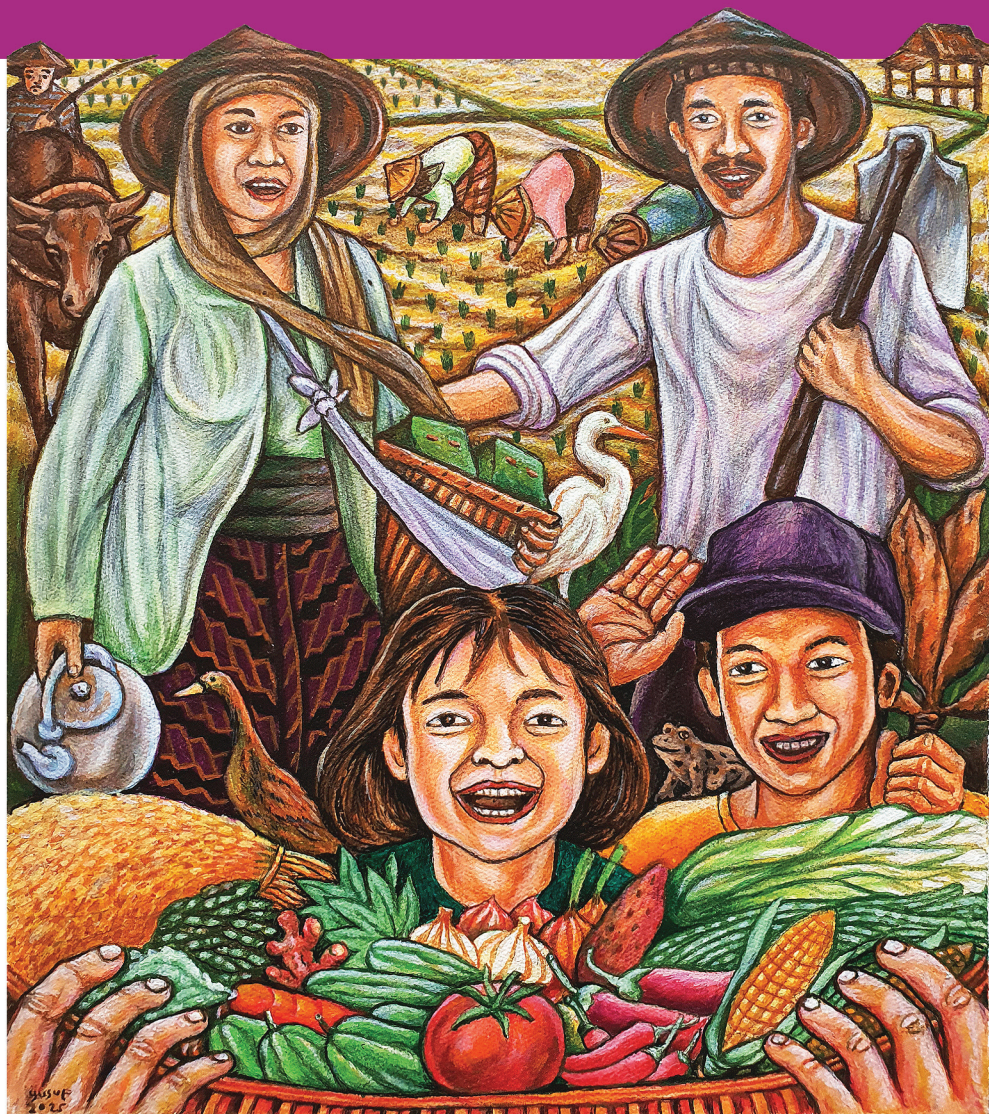


BEN WHITE

PERTANIAN & MASALAH GENERASI

Seri

*Kajian Petani
dan Perubahan Agraria*



PERTANIAN & MASALAH GENERASI

BEN WHITE

Guru Besar Emeritus Sosiologi Pedesaan
di International Institute of Social Studies (ISS),
Den Haag, Belanda.

Buku mutiara ini meneroka persoalan muskil tentang mengapa begitu banyak anak muda di berbagai belahan dunia tampak enggan menjadi petani. Dengan contoh yang amat kaya, baik dari masa lalu maupun dari masa kini, buku ini memerikan betapa eratny kaitan antara kelas, gender, dan hubungan antargenerasi dalam rumah tangga dan masyarakat tani—suatu keterkaitan yang sangat penting untuk diperhatikan guna memahami bagaimana generasi petani direproduksi dari waktu ke waktu.

*Henry Bernstein, Profesor Emeritus Kajian Pembangunan
di University of London, Inggris*

Apa yang akan terjadi pada jutaan pemuda desa di Asia dan Afrika yang tidak mampu pergi ke kota untuk mencari kerja tapi juga terhalang untuk memasuki pertanian produktif di masa depan? Melalui buku ini, Ben White menyuguhkan kekayaan wawasan, kejernihan konseptual, dan kedalaman telaah empiris terhadap pertanyaan mendesak itu. Buku yang sangat saya rekomendasikan.

Tania Li, Departemen Antropologi, Toronto University, Kanada

Setidaknya, dalam satu dekade terakhir, pertanyaan “Siapa Mau Jadi Petani?” semakin sering muncul dalam diskusi publik di Indonesia. Buku ini hadir dengan analisis empiris yang tajam, penggunaan konsep yang cermat dan reflektif untuk mengurai keterkaitan antara kelas, gender, dan generasi dalam memahami perubahan agraria. Buku ini penting dibaca oleh kaum muda yang sedang mencari arah, generasi tua yang menyimpan pengalaman panjang, dan terutama bagi para pengambil kebijakan yang ingin merumuskan masa depan pertanian secara lebih adil dan berkelanjutan.

Charina Chazali, AKATIGA, Indonesia

Dalam karya terbarunya ini, Ben White kembali menekankan pentingnya kajian kepemudaan (*youth studies*) terutama melalui titik masuk generasi untuk memahami perubahan sosial global yang cepat dan masif dalam lanskap pertanian. Diperkaya dengan komparasi cerita dari beberapa negara serta dialog teoretis yang *humble*, Ben White mengeksplorasi secara komprehensif irisan antara kelas sosial, gender, dan hubungan antargenerasi untuk menghantarkan pembaca supaya lebih peka terhadap pola reproduksi sosial di masyarakat. Di sisi lain, buku ini juga mengajak kita untuk merefleksikan lebih jauh, apakah di masa depan menjadi petani masih terbesit dalam aspirasi generasi muda?

Oki Rahadianto Sutopo, Sosiolog di Universitas Gadjah Mada

BUKU-BUKU SERI KAJIAN PETANI & PERUBAHAN AGRARIA

Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria (Edisi Revisi) (2019), terjemahan dari *Class Dynamics of Agrarian Change* (2010) karya Henry Bernstein

Petani dan Seni Bertani: Maklumat Chayanovian (2020), terjemahan dari *Peasants and The Art of Farming: A Chayanovian Manifesto* (2013) karya Jan Douwe van der Ploeg

Rezim Pangan dan Masalah Agraria (2021), terjemahan dari *Food Regimes and Agrarian Questions* (2013) karya Philip McMichael

Penghidupan Berkelanjutan dan Pembangunan Pedesaan (2021), terjemahan dari *Sustainable Livelihoods and Rural Development* (2015) karya Ian Scoones

Dinamika Politik Gerakan Agraria Transnasional (2026), terjemahan dari *Political Dynamics of Transnational Agrarian Movements* (2016) karya Marc Edelman dan Saturnino M. Borras Jr.

Aktivisme Cendekia dan Perjuangan Agraria (2026), terjemahan dari *Scholar-Activism and Land Struggles* (2023) karya Saturnino M. Borras Jr. dan Jennifer C. Franco

KAJIAN PETANI & PERUBAHAN AGRARIA

Edisi Indonesia dari *Agrarian Change and Peasant Studies Series*, buku-buku kecil dengan isu besar, yang dikelola oleh jaringan internasional cendekiawan-aktivis agraria dalam wadah Initiative in Critical Agrarian Studies (ICAS).

EDITOR SERI

Saturnino M. Borras Jr., International Institute of Social Studies (ISS),
Den Haag, Belanda

Sergio Coronado, Center for Research and Popular Education (CINEP),
Kolombia

Ruth Hall, Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies (PLAAS),
Universitas of the Western Cape, Afrika Selatan

Max Spoor, ISS, Den Haag, Belanda

Henry Veltmeyer, Universidad Autónoma de Zacatecas, Meksiko

Jingzhong Ye, College of Humanities and Development Studies (COHD),
China Agricultural University, Tiongkok

KOMITE PENASIHAT EDITORIAL INTERNASIONAL

Duygu Avci, Sabanci Üniversitesi, Turki

Gonzalo Colque, Fundación Tierra, Bolivia

Alessandra Corrado, Università della Calabria, Italia

Raúl Delgado-Wise, Universidad Autónoma de Zacatecas, Meksiko

Bernardo Mançano Fernandes, Universidade Estadual Paulista,
Presidente Prudente (UNESP), Brasil

Sayaka Funada-Classen, Jepang

Hamza Hamouchene, SIYADA Network dan Transnational Institute (TNI)
MENA Programmes

Shuji Hisano, Kyoto University, Jepang

Umut Kocagöz, International Institute of Social Studies (ISS), Belanda

Koichi Ikegami, Kindai University, Jepang

Alexander Nikulin, Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration (RANEPA), Rusia

Fatih Özden, Ege Üniversitesi, Turki

Laksmi Adriani Savitri, FIAN, Indonesia

Sergio Schneider, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
Brasil

Wonkyu Song, Research Institute of Agriculture and Peasant Policy,
Korea Selatan

Chayan Vaddhanaphuti, Regional Center for Social Science and Sustainable
Development (RCSD), University of Chiang Mai, Thailand

PERTANIAN & MASALAH GENERASI

BEN WHITE

PENERJEMAH
Achmad Choirudin

Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria





Anggota Indonesian Society for Social Transformation (INSIST)

Pertanian dan Masalah Generasi

© Ben White

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Inggris dengan judul *Agriculture and the Generation Problem* pada 2020 oleh Fernwood Publishing, Kanada (www.fernwoodpublishing.ca) dan Practical Action Publishing, Inggris (www.practicalactionpublishing.com), sebagai buku No. 10 dalam *Agrarian Change and Peasant Studies Series* (Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria).

Diterbitkan INSISTPress atas kerjasama dengan Initiative in Critical Agrarian Studies (ICAS) serta dukungan dari International Institute of Social Studies (ISS)/Erasmus University Rotterdam (EUR), Belanda; PLAAS (Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies), University of Western Cape (UWC), Afrika Selatan; dan College of Humanities and Development Studies (COHD), China Agricultural University (CAU), Tiongkok.



International
Institute of
Social Studies



COHD 人文与发展学院

College of Humanities and Development Studies (COHD)

Penerjemah: Achmad Choirudin

Penyunting Ahli: Ben White dan Laksmi A. Savitri

Penyunting: Hanny Wijaya

Penyusun Atak: Damar N. Sosodoro

Ilustrasi Sampul: Muhammad Yusuf (Ucup)

xxii + 206 halaman/14 x 20 cm

ISBN: 978-623-6179-33-8 [cetak]

ISBN: 978-623-6179-32-1 [PDF]

Cetakan pertama, Februari 2026

INSISTPress

Kampus Perdikan-INSIST, Jl. Kaliurang Km. 18,

Padukuhan Sempu-Sambirejo, Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem,

Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta 55582

Telepon: +6285102594244 | Surat-el: redaksi@insistpress.id

Tapakmaya: www.insistpress.id

DAFTAR ISI

PENGANTAR ISS/EUR — xi

PENGANTAR EDITOR ICAS — xvii

PRAKATA PENULIS — xxx

BAB I MASALAH GENERASI DALAM PERUBAHAN AGRARIA — 1

Krisis Reproduksi Sosial? — 4

Beberapa Kerangka & Konsep Pegangan — 11

BAB 2 REGENERASI DALAM TRANSFORMASI AGRARIA — 31

Transformasi Kolonial — 31

Transformasi Sosialis & Pascasosialis:

Tiongkok & Uni Soviet — 43

Perampasan Tanah & Pertanian Korporat — 53

Komodifikasi & “Revolusi Hijau” dalam Pertanian

Skala Kecil — 61

Dimensi Generasi dalam Reforma Agraria

& Pertanahan — 68

BAB 3 TUMBUH DEWASA DI DESA — 77

Rumah Tangga — 77

Pembagian Kerja Berdasarkan Generasi — 85

Pendidikan, Pemiskinan Keterampilan, & Alienasi — 91

Kerja-Majemuk Lintas-Sektor & Lintas-Tempat — 102

BAB 4 MENANTIKAN TANAH — 109

Alih-Generasi Sumberdaya Agraria — 109

Tegangan Antargenerasi & Intragenerasi —	112
Saling-Silang Antara Gender, Generasi, & Kelas: Penyingkiran Struktural dalam Alih-Generasi Sumberdaya Agraria —	125

BAB 5 SIAPA MAU JADI PETANI? —	137
Generasi Masa Depan, Pertanian Masa Depan —	138
Bergumul dengan Masa Depan: Cita-Cita Pemuda Desa —	140
Memilih Jalan Sendiri: Kerja Lintas-Tempat dalam Daur Hidup Kaum Muda Pedesaan —	148
Pemuda Desa & Aksi Kolektif —	156
Masa Depan Pertanian Kecil? —	165

GLOSARIUM —	173
-------------	-----

PUSTAKA —	179
-----------	-----

INDEKS —	201
----------	-----

PENGANTAR ISS/EUR

Gagasan-gagasan yang membebaskan bisa saja lahir dari rahim politik pengetahuan yang sangat tidak demokratis—yaitu soal siapa yang berhak memproduksi dan menggunakan pengetahuan, sejauh mana, bagaimana caranya, dan untuk tujuan apa? Pengetahuan siapa yang dianggap absah? Di tingkat global, sirkulasi pengetahuan—bagaimana pengetahuan dihasilkan, diberi nilai, diedarkan, dipertukarkan, dan dimanfaatkan—mirip seperti barang dagangan lain dalam kehidupan sehari-hari: dikuasai segelintir pihak, dimonopoli, dan diperjualbelikan demi keuntungan. Di dunia sekarang ini, setidaknya di bidang ilmu sosial, sirkulasi pengetahuan terpusat di perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian yang kaya sumberdaya di negara-negara Utara, dengan bahasa Inggris sebagai bahasa dominan. Untuk bisa mengikuti perkembangan mutakhir dunia akademik—yang menjadi prasyarat agar seseorang bisa menghasilkan ide penelitian, proposal, atau publikasi yang dianggap “orisinal”—seorang peneliti harus punya akses ke berbagai hal: pendanaan penelitian, kesempatan menulis untuk jurnal dan penerbit buku bergengsi, langganan jurnal akademik, biaya penerbitan tulisan dalam skema akses terbuka/gratis (*open access*), dan perpustakaan dengan koleksi lengkap.

Namun, berbagai syarat keuangan dan logistik semacam itu jelas jauh di luar jangkauan banyak pemerintah, perguruan tinggi, maupun peneliti di Selatan Global. Pada 2024, biaya langganan tahunan untuk salah satu jurnal ilmu sosial papan atas mencapai US\$6.500 (sekitar Rp110 juta)—dengan jumlah artikel per edisi yang lebih banyak dibandingkan jurnal pada umumnya. Jurnal lain dari penerbit yang sama, yang juga tergolong “papan atas” tapi lebih rata-rata, mematok biaya langganan tahunan sebesar US\$2.700 (sekitar Rp45 juta). Dengan langganan jur-

nal, masyarakat luas bisa mengakses artikel-artikel di balik “gerbang berbayar”. Penulis bisa memilih skema Akses Terbuka agar tulisannya dapat diakses secara gratis, tapi dia harus membayar penerbitnya. Biaya penerbitan artikel berskema Akses Terbuka dikenal dengan istilah *Article Publishing Charge* (APC); di jurnal yang pertama tadi itu, misalnya, APC satu artikel bisa mencapai US\$4.300 (sekitar Rp70 juta) belum termasuk pajak. Bandingkan dengan gaji dosen-tetap perguruan tinggi negeri di banyak negara berpendapatan rendah—menengah di Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Karibia, yang mungkin hanya sekitar US\$300 (sekitar Rp5 juta) per bulan. Gambaran ini menunjukkan betapa tidak demokratisnya struktur global dalam politik pengetahuan. Dari struktur timpang ini, muncul berbagai pandangan menyimpang tentang dunia beserta kehidupan di dalamnya. Dan dunia akademik bisa dan memang pernah dimanfaatkan untuk memproduksi pengetahuan yang justru membenarkan eksploitasi, penindasan, dan perusakan ekologi.

Tidak ada yang alamiah dari struktur politik pengetahuan global yang tidak demokratis ini. Ia merupakan perpanjangan dari logika kapital—dari perkembangan kapitalisme global yang penuh ketimpangan. Perguruan tinggi di seluruh dunia telah mengalami neoliberalisasi dalam berbagai bentuk, di mana keberhasilan peneliti dan lembaga secara individual lebih dihargai ketimbang etika moral komunitas akademik secara kolektif.

Para peneliti dan aktivis di balik serial buku kecil *Kajian Petani dan Perubahan Agraria* (yang tergabung dalam Initiatives in Critical Agrarian Studies [ICAS]), yang mulai digagas pada 2008, tidak ingin menjadi bagian dari sistem yang turut melegitimasi *status quo* politik pengetahuan global. Mereka ingin memberikan sumbangsih kecil untuk mempertanyakan watak tidak demokratis dan struktur tak adil dari sirkulasi pengetahuan yang berlaku saat ini. Mereka ingin ikut membongkar struktur tersebut—dari cara pengetahuan diproduksi, diberi nilai, diedarkan, dipertukarkan, hingga digunakan—seraya membangun

alternatifnya. Demokratisasi politik pengetahuan hanya bisa terwujud melalui banyak prakarsa serupa di berbagai penjuru dunia, dan melalui gerakan massa. Para peneliti akademik yang menempati posisi bawah dalam piramida politik pengetahuan global yang tak adil ini mesti mengambil peran penting dalam upaya membongkar sistem yang berlaku sekaligus merintis jalan baru. Inilah yang mendasari terbentuknya *Collective of Agrarian Scholar-Activists in the South* (CASAS, Kolektif Cendekiawan-Aktivistis di Selatan Global) sebagai sesuatu yang menjanjikan, menggugah, dan menginspirasi.

Struktur politik pengetahuan global yang timpang tidak hanya berlaku dalam dunia akademik. Dalam ilmu-ilmu sosial—khususnya di bidang Kajian Agraria Kritis—setidaknya ada tiga ruang yang bisa dimanfaatkan untuk kelahiran dan penggunaan pengetahuan yang membebaskan, yakni dunia akademik, komunitas lokal beserta basis rakyat gerakan sosialnya, dan lembaga penelitian serta pengembangan yang bercorak otonom. Komunitas ICAS memandang ketiganya sebagai komunitas-komunitas horizontal yang saling beririsan, bukan sebagai struktur hierarkis dengan para akademia di puncaknya. Para pengorganisir dan pemimpin serikat tani, misalnya, punya pengetahuan sangat mendalam tentang kehidupan petani—pengetahuan yang bahkan tidak bisa digapai oleh kalangan akademia atau peneliti dari lembaga swadaya masyarakat (LSM)/organisasi nonpemerintahan (ornop), meskipun mereka bisa menghasilkan pengetahuan tersendiri dari mempelajari kondisi produksi dan reproduksi sosial kalangan petani yang sama. Dunia akademik memang kerap memegang peranan dominan, dan tak jarang juga secara sadar dipandang sebagai satu-satunya sumber pengetahuan ilmiah yang absah. Anggapan seperti ini layak dipertanyakan, karena komunitas ICAS memandang pengetahuan yang lahir dari luar dunia akademik juga sama pentingnya. Yang tak kalah penting ialah kemungkinan sinergi dari pertemuan tiga lingkaran penghasil pengetahuan yang berlainan ini. Inilah bagian dari proses demokratisasi politik pengetahuan.

Serial buku kecil ICAS merupakan suatu prakarsa yang bertujuan memberikan sumbangsih kecil dalam upaya demokratisasi politik pengetahuan. Edisi Indonesia ini kami anggap sangat penting dalam serial ini. Buku-buku ICAS—meskipun penyebarannya kami sadari belumah merata—telah tersedia dalam belasan bahasa, antara lain Inggris, Spanyol, Portugis, Mandarin, Jepang, Thai, Korea, Italia, Rusia, Arab, dan Burma. Tidak semua buku edisi awal bahasa Inggris seri ini diterjemahkan ke tiap bahasa tersebut, karena masing-masing tim penerjemah kolega kami di setiap bahasa memilih sendiri judul-judul yang mereka terjemahkan, dan mereka tidak punya sumberdaya logistik yang memadai untuk menerjemahkan dan menerbitkan semua volume secara bersamaan.

Dengan hadirnya edisi Indonesia serial buku kecil ICAS, kami berharap prakarsa sederhana ini dapat membantu membuka ruang-ruang interaksi dalam politik pengetahuan, khususnya di bidang Kajian Agraria Kritis, dan secara lebih luas dalam kajian pembangunan. Kami berharap edisi Indonesia ini bisa memberikan dorongan tambahan bagi para peneliti dan aktivis di Indonesia untuk terlibat lebih aktif dan berkesinambungan dengan rekan-rekan mereka di mancanegara. Dunia punya banyak hal untuk dipelajari dari Indonesia, dan begitu pula sebaliknya.

Dalam konteks inilah Erasmus University Professor Programme (demi dampak sosial yang positif) dari Erasmus University Rotterdam, Belanda, melalui sub-program khusus bertajuk “Democratizing Knowledge Politics Initiative” (Prakarsa Demokratisasi Politik Pengetahuan), memberikan dukungan pendanaan sederhana untuk menjadikan edisi Indonesia ini tersedia secara Akses Terbuka (untuk format buku-el). Prakarsa dari universitas ini mendukung pendekatan kerja bergaya cendekiawan-aktivis, yang berupaya membangun ruang-ruang interaksi antara komunitas penghasil dan pengguna pengetahuan—baik dari dalam maupun luar dunia akademik. Perluasan serial buku kecil ICAS ke

dalam bahasa Indonesia merupakan langkah besar dalam proses demokratisasi politik pengetahuan.

Saturnino M. Borras Jr.

Guru Besar Kajian Agraria, International Institute of Social Studies (ISS)

Erasmus Professor, Erasmus University Rotterdam, Belanda

5 Mei 2025

PENGANTAR PENYUNTING ICAS

Pertanian dan Masalah Generasi karya Ben White ini adalah buku kesepuluh dalam *Agrarian Change and Peasant Studies Series*, serial buku-buku kecil dengan isu besar yang digarap oleh Initiative in Critical Agrarian Studies (ICAS) dan College of Humanities and Development Studies (COHD) of China Agricultural University, atau buku keenam dalam edisi Indonesia Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria yang diterbitkan INSISTPress. Buku pertama adalah *Class Dynamics of Agrarian Change* (edisi Indonesia: *Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria*) karya Henry Bernstein; disusul *Peasants and the Art of Farming* (edisi Indonesia: *Petani dan Seni Bertani*) karya Jan Douwe van der Ploeg; *Food Regimes and Agrarian Questions* (edisi Indonesia: *Rezim Pangan dan Masalah Agraria*) karya Philip McMichael; *Sustainable Livelihoods and Rural Development* (edisi Indonesia: *Penghidupan Berkelanjutan dan Pembangunan Pedesaan*) karya Ian Scoones; *Political Dynamics of Transnational Agrarian Movement* (edisi Indonesia: *Politik Gerakan Agraria Transnasional*, akan terbit) karya Marc Edelman dan Saturnino M. Borras Jr.; *Agrarian Change, Migration and Development* karya Henry Veltmeyer dan Raul Delgado Wise; *Agroecology: Science and Politics* karya Peter Rosset dan Miguel Altieri; *Speculative Harvests: Financialization, Food and Agriculture* karya Jennifer Clapp dan Ryan Isakson; dan *Counterrevolution: The Global Rise of the Far Right* karya Walden Bello. Kesepuluh buku tersebut menegaskan kembali betapa penting dan relevannya pendekatan ekonomi-politik agraria sebagai lensa analisis dalam kajian agraria dewasa ini. Kesepuluhnya juga memberi isyarat bahwa buku-buku berikutnya dalam seri ini akan terus menjaga keketatan ilmiah sekaligus relevansi politiknya.

Uraian singkat tentang Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria bisa membantu menempatkan buku Ben White ini dalam perspektif

yang selaras dengan kerja intelektual serta politik ICAS. Dewasa ini, kemiskinan global masih menjadi persoalan mendesak pedesaan, dengan tiga perempat kaum miskin dunia merupakan penduduk desa. Karena itu, persoalan kemiskinan global beserta tantangan untuk mengakhiri-nya, sebagai isu multidimensi (ekonomi, politik, sosial, kultural, gender, lingkungan, dsb.), berkaitan erat dengan dua hal: perlawanan rakyat pekerja di pedesaan terhadap sistem yang melahirkan dan melanggengkan kemiskinan itu, serta dengan perjuangan mereka untuk mewujudkan penghidupan berkelanjutan. Maka, pembangunan pedesaan tetap menjadi kunci dalam kajian pembangunan. Namun, perhatian dan fokus pada desa ini bukan berarti memisahkan persoalan pedesaan dari perkotaan. Tantangannya justru bagaimana memahami keterkaitan erat antara keduanya, sebagiannya karena langkah-langkah pengentasan kemiskinan pedesaan yang dipandu kebijakan neoliberal serta program “perang melawan kemiskinan global” yang dipimpin lembaga keuangan dan pembangunan internasional arus utama, dalam banyak hal, hanya mengganti kemiskinan pedesaan menjadi bentuk baru kemiskinan perkotaan.

Pemikiran arus utama dalam kajian agraria mendapat pembiayaan melimpah sehingga mampu mendominasi produksi serta penerbitan penelitian dan kajian tentang isu-isu agraria. Banyak lembaga yang mendukung pengarusutamaan pemikiran itu (seperti Bank Dunia) juga terampil memproduksi serta menyemaikan terbitan yang sangat mudah diakses dan berorientasi kebijakan. Terbitan-terbitan semacam itulah yang tersebar luas seantero dunia. Para pemikir kritis di lembaga-lembaga akademik terkemuka pada dasarnya juga mampu dan memang menantang pendekatan arus utama itu, tapi sayangnya karya-karya mereka umumnya hanya beredar di lingkaran akademik dengan jangkauan dan dampak yang terbatas ke masyarakat luas.

Situasi ini meninggalkan lubang besar untuk memenuhi kebutuhan para akademika (dosen, peneliti, dan mahasiswa), pegiat gerakan sosial, dan praktisi pembangunan di Selatan maupun Utara Global untuk bisa

mengakses buku kajian agraria kritis yang kokoh secara ilmiah tapi mudah dibaca, relevan secara politis, berorientasi kebijakan, dan murah. Untuk merespons kebutuhan ini, ICAS meluncurkan serial buku ini. Gagasan utamanya adalah menerbitkan “buku-buku ringkas andalan” yang bisa menjelaskan satu isu pembangunan tertentu dengan dasar beberapa pertanyaan: Apa perdebatan dan isu mutakhir dalam topik ini? Siapa ilmuwan, pemikir/cendekiawan kunci, dan praktisi kebijakan yang berpengaruh? Bagaimana posisi-posisi semacam itu bisa berkembang seiring waktu? Jalur-jalur apa yang mungkin terbentuk pada masa depan? Kepustakaan kunci macam apa yang menjadi bahannya? Bagaimana dan mengapa penting bagi kalangan organisasi masyarakat sipil (oms), aktivis gerakan sosial, lembaga donor pembangunan, lembaga donor non-pemerintah, mahasiswa, academia, peneliti, dan pengamat kebijakan untuk secara kritis terlibat dengan beberapa poin utama yang dijelaskan dalam buku ini? Setiap buku dalam seri ini memadukan pembahasan teoretis dan yang berorientasi kebijakan dengan disertai contoh-contoh empiris dari pelbagai konteks nasional dan lokal.

Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria tersedia dalam berbagai bahasa selain bahasa Inggris, yakni bahasa Tiongkok, Spanyol, Portugis, Indonesia, Thai, Jepang, Korea, Italia, Rusia, Turki, dan Arab. Edisi Tiongkok diterbitkan melalui kerjasama dengan College of Humanities and Development, China Agricultural University, di Beijing, yang dikoordinasikan Jingzhong Ye; edisi Spanyol dengan Program Doktorat Kajian Pembangunan, Autonomous University of Zacatecas, di Meksiko, dikoordinasikan Raúl Delgado Wise, dan dengan Fundación Tierra di Bolivia, dikoordinasikan Gonzalo Colque; edisi Portugis dengan Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente (UNESP), di Brasil, dikoordinasikan Bernardo Mançano Fernandes, dan dengan Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) di Brasil, dikoordinasikan Sergio Schneider; edisi Indonesia dengan INSISTPress, dikoordinasikan Laksmi A. Savitri; edisi Thai dengan RCSD of University of Chiang Mai, dikoordinasikan Chayan Vaddhanaphuti; edisi Italia dikoordinasi-

kan oleh Alessandra Corrado di University of Calabria; edisi Jepang dikoordinasikan Shuji Hisano di Kyoto University, Koichi Ikegami di Kindai University, serta Sayaka-Funada-Classen; edisi Korea dengan Research Institute of Agriculture and Peasant Policy, dikoordinasikan oleh Wonkyu Song; dan edisi Rusia dengan Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), dikoordinasikan oleh Alexander Nikulin; edisi Turki dikoordinasikan oleh Umut Kocagöz dan Duygu Avcı; dan edisi Arab dikoordinasikan oleh Hamza Manouchene di Transnational Institute.

Melihat tujuan Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria, sudah jelas mengapa kami begitu senang bisa menerbitkan buku Ben White ini. Buku-buku yang sudah diterbitkan dalam seri ini saling melengkapi dalam hal tema, keterbacaan, relevansi politik maupun akademik, dan ketatan ilmiah. Kami pun menantikan dengan antusias kelanjutan seri penting ini di masa datang.

*Saturnino M. Borras Jr., Ruth Hall,
Christina Schiavoni, Max Spoor, dan Henry Veltmeyer
Editor Seri Buku ICAS*

PRAKATA PENULIS

Saya tidak akan mampu menulis buku ini tanpa kesempatan mengajar kajian agraria serta kajian anak dan kepemudaan selama bertahun-tahun di International Institute of Social Studies (ISS) di Den Haag, Belanda, dan juga penelitian pada topik yang sama selama bertahun-tahun di Indonesia. Pada 2011, sewaktu memasuki usia pensiun dari ISS, saya mencoba menyatukan dua bidang kajian ini—kajian agraria dan kajian kepemudaan—dalam Pidato Perpisahan berjudul “*Who Will Own the Countryside? Dispossession, Rural Youth and the Future of Farming*” (Siapa yang Akan Mempunyai Pedesaan? Penggusuran, Pemuda Desa, dan Masa Depan Pertanian). Pada saat itu juga timbul ambisi untuk menulis buku kecil ini.

Dalam proses menulis, saya juga sangat terbantu dengan kesempatan mempresentasikan tema-tema dari buku ini di berbagai kampus dan lembaga: Free University Amsterdam, Belanda; Australian National University, Australia; BOKU University of Natural Resources and Life Sciences, Austria; Guelph University dan Trent University, Kanada; College of Humanities and Development Studies, China Agricultural University, Tiongkok; International Fund for Agricultural Development (IFAD), Italia; Universitas Gadjah Mada, Universitas Mercu Buana, Universitas Indonesia, Universitas Lampung, Universitas Kristen Satya Wacana, Sajogyo Institute, dan Yayasan Akatiga, Indonesia. Interaksi di berbagai forum itu telah memperkuat keyakinan saya bahwa harus ada sebuah buku kecil tentang dimensi generasi dalam pertanian, dan saya sangat berterimakasih kepada Jun Borras yang mendorong saya untuk menyumbangkan buku ini buat Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria ICAS.

Saya sangat beruntung mendapatkan komentar serta saran kritis terhadap draf pertama buku ini—banyak di antaranya sangat terperinci—dari sebagian penulis kesukaan saya dalam kajian agraria dan kajian ke-pemudaan/generasi: Nicola Ansell, Henry Bernstein, Roy Huijsmans, Tania Li, Jim Sumberg, dan Jan Douwe van der Ploeg. Hanny Wijaya memberi banyak saran berharga, khususnya pada bab terakhir. Terima kasih banyak kepada kalian semua atas waktu yang diluangkan.

Atas semangat dan rujukan-rujukan yang berguna, saya menghaturkan terima kasih kepada semua rekan di Land Deal Politics Initiative, Emancipatory Rural Politics Initiative, tim peneliti “Menjadi Petani Muda” di Kanada, Tiongkok, India, dan Indonesia, juga kepada Ratna Saptari dan Clara Mi Young Park.

Untuk edisi bahasa Inggris, adalah kesempatan yang menyenangkan bisa bekerjasama dengan tim Fernwood Publishing: Beverley Rach, Brenda Conroy, Candidad Hadley, Curran Farris, Errol Sharpe, dan banyak orang yang tidak berkontak secara personal langsung dengan saya.

Untuk edisi bahasa Indonesia ini, saya merasa beruntung bisa bekerjasama dengan tim penerjemah dan penyunting yang tekun serta profesional, hingga versi Indonesia ini dapat diandalkan baik dalam keakuratan substansi maupun dalam memaknai nuansa prosa saya yang kadang-kadang terlampau rumit. Terima kasih sekali lagi kepada Jun Borrás atas dukungan pendanaannya melalui prakarsa *Democratizing Knowledge Politics*. Semoga buku ini bisa memiliki peran kecil dalam usaha “demokratisasi politik pengetahuan” di Indonesia, khususnya yang menyangkut pemuda desa dan regenerasi pertanian.

BAB 1

Masalah Generasi dalam Perubahan Agraria

[K]ami menjemur pakaian di belakang rumah. Salah seorang anak perempuan di rumah [yang saya tempati] mulai mencabut gerumbul bawang putih dan menjemurnya di bawah sinar matahari. “Itu punya siapa?” tanya saya santai. “Yang itu punya ibu saya. Yang itu punya abang saya. Yang itu punya adik perempuan saya. Ini punya saya, dan yang itu punya bapak saya,” jawabnya. “Ibu dan bapak bekerja bersama. Hari ini mereka menyiangi bawang putih ibu. Kalau sudah selesai, mereka akan mengerjakan punya bapak,” ia menjelaskan. Demikianlah perkenalan saya dengan otonomi ekonomi anggota rumah tangga. Masing-masing menciptakan kepemilikan pribadi melalui kerjanya sendiri-sendiri. Mereka juga membangun hubungan persaudaraan dan tolong-menolong saling bertukar dengan orang lain.

—Lauje, Sulawesi Tengah, awal 1990-an sebelum demam kakao
(Li 2014: 59 [2020: 97–98])

Saat Antonio berusia 13 tahun, ayahnya memberinya sepetak tanah kecil sebagai imbalan atas bantuannya mengerjakan lahan. Antonio kemudian menanaminya kacang, yang benihnya dia beli dengan uang hasil penjualan seekor domba hadiah ulang tahunnya beberapa tahun sebelumnya. Adik laki-lakinya, Javier, membantunya menanam, dan Antonio akan memberinya imbalan panen kacang sebanyak lima bedeng.

—Dataran Tinggi Bolivia (Punch 2011: 156)

Anak: Pak, tanah yang Bapak kasih ke aku tidak bisa dipakai. Tanahnya tandus, tidak subur sama sekali. Penuh *Jus*.¹

Bapak: Oh ya? Tapi kau juga tak pernah berniat memberiku sesuatu yang lebih baik, kan?! Sudah berapa tahun kau garap tanah itu? Pernah kasih panen apa ke Bapak? Aku juga butuh makan dari situ. Kalau kau mau tanah lain, kau harus garap dengan skema bagi-hasil.

Anak: Mana bisa begitu, Pak?! Aku ini anak Bapak, kok malah disuruh bagi-hasil?

Bapak: Kenapa enggak bisa?! Aku ini bapakmu, seharusnya kau kasih sesuatu buat makan.

Anak: Ah, enggak bisa begini caranya. Kalau begitu, aku lebih baik pindah ke keluarga ibu.

—Asewesa, Ghana Tenggara, 1983 (Amanor 2010: 117–118)

Para laki-laki muda mengatakan bahwa mereka mengobrak-abrik kebun nanas milik orang asing gara-gara ulah para orang tua. Misalnya, ketika seorang lelaki tua yang menguasai tanah keluarga menyewakan hampir separuhnya, anak-anaknya tidak punya lagi tanah untuk digarap demi memenuhi kebutuhan mereka. Bukankah mereka juga harus makan? Ketika para lelaki tua menerima uang dari orang-orang Burkina Faso, mereka menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan tidak memberi apa pun kepada para pemuda, sehingga mereka jadi gelandangan yang berkeliaran di kota.

—Para lelaki muda di Pantai Gading, yang merusak tanaman di lahan yang disewakan oleh para orang tua kepada “orang asing” dari Burkina Faso untuk budidaya komersial sehingga membuat mereka sulit mengakses tanah (Kouamé 2020: 137)

Empat sketsa cerita di atas menggambarkan ragam hubungan antara generasi muda dan tua di masyarakat tani. Buku ini bermaksud menelaah masalah generasi tersebut, dengan memusatkan perhatian pada

masyarakat petani kecil (berlahan sempit), meski saya juga memberi perhatian pada buruh tani upahan baik di pertanian kecil maupun pertanian korporat.

Meski usaha tani kecil atau tani keluarga diperkirakan bakal lenyap, jumlah mereka ternyata masih sangat besar, lebih dari 500 juta unit seantero dunia, dan mencakup lebih dari 90 persen dari semua unit usaha tani di dunia. Usaha tani kecil diperkirakan menggarap 50–75 persen dari seluruh tanah pertanian di dunia, sedangkan usaha tani model lain (korporat dan swasta skala besar) menggarap 25–50 persennya (Graeub *et al.* 2016; Lowder, Scoet, dan Raney 2016). Dari 500 juta, sedikitnya 475 juta unit usaha tani kecil masing-masing menggarap tanah kurang dari 2 hektar. Sekitar sepersepuluhnya berada di Afrika, 7 persen di Eropa, dan 4 persen di Amerika Latin. Sebagian besar, hampir tiga perempatnya (sekitar 364 juta), berada di kawasan Asia-Pasifik: Tiongkok, India, serta negara-negara lain Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Kepulauan Pasifik (Lowder, Scoet, dan Raney 2016: 21, 27).

Apakah pola pertanian kecil akan berlanjut? Di seluruh dunia, populasi petani kecil mengalami penuaan, sementara di beberapa kawasan banyak petani kecil tidak punya generasi penerus. Salah satu sebabnya ialah berpalingnya pemuda desa dari pertanian; berbagai penelitian telah mengungkapkan keengganan mereka untuk bertani di masa depan, di berbagai kawasan (lihat, misalnya, Proctor dan Lucchesi 2012; White 2012; Cuervo dan Wyn 2012). Masalah lainnya, yang kurang diperhatikan, ialah makin menyempitnya akses kaum muda (perempuan maupun lelaki) atas tanah, bahkan kadang tertutup sama sekali; bagaimana dan mengapa banyak pemuda desa, bahkan kalau mereka tertarik bertani, dihadapkan pada masalah ini, selain batasan-batasan lain yang mereka hadapi untuk mulai bertani. Masalah-masalah ini perlu ditilik dengan memperhatikan dinamika pengalihan (transfer) sumberdaya agraria serta peluang bertani antara generasi tua dan generasi muda di masyarakat desa. Dimensi antargenerasi beserta tegangan yang menyertainya sebenarnya sudah menjadi topik umum dalam kajian sejarah

agraria Eropa (simak, misalnya, di Bab 4), tetapi topik ini tidak begitu diperhatikan dalam kajian perubahan agraria dewasa ini. Meski topik ini relatif lebih diperhatikan dalam penelitian tentang Afrika Sub-Sahara, persoalan hubungan antargenerasi masih kurang diperhatikan, dibandingkan analisis kelas dan gender (Sumberg *et al.* 2012). Padahal, konsep generasi merupakan alat analisis yang penting jika kita ingin memasukkan dimensi waktu guna memahami dinamika saling-silang dari hubungan gender dan kelas di masyarakat pedesaan. Hubungan generasi seharusnya menjadi perhatian serius bagi siapa saja yang ingin memahami rupa pertanian di masa depan serta nasib generasi mendatang di pedesaan; begitu pula agenda-agenda penelitian dan kebijakan, seharusnya menaruh perhatian besar pada hubungan generasi.

Buku ini dibagi menjadi lima bab. Pada bagian selanjutnya bab ini, saya mengemukakan arti penting topik-topik kunci terkait masa depan pertanian, yakni suramnya masa depan lapangan kerja pemuda pedesaan dan kemungkinan krisis generasi dalam pertanian kecil. Bagian terakhir bab ini mengemukakan konsep-konsep pokok yang dielaborasi dari bi-dang-bidang multidisiplin kajian agraria, kajian generasi, dan kajian ke-pemudaan.

Bab 2 menerapkan suatu lensa hubungan generasi untuk melihat transformasi besar agraria sepanjang sejarah dunia, dengan sederet contoh dari transformasi kolonial, transformasi sosialis dan transisi pasca-sosialis, komodifikasi dan “revolusi hijau” dalam pertanian kecil, perampasan tanah baik di masa lalu maupun masa kini, serta reforma agraria. Dari bab dengan cakupan bahasan yang sangat luas ini, Bab 3 dan Bab 4 mempersempit fokus bahasan. Bab 3 menelaah rumah tangga pedesaan, siklus perkembangannya, dinamika perkembangan daur hidup dari kanak-kanak hingga masa muda, dewasa hingga menua, serta hubungan kemandirian dan ketergantungan di antara generasi-generasi tersebut. Bab 4 menilik lebih dekat beragam cara pengalihan—atau dalam beberapa kasus, tidak dialihkannya—sumberdaya agraria antargenerasi, juga

konflik dan tegangan, baik dalam satu generasi maupun antargenerasi, yang kerap timbul dalam proses-proses pengalihan itu.

Bab terakhir meneropong masa depan pertanian, dengan bertumpu pada bab-bab sebelumnya, untuk membuka tabir pemahaman umum “orang muda tidak lagi tertarik pada pertanian” beserta narasi-narasi terkait tentang “suramnya masa depan pertanian.” Bab terakhir ini juga menilik pengalaman pemuda pedesaan, perempuan maupun laki-laki, yang sungguh ingin menjadi petani serta berbagai kendala yang mereka hadapi. Menurut saya, faktor utama yang dari dulu mendorong pemuda hengkang dari desa dan enggan bertani ialah minimnya akses mereka atas sumberdaya agraria secara mandiri, meski faktor ini tidak menghalangi mereka yang ingin kembali ke desa dan bertani ketika sumberdaya (terutama tanah) tersedia berkat tabungan ataupun warisan.

KRISIS REPRODUKSI SOSIAL?

Tidak mudah bagi kaum muda untuk menghadapi pasar tenaga kerja hari ini. (ILO 2017a: 26)

Laporan International Labour Organization (ILO, organisasi ketenagakerjaan dunia) yang berjudul *Global Employment Trends for Youth* (2017a) menjabarkan pola masalah ketenagakerjaan pemuda seantero dunia. Tingkat pengangguran pemuda di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah berkisar 10–15 persen—sekitar tiga kali lipat dari tingkat pengangguran kelompok dewasa—dan angka ini terus meningkat. Pendidikan toh tidak menyelesaikan persoalan ini; tingkat pengangguran di kalangan muda justru cenderung berbanding lurus dengan tingkat pendidikan, bukannya sebaliknya. Bagi pemuda yang sudah bekerja pun, kualitas pekerjaan masih menjadi keprihatinan serius. Tingkat “pekerja miskin”—yakni mereka yang bekerja dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan—mencapai sekitar 30 persen di negara berpendapatan menengah dan 70 persen di negara berpendapatan ren-

dah; di semua kawasan, persentasenya lebih tinggi antara pemuda dibandingkan kelompok dewasa; sementara di India Selatan dan Afrika Sub-Sahara, persentasenya melebihi 50 persen (ILO 2017a: 19). Selain itu, dibandingkan kelompok dewasa, lebih banyak pemuda yang bekerja di sektor informal. Pekerjaan yang tersedia pun makin serabutan dan tidak pasti, padahal semua penelitian tentang cita-cita kaum muda menunjukkan bahwa—sebagaimana akan kita bahas di bab terakhir—mereka sangat menginginkan pekerjaan yang pasti dan bergaji tetap. Dan semua masalah ini lebih berat dialami pemuda desa. Dibandingkan rekan-rekan mereka di kota, pemuda desa mengalami “masa tunda” lebih lama untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah, dan 40 persen lebih mungkin kerja serabutan tanpa kontrak (ILO 2017a: 3, 5).

Dibandingkan generasi sebelumnya, kaum muda masa kini mengenyam pendidikan formal lebih tinggi, sehingga lebih banyak dibekali dengan apa yang disebut “modal manusia” (*human capital*). Namun, terlalu banyaknya lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi di satu sisi, serta pesatnya kemajuan teknologi yang menggantikan tenaga kerja manusia di lain sisi, mengisyaratkan bahwa teori modal manusia paling tidak relevan untuk diterapkan pada generasi masa kini, dibandingkan pada generasi-generasi sebelumnya. Mengapa? Premis yang mendasari teori modal manusia—bahwa pendidikan akan meningkatkan peluang mendapat pekerjaan—tidak sesuai dengan pengalaman nyata generasi muda pedesaan (Bessant, Farthing, dan Watts 2017: Bab 5). Mereka makin dihadapkan pada pasar tenaga kerja yang terlampaui padat dan makin menciut; di situasi ini, meski umumnya ijazah dibutuhkan untuk memperoleh pekerjaan terampil atau semiterampil, sebenarnya ijazah saja tidak menjamin seseorang memperoleh pekerjaan, tanpa sarana lain untuk “membuka pintu”, seperti kenalan “orang dalam” dan pengalaman kerja yang sesuai—bekal yang jarang dipunyai pemuda desa dan miskin.

Prospek kerja generasi muda yang sudah suram ini makin tidak pasti seiring pesatnya perubahan teknologi; sebab, berbagai inovasi un-

tuk penghematan ongkos produksi utamanya ditujukan untuk mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Mekanisasi di sektor pertanian serta pekerjaan manual lainnya dan otomatisasi kerja-kerja administrasi, komunikasi, penjualan, serta jasa bakal berkembang pesat pada tahun-tahun mendatang; sekitar 50 persen dari seluruh kegiatan kerja yang ada sekarang berpotensi diotomatisasi dengan teknologi yang sudah tersedia (ILO 2017b). Secara teori, teknologi hemat tenaga kerja bisa mengurangi jam kerja, sembari tetap mempertahankan serapan tenaga kerja melalui penyebaran peluang kerja, sebagaimana diprediksi oleh John Maynard Keynes 1963 [1930]).² Namun, hal ini tidak terjadi dalam perekonomian kapitalis yang berlaku saat ini. Ketika dihadapkan pada pekerjaan-pekerjaan baru yang diciptakan kemajuan teknologi, pemuda desa dan miskin cenderung tidak punya bekal pendidikan, keterampilan, dan jaringan yang memadai untuk beralih dari pekerjaan lama ke pekerjaan baru. Perubahan teknologi, dengan demikian, menawarkan dua sisi berlawanan; di satu sisi, ada utopia masa depan sistem pangan terotomatisasi dan berkelanjutan yang kebal terhadap dampak perubahan iklim, tetapi di sisi lain membawa momok pengangguran massal, yang menimbulkan persoalan baru: Bagaimana angkatan kerja yang tersisih ini, tanpa pendapatan dari bekerja, akan memenuhi kebutuhan hidup mereka? Dan bagaimana penyusutan pasar tenaga kerja berdampak pada perekonomian yang bergantung pada permintaan konsumen massal, yang dari dulu ditopang oleh pendapatan dari bekerja? (Shepon, Hendriksson, dan Wu 2018: 3).

Pada tahun-tahun mendatang, pengangguran dan setengah-pengangguran massal di kalangan pemuda (termasuk yang berpendidikan) akan menjadi gejala struktural, kronis, dan permanen di hampir seluruh perekonomian dunia. Ada banyak contoh tentang meningkatnya jumlah pengangguran dan setengah-pengangguran di kalangan pemuda terdidik. Melihat gejala ini, beberapa peneliti mulai membahas tentang memanjangnya tahapan hidup “mengejar kedewasaan”, yakni ketika seseorang secara biologis sudah melewati masa muda, tetapi secara sosial

masih sulit menjangkau status dewasa (Durham 2017). Memanjangnya masa muda juga kerap disebut masa “kerentanan” (*precarity*) (Bessant, Farthing, dan Watts 2017). Tingginya angka pengangguran pemuda seantero dunia menunjukkan kondisi baru dan kronis yang disebut “surplus populasi relatif”. Untuk menghindari kesalahpahaman, “surplus relatif” yang dimaksud di sini bukanlah tentang terlalu banyaknya mulut yang harus diberi makan, seperti dipahami dalam pemikiran Malthusian, melainkan tentang kelebihan tenaga kerja yang tidak terpakai: ketidakmampuan ekonomi, dengan bentuknya yang berlaku sekarang serta kebijakan dan kemajuan teknologi saat ini, untuk menyerap seluruh angkatan kerja yang tersedia (Li 2009, 2017).

Pertanian, khususnya skala kecil, sejauh ini masih menjadi bidang terbesar untuk serapan tenaga kerja dan sumber penghidupan bagi kaum muda maupun tua di Afrika dan Asia (tetapi tidak lagi di Amerika Latin). Sektor ini menyumbang 35 persen dari total pekerjaan di Asia dan 44 persen di Afrika, dengan persentase yang tentunya jauh lebih tinggi di pedesaan (ILO 2017a: 42). Karena itu, penting untuk mempertimbangkan prospek pekerjaan dan sumber penghidupan pemuda desa di pertanian dan sektor-sektor terkait lainnya, juga untuk mempertanyakan apa yang sesungguhnya dicita-citakan pemuda desa serta bagaimana mereka mengangankan masa depan.

Banyak laporan menunjukkan bahwa pemuda desa umumnya men-cita-citakan masa depan di luar pertanian. Hal ini digaungkan sebagai lonceng krisis pertanian kecil seantero dunia, ketika anak-anak petani tidak ingin mengikuti jejak orang tua mereka. Namun, logika di balik narasi “pertanian dalam bahaya” ini cenderung melompat, seolah cita-cita yang digaungkan itu otomatis bakal jadi kenyataan di masa depan (Leavy dan Hossain 2014; White 2012). Sebagaimana ditunjukkan di Bab 5, anggapan krisis regenerasi pertanian kecil ini perlu ditinjau kembali di banyak negara. Data penelitian tentang cita-cita pemuda desa, serta harapan dan kekhawatiran petani tua tentang krisis regenerasi, bukanlah

indikator yang bisa diandalkan untuk meramalkan masa depan (Chiswell 2014).

Terakhir, krisis reproduksi sosial dalam pertanian kecil makin dikawatirkan karena populasi petani di seluruh dunia mengalami penuaan dan, di beberapa negara, banyak petani memang tidak punya penerus. Di Afrika, dilaporkan bahwa rata-rata usia petani³ sekitar 60 tahun (FAO-IFAD-CTA 2014: 2), sementara di banyak negara Asia, rata-rata usia petani sekitar pertengahan 50 tahun (Rigg *et al.* 2019).⁴ Tren ini umumnya dikaitkan dengan keengganan generasi muda untuk bertani. Namun, ada penjelasan lain yang juga masuk akal, tetapi belum banyak diteliti. Sebagai contoh, Tabel 1.1 menunjukkan bergesernya struktur usia petani Indonesia dan Australia selama tiga puluh tahun.

TABEL 1.1
Perubahan Usia Petani Utama dalam Pertanian Kecil
di Indonesia dan Australia

UMUR	AUSTRALIA		INDONESIA	
	1981	2011	1983	2013
Di bawah 35	28%	13%	25%	13%
35–54	47%	37%	57%	54%
55 dan ke atas	25%	50%	18%	33%

Sumber: Australian Bureau of Statistics (2012) untuk Australia
dan Badan Pusat Statistik (1983 dan 2013) untuk Indonesia.

Meski kedua negara ini punya sistem perekonomian dan pertanian yang berbeda, dalam satu generasi, proporsi petani-utama yang berusia di bawah 35 tahun sama-sama merosot separuhnya, sementara yang berusia di atas 55 tahun sama-sama meningkat dua kali lipat. Penjelasan paling

umum menyatakan bahwa perubahan ini disebabkan oleh keengganan anak-anak petani untuk mengambil alih usaha tani orang tua, sehingga orang tua mereka harus terus bertani sampai renta. Namun, perubahan tersebut bisa juga karena petani tua masih tetap hidup bugar serta enggan atau tidak bisa menyerahkan usaha taninya kepada anak-anaknya, sehingga generasi penerusnya harus menunggu lebih lama untuk mendapatkannya.

Di Rumania, misalnya, di mana dua pertiga petani kecil berusia di atas 55 tahun dan hanya 7 persen yang berusia di bawah 35 tahun, terjadi eksodus besar-besaran pemuda desa, dan hanya 26 persen usaha tani yang diserahkan kepada generasi penerus di keluarga. Apakah eksodus ini menjadi sumber masalah bagi proses alih-generasi usaha tani, atau justru sebaliknya? Yang jelas, banyak petani kecil yang menua itu tidak bisa begitu saja berhenti bertani, dan begitu berhenti, mereka cenderung memilih untuk menjual atau menyewakan tanah mereka, demi menambah uang pensiun yang memang tidak begitu seberapa, ketimbang menyerahkannya kepada anak-anak mereka.

Petani yang menua sebetulnya tidak bisa pensiun atau enggan menerima posisi bawahan, karena mereka mengandalkan pendapatan dari usaha tani yang dipunyai, dan uang pensiun di Rumania tidak cukup buat sekadar bertahan hidup. ... Petani tua yang mengandalkan tanahnya untuk penghasilan di masa depan cenderung memilih menyewakan atau menjual tanah ketimbang menyerahkannya kepada kerabat, karena mereka membutuhkan uangnya untuk tabungan atau tambahan pensiunan. Hal ini sering kali mendorong terjadinya perampasan atau konsolidasi tanah oleh perusahaan agrobisnis yang mengambil kesempatan aji mumpung dari keputusan petani untuk melanjutkan usaha tani. (Eco Ruralis 2016: 15)

Apakah pemuda generasi penerus pertanian enggan memulai bertani? Atau apakah mereka tidak bisa memulai bertani karena orang tua

mereka enggan atau tidak bisa berhenti? Dua pemaknaan ini bisa saja memiliki relevansi berbeda di negara dan kawasan berbeda, begitu juga implikasi kebijakannya. Atau, apakah ada dinamika lebih kompleks, sebagaimana diungkapkan Rigg *et al.* (2019), yang menuntut kita agar mempertimbangkan kembali cara memahami fenomena menuanya suatu generasi petani dan perubahan profesi dalam konteks pertanian skala kecil? Kita akan kembali ke pertanyaan-pertanyaan ini di Bab 4.

BEBERAPA KERANGKA & KONSEP PEGANGAN

Di buku ini, saya menggunakan suatu kerangka umum ekonomi-politik yang menempatkan dinamika reproduksi sosial sebagai porosnya. Saya memadukan perspektif kajian agraria kritis dan kajian kritis tentang pemuda/generasi. “Kritis” di sini merujuk pada pengujian atas anggapan saklek, dan tidak selalu bernada negatif—artinya, tidak mengamini begitu saja anggapan apa pun dan secara berhati-hati menerapkan penalaran serta pembuktian dalam menentukan apakah suatu klaim benar adanya (Moore dan Parker 2009: 3). Ini berarti menyelidiki asumsi-asumsi arus-utama atau yang dipercaya banyak orang dan, bila perlu, mengajukan serta mengikuti cara-cara baru penyelidikan, dengan harapan bisa mencapai pemahaman lebih baik yang bisa dijadikan landasan untuk bertindak.⁵ Dengan perpaduan dua bidang kajian kritis ini, dinamika antargenerasi beserta tegangan-tegangan terkait yang berlangsung di hampir semua wilayah pedesaan bisa kita pahami dengan lebih memadai.

Ekonomi-Politik Agraria

Kajian agraria membantu kita untuk lebih baik memahami dan membandingkan struktur serta dinamika masyarakat pedesaan, proses perubahan sektor pertanian-pangan di masa lalu maupun kemungkinannya di masa depan, dan khususnya perdebatan mendasar dan yang masih berlangsung tentang masa depan pertanian skala besar versus skala kecil. Pendekatan ekonomi-politik dalam kajian agraria digunakan untuk

mengkaji dan membandingkan “relasi sosial serta dinamika produksi dan reproduksi, properti dan kekuasaan dalam formasi masyarakat agraris serta berbagai proses perubahannya, baik yang terjadi di masa lampau maupun masa kini” (Bernstein 2010: 1), dan juga karakteristik khusus pertanian kecil (van der Ploeg 2013). Pada tingkat mikro, pendekatan ini membantu kita memahami daur perkembangan rumah tangga petani kecil serta nalar di balik bertahannya pertanian skala kecil dalam dunia kapitalis.

Ada beberapa konsep kunci dalam analisis atas struktur agraria beserta dinamikanya, yakni “komodifikasi”; “rezim tenaga kerja” dan proses kerja; “diferensiasi agraria” dan “pembentukan kelas” serta “pembagian kerja secara sosial” yang terkait dengan dua proses ini. Semua ini merupakan konsep abstrak yang memandu kita untuk mempertanyakan sekaligus memahami jawaban atas persoalan-persoalan nyata dan bumi yang bisa digali untuk menelaah dan memperbandingkan struktur agraria: “Siapa memiliki apa? Siapa melakukan apa? Siapa mendapatkan apa? Digunakan untuk apa hasil yang mereka dapatkan?” (Bernstein 2010: 22 [2019: 30]) dan “Apa yang mereka lakukan satu sama lain?” (White, Hall, dan Wolford 2012: 620).⁶

“Komodifikasi” merujuk pada proses di mana unsur-unsur produksi dan reproduksi dihasilkan untuk, dan diperoleh dari, pertukaran pasar, yang mana unsur-unsur tersebut ditundukkan pada logika, disiplin, dan tuntutan pasar.⁷ “Diferensiasi agraria” adalah kecenderungan yang didorong oleh komodifikasi, di mana produsen komoditas skala kecil (petani kecil) terbagi menjadi kelas kapital dan kelas tenaga kerja (Bernstein 2010: 125 [2019: 174]), meskipun proses ini tidak selalu menghasilkan pembelahan kelas secara tegas. Proses diferensiasi ini ditandai dengan kemunculan atau penajaman perbedaan antarkelompok dalam masyarakat tani, yakni ketika sebagian kelompok berhasil memperluas reproduksi usaha tani (akumulasi) sedangkan sebagian lain mengalami “himpitan reproduksi sederhana”⁸ yang menyebabkan mereka kehilangan aset. Diferensiasi, dengan demikian, kerap ditandai dengan

munculnya kelompok petani yang lebih kaya dibandingkan kelompok lainnya; tetapi perlu ditegaskan bahwa inti dari konsep ini bukanlah menajamnya ketimpangan, melainkan berubahnya *hubungan*, di antara mereka, karena nilai yang tercipta dalam kerja pertanian kemudian dikuasai dan dibagi di antara kelompok-kelompok berbeda (White 1989: 19–20). Perubahan hubungan ini bisa dilihat, misalnya, dari mencuatnya hubungan timpang (asimetris) antara pemilik tanah dan penggarap serta antara majikan dan buruh upahan dalam rezim tenaga kerja agraria yang baru.

“Rezim tenaga kerja” agraria merujuk pada “berbagai cara mengarahkan atau menggerakkan tenaga kerja serta mengorganisir tenaga kerja dalam produksi” (Bernstein 2010: 127 [2019: 181]) serta kondisi sosial dan politik yang memungkinkan pemaksaan hubungan-hubungan tersebut. Dalam pembahasan di buku ini, “pembagian kerja secara sosial” dimaknai sebagai “aktivitas-aktivitas bermacam kategori orang menurut posisi yang mereka duduki dalam struktur relasi sosial tertentu, terutama ... relasi kelas ... dan relasi gender” (Bernstein 2010: 129 [2019: 178]); saya memperluas definisi ini dengan memasukkan relasi generasi. Pembagian kerja ini juga mencakup produksi langsung barang dan jasa serta produksi dan pemeliharaan kehidupan itu sendiri. Poin ini akan dibahas lebih lanjut di akhir bagian ini, ketika kita sampai pada gagasan kunci mengenai “reproduksi sosial”.

Pembagian kerja secara sosial, dengan demikian, mencakup dimensi kelas, gender, generasi, serta terkadang faktor lainnya, dan saling-silang (interseksionalitas) di antara dimensi-dimensi ini. Interseksionalitas, sebagai suatu alat analitis, membantu kita memahami bagaimana beragam bentuk serta hubungan penundukan (subordinasi), ketimpangan, dan identitas—misalnya yang berbasis kelas, gender, etnis, dan generasi—saling berkaitan.

Ketika membahas ketimpangan sosial, kita akan memahami kehidupan rakyat dan tata kuasa dalam suatu masyarakat secara lebih baik

jika memandang bahwa semua ini terbentuk bukan oleh satu poros tunggal pembagian sosial, apakah itu ras atau gender atau kelas [atau generasi], melainkan oleh ragam poros yang saling terhubung dan memengaruhi. (Collins dan Bilge 2016: 2; tentang interseksionalitas terkait masa kanak-kanak/masa muda, lihat Alanen 2016)

Mempertimbangkan gender dan generasi dalam analisis berarti menilik bagaimana hubungan-hubungan dan tegangan-tegangan ini terjalin, tidak hanya dalam rumah tangga petani kecil, tetapi juga dalam lokasi-lokus berbeda di berbagai rezim tenaga kerja serta rantai komoditas pertanian. Perempuan maupun laki-laki, tua maupun muda, anak lelaki maupun perempuan bisa menjadi produsen langsung dalam usaha taninya sendiri (sebagaimana kita simak dalam dua sketsa cerita pertama di awal bab ini); mereka juga bisa menjadi pekerja tanpa upah dalam usaha tani keluarga (termasuk pertanian kontrak) atau usaha tani milik pihak lain, atau menjadi buruh di kampung sendiri ataupun kampung lain dalam usaha tani pihak lain (pertanian lebih besar atau perkebunan industrial), atau menjadi pelaku aktif (usaha sendiri, pekerja keluarga tanpa upah, buruh upahan) di usaha-usaha sektor hulu dan/atau hilir dalam rantai komoditas pertanian; mereka juga bisa menjadi konsumen pangan serta produk-produk pertanian lain yang tidak dihasilkan sendiri, atau bisa saja menjadi penyedia ataupun penerima makanan serta pengasuhan dalam rumah tangga yang menjalankan produksi pertanian (White, Park, dan Julia 2015).

Dalam sistem pertanian-pangan yang makin terkomodifikasi hari ini, hubungan kelas beririsan dan berpadu dengan pembelahan serta diferensiasi sosial lainnya. Sehingga, seiring berlangsungnya ketegangan serta dinamika yang berbasis kelas, reproduksi masyarakat tani juga merupakan proses berbasis gender sekaligus generasi. Proses diferensiasi dalam pertanian skala kecil, serta penyatuannya ke dalam pertanian korporat skala besar (juga perlawanan terhadapnya), dibentuk oleh hu-

bungan-hubungan gender dan generasi, termasuk ketimpangan serta pembagian kerja di dalamnya, baik yang terbangun dari masa lalu maupun yang berlaku saat ini.

Selain aktor-aktor individu dan kelas-kelas agraris, bangunan dasar yang turut menyusun struktur agraria ialah rumah tangga petani. Sebagai cirinya, rumah tangga petani biasanya menggabungkan beragam unit produksi, konsumsi, dan akumulasi, yang sebagiannya saja bertumpang tindih. Dalam unit-unit ini, ada kemungkinan terjadinya mekanisme pengalihan surplus di antara anggota rumah tangga berdasarkan hierarki usia dan gender, selain pertukaran tenaga kerja di antara mereka, sebagaimana tergambarkan dalam sketsa cerita Indonesia dan Bolivia di awal bab ini (White 1989: 22; Guyer dan Peters 1987). Rumah tangga juga mesti dilihat sebagai “subjek yang terus bergerak”, sehingga dibutuhkan perspektif dinamis (tidak kaku) untuk memahami “daur perkembangannya”—pembentukannya, perluasannya, penyebarannya, pemisahannya, dan pergantian anggotanya—serta perubahan komposisi usia dan tenaga kerja dalam keberlangsungan daur tersebut (Chayanov 1966a [1925]: Bab 1; Fortes 1966; White 1980: 16–22). Kita akan kembali ke poin ini di Bab 3.

Terakhir, apa yang dimaksud “pertanian kaum tani”/“pertanian rakyat” (*peasant farming*), “pertanian keluarga” (*family farming*), dan “pertanian (skala) kecil”/“pertanian berlahan sempit” (*smallholder farming*)? Dalam bukunya yang masyhur, *Peasants (Petani)*, Eric Wolf menunjuk pada pengalihan surplus dari penggarap skala kecil ke penguasa dominan dalam suatu masyarakat hierarkis sebagai penanda penting keberadaan kaum tani.

Petani (*peasants*) ... adalah pencocok-tanam pedesaan yang menyerahkan surplus-surplus mereka kepada satu golongan penguasa yang dominan, yang menggunakan surplus-surplus itu untuk menunjang tingkat hidup mereka sendiri dan membagi-bagikan sisanya kepada

golongan-golongan di dalam masyarakat yang tidak bertani melainkan harus diberi makan sebagai imbalan [atas] barang-barang dan jasa-jasa khusus yang mereka berikan. ...

Dengan demikian, maka baru apabila pencocok-tanam diintegrasikan ke dalam sebuah masyarakat yang mempunyai negara—artinya apabila pencocok-tanam itu menjadi sasaran tuntutan-tuntutan dan sanksi-sanksi pemegang kekuasaan di luar lapisan sosialnya—kita dapat benar-benar berbicara tentang adanya *peasants*. (1966: 3–4, 11 [1983: 4–5, 16])

Senada, sejarawan Rodney Hilton (1975), dalam kajian klasiknya tentang kaum tani Inggris Abad Pertengahan, menyatakan bahwa keberadaan kaum tani sebagai sebuah kelas memiliki prasyarat, yakni keberadaan kelas-kelas lain yang hidup dari surplus hasil kerja petani. Pandangan ini kemudian dikembangkan oleh para cendekiawan lain. Dalam kajiannya tentang perjuangan kelas di Yunani kuno, De Sainte-Croix mengacu pada poin-poin dari gagasan Hilton untuk mengembangkan gagasan bahwa:

1. Kaum tani menguasai sarana produksi pertanian, baik sebagai pemilik atau bukan; mereka menafkahi diri dari berbagai upaya produktif mereka sendiri, dan secara bersamaan menghasilkan surplus yang melebihi kebutuhan dasar hidup (subsistensi) dan reproduksi mereka.
2. Mereka bukanlah budak, sehingga secara formal bukan milik pihak lain (meski mereka bisa saja menjadi hamba feodal [*serf*]).
3. Mereka bisa saja menjadi pemilik tanah atau penyewa (yang membayar sewa dengan uang, hasil panen [skema bagi hasil], dan terkadang ditambah layanan kerja).
4. Mereka menggarap lahan terutama sebagai keluarga, dengan mengandalkan tenaga kerja anggota keluarga, meski terkadang juga mempekerjakan budak atau buruh upahan secara terbatas.

5. Mereka menopang kelas-kelas yang menempatkan mereka sebagai bawahan (subordinat) dan mengeksploitasi mereka dalam tingkatan tertentu, khususnya tuan tanah, pemberi utang, warga kota, serta lembaga-lembaga negara tempat mereka hidup baik dengan atau tanpa hak-hak politik. (De Sainte-Croix 1981: 210)

Dalam buku *Peasants and The Art of Farming* (*Petani dan Seni Bertani*), Jan Douwe van der Ploeg mengambil fokus berbeda; alih-alih membedakan kaum tani (*peasants*) dari penggarap “primitif” (*pre-peasant*, dalam istilah Eric Wolf, setengah abad lalu), dia membedakan kaum tani dari petani kapitalis (*capitalist farmers*), dengan menitikberatkan perbedaan mendasar mereka pada tujuan atau nalar di balik bertani itu sendiri. Dia mendefinisikan “pertanian kaum tani” (*peasant agriculture*) sebagai “bentuk atau cara bertani yang berporos pada proses produksi-bersama (*co-production*) dengan tumpuan sumberdaya yang dikendalikan secara mandiri, (hampir) tanpa buruh upahan. Pendorong utama perkembangannya ialah peningkatan nilai tambah dari setiap objek kerja” (van der Ploeg 2013: 134 [2019: 195]). Poin kuncinya terletak pada perbedaan tujuan antara kaum tani dan petani kapitalis; tujuan kaum tani bukanlah memaksimalkan keuntungan kapitalistis yang bertumpu pada pemilikan tanah dan nilai lebih yang diekstraksi dari tenaga kerja, melainkan memaksimalkan nilai tambah dan penghasilan dari kerja, yakni keseluruhan “hasil kerja keluarga” sebagai satu kesatuan.

Van der Ploeg menunjukkan dengan tepat bagaimana petani kecil, atau biasa disebut “produsen komoditas skala kecil” (*petty commodity producer* [PCP]), mampu bertahan hidup dalam konteks kapitalisme lebih luas—satu isu yang disoroti juga oleh Karl Kautsky dan Alexander Chayanov seabad sebelumnya. Kautsky dan Chayanov menggambarkan bahwa produsen komoditas skala kecil ini “tidak menggantungkan hidup pada penghasilan dari kepemilikan (properti) mereka, melainkan dari hasil kerja yang mereka curahkan” (Kautsky 1988 [1899]: 170).

Dan “hasil kerja keluarga” secara analitis tidak dapat dipisah-pisahkan, “Karena tidak ada gejala pengupahan secara sosial, maka tidak berlaku pula keuntungan bersih secara sosial” (Chayanov 1966b: 5). Sebagaimana ditegaskan van der Ploeg (2013: 15 [2019: 22]), “tenaga kerja, dalam pertanian kaum tani, bukanlah tenaga kerja upahan, sementara modal di dalamnya bukanlah kapital seperti dalam pengertian Marxis—yang berarti tidak punya keharusan menghasilkan nilai lebih untuk diinvestasikan lagi demi menghasilkan lebih banyak nilai lebih.” Dalam kehidupan kaum tani seturut definisi van der Ploeg ini, “peralihan surplus” bisa saja terjadi, tetapi hanya berlaku pada sebagian, bukan keseluruhan, kaum tani.

Perlu saya jelaskan mengapa di buku ini (yang edisi bahasa Inggris), saya lebih memilih menggunakan istilah *smallholder* (petani kecil/skala kecil/berlahan sempit) ketimbang *peasant* (kaum tani/petani) atau *family farmer* (petani keluarga), meskipun dalam buku ini yang mengandalkan banyak penelitian orang lain sebagai rujukan, saya tidak bisa sepenuhnya menghindari istilah *peasant*. Yang jelas, banyak bahasa di dunia ini tidak memiliki dua kata yang membedakan *peasant* dan *farmer*, sehingga penerjemahannya kadang jadi membingungkan, yang sebenarnya tidak perlu diperumit. Dan meski kebanyakan usaha tani kecil juga merupakan usaha tani “keluarga”, tidak semuanya begitu; tidak ada alasan mutlak untuk menganggap suatu usaha tani kecil pasti menjadi urusan satu keluarga. Usaha tani kecil bisa saja dimiliki dan dijalankan oleh satu orang, atau, meski jarang, oleh sepasang (atau sekelompok kecil) kawan, atau, yang lebih sering, oleh seorang lelaki atau perempuan yang punya keluarga tetapi pasangan dan/atau anak-anaknya sama sekali tidak ikut bertani. Di buku ini, “petani kecil” (*smallholder*) mengacu tidak hanya pada luasan (tanah) unit usaha tani, tetapi juga pada cara, gaya, dan skala pengerjaannya, di mana petani pemilik atau penyewa tanah mengelola dan mengerjakan sendiri usaha taninya, sering kali dengan dibantu anggota keluarga, tanpa menutup kemungkinan menggunakan buruh upahan.⁹ Jenis pertanian ini, dengan demikian, mencakup usaha

tani dengan tanah 0,5 atau 2 hektar di Asia, Afrika, atau Amerika Latin, dan juga usaha tani dengan tanah 100 atau 200 hektar di Kanada atau Belanda, tergantung bagaimana usaha tani itu dimiliki, dikelola, dan dikerjakan. Rumah tangga petani kecil bisa saja—dan sering kali—tunduk pada penghisapan serta eksploitasi surplus oleh kelas-kelas nontani yang berkuasa, tetapi tidak selalu begitu, sehingga poin ini menurut saya tidak perlu dimasukkan dalam definisi tersebut.

Satu aspek penting dalam rumah tangga petani kecil dan kelangsungan hidup mereka di dunia sekarang ini ialah “kerja-majemuk”/“kerja lintas-sektor” (*pluriactivity*) yang mereka geluti.¹⁰ Selain terlibat dalam produksi tanaman dan/atau ternak, seorang atau beberapa anggota rumah tangga bisa saja bekerja di luar pertanian, baik di kampung sendiri ataupun dengan merantau dalam periode tertentu (musiman atau seterusnya daur hidup). Baik di negara kaya maupun miskin, pertanian kecil bisa bertahan hidup berkat keuletan pelakunya dalam bekerja lintas-sektor dan bekerja lintas-tempat (*plurilocality*, jika pelakunya merantau secara periodik). Kaum muda menilai bahwa kerja-majemuk menjadi salah satu siasat terpenting agar mereka bisa bertani di masa depan, sebagaimana akan kita bahas di Bab 5. Selain sebagai sumber penghidupan, kerja tani sekaligus nontani bisa saling menghidupi; misalnya ketika sebuah keluarga menggunakan sumberdaya agrariannya (seperti hasil panen dan uang dari penyewaan/penjualan tanah) untuk mengongkosi seorang anggotanya yang pergi merantau, atau untuk memodali usaha di luar pertanian, atau ketika tabungan yang terkumpul dari pekerjaan nontani diinvestasikan untuk meningkatkan sumberdaya agraria atau menjadi modal kerja tani.

Ciri-ciri rumah tangga dan masyarakat tani ini terhubung dengan dimensi hubungan antargenerasi melalui konsep “reproduksi sosial”—inilah salah satu dari dua konsep inti (satunya lagi “generasi”) yang menopang analisis di setiap bab buku ini. Dari beragam pemaknaan tentang reproduksi sosial yang bisa digunakan, saya menemukan satu definisi dari Karen Wells yang cocok di sini, yakni “praktik-praktik ma-

teriel dan diskursif yang memungkinkan kelangsungan hidup sebuah formasi sosial serta anggotanya (termasuk hubungan antar-kelompok sosial di dalamnya) dari waktu ke waktu” (Wells 2009: 78). Konsep ini membantu kita memahami bagaimana rumah tangga dan masyarakat tani bereproduksi baik dari hari ke hari maupun sepanjang rentang musim dan generasi, termasuk keberlanjutan dan keterputusan dalam proses-proses ini. Konsep ini mengandung inti gagasan bahwa tenaga kerja manusia menjadi poros proses reproduksi rumah tangga, komunitas, dan masyarakat, dan juga bahwa tenaga kerja manusia tidak hanya melakukan produksi barang dan jasa yang bisa dijual di pasar, tetapi juga produksi dan pemeliharaan hidup itu sendiri—kadang disebut “kerja reproduktif”—sebagai suatu proses terpadu (Bhattacharya 2017). Pemahaman ini memudahkan kita untuk memikirkan dan mengkaji secara empiris berbagai periode dan tingkatan dalam reproduksi sosial dan pembagian kerja di dalamnya: reproduksi rumah tangga dari hari ke hari dan dari generasi ke generasi; reproduksi rumah tangga tani dari musim ke musim dan jalur yang mereka tempuh dalam perluasan reproduksi, reproduksi sederhana atau “himpitan” reproduksi sederhana; dan juga reproduksi seluruh komunitas beserta bangunan kelas dan hubungan gender dari generasi ke generasi.

Kajian Generasi dan Kajian Kepemudaan

Perspektif hubungan generasi memusatkan perhatian kita pada dimensi-dimensi generasi dalam reproduksi sosial. Perspektif ini membantu kita memahami kehidupan subjek yang kita kaji, khususnya perubahan posisi serta hubungan mereka dalam struktur agraria sepanjang perjalanan hidup dari kanak-kanak hingga muda, dewasa, dan tua. Perspektif ini juga membantu kita memahami gejala (yang kelihatannya) paradoks pemuda yang meninggalkan pertanian di zaman ketika pengangguran atau setengah-pengangguran meluas di kalangan mereka (Cuervo dan Wyn 2012), juga untuk memahami ragam persoalan yang dihadapi oleh mereka yang sesungguhnya bercita-cita bertani di masa depan.

Baik di ranah ilmu sosial maupun kebijakan, dan dalam bahasa sehari-hari, “generasi” dimaknai secara berbeda-beda. Istilah ini kadang dimaksudkan merujuk pada hubungan yang diikat oleh kekerabatan menurut garis keturunan atau hubungan batin, di mana posisi generasi seseorang—seperti “anak”, “cucu”, “orang tua”, “kakek”, “nenek”, “keponakan” atau “paman/bibi”—bersifat tetap, berapa pun usia biologisnya, baik ketika masih hidup atau bahkan sudah mati. Istilah “generasi” bisa juga merujuk pada fase-fase daur hidup, misalnya masa kanak-kanak, muda, dewasa, dan tua, serta masa peralihan di antara fase-fase ini. Pada 1928, Karl Mannheim mengemukakan gagasan penting lain tentang generasi, dalam artikelnya “The Problem of Generations” (“Masalah Generasi”). Bagi Mannheim, generasi atau “unit-unit generasi” merupakan pengelompokan yang longgar menurut usia; selain dicirikan kesamaan usia, kelompok generasi ini juga memiliki kesamaan pengalaman sosial, kultural, dan khususnya pengalaman politik-kesejahteraan, serta memaknai diri menurut kesamaan pengalaman ini. Dalam pemahaman ini, tidak semua kelompok demografis bisa dimaknai sebagai “generasi untuk dirinya sendiri”¹¹ (Huijsmans 2016: 11–18; Mannheim 1952 [1928]).

Masing-masing pemahaman tentang generasi ini cukup berguna bagi buku ini, dan beberapa bahkan digunakan di bab-bab selanjutnya. Namun, gagasan kunci yang mendasari buku ini memahami generasi sebagai *hubungan* antara individu dan kelompok di masyarakat berdasarkan usia “sosial” atau status daur hidup mereka. Generasi dalam pemahaman ini—seperti gender dan kelas—ialah suatu hubungan, bukan “sesuatu” itu sendiri. Seperti halnya gender, generasi terbentuk secara sosial (juga kultural dan politik)—sama halnya dengan “usia” dan “kelamin” ketika melampaui penanda-penanda biologis murni. Dalam bahasa sederhana, seseorang merupakan “anak”, “pemuda” atau “dewasa”, “junior” atau “senior”—tanpa mempertimbangkan usia biologisnya—jika masyarakat mengakui, memaknai, atau memperlakukannya sesuai sebutan-sebutan tersebut. Dengan memaknai generasi sebagai hubungan, kita bisa me-

mahami bagaimana perubahan agraria dapat menyusun-ulang struktur “lanskap sosial generasi” dan sebaliknya (Huijsmans 2016: 4), juga bagaimana hubungan generasi (seperti halnya hubungan gender) diliputi ketimpangan hubungan kuasa, yang terbangun dan terkukuhkan melalui praktik sosial “penggenerasian” (*generationing*).

Penggenerasian ... merupakan praktik kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya bersifat diskursif, tetapi juga materiel yang menentukan sumbangsih ekonomi serta akses orang-orang atas sumberdaya. ... Kekuasaan ini juga membentuk identitas orang-orang (yang bertautan dengan hubungan-hubungan lain termasuk gender dan kelas), dihidupi oleh individu maupun kelompok, dan membawa dampak materiel. Pembentukan generasi juga selalu diliputi pertentangan. (Ansell 2016: 315)

Dalam konteks “patriarki” (seturut makna asalnya: struktur relasi kuasa yang menempatkan laki-laki di atas perempuan *dan* generasi tua di atas generasi muda) dan “gerontokrasi” (struktur relasi kuasa yang menempatkan generasi tua di atas generasi muda), hubungan kuasa antar-generasi bisa membawa pengaruh mutlak terhadap reproduksi sosial masyarakat tani. Hubungan-hubungan ini, beserta ketimpangan antar-generasi terkait hak atas tanah, pembuatan keputusan, dan penyediaan aspirasi, umumnya diabaikan dalam kajian yang mengusung perspektif ekonomi-politik agraria klasik. Karena itu, kita perlu menggunakan pendekatan yang berfokus pada hubungan (relasional) dalam mengkaji pengalaman pemuda dalam pertanian dan kehidupan pedesaan, organisasi sosial dari hubungan antara generasi muda dengan generasi lebih tua, dan peran hubungan ini dalam reproduksi sosial masyarakat agraris (Archambault 2014; Berckmoes dan White 2016).

Pergantian generasi dalam rumah tangga petani bukan sekadar pembaruan anggotanya, tetapi juga melibatkan proses pengalihan (atau terhambatnya pengalihan) tanah, sumberdaya agraria lainnya, serta pe-

ngetahuan dan keterampilan bertani dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk memahami bagaimana pemuda terlibat dan terhalang memasuki dunia pertanian, kita perlu terlebih dahulu memahami bagaimana akses atas sumberdaya agraria terbentuk di berbagai masyarakat dan bagaimana pengalihan sumberdaya antargenerasi diatur, baik dengan ataupun tanpa bermacam tegangan dan pergulatan yang menyertainya. Pengalihan sumberdaya ini bisa saja melibatkan ketegangan antargenerasi (vertikal, tua-muda) maupun intragenerasi (horizontal, di dalam suatu generasi). Poin ini menjadi fokus pembahasan di Bab 4.

Pokok bahasan dan pendekatan yang diusung kajian generasi dan kajian kepemudaan memang bertumpang tindih, tetapi keduanya tidaklah sama. Kajian sosial tentang pemuda, dan tentang kanak-kanak, telah berkembang pesat sebagai bidang kajian tersendiri selama tiga dasawarsa terakhir, dengan berbagai jurnalnya tersendiri yang memperbantahkan kerangka pikir serta perdebatan seputarnya (Huijsmans 2016: 3; Tisdall dan Punch 2012). Namun, tidak semua kajian tentang kanak-kanak dan kepemudaan memandang generasi sebagai suatu hubungan sebagaimana dijelaskan di atas. Misalnya, beberapa pendekatan dalam kajian kepemudaan memandang pemuda sebagai suatu “proses menjadi” (*becoming*), sementara beberapa pendekatan lainnya memandang pemuda sebagai subjek yang “mengada di sini dan sekarang” (*being*). Fokus kajian yang menempatkan pemuda sebagai “proses menjadi” tercermin pada teori modal manusia dan cara pandang masyarakat serta orang tua atas harapan mereka terhadap kaum muda: berhaluan masa depan, memandang masa muda sebagai kondisi “menuju kedewasaan”, sebagai masa persiapan dan perkembangan menuju masa dewasa (yang sukses). Meskipun dalam kajian kepemudaan sebagian kalangan mengusung perspektif ini, banyak kajian kepemudaan lebih memusatkan perhatian pada fakta bahwa pemuda—perempuan maupun laki-laki—juga sibuk “menjadi muda”: menikmati masa muda, berusaha menjadi pemuda sukses (khususnya di mata lingkaran pergaulannya), kadang berhasrat pada “barang-barang mentereng”¹² (seperti ponsel pintar, motor, serta

busana modis), dan kadang terlibat dalam apa yang disebut Bank Dunia (2006) sebagai “perilaku berisiko”. Dua perspektif ini saling melengkapi; keduanya mencerminkan dua wajah masa kanak-kanak dan masa muda yang bersandingan dalam tegangan satu sama lain. Kajian-kajian kepemudaan bisa juga—tetapi tidak selalu—memasukkan fokus pada hubungan orang muda dengan dunia dewasa, yang merupakan satu elemen inti dalam pendekatan generasi.

Para pembuat kebijakan dan badan statistik tidak punya banyak pilihan untuk menentukan fase-fase kehidupan (kanak-kanak, muda, dan dewasa), kecuali berdasarkan usia biologis. Sementara itu, kategori berbasis usia yang umum digunakan oleh badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)—“anak” (0–17 tahun), “muda” (tumpang tindih dengan “anak”, 15–24 tahun)—tidak begitu berguna untuk dijadikan perangkat analitis. Dalam undang-undang dan kebijakan kepemudaan di berbagai negara, definisi masa “muda” sangat beragam. Di Meksiko, masa “muda” dimulai pada usia 12 tahun, di Inggris Raya 13 tahun, di Indonesia 16 tahun, dan di Bolivia 18 tahun; usia “muda” berakhir pada usia 19 tahun di Inggris Raya, 29 tahun di Meksiko, 35 tahun di Tanzania, dan 40 tahun di Malaysia.¹³ Batasan-batasan usia ini dibuat secara politis, dan pada gilirannya sering tidak sepadan dengan usia-usia yang ditetapkan—seturut undang-undang negara-negara itu sendiri—sebagai penanda peralihan menuju dewasa, seperti usia tanggung jawab atas tindakan kriminal, batas akhir pendidikan wajib, serta usia minimal untuk memasuki kerja, menikah, dan memiliki hak suara dalam pemilu. Di Malaysia, misalnya, usia minimal perempuan untuk menikah ialah 16 tahun, sehingga seorang perempuan yang menikah pada usia 16 tahun mungkin bisa menjadi ibu pada usia 17 tahun, dan bila anaknya perempuan dan mengikuti pola yang sama, dia akan menjadi nenek pada usia 34–35 tahun, namun dia tetap tergolong “muda” menurut undang-undang, hingga dia berusia 40 tahun. Jika seorang remaja ingin mencuri atau membunuh, sebaiknya dia melakukannya di Bolivia, karena usia tanggung jawab atas tindakan kriminal di negara ini dimulai pada usia

16 tahun, dan jangan melakukannya di India atau Indonesia, di mana usia tanggung jawab atas tindakan kriminal masing-masing ialah 7 dan 8 tahun. Singkatnya, gagasan normatif tentang masa muda dan pengalaman aktual pemuda sangat berbeda antarmasyarakat, antarkelompok dalam masyarakat, dan antarwaktu di berbagai masyarakat.

Kajian kepemudaan juga memandang “pemuda sebagai identitas” (Jones 2009: Bab 3), dengan menyadari bahwa pemuda tidak hanya berusia muda, tetapi juga terpilah berdasarkan gender (perempuan dan laki-laki) dan, di kebanyakan masyarakat pedesaan, berdasarkan “kelas”, sering kali juga “etnis”, kadang juga berdasarkan kategori difabel atau tidak, atau penanda-penanda lain seperti keagamaan.¹⁴ Karena itu, kepemudaan dan generasi mesti dipandang sebagai kategori “saling-silang” (sebagaimana dijelaskan di atas) dengan berbagai kategori sosial lain yang penting, dan dengan demikian mengandung ragam identitas (Hajdu *et al.* 2013; Jones 2009; Nayak dan Kehily 2013; Wyn dan White 1997).

Masa muda bisa dikatakan telah mengalami pemanjangan sekaligus pemendekan selama beberapa dasawarsa terakhir, karena kedewasaan sosial dalam beberapa hal mengalami penundaan dan dalam beberapa hal lainnya mengalami percepatan. Di kebanyakan negara berpendapatan rendah dan menengah—serta di banyak negara kaya—dibandingkan orang tua mereka, pemuda menempuh *pendidikan* lebih lama, *menikah* pertama kali dan *memasuki pasar kerja* dengan usia rata-rata lebih tua—inilah tiga indikator utama yang umumnya digunakan oleh para peneliti dan pembuat kebijakan untuk menandai peralihan menuju kedewasaan (Durham 2017: 3). Namun, pada saat bersamaan, terutama seiring meluasnya penggunaan internet dan media sosial digital, pemuda tidak lagi bergantung pada kelompok dewasa (orang tua, guru, pemuka agama, atau tokoh masyarakat) untuk mendapat wawasan dan berhubungan dengan dunia luar; mereka juga melibatkan diri dalam globalisasi serta modernitas secara mandiri tanpa campur tangan orang tua atau orang dewasa lainnya, bahkan kerap tanpa bisa dipahami oleh orang tua dan guru mereka.

Kajian kepemudaan juga memaknai “pemuda sebagai pelaku aktif” dalam pembaharuan sosial, ekonomi, dan politik, alih-alih melihat mereka sebagai objek pasif di bawah kendali dan bimbingan orang dewasa (Jones 2009). Sebagaimana diungkapkan Mannheim (1952), sementara “generasi lebih tua cenderung bertindak sebagai kekuatan konservatif [yang memaksakan norma-norma kolot], ... tiap generasi muda memiliki hubungan yang benar-benar segar dengan kondisi-kondisi baru, yang menghasilkan solusi-solusi mutakhir serta tren-tren baru” (Spencer 1990: 20). Pada saat bersamaan, pendekatan yang berporos pada aktor juga perlu memahami kekuatan lingkungan struktural yang membelenggu kesanggupan berperan aktif (agensi) serta ruang gerak pemuda; seperti halnya kelompok-kelompok sosial lainnya, pemuda menjalankan “agen-si yang dibatasi” (*constrained agency*) (Long dan van der Ploeg 1994).

Terakhir, dan ini terkait dengan gagasan atas pemuda sebagai aktor, satu aspek dalam hubungan generasi yang melibatkan masa muda ialah hubungan antara pemuda dan peneliti dewasa seperti saya sendiri yang mengkaji dan menulis tentang mereka. Kajian kepemudaan mengemukakan satu peringatan penting: bahwa orang muda perlu dan berhak diteliti dengan layak (Beazley *et al.* 2009). Artinya, peneliti perlu bertanya ke diri sendiri: apakah kaum muda menjadi objek, subjek, atau partisipan dalam penelitian? Apakah pemahaman peneliti tentang keadaan, pengalaman, dan hubungan pemuda dengan orang dewasa akan diperoleh secara langsung dari pemuda atau melalui perantara orang dewasa? Kaum muda punya kemampuan cukup memadai untuk menjadi pelaku kunci dalam proses penelitian, jika peneliti memang ingin meneliti “bersama” mereka, ketimbang sekadar “tentang” mereka. Di buku ini, yang ditopang utamanya oleh sumber-sumber penelitian sebelumnya, standar-standar ideal tersebut tidak bisa diterapkan sepenuhnya. Meski demikian, saya berupaya sebisa mungkin menyediakan ruang “bersuara” buat kaum muda, dengan memuat kisah nyata serta kutipan mereka, dari sumber mana pun yang menyediakan. Saya jadikan ini sebagai pegangan di bab-bab berikutnya.

Para pembaca mungkin akan kaget dengan banyaknya contoh kasus yang saya gunakan. Inilah bagian dari sikap saya atas poin yang saya sampaikan tadi, bahwa kita seharusnya berupaya memberi ruang orang-orang yang dibahas di buku ini untuk berbicara kepada kita. Ini juga mencerminkan keyakinan saya bahwa gambaran nyata lebih mengena untuk menggiring pembaca merasa bersentuhan langsung dengan kenyataan yang kita bahas. Contoh-contoh yang mengemuka di tiap bab memang sengaja saya ambil dari negara-negara Utara maupun Selatan.¹⁵ Meski ada banyak sekali perbedaan dalam hal sejarah agraria, teknologi, skala, dan praktik-praktik bertani antara masyarakat pedesaan di negara-negara seperti Kanada, Burundi, Tiongkok, Irlandia, dan Indonesia, ada pula beberapa kesamaan yang tidak terduga terkait masalah-masalah keberlanjutan generasi tani.

CATATAN

- 1 *Euphorbia heterophylla*, jenis tumbuhan semak yang mengganggu, sulit dibasmi, dan tumbuh di tanah tandus.
- 2 Keynes memperkirakan bahwa pada 2030, berkat kemajuan teknologi, kita hanya akan butuh bekerja tujuh belas jam setiap pekan tanpa mengurangi produktivitas, kemakmuran, atau serapan tenaga kerja.
- 3 “Petani” yang dimaksud di sini ialah petani utama (*principal farmer*), bukan keseluruhan tenaga kerja dalam suatu usaha tani.
- 4 Dengan pengecualian: Vietnam 37, India 48, Jepang 70 (Rigg *et al.* 2019).
- 5 Lihat, misalnya, cara Initiatives in Critical Agrarian Studies mendefinisikan “kajian agraria kritis” di situs webnya (http://www.iss.nl/icas_about.html).
- 6 Pertanyaan kelima berkenaan dengan sisi hubungan serta politik rezim kepemilikan dan ketenagakerjaan, proses kerja, dan struktur akumulasi yang diselidiki oleh empat pertanyaan dari Bernstein.
- 7 Definisi ini memadukan pengertian-pengertian dari Bernstein (2010: 124 [2019: 42]) dan van der Ploeg (2013: 132 [2019: 193]).
- 8 Istilah ini dari Bernstein (1981).
- 9 Untuk perbedaan antara “luasan” dan “skala” dalam bertani, lihat van der Ploeg (2013).
- 10 Banyak peneliti menggunakan berbagai istilah untuk menggambarkan fenomena ini, termasuk keragaman dan kemajemukan pekerjaan, “brikolase” penghidupan, mata pencaharian di banyak sektor dan banyak tempat, atau diversifikasi untuk bertahan hidup (Rigg *et al.* 2019: 9).
- 11 *Generations for themselves*—ungkapan ini merupakan analogi dari “kelas untuk dirinya sendiri” (*class for itself*) versus “kelas dalam dirinya sendiri” (*class in itself*) dalam analisis kelas Marxis.
- 12 *Positional goods*, dalam artian ekonomis, ialah barang-barang yang, bagi pemiliknya, nilainya ditentukan terutama oleh kenyataan bahwa orang lain tidak memilikinya.
- 13 Serangkaian contoh di alinea ini diambil dari www.youthpolicy.org yang dikelola oleh ornop Jerman Demokratie & Dialog e.V., pusat jaringan pengetahuan tentang isu dan kebijakan internasional untuk pemuda.
- 14 Meminjam dari Alanen (2016: 159) tentang interseksionalitas kanak-kanak.

- 15 Istilah ini kurang memadai, tetapi menurut saya lebih tepat dibandingkan “negara berkembang/maju”, “dunia pertama/dua/ketiga”, atau “dunia minoritas/mayoritas” yang terasa kurang pas.

BAB 2

Regenerasi dalam Transformasi Agraria

Masyarakat-masyarakat agraris, dalam perjalanan panjang sejarah mereka, telah mengalami banyak perubahan dalam hal rezim tenaga kerja dan pembagian kerja secara sosial di dalamnya, termasuk hubungan gender dan generasi. Bab ini menyelidiki dimensi hubungan generasi dalam berbagai jenis transformasi agraria, utamanya dengan menggunakan banyak contoh konkret. Saya menaruh perhatian utama pada berubahnya cara-cara—dan dengan kondisi seperti apa—generasi tua dan muda tercakup atau terhalangi dalam mengakses sumberdaya serta penghidupan tani. Tidak selalu mudah untuk memahami aspek ini, mengingat tidak banyak kajian tentang transformasi agraria yang memberi perhatian khusus pada dimensi generasi. Saya memilih beberapa kasus yang menyediakan informasi cukup memadai. Pembahasan akan mencakup berbagai konteks, mulai dari transformasi kolonial, transformasi sosialis serta pasca-sosialis, perampasan tanah serta penggusuran besar-besaran, komodifikasi serta “revolusi hijau” dalam pertanian skala kecil, dan reforma agraria.

TRANSFORMASI KOLONIAL

Untuk menguasai dan mengeruk keuntungan dari pertanian di tanah jajahan, penguasa kolonial butuh akses atas tanah dan tenaga kerja. Mereka mengambil alih tanah bumiputra dengan berbagai cara, dari merampas hak-hak atas tanah penguasa lokal yang ditundukkan hingga memberlakukan relasi kepemilikan ala Barat yang mengabsahkan perampokan tanah dan kekayaan lainnya. Begitu diterapkan ke dalam hukum kepemilikan di tanah jajahan, gagasan ini menjadikan semua “tanah tanpa sertifikat (meski telah dihuni dan digarap secara turun-temurun) sebagai tanah telantar/tak bertuan, dan dengan demikian secara sah men-

jadi milik negara” (Alden Wily 2012: 752). Prinsip ini kerap dijadikan pembenaran atas penetapan tanah “telantar”—istilah yang disematkan secara tidak tepat pada tanah-tanah yang tidak dihuni secara menetap dan tidak digarap secara terus-menerus—sebagai milik negara kolonial. Dengan cara inilah bumiputra jajahan yang hidup meramu (mencari makanan dari alam), berburu, dan/atau berladang dianggap tidak layak memiliki tanah dalam rezim kepemilikan yang baru, yang kerap didasarkan pada ras (Bhandar 2018).

Rezim tenaga kerja, sebagaimana dijelaskan di Bab 1, ialah “berbagai cara mengerahkan atau menggerakkan tenaga kerja serta mengorganisir tenaga kerja dalam produksi” (Bernstein 2010: 127 [2019: 181]). Rezim tenaga kerja kolonial bisa dibagi menjadi dua kategori umum: tenaga kerja “paksa” dan tenaga kerja “(semi)proletar”. Tenaga kerja paksa termasuk perbudakan,¹ penarikan upeti atau pajak berwujud barang dari kaum tani yang menggarap/mendiami tanah, kerja rodi kaum tani, dan kerja kuli kontrak (biasanya di perkebunan). Tenaga kerja (semi)proletar, yang telah terbentuk melalui pemisahan produsen dari sarana produksi sepenuhnya atau sebagiannya, mencakup perpaduan kerja upahan dan kerja karena jeratan utang, perpaduan antara pertanian gurem dan kerja upahan, produksi komoditas oleh petani kecil, dan proletarisasi penuh seperti yang terjadi dalam perkebunan klasik (Bernstein 2010 [2019]: Bab 3). Sebagian besar tanaman komoditas utama kolonial—seperti gula, kopi, kapas, cokelat, karet, teh, tembakau, dan rempah—diproduksi menggunakan lebih dari satu jenis rezim tenaga kerja, dan dalam beberapa kasus menggunakan semua jenis rezim tersebut, pada waktu dan tempat berbeda.

Setiap rezim tenaga kerja punya cara berbeda dalam melibatkan tenaga kerja muda dan tua, laki-laki maupun perempuan, ke dalam perekonomian kolonial, selain membawa prospek berbeda bagi generasi berikutnya. Setelah tanah dirampas dan para penggarap didesak untuk bertani seadanya di tanah-tanah tandus, perpaduan kemiskinan kaum tani dan struktur gerontokrasi sering kali menciptakan pola migrasi

temporer (secara sirkuler atau bagian dari perjalanan hidup) laki-laki dan perempuan muda untuk bekerja sebagai semiproletar dalam perekonomian penjjajaan. Pola migrasi inilah yang menjadi sarana utama perekrutan tenaga kerja untuk pertanian, tambang, dan rumah tangga pendatang-penjjajah di Afrika bagian selatan, seperti digambarkan dalam contoh dari Zimbabwe berikut ini.

Patriarki, Kerja Migran, & Negara di Zimbabwe Jajahan Inggris

Dua kelompok etnik utama yang mendiami Rhodesia Selatan (sekarang Zimbabwe) di zaman penjjajaan ialah Shona dan Ndebele.² Pada tahun-tahun awal penjjajaan di akhir abad XIX, perekrutan tenaga kerja oleh petani-pendatang-berkulit-putih serta majikan lainnya di wilayah ini didasarkan pada hubungan patriarkis berbasis usia dan gender yang telah mengakar di kedua etnik. Unit sosial dan ekonomi yang mendasar di sini ialah *homestead*—sekelompok kecil rumah tinggal keluarga. Tiap rumah biasanya dihuni oleh seorang suami (lelaki kepala rumah tangga), seorang atau beberapa istri, anak-anak mereka yang belum menikah, dan kadang juga anak lelaki mereka yang sudah menikah beserta istri dan anak-anaknya, tawanan perang, dan perempuan jaminan gadai.³ Ketua adat memberi tanah menganggur kepada para kepala rumah tangga (*homestead*), baik untuk perluasan pertanian mereka sendiri atau untuk dijatahkan kepada anak lelaki yang sudah menikah. Pekerjaan pembersihan lahan dilakukan lelaki maupun perempuan; lelaki menggunakan cangkul atau bajak, sementara perempuan menggunakan cangkul. Seabrek kerja tani lainnya (menanam, menyiangi, dan memanen) dilakukan oleh perempuan dewasa dan anak perempuan.

Selain bercocok tanam, pemeliharaan ternak juga penting dalam perekonomian rumah tangga. Selain sebagai sumber pangan, ternak juga menjadi alat tukar dan objek penumpukkan kekayaan lelaki. “Dengan ternak, seorang lelaki kaya bisa menambah istri dan anak. Dia bisa meminjamkan ternaknya kepada lelaki miskin, dengan imbalan perempuan jaminan gadai atau janji si lelaki miskin untuk meni-

kahkan anak perempuannya kepada si lelaki kaya” (Grier 2006: 43). Penggembalaan ternak utamanya menjadi tugas anak laki-laki dan lelaki dewasa. Akan tetapi, tidak semua gembala muda berpeluang mendapatkan hewan gembalaannya untuk dijadikan mahar atau bekal menikah di masa depan.

Kuasa dan hak-hak atas anak menjadi poros pembentukan status “senior” dan “junior”. Lelaki memang mungkin telah menikah dan mempunyai anak, tetapi tetap dianggap “junior” jika belum mampu bayar mahar; dalam kasus seperti ini, lelaki seniorlah yang punya kuasa penuh atas tenaga kerja istri serta anak-anak bujang dari lelaki junior. Lelaki senior berkuasa menentukan kapan dan dengan lelaki mana anak perempuannya menikah, selain menarik mahar dari pernikahan ini; mereka juga berkuasa menentukan apakah dan kapan anak lelaki mereka menikah dengan menyediakan (atau tidak) mahar berupa ternak. Hubungan hierarkis antara senior dan berbagai kategori junior—lelaki dewasa junior, istri, anak bujang, perempuan jaminan gadai, dan tawanan—“dipenuhi tegangan dan perselisihan, yang kerap mendorong kaum muda hengkang dari desa dan memasuki dunia kerja migran” (Grier 2006: 34).

Begitu ekonomi penjajahan meluas, banyak pemuda pergi untuk bekerja sebagai pelayan pribadi atau rumah tangga, kuli angkut, buruh tambang, dan buruh pertanian. Beberapa pergi karena diminta ayah mereka untuk menafkahi keluarga, tapi banyak yang hengkang karena kemauan sendiri untuk kabur dari kekangan patriarkis di rumah. Sumber utama perselisihan antara ayah dan anak perempuan ialah perjodohan dan paksaan menikah; banyak anak perempuan pergi ke kota, ke ladang pertanian, dan ke kompleks misionaris demi menghindari paksaan menikah serta rencana-rencana lain yang mana lelaki senior berkuasa menjual tenaga kerja mereka ke lelaki lain. Sementara itu, tegangan antara ayah dan anak lelaki biasanya terkait kekuasaan ayah atas sarana produksi (tanah dan ternak) yang mereka ikut kerjakan, juga kendali ayah atas reproduksi mereka (peluang menikah dengan modal

ternak). Banyak lelaki muda tergiur pada peluang kerja migran karena memungkinkan mereka meraih kemandirian hidup; mereka juga bisa mengubah relasi kuasa di dalam rumah tangga, ketika suatu hari nanti bisa membayar mahar pernikahan dengan kekayaan yang mereka kumpulkan sendiri. Pada saat yang sama, meluasnya penggusuran tanah pertanian serta padang penggembalaan bumiputra dan peminggiran pertanian kaum tani ke tanah-tanah tandus telah memaksa para junior di rumah tangga petani untuk bermigrasi secara musiman atau sirkuler dan bekerja di pertanian milik kulit putih atau di pertambangan. Berpindahnya tenaga kerja muda, khususnya lelaki, telah menciptakan masalah kendali dan pendisiplinan di perkotaan maupun pedesaan.

Seiring memburuknya perekonomian bagi keluarga kaum tani selama akhir 1910-an dan 1920-an, pola-pola ketenagakerjaan berbasis hak garap (*labour tenancy*) pada usaha tani milik kaum kulit putih di banyak tempat kemudian digantikan dengan sistem kerja upahan, baik tetap maupun tidak tetap. Orang Afrika dari semua usia, lelaki maupun perempuan, lantas mencari kerja upahan di pertanian milik orang kulit putih di sekitar. Mereka sering kali harus tunduk pada sistem kerja baru, dengan skema borongan berbasis target kerja ataupun hasil, di ladang tembakau, kapas, padi, dan (sejak 1930-an) teh serta kopi. Dalam skema borongan kerja, para orang tua bisa menguasai upah dari kerja anak-anak mereka, yang memang tidak dibayar secara perorangan; adanya penalti kalau gagal menyelesaikan tugas sesuai jadwal makin mendorong mereka membawa anak-anak mereka ke ladang untuk membantu. Anak-anak yang berusia lebih tua, khususnya lelaki, cenderung berontak dan pergi atas kemauan sendiri untuk mencari kerja dan pendapatan di ladang-ladang yang tidak mempekerjakan orang tua mereka.

Sejak 1930-an hingga 1950-an, model baru perekrutan pekerja remaja muncul dalam bentuk sekolah “belajar sambil bekerja” (*earn-and-learn*) di sekolah yang dikelola usaha tani/perkebunan luas, di mana anak-anak dan remaja menghabiskan sebagian hari mereka di kelas dan sebagiannya lagi di lahan. Sekolah-sekolah ini (sekolah harian bagi

anak-anak dari pekerja dewasa, sekolah asrama bagi mereka yang direkrut secara bebas) ditemukan di perkebunan besar milik perusahaan dan tidak lama kemudian di kebun-kebun milik keluarga; sekolah asrama besar yang pertama dibuka berada di perkebunan milik Perusahaan Teh Rhodesia pada 1930. Di satu sisi, sekolah-sekolah ini dibuka untuk memenuhi tuntutan bumiputra Afrika yang menginginkan pendidikan, dan di sisi lain sebagai cara merekrut tenaga kerja: “Dalam memilih ladang untuk bekerja, banyak orang tua mempertimbangkan apakah ladangnya menyediakan sekolah untuk anak-anak mereka” (Grier 2006: 163). Para murid-pekerja mendapatkan pendidikan dasar, seragam, dan ransum secara gratis, bahkan sering kali juga diberi sedikit upah. Melalui cara inilah ladang-ladang pertanian dan perkebunan besar bisa mempekerjakan banyak sekali anak tanpa perlu izin atau kontrak kerja, karena mereka dianggap sebagai “murid”, bukan “pekerja”. Pada awal 1960-an, terdapat lebih dari enam ratus “sekolah pertanian” yang terdaftar, dan ratusan lainnya tidak tercatat di instansi pemerintah. Sekolah-sekolah ini membawa anak-anak desa ke “suatu situasi terperangkap: mereka bersekolah agar saat dewasa nanti bisa berkelit dari kerja kasar mengandalkan otot yang berupah murah, tetapi mereka harus bekerja seperti itu di sekolah demi memperoleh pendidikan” (Grier 2006: 194).

Banyak sekolah “belajar sambil bekerja” yang masih hidup hingga abad XXI. “Di dunia ideal,” tulis Michael Bourdillon *et al.* (2010), “sekolah-sekolah semacam itu seharusnya tidak ada. Namun, di dunia yang kita hidupi, sekolah-sekolah itu menyediakan kesempatan terbaik bagi banyak anak untuk mengenyam pendidikan. ... Para murid sangat paham mengapa mereka bersekolah dan menyadari manfaat serta kerugian yang mereka terima” (Grier 2006: 111). Pada 2012, di bawah tekanan internasional dari berbagai organisasi anti-pekerja anak, sistem belajar-sambil-bekerja secara resmi dihentikan. Dalam waktu satu sampai dua tahun, hampir semua perkebunan meninggalkan sistem ini. Tanpa penyediaan pilihan-pilihan lain, penutupan sekolah-sekolah ini hanya menjerumuskan anak-anak bahkan ke dalam kondisi lebih buruk

serta dilema baru tanpa jalan keluar; mereka tidak mampu bersekolah bila tidak bekerja, dan jika bekerja, mereka tidak boleh bersekolah (Shumba 2015; Mutanda 2016).

Tanah, Tenaga Kerja, & Hubungan Generasi di Indonesia Jajahan Belanda

Di beberapa wilayah jajahan, perkebunan dan pertambangan besar didirikan di tanah yang dianggap “tak bertuan” atau “telantar” oleh negara kolonial. Untuk melancarkan operasi perkebunan dan pertambangan, negara kolonial mengandalkan tenaga kerja dari kalangan kaum tani di daerah dataran rendah padat penduduk di mana mereka biasanya dibebani pajak sangat berat.⁴ Orang muda dari golongan bawah kaum tani, terutama yang tak punya tanah sama sekali atau bertanah sangat sempit, menjadi sasaran utama untuk direkrut sebagai buruh perkebunan. Contohnya terjadi di Hindia Belanda, di mana banyak lelaki dan perempuan muda dari kalangan petani miskin direkrut sebagai kuli perkebunan di Sumatra; awalnya mereka didatangkan dari Tiongkok dan kemudian dari Jawa.

Pada permulaan abad XIX, masyarakat pedesaan Jawa sangat terstratifikasi, terutama berdasarkan perbedaan hak atas tanah dan tenaga kerja. Penggolongan ini cukup beragam dan kadang rumit, tetapi kita bisa menyebut tiga kelas masyarakat tani secara umum: *pertama*, mereka yang tidak punya hak atas tanah sama sekali, yang jumlahnya sangat besar, baik pekerja bebas yang mengembara maupun yang terikat sebagai suruhan di keluarga petani pemilik tanah; *kedua*, yang jumlahnya juga banyak, kaum tani yang punya hak atas tanah tetapi dibebani pajak dan kewajiban kerja berat yang melekat pada hak-hak tersebut—kelompok ini juga kerap terpilah lagi secara internal; dan *ketiga*, pamong desa, yang tidak hanya memiliki tanah pribadi, tetapi juga menguasai sebagian tanah desa sebagai gaji (bengkok) dan punya hak atas tenaga-kerja tanpa upah dari kaum tani untuk mengolah tanah tersebut.

Penguasaan tanah, khususnya di dataran rendah berpenduduk padat dengan lahan budidaya menetap, umumnya tidak didasarkan pada kepemilikan mutlak, melainkan dalam bentuk hak pakai/guna/garap yang diberikan oleh penguasa setempat sebagai sarana untuk menerapkan kerja wajib, baik untuk melayani masyarakat setempat maupun penguasa lebih tinggi. Hak pakai atas tanah ini biasanya digilir secara berkala di antara pengguna dan belum tentu bisa diwariskan; sayangnya, sumber-sumber yang ada tidak menjelaskan tentang bagaimana hak atas tanah diberikan atau tidak diberikan kepada kalangan muda dewasa. Di banyak daerah, ada kelompok yang disebut bujang, yang melakukan migrasi secara sementara (sirkuler) untuk mencari penghidupan; migrasi ini kadang menciptakan permukiman baru di kawasan-kawasan yang masih tersedia cukup tanah untuk digarap. Kaum tani sendiri juga sangat lazim melakukan migrasi, “dengan banyak alasan: menghindari kerja wajib, memperoleh kerja upahan, meloloskan diri dari gagal panen ..., membuka lahan baru, lari dari penindasan aparat setempat, atau mencari peluang baru di kota-kota kecil dan besar yang sedang berkembang” (Ricklefs 2007: 18).

Bagi laki-laki, pekerjaan untuk produksi pertanian maupun pemenuhan kewajiban kepada penguasa desa serta wilayah cenderung bersifat musiman dan tidak menentu; sebaliknya, perempuan umumnya terlibat dalam pekerjaan yang lebih ajek, baik di pertanian, kerajinan, industri kecil, maupun rumah tangga. Remaja anggota rumah tangga juga dilibatkan dalam berbagai pekerjaan:

Anak-anak usia dini, bahkan 5 atau 6 tahun, sudah ikut dalam kerja produktif atau setidaknya membebaskan orang dewasa dari kerja produktif, sehingga mereka sibuk dengan berbagai tugas sebagai tenaga kerja pertanian, menjaga tanaman dari serbuan burung dan hama lainnya, melakukan pekerjaan rumah tangga, hingga mengurus ternak. Begitu beranjak remaja, mereka terlibat sepenuhnya dalam siklus kerja pedesaan—membersihkan lahan, menyiapkan lahan,

memanen, mengangkut air, mencari kayu bakar, menenun. (Elson 1994: 10)

Pembagian kerja berbasis gender dan generasi ini berdampak pada pola kehidupan sehari-hari: lelaki dewasa memiliki waktu luang lebih banyak, yang mereka habiskan untuk “beristirahat, menghisap opium atau mengunyah sirih ..., bermain judi, menikmati hiburan seperti sabung ayam, pencak, sepak bola, adu gasing, dan layangan” (Elson 1994: 9–10).

Untuk mengeruk sumberdaya dan laba, proses penghisapan kolonial di Jawa awalnya mengandalkan tanam paksa (1830–1870); sejak 1870, bentuk eksploitasi ini beralih ke pemberlakuan pajak sangat tinggi terhadap bumiputra jajahan sekaligus pembukaan perkebunan tanaman dagang untuk ekspor; perkebunan ini mempekerjakan kuli upahan yang kebanyakan direkrut dari kalangan kaum tani tunakisma atau nyaris tunakisma. Sistem tanam paksa pada dasarnya diterapkan dengan memanfaatkan sepenuhnya hak-hak penguasa atas tenaga kerja dan hasil bumi kaum tani, untuk memenuhi tuntutan penguasa setempat maupun kolonial (Elson 1994: 303). Sebuah laporan dari tahun 1851 tentang satu daerah penghasil indigo merinci beban berat yang harus dipikul kaum tani akibat tanam paksa. Dalam setahun, mereka menghabiskan 176 hari untuk bekerja di ladang indigo dan mengangkut hasilnya, 76 hari bekerja di pabrik setempat, dan 60 hari kerja rodi (kerja wajib kepada penguasa lokal sebagai tebusan pajak, biasanya untuk pembangunan serta perbaikan jalan dan sarana lain). Jika ditotal, tiap lelaki dewasa menghabiskan 312 hari kerja tanpa upah setiap tahunnya (Elson 1994: 88)—harga sangat mahal yang harus dibayar kaum tani hanya untuk memperoleh hak menggarap tanah. Akibatnya, sumbangsih tenaga kerja perempuan dan anak-anak menjadi sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup keluarga. Batas usia antara anak-anak dan dewasa, terutama dalam hal kewajiban kerja baik untuk masyarakat maupun penguasa, umumnya sekitar usia 14 tahun; artinya, ketika berusia sekitar 14 tahun, seseorang dianggap cukup dewasa untuk melakoni kerja rodi.

Namun, banyak anak lelaki dan perempuan sudah menikah sebelum mencapai usia ini, disebabkan antara lain supaya orang tua dapat akses tenaga kerja muda; karena lelaki yang baru menikah biasanya diminta tinggal dan bekerja di rumah keluarga besar pihak mertua selama beberapa tahun pertama pernikahan.

Tidak seperti perkebunan di Jawa yang umumnya mengandalkan buruh dari desa-desa sekitar, perkebunan di Sumatra harus mendatangkan ratusan ribu kuli dari luar (awalnya dari Tiongkok selatan dan kemudian dari Jawa), menyediakan tempat tinggal berupa tangsi dan memberi makan, serta mengikat mereka dengan kontrak kerja (*indenture*)⁵. Di bawah skema “kuli kontrak”, pekerja diikat dengan ketentuan ketat, termasuk sanksi keras. Kuli yang ketahuan melarikan diri atau menolak bekerja bisa dihukum penjara, dikenai denda, dan/atau dipaksa memperpanjang kontrak. Perusahaan perkebunan awalnya lebih suka kuli dari Tionghoa karena dianggap rajin dan terampil, tetapi ongkosnya terlalu mahal. Memasuki abad XX, pencari kuli bergeser ke pedesaan Jawa. Agen-agen penyalur tenaga kerja pun bermunculan di Jawa; mereka menjanjikan pengiriman “wanita dan pria muda yang sehat dan kuat” dengan ongkos murah, “menjelajahi pedesaan Jawa, memikat para pemuda, si miskin, dan bahkan petani pemilik tanah, dengan cerita emas, tanah, dan upah besar. Banyak calon kuli yang tergiur dengan uang muka “cuma-cuma”, dan mereka baru menyadari belakangan bahwa uang muka itu harus dikembalikan melalui potongan upah bulanan” (Stoler 1985: 29). Kuli perempuan, yang jumlahnya sekitar 10 persen dari seluruh tenaga kerja, mendapat upah hanya setengah dari upah lelaki, dan karenanya kerap dipaksa menjadi pelacur bagi para kuli lelaki yang jumlahnya jauh lebih banyak. Mereka dimanfaatkan sebagai “umpan untuk memikat lelaki yang direkrut ke perkebunan di Deli dan penghiburan buat para lelaki itu agar betah di perkebunan” (Stoler 1985: 32).

Meski berbagai taktik digunakan untuk menjebak kuli kontrak dalam jeratan utang dan membujuk mereka untuk memperpanjang kon-

trak tiga tahunan, ribuan kuli tetap kembali ke Jawa saban tahunnya. Pada 1911, undang-undang baru mulai menghapus sistem kontrak *indenture* serta berbagai hukuman pidana, sehingga para kuli tidak bisa lagi dipaksa agar bertahan di perkebunan. Selama beberapa dekade terakhir kekuasaan kolonial, sasaran perekrutan tenaga kerja bergeser ke keluarga muda—tujuannya demi membangun angkatan kerja yang mampu mereproduksi diri mereka sendiri.

Di Jawa awal abad XX, anak-anak dan pemuda desa banyak terjun ke pekerjaan di pertanian kecil, perkebunan, dan nonpertanian. Di industri kecil dan kerajinan pedesaan, penghasilan yang sangat rendah, jauh di bawah upah memburuh tani, mengisyaratkan bahwa semua anggota keluarga harus membanting tulang demi mencukupi kebutuhan keluarga untuk bertahan hidup. Misalnya, industri topi pandan (anyaman tangan) di Tangerang, Jawa Barat, yang menghasilkan sekitar sepuluh juta topi setiap tahun untuk diekspor, mengandalkan buruh dari keluarga petani miskin dan tunakisma di desa-desa sekitar: “Di rumah tangga yang tidak memiliki sumber nafkah lain selain menganyam topi, semua anggotanya, termasuk anak-anak yang masih sangat kecil dan belum lepas dari pengasuhan ibu mereka, harus membantu anggota keluarga lain yang sudah bekerja bak budak demi bisa makan sehari-hari” (Pleyte 1911: 59).

Pada tahun-tahun awal abad XX, kesempatan pendidikan bagi bumi-putra masih sangat terbatas. Hanya satu dari dua ratus anak Jawa yang bisa duduk di bangku sekolah apa pun. Dengan dimulainya “politik etis” pada 1901 dan dibangunnya sekolah-sekolah desa sejak 1907, sebagian anak desa mulai punya prospek pendidikan. Namun, hingga sensus penduduk 1930, hanya sekitar sepertiga anak-anak Jawa yang bersekolah, itu pun hanya selama tiga tahun dengan waktu belajar dua setengah jam setiap harinya. Di Sumatra, perusahaan perkebunan berupaya, meski hanya setengah hati, membangun sekolah untuk anak-anak kuli, tetapi anak-anak lelaki yang sempat belajar membaca dan menulis kerap me-

milih meninggalkan perkebunan dan mencari berbagai pekerjaan lain, terutama kantor, di tempat-tempat lain.

Setelah ILO mengeluarkan ketetapan/konvensi pertama tentang “pekerja anak” pada 1919,⁶ pemerintah Belanda, sebagai anggota Liga Bangsa-Bangsa, menyadari kewajibannya untuk menerapkan konvensi ini di tanah jajahannya. Pada 1925, Volksraad⁷ mengesahkan ordonansi yang mengatur pekerja anak serta ketentuan kerja malam bagi perempuan di pabrik. Namun, pengendalian—khususnya larangan—pekerja anak tidak serta-merta menjauhkan mereka dari dunia kerja. Pada 1928, setelah mengunjungi beberapa desa petani tembakau, Kontrolir Tenaga Kerja Raden Iskandar menyimpulkan, meski anak-anak dilarang bekerja di gudang tembakau, bukan berarti mereka akan menganggur.

Anak-anak bisa momong adik-adik saat ibu mereka bekerja, karena kalau tidak begitu, ibu mereka harus membayar orang untuk momong; anak-anak perempuan bisa menanak nasi dan memasak sayur, membersihkan rumah dan halaman, membawa makanan untuk orang tua [di ladang], mencari kayu bakar (kalau tidak, mereka harus beli), meramban sayuran untuk dimasak; anak-anak lelaki mengangon hewan atau bebek, mengarit untuk pakan ternak, membantu ayah di semua tahap budidaya padi dan tembakau; banyak anak bisa mendapatkan uang dengan berjualan jajanan, menjadi pelayan di warung, atau menjadi pelayan di rumah tetangga. (dalam de Kat Angelino 1929: 140)

Pengamatan ini mencerminkan stereotipe menarik atas pembagian peran berdasarkan gender di kalangan muda, sekaligus menegaskan bahwa peraturan kolonial tentang pekerja anak bukan dimaksudkan untuk menghindarkan mereka dari dunia kerja, atau dari produksi pertanian, atau bahkan dari mencari uang, dan tentunya bukan untuk memaksa mereka bersekolah—satu poin yang hampir tidak disinggung dalam

laporan de Kat Angelino—melainkan untuk menjauhkan mereka dari pekerjaan sektor formal dan pabrik-pabrik besar pengolahan hasil bumi.

TRANSFORMASI SOSIALIS SERTA PASCASOSIALIS: TIONGKOK & UNI SOVIET

Pada abad XX, Rusia, Tiongkok, dan berbagai negara lain mengalami revolusi sosialis yang membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk struktur akses atas sumberdaya agraria serta penghidupan, rezim tenaga kerja, dan hubungan antargenerasi.⁸ Sebelum mengalami revolusi, struktur agraria di Rusia (sebelum Perang Dunia I) dan Tiongkok (sebelum Perang Dunia II) memiliki banyak kesamaan dengan struktur agraria pedesaan miskin di Eropa dan Asia lainnya. Sebagian besar penduduk hidup dari pertanian dalam masyarakat tani yang terpilah menjadi petani besar dan kecil (baik sebagai pemilik atau penggarap tanah) serta buruh tunakisma. Anak-anak dan pemuda tumbuh dalam rumah tangga patriarkis, di mana kerja mereka memainkan peran penting bagi rumah tangga untuk bertahan hidup atau menggapai kemakmuran (sebagaimana akan kita lihat dalam modelnya Chayanov tentang daur perkembangan rumah tangga tani di Rusia, yang dibahas lebih rinci di Bab 3).

Menjelang akhir abad XIX, banyak pemuda desa Rusia mulai memasuki kerja migran. Ribuan lelaki muda meninggalkan kampung halaman dalam waktu cukup lama untuk bekerja, fenomena yang diikuti kalangan perempuan muda pada awal abad XX. Persinggungan mereka dengan pekerjaan pabrik dan kehidupan perkotaan telah mengubah mereka menjadi lebih percaya diri ketika pulang kampung untuk menghadiri festival musim dingin. Festival ini “mencerminkan sekaligus mempertanyakan (pada penghujung abad) perbedaan sosial, kekayaan, dan status di masyarakat desa,” sebagaimana bisa dirasakan melalui “lagu-lagu satir, yang banyak diciptakan oleh perempuan muda dari kalangan kaum tani, yang menyindir kondisi ekonomi desa, korupsi pejabat

setempat, *kulaki* (kaum kaya), dan khususnya *khutorianine*, petani yang terus memperluas tanahnya dan memilih keluar dari komune seiring reforma agraria Stolypin pada 1905–1906” (Frank 1991: 716–718).

Di Tiongkok akhir 1920-an, saat perang saudara berkecamuk, kelas pekerja tunakisma tidak begitu banyak, begitu pula kelas tuan tanah besar. Sebagian besar penduduk pedesaan ialah kelas kaum tani yang terdiferensiasi; mereka umumnya menggarap lahan sempit, sekitar separuhnya memiliki lahan sendiri, sementara sisanya menjadi penyewa atau setengah pemilik/setengah penyewa di lahan milik tuan tanah kecil setempat atau absente. Baik di Rusia maupun di Tiongkok, luas tanah garapan berbanding lurus dengan besaran keluarga, seperti ditemukan di banyak tempat lainnya (dirinci di Bab 3). Perhatikan hasil survei di Ting Hsien pada 1920-an, yang mengelompokkan rumah tangga ke dalam tiga kategori berdasarkan luas tanah garapan (Tabel 2.1).

TABEL 2.1
Luas Lahan dan Besaran Keluarga,
Ting Hsien, akhir 1920-an

LUASAN LAHAN	PERSENTASE RUMAH TANGGA	RATA-RATA BESARAN RUMAH TANGGA
Di bawah 10 <i>mu</i>	33,7	4,7
10–29 <i>mu</i>	32,4	6,4
30 <i>mu</i> dan di atasnya	33,7	9,6
Rata-rata		6,9

Catatan: 1 *mu* dalam satuan Peking = sekitar 600 meter persegi (0,06 hektar), atau 0,15 ekar.

Sumber: Tawney (1966 [1932]: 72n1).

Hampir dua pertiga rumah tangga petani tergolong keluarga besar, yang mencakup anggota selain keluarga inti (suami-istri-anak). Dalam masyarakat patrilineal ini, perempuan tidak mewarisi tanah, sementara

lelaki muda yang sudah menikah umumnya bertahan dalam rumah tangga tiga generasi (Buck 1930: Bab 9). Tanah keluarga tetap dikuasai si patriark selagi dia masih hidup, sementara anak-anak yang sudah dewasa tidak punya wewenang penting di keluarga, sekalipun sudah menikah; mereka tetap menjadi bawahan orang tua (untuk perempuan, menjadi bawahan mertua), khususnya ayah, sampai si patriark mati atau terlalu lemah sehingga harus menyerahkan kekuasaannya (Naftali 2016: 23–24).

Baik di Rusia setelah 1918 maupun di Tiongkok setelah 1949, rezim baru revolusioner segera memperhatikan pendidikan serta cara-cara baru reproduksi generasi muda. Di Rusia, rezim yang baru terbentuk membangun sekolah-sekolah baru serta menyelenggarakan program kesehatan anak, menghapus hukuman fisik, dan melarang anak di bawah 14 tahun bekerja. Ideologi komunis berpendirian bahwa permasalahan seputar kanak-kanak dan kepemudaan terjadi karena cacatnya penataan masyarakat, kemiskinan, dan ketimpangan kelas, dan bahwa negara harus berperan aktif dalam mengasuh generasi baru. Kurikulum sekolah pun memasukkan bekerja di kebun, bengkel, atau pabrik milik sekolah sebagai bagian dari pembelajaran.

Sekolah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan produktif ... dan kelompok pemuda mengarahkan anak-anak untuk memanen gandum, membantu merawat veteran, membuat mainan, dan seabrek kegiatan lain. Tujuannya ialah membantu negara—bukan ekonomi keluarga—tanpa mengganggu tujuan utama pendidikan dasar, sambil mengajarkan anak-anak tentang keterampilan yang berguna maupun kemuliaan bekerja itu sendiri. (Stearns 2006: 87)

Seperti di negara-negara sosialis lainnya, di Rusia, pengerahan pekerja anak dan pemuda ke dalam kerja produktif dipandang sebagai bagian dari pendidikan, bukan sebagai penentangan terhadap pendidikan itu sendiri. Pandangan ini—yang didukung kuat oleh penelitian masa kini—bertentangan tidak hanya dengan larangan pekerja anak yang

ditetapkan dalam Konvensi ILO No. 5 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja, tetapi juga dengan kampanye para aktivis ber-slogan “bebaskan anak dari kerja” (Bourdillon *et al.* 2010).

Dalam proyek Bolshevik, “kaum muda harus dijadikan komunis di seluruh aspek kehidupan sehari-hari—bekerja, mengisi waktu luang, hubungan gender, hingga kehidupan keluarga,” tetapi cita-cita ini masih sangat jauh dengan kenyataan kaum muda (Gorsuch 2000: 1–2). Komsomol (Liga Pemuda Komunis), yang dibentuk pada 1918, punya anggota dua kali lipat dari jumlah anggota Partai Komunis pada akhir 1920-an. Pada 1926, hampir 60 persen anggotanya diisi pemuda tani, dan sebagian pimpinan Komsomol perkotaan mengkhawatirkan perluasan anggota untuk merangkul pemuda tani maupun pekerja. Meski begitu, dari seluruh pemuda tani, hanya 6 persen yang bergabung Komsomol, sementara separuh lebih dari keseluruhan pemuda kelas-pekerja menjadi anggotanya, mengingat jumlah absolut kaum tani jauh lebih besar dibandingkan kelas-pekerja (Gorsuch 2000: 42–48).

Memang ada perubahan hukum dan retorika seputar kesetaraan gender dalam perekonomian, perkawinan, serta hak-hak sipil, tetapi budaya pembedaan berbasis gender saat itu masih bercokol, sehingga menghambat partisipasi aktif perempuan muda dalam kegiatan Komsomol. Sebagian orang tua, khususnya kalangan kaum tani, melarang anak perempuan mereka bergabung Komsomol karena dianggap menjauhkan anak perempuan dari kendali orang tua (Gorsuch 2000: 97–98). Fedor Belov, yang berusia 13 tahun saat kelaparan massal pascakolektivisasi selama 1932–1933, memberi pandangan sekilas seputar perubahan kondisi di sebuah *kolkhoz* (komune Soviet) yang cukup berhasil di Ukraina Barat (Kotak 2.1).

KOTAK 2.1

Sebuah Komune di Ukraina Barat

Sebelum revolusi 1918, desa ini dikangkangi oleh seorang tuan tanah yang memiliki 10.000 hektar tanah pertanian, 2.000 hektar hutan, 300 lembu, 200 kuda, lebih dari 100 sapi, sebuah pabrik batu bata, satu pabrik kayu, dan beberapa kilang gandum. Setelah kecamuk selama 1914–1918, revolusi Oktober berikut perang sipil yang menyertainya, tanah-tanah itu didistribusi; masing-masing rumah tangga mendapatkan rata-rata 6–7 hektar. Setelah itu, kehidupan jadi lebih baik selama beberapa tahun; rumah tangga menghasilkan surplus gandum, dan kaum tani bisa mengembangkan usaha taninya dengan bangunan baru, peralatan pertanian, serta menambah sejumlah sapi, kuda, sarang lebah, kincir air, dan kincir angin. Sejak 1928, Dewan Rakyat Miskin dan anggota Komsomol memulai proses “dekulakisasi”—pengusiran petani kaya dan pembagian tanah, harta, serta timbunan gandum mereka kepada komune—di mana para ayah dan anak-anak lelaki kerap bergabung dalam satu barisan aksi. Usaha tani kolektif pertama dibangun, dan saat kelaparan parah melanda, mayoritas kaum tani sudah menjadi anggota kolektif.

Di dalam kolektif, sebagian besar usaha tani dikelola dan dikerjakan secara bersama, tetapi masing-masing rumah tangga tani juga masih menguasai seekor kuda, sepetak tanah kecil, dan bisa juga beberapa hewan ternak. Sebagian penghasilan mereka bersumber dari tanah milik sendiri, dan sebagiannya dari kerja wajib di *kolkhoz*. Tiap orang dewasa dari usia 17 tahun diminta bekerja untuk kolektif selama 130 hari dalam setahun, sementara anak-anak berusia 12–16 tahun selama 50 hari. *Kolkhoz* juga harus menyediakan pekerja muda bugar dalam jumlah tertentu

untuk industri, juga sejumlah anak lelaki maupun perempuan untuk dididik di Tempat Latihan Pabrik (FZO) dan Sekolah Keturuan (RU). Nasib rumah tangga—apakah akan makmur atau jatuh miskin—bergantung pada ketersediaan tenaga kerja muda bugar di rumah tangga itu sendiri, baik untuk memenuhi kewajiban kerja di komune maupun untuk bekerja di lahan dan ternak milik keluarga. Karena sepertiga anak lelaki dan dua pertiga anak perempuan berusia 10–16 tahun pada pergi bersekolah, banyak rumah tangga mengalami kekurangan tenaga kerja. Pada tahun-tahun pemulihan setelah kelaparan, sebuah rumah tangga terbi-lang “tangguh” kalau memiliki setidaknya dua anggota yang bugar, seekor sapi, satu atau dua ekor babi, 15–20 ekor ayam, beberapa kawanan lebah, dan sepetak kebun pekarangan seluas setengah hektar lebih sedikit. Rumah tangga ini bisa menjual sebagian hasil panennya di pasar, dan bahkan bisa membeli barang-barang mewah seperti radio, sepeda, atau gramofon. Sebaliknya, sebuah rumah tangga “di bawah rata-rata” biasanya tidak punya seorang pun lelaki dewasa atau muda bugar, dan hanya memiliki sepetak kecil kebun pekarangan di samping rumah serta beberapa ekor ayam saja. Seorang perempuan anggota rumah tangga semacam ini bilang kepada Belov:

Jadi, kalau kau ingin tahu bagaimana aku hidup, lihat saja diriku beserta empat anakku, maka semuanya akan tampak jelas. Suamiku mati saat perang. Saat itu aku punya seorang anak lelaki yang baru saja mulai bisa membantuku; mereka telah merenggutnya untuk dibawa ke Sekolah Bengkel Pabrik dan meninggalkanku bersama empat mulut yang harus diberi makan, empat anak yang harus diberi pakaian dan di-

sekolahkan. ... Kemarin serombongan komite datang ke rumah untuk menarik pajak. ... Aku bilang ke mereka untuk membawa saja anak-anakku, alih-alih pajak, tetapi mereka menolaknya. (Belov 1956: 178)

Setelah 1949, rezim baru Tiongkok bertekad untuk membangun sebuah masyarakat yang berbeda, tidak seperti model Barat maupun tradisi Konfusius. Kendali patriarkis serta budaya patuh kepada orang tua dianggap sebagai sumber banyak masalah sosial. Bahkan, pada 1930-an, di daerah-daerah yang dikuasai Partai Komunis Tiongkok, undang-undang pertanahan dan pernikahan diberlakukan untuk memberi perempuan miskin kemandirian ekonomi, hak-hak setara atas tanah, dan kebebasan memilih pasangan.

Reforma pertanahan pada akhir 1940-an dan awal 1950-an membagikan sertifikat tanah kepada perempuan dan laki-laki, sementara perempuan muda berperan aktif mengampanyekan program ini. Namun, sertifikat atas nama perempuan kerap diserahkan ke lelaki kepala keluarga. “Karena itu, kebijakan mendasar tentang gender dan tanah umumnya tidak terlaksana, atau terlaksana sebagian tanpa mengganggu hubungan hierarkis di rumah tangga” (Jacobs 2010: 84–85). Pola bertempat tinggal tetap patrilokal⁹, dan perempuan terjun dalam tim-tim produksi setelah menikah. Di bawah kolektivisasi (1952–1978), penghasilan seseorang ditentukan berdasarkan dua hal sekaligus, yakni poin-kerja yang mereka peroleh masing-masing dan keseluruhan hasil produksi-bersama. Namun, berbagai kajian menyimpulkan bahwa perempuan memperoleh penghasilan 20–30 persen lebih sedikit dibandingkan laki-laki, akibat penilaian berdasarkan gender untuk beragam kerja. Meski ketimpangan terus berlanjut, sistem poin-kerja memberi beberapa keuntungan bagi perempuan pekerja baik dewasa maupun remaja, serta membuat sumbangan kerja mereka lebih tampak (Jacobs 2010: 91).

Program pendidikan sangat menekankan agar pengaruh keluarga memudar. Negara menjalankan proyek besar-besaran penyediaan sekolah (termasuk pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak), dan juga pengerahan kelompok pemuda sebagai sumber penting pasokan tenaga kerja baik untuk pertanian serta usaha-usaha kolektif lainnya maupun untuk kerja-kerja politik (Stearns 2006: 89–90). Namun, selama Revolusi Kebudayaan akhir 1960-an, pendidikan pada jenjang menengah dan tinggi benar-benar terganggu (Zhou dan Hou 1999: 12–16).

Baik di Rusia maupun di Tiongkok, reformasi dan kebijakan sosialis berhasil melemahkan struktur patriarkis di masyarakat pedesaan, selain menyediakan pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan bagi generasi muda. Di sekolah, anak-anak memadukan belajar-sambil-bekerja, dalam bentuk-bentuk kerja yang bersifat kolektif. Meski pertanian kolektif sangat tidak efisien dan mengakibatkan kelaparan di kedua negara ini, kolektivisasi tanah berhasil memecahkan kelangungan ketimpangan antargenerasi yang dilanggengkan pewarisan tanah.

Dalam tiga dekade terakhir, Rusia, Tiongkok, dan negara-negara bekas sosialis lainnya telah menempuh jalur pascasosialis yang berlainan. Di Tiongkok dan Vietnam, misalnya, peralihan pertanian dari kolektif ke sistem berbasis rumah tangga, dengan penguasaan tanah berdasarkan kepemilikan kolektif dan hak pakai perseorangan yang digilir secara berkala, telah menghasilkan masyarakat tani yang cukup egaliter. Tiap anggota rumah tangga diberi alokasi tanah, yang kemudian digabung menjadi bagian rumah tangganya. Alokasi ini disesuaikan-ulang setiap beberapa tahun guna menjaga keberlanjutan penguasaan tanah secara adil dan merata. Namun, di Tiongkok, dengan diberlakukannya Undang-Undang Administrasi Pertanahan pada 1998, masa berlaku hak pakai diperpanjang dari lima belas menjadi tiga puluh tahun; walaupun diberlakukan tanpa mempertimbangkan hubungan gender, kekakuan baru ini justru merugikan perempuan dan meningkatkan jumlah perempuan tunakisma, khususnya di kalangan muda yang baru menikah

dan pindah ke desa suami sehingga sering kali harus menunggu puluhan tahun untuk mendapatkan jatah tanah (Jacobs 2010: 94, 101).

Sebagaimana akan dibahas di Bab 3, desa-desa dan rumah tangga di pedesaan Tiongkok tampaknya mengarah pada kondisi “bolong” karena para perempuan dan lelaki muda dewasa berbondong-bondong bermigrasi ke kota, meninggalkan rumah-tangga yang hanya berisi dua generasi yaitu eyang dan cucu di desa. Perubahan bentuk-bentuk keluarga—meningkatkan jumlah rumah tangga keluarga inti dan rumah tangga “bolong”—telah memengaruhi relasi kewenangan antara anak, orang tua, dan tetua. Sebagaimana dicatat Susie Jacobs (2010: 99):

Wewenang ayah atas anak lelaki makin melemah ... akibat pembeblahan rumah tangga. [Hubungan hierarkis antara ibu mertua dan menantu perempuan] masih terasa, tetapi watak hubungan ini berlainan dalam berbagai situasi keluarga inti. Menantu perempuan tetap diharapkan membantu pekerjaan ibu mertua, tetapi hubungan mereka kini lebih bersifat timbal balik, dan ibu mertua juga bisa diminta membantu. Bantuan utama yang diberikan biasanya seputar pengasuhan anak, meski terkadang bisa juga untuk kerja-kerja lain seperti menanam.

Sebaliknya, di banyak daerah Rusia, pertanian skala kecil tidak menjadi bentuk utama produksi pertanian. Janji transformasi ekonomi yang pesat serta penciptaan “kapitalisme rakyat” melalui privatisasi ternyata ilusi belaka. Meski tatanan hukum bekas usaha-usaha kolektif telah berubah, pertanian skala besar masih tetap lazim (Vorbrugg 2019: 7). Lama setelah pembubaran kolektivisasi, “pertanian masih didominasi para penerus partikelir dari *kolkhoz* dan *sovkhoz*. Usaha-usaha pertanian besar ini ... menguasai sebagian besar tanah dan menjadi produsen komersial utama” (Visser 2010: 277). Banyak perusahaan pertanian terbesar awalnya merupakan perusahaan pengolahan makanan atau perdagangan;

perusahaan-perusahaan ini kemudian membeli tanah dan aset lain dari bekas usaha kolektif yang bangkrut, demi mengamankan basis pasokan mereka (Vorbrugg 2019). Pada awal 2000-an, panen pertanian kecil hanya menyumbang kurang dari 5 persen dari seluruh produksi pertanian. Kebijakan agraria lebih difokuskan pada pertanian korporat skala besar, dan diperkirakan “pemusatan kepemilikan properti di tangan kaum elite tak mungkin ... bakal segera melemah” (Visser 2010: 287). Para penggarap petak-petak tanah berbasis rumah tangga berlanjut dalam hubungan simbiosis yang dipaksakan dengan perusahaan pertanian besar; pekerjaan berupah murah di perusahaan besar tetap dilakoni demi memperoleh subsidi input serta berbagai layanan sosial (Visser 2010: 282–283). Keluhan mereka terhadap pertanian korporat skala besar utamanya menyangkut beberapa hal, yakni kegagalan perusahaan memenuhi janji untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi, menurunnya nilai aset dan tenaga kerja pertanian, dan rusaknya kondisi kelembagaan serta infrastruktur untuk membangkitkan pertanian (Vorbrugg 2019). Kondisi pedesaan yang terpuruk ini, ditambah meningkatnya konsumerisme, telah mendorong migrasi besar-besaran pemuda desa untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik di perkotaan.

Bagi banyak pemuda, merantau ke kota menjadi pilihan menarik, tetapi tidak selalu mudah diwujudkan, khususnya bagi mereka yang harus tinggal karena terikat dengan kampung halaman beserta orang-orangnya, tanggung jawab pada orang tua, atau minimnya peluang di tempat lain. ... Pertanian mitra perusahaan, dukungan perusahaan, dan tanah sewaan bisa menjadi sumber penghidupan minimum untuk ekonomi beranggaran rendah, tetapi bukan di kota. Tidak jarang, mereka yang gagal mapan di kota akhirnya kembali ke desa. Singkatnya, orang-orang tidak mudah lepas begitu saja dari pertanian serta ekonomi-politik pedesaan yang nisbi merugikan, hanya dengan meninggalkan desa. (Vorbrugg 2019: 10)

Hal ini menunjukkan bahwa tanah di desa serta ikatan keluarga tetap penting bagi generasi muda, sekalipun kehidupan pedesaan mengalami kemunduran; setidaknya desa tetap bisa menjadi tempat bersandar ketika tidak ada pilihan lain.

Perubahan pesat di negara-negara yang mengalami transformasi sosialis, serta pembalikan sebagiannya selama transisi pascasosialis, menunjukkan betapa pentingnya kebijakan negara dan kekuatan ekonomi serta politik yang lebih besar dalam membentuk perjalanan hidup generasi muda dan hubungan antargenerasi.

PERAMPASAN TANAH & PERTANIAN KORPORAT

Dari penganugerahan tanah secara besar-besaran di Mesir kuno dan Kekaisaran Romawi hingga pemagaran tanah komunal (*enclosure*) di Eropa, perkebunan kolonial, dan yang terbaru perampasan tanah oleh korporasi, rezim-rezim yang berkuasa sering kali membiarkan, mendukung, atau bahkan melakukan sendiri pengusuran petani kecil dan orang-orang yang hidup dari hutan. Semua ini memunculkan penguasaan tanah skala besar yang dikerjakan oleh budak atau hamba suruhan pada era pra-kapitalis dan oleh buruh upahan atau petani kontrak di bawah sistem kapitalisme. Karl Marx, yang menulis tentang pemagaran/pengaveling-an tanah komunal di Inggris, mencatat bahwa “perampasan tanah secara besar-besaran¹⁰ ... merupakan langkah awal untuk menciptakan ruang bagi pertanian besar-besaran. Karena itu, proses subversi pertanian ini akan mengemuka sebagai revolusi politik” (1977 [1867]: 470).

Pengusuran tanah petani kecil untuk pertanian, perkebunan, atau padang penggembalaan berskala besar ada kalanya menyisihkan jatah lahan sempit bagi petani kecil, tetapi umumnya tidak cukup untuk sekadar bertahan hidup. Perampasan ini tentunya juga tidak memberi bekal sumberdaya agraria bagi generasi mendatang, memaksa mereka yang tergusur, terutama generasi muda, ke dalam kerja upahan, baik di daerah setempat atau dengan migrasi massal. Proses inilah yang disebut “akumulasi primitif”, di mana bangunan sosial nonkapitalistis diubah

menjadi kapitalis melalui pemisahan pekerja dari akses langsung atas sarana produksi serta berubahnya tanah menjadi milik pribadi dan kapital.

Beberapa penelitian tentang dimensi gender dalam pengambilalihan tanah skala besar sudah bermunculan dalam beberapa tahun belakangan,¹¹ tetapi jumlahnya terbilang jauh lebih sedikit dibanding penelitian tentang aspek-aspek lain dalam perampasan tanah. Yang lebih sedikit lagi diperhatikan—baik oleh peneliti maupun aktivis—terkait pengalaman masyarakat pedesaan dengan penggusuran dan pertanian korporat ialah perbedaan dan tegangan antargenerasi.¹² Mari kita telaah satu kasus masa lalu dan satu kasus masa kini: pembukaan lahan besar-besaran di dataran tinggi Skotlandia dan perampasan tanah untuk perluasan perkebunan sawit di Indonesia.

Pemagaran Tanah Komunal di Eropa: Kasus Dataran Tinggi Skotlandia

Di Eropa akhir Abad Pertengahan, sekitar akhir abad XV dan awal abad XVI, berlangsung babak awal penindasan terhadap hak-hak purba kaum tani atas penggunaan dan penguasaan tanah bersama. Ketika mencapai puncaknya pada abad XV, XVIII, dan awal abad XIX, “pemagaran” ini dibarengi dengan penghapusan hak-hak kaum tani atas padang penggembalaan bersama serta hak-hak kolektif lainnya; sebagai gantinya, dimapankanlah hak untuk mematok dan menggarap tanah (dengan disewakan atau buruh upahan), sehingga pemilikan tanah pribadi meningkat drastis (Mazoyer dan Roudart 2012: 337).

Pemagaran tanah dan penggusuran di Skotlandia pada abad XVIII dan awal XIX menjadi satu contoh nyata tentang tahap akhir proses ini. Di dataran tinggi dan pulau-pulau Skotlandia, terdapat banyak sekali *crofter* atau penyewa-penggarap tanah-tanah sempit yang bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Mereka menyewa kepada petani-penyewa lebih besar dan lebih makmur. Para petani kecil yang miskin ini ialah korban penggusuran sebelumnya, di

mana para tuan tanah telah menghapuskan akses bersama atas padang penggembalaan dan tanah-tanah subur; dalam banyak kasus, mereka juga memaksa petani di pedalaman untuk beralih menjadi *crofter* di daerah pesisir, menggantikan tanah pertanian para petani itu dengan peternakan atau penggembalaan sapi atau domba yang dikelola secara ekstensif, atau taman luas yang dipenuhi rusa sebagai medan berburu bagi kaum elite bangsawan atau kapitalis.

Penggusuran yang mencapai puncaknya pada 1820-an ini meninggalkan banyak *crofter* berusia tua yang tidak bisa berbuat banyak menghadapi hantaman bertubi-tubi terhadap tanah dan sumber-sumber penghidupan mereka, tetapi tetap bertahan atau memang tidak mampu henggang. Namun, generasi muda tidak mau menyerah dengan kondisi serbasusah ini; mereka pun terdorong—dan kadang terpaksa—mencari kerja di perkotaan di bagian selatan Skotlandia atau Amerika Utara. Dan di akhir kisah perampasan ini, para *crofter* serta-merta diusir dari rumah dan tanah mereka, yang kemudian dijadikan padang penggembalaan (Davidson 2004; Devine 2006).

Pada 1883, Komisi Napier ditugaskan oleh parlemen Inggris untuk menyelidiki kondisi para *crofter* di dataran tinggi dan pulau-pulau Skotlandia. Penyelidikan ini menghasilkan lebih dari 3.300 halaman catatan verbatim berisi testimoni berbagai pelaku dan pengamat, baik itu tuan tanah, petani penyewa tanah luas, pendeta dan guru sekolah, serta para petani miskin dan buruh tunakisma. Seorang petani berusia 73 tahun, Duncan McDonald dari Argyll, di dataran tinggi Skotlandia, mengingat kisah perampasan dan pengusiran besar-besaran yang dialami komunitasnya, yang hanya menyisakan segelintir penggembala dan seorang manajer lahan:

Saat saya masih muda, ada seorang tuan tanah yang selalu disanjung karena sikapnya [sangat baik] kepada penyewa maupun orang miskin. Ketika lelaki ini mati, tanahnya dibeli oleh tuan tanah lain yang berjanji akan bersikap baik, tapi ternyata dia bersikap baik sebentar

saja. Pertama-tama dia merampas tanah gambut kami. Lantas, se-pertinya dia berniat menempatkan hewan ternak miliknya sendiri di seluruh bentang tanah ... yang dulunya dihuni 400 atau 500 jiwa; dan kini hanya tinggal tiga penggembala dan seorang manajer. ... Dia mengusir kami satu per satu, dan dia sendiri yang mengumpulkan ternak yang ditempatkan di tiap tanah yang dikosongkan. ... Ketika seluruh tanah dipenuhi rumput alih-alih tanaman budidaya, dia kemudian menjadikannya tempat ternak, dan sejak itu semua orang pergi. Mereka yang punya sarana untuk ke Amerika, pergilah ke Amerika, dan sebagian lain pergi ke kota-kota besar. Mereka yang paling fakir menjadi buruh tuan tanah itu dengan upah 1 *shilling* per hari untuk laki-laki, dan 6 *penny* untuk perempuan.¹³ ... Jika mereka menolak bekerja dengan ketentuan ini, lelaki itu mengancam akan merobohkan rumah mereka. (Wawancara pada 13/8/1883, Komisi Napier 1884, Vol. III: 2324–2325)

Tanah-tanah sempit yang dijatahkan untuk *crofter* yang masih bertahan sengaja dibuat sempit supaya menghasilkan hanya sebagian sumber penghidupan paraenggarapnya, sehingga mereka harus memadukan penggarapan lahan dengan menangkap ikan, mencari rumput laut, atau berbagai kerja upahan, agar terhindar dari kemelaratan. Mereka kerap ditempatkan di daerah yang tanahnya sangat tandus dan gersang. Seperti halnya banyak perampasan tanah di berbagai tempat di dunia sekarang ini, masalah utama yang dikeluhkan para petani kecil ini ialah merosotnya mutu makanan mereka secara drastis, karena tanah mereka tidak bisa lagi memberi mereka makan.

- Apakah sekarang terjadi kelangkaan susu yang jauh lebih parah ketimbang di masa lalu?
- Ya, dan juga kelangkaan mentega. Dibandingkan dulu, kini kami benar-benar kehabisan mentega.

- Apakah Anda terpaksa memberi anak-anak Anda teh sebagai ganti susu?
- Ya. (John Matheson, petani, usia 68, Isle of Lewis, wawancara 6/6/1883, Komisi Napier 1884 Vol. II: 976)

Hal lain yang ingin aku sampaikan Dulu ayah dan kakekku hidup dengan susu dan mentega, juga daging dan gandum rutin, sedangkan aku hidup dari gandum saja, air panas, dan gula. Ayahku cuma punya tanah sempit dengan sewa hanya £5, tetapi bukan hanya kami tidak pernah perlu belanja makanan, bahkan kami susah untuk menghabiskan hasilnya. (Malcolm McPhail, peladang, 65 tahun, Isle of Lewis, wawancara 6 Juni 1883, Komisi Napier 1884, Vol. II: 963)

Tidak ada tanah untuk pasangan pemuda yang ingin menikah, sehingga mereka harus hengkang.

Di desa ini banyak sekali lelaki muda, baik yang bujang maupun yang sudah menikah, semuanya nelayan dan menjadi cadangan angkatan laut, yang terpaksa jadi beban orang tua mereka, karena tidak bisa mendapatkan tanah garapan, bahkan sepetak pun untuk bangun rumah. Misalnya, ada seorang suami yang telah membangun sebuah gubuk kecil di petak tanah ayahnya; ayahnya langsung diancam oleh mandor, jika anaknya tidak segera hengkang maka dia (si ayah) akan segera diusir paksa. Ini hanyalah satu contoh dari banyak sekali kasus, dan semua ini gara-gara si mandor yang memagari orang-orang dari semua sisi, agar tersedia tanah luas untuk dombanya. (Angus Patterson, petani, 58 tahun, Isle of Lewis, wawancara 5/6/1883, Komisi Napier 1884, Vol. II: 957)

Gender & Generasi dalam Perampasan Tanah Masa Kini: Perluasan Perkebunan Sawit di Indonesia

Di berbagai belahan dunia, dampak dan respons terhadap pengambilalihan tanah oleh perusahaan melibatkan dimensi gender dan generasi. Kajian yang tersedia biasanya menunjukkan dampak negatif secara umum terhadap perempuan karena ketidaksetaraan dan ketimpangan kekuasaan dalam hal akses atas sumberdaya, suara, dan kerentanan lebih umum (misalnya, Julia dan White 2012; Tsikata dan Yaro 2014; Levien 2018). Hal serupa terjadi pada skema pertanian kontrak skala besar, seperti perusahaan perkebunan sawit yang meluas di berbagai belahan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Misalnya, di Kalimantan Barat, tanah adat (di mana perempuan dulunya punya hak guna) pertama-tama diklaim oleh negara, lalu diberikan kepada perusahaan perkebunan dan sebagiannya dibagikan kepada rumah tangga petani masing-masing seluas 2 hektar untuk ditanami sawit dengan skema kontrak; meski tidak ada ketentuan resmi tentang siapa yang harus mendapat tanah atau siapa yang harus menjadi kepala rumah tangga, kenyataannya hanya lelaki “kepala keluarga” yang terdaftar sebagai penerima tanah (Julia dan White 2012).

Tania Li telah mengkaji dampak perluasan perkebunan sawit di Indonesia terhadap dinamika pengusuran yang memuat hubungan antar-generasi serta berjangka panjang dan juga masalah terkait, yaitu terputusnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Li mencatat bahwa “pengalaman generasi yang dilahirkan dalam kondisi kelangkaan tanah berbeda dengan generasi yang hidup di sekitar perkebunan ketika peluang baru mulai terbuka.” Perluasan perkebunan biasanya meninggalkan pemilik tanah di tempat mereka, tetapi terdesak ke enklave-enklave tempat petani—mirip *crofter* di Skotlandia—masih bisa bercocok tanam walaupun dalam skala yang jauh lebih kecil; tekanan yang sebenarnya baru mulai dirasakan satu generasi berikutnya, ketika tanah di enklave tidak lagi mencukupi kebutuhan generasi muda (calon) petani.

[Satu] alasan warga desa mau melepaskan tanah terkait erat dengan dinamika hubungan antargenerasi. Karena menyadari adanya risiko menggusur pemilik tanah adat dan memancing sorotan media, perusahaan sawit jarang melakukan penggusuran secara langsung dan tidak mengambil alih *semua* tanah warga. Alih-alih, permukiman penduduk “dijadikan enklave”, dibiarkan utuh bersama tanah pertanian sempit yang masih tersisa. Tanah ini mungkin masih cukup bagi generasi sekarang untuk terus bertani seperti sebelumnya, atau setidaknya untuk menyadap karet dan memanen buah-buahan, tetapi sudah jarang cukup untuk menanam padi ladang. ...

Masalah besar baru dirasakan kemudian, ketika enklave-enklave itu ternyata terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan generasi berikutnya, sementara tanah hutan di sekitar sudah diduduki perkebunan. Pada titik inilah pemilik tanah adat benar-benar merasakan “perampasan”, ketika mereka benar-benar tidak punya akses lagi untuk berladang. Seorang tetua di tapak penelitian saya di Kalimantan menjelaskan, “ketika perusahaan datang, kami pikir tanah kami seluas lautan.” Tetapi perusahaan yang datang makin banyak. Sekarang anak dan cucunya tidak punya tanah. Mereka seperti terdampar di lautan kelapa sawit tanpa ikut memiliki, juga tidak punya cara untuk mendapatkan bagian, karena harga tanah di enklave dan tanah sisa yang tidak dijadikan perkebunan sudah jauh di luar jangkauan mereka. (Li 2018: 59)

Ketakadilan antargenerasi seolah sudah “terpatri” dalam praktik investasi besar-besaran di perkebunan sawit sekarang ini. Baik dalam wacana pemerintah maupun aspirasi masyarakat lokal terkandung “optimisme kejam” (Berlant 2007) tentang janji-janji kesejahteraan di masa depan seperti peningkatan pendapatan petani kecil, infrastruktur, pekerjaan, dan pendidikan bagi anak-anak mereka. Namun, semua harapan ini seketika sirna karena perusahaan ternyata lebih memilih mempekerjakan orang luar di semua lini, kecuali untuk kerja paling kasar dan berupah paling

rendah. Keamanan akses tanah dalam jangka panjang sangat tidak pasti, terutama karena hak pewarisan tanah untuk generasi berikutnya sudah dilepaskan melalui surat perjanjian yang ditandatangani oleh pemilik tanah setempat. Meskipun ada putusan pengadilan yang mengakui hak ulayat atas tanah hutan, surat-surat perjanjian itu menyatakan dengan jelas bahwa tanah yang dilepaskan dan diberi kompensasi itu ialah “tanah negara”; artinya, setelah masa konsesi perusahaan berakhir, tanah tersebut akan kembali menjadi milik negara, tanpa jaminan pengembalian hak guna seperti yang mereka punyai sebelumnya (Elmhirst *et al.* 2018).

Perspektif hubungan generasi membuat makin relevan argumen Olivier De Schutter (Pelapor Khusus untuk PBB tentang Hak atas Pangan 2008–2014), bahwa pengambilalihan-pelepasan tanah berskala besar seharusnya dilihat sebagai “pilihan terakhir dan paling dihindari” (De Schutter 2011), karena menutup peluang pertanian kecil, tidak hanya bagi petani generasi sekarang, tetapi juga bagi generasi mendatang yang menghadapi keterasingan permanen dari tanah yang mungkin ingin mereka garap di masa depan, ketika tidak ada peluang penghidupan di tempat lain (White 2012a). Namun, jika dilihat dari perspektif jangka panjang, mungkin kita keliru kalau menganggap gelombang perampasan dan keterasingan dari tanah yang terjadi saat ini sebagai sesuatu yang “permanen”. Di hampir semua kasus sejarah penggusuran dan pertanian skala besar (terkecuali yang terbaru), rezim-rezim berikutnya memilih pembangunan ekonomi dan perdamaian sosial dengan memecah tanah-tanah tersebut untuk mendorong pertanian skala kecil yang lebih efisien (Mazoyer dan Roudart 2012). Karena itu, penting bagi penelitian untuk memusatkan perhatian pada gerakan “merebut kembali tanah” yang terjadi terdahulu, sekarang, maupun di masa datang demi generasi baru petani kecil melalui reforma agraria baik yang diperjuangkan masyarakat lokal maupun yang didorong negara (dibahas di akhir bab ini).

KOMODIFIKASI & "REVOLUSI HIJAU" DALAM PERTANIAN SKALA KECIL

Kasar adalah orang terakhir yang saya singgahi dalam perjalanan turun di perbukitan Sulawesi pada 2006. Kondisinya mengesankan. Gubuk bambunya reyot dan terancam ambruk. Anaknya yang berusia sekitar 12 tahun lebih mencemaskan lagi. Bocah itu sangat kurus dan jelas tampak kelelahan menggotong karung-karung berisi kapuk yang berat. Pohon kapuk telah ditanam bapaknya di tanah gersang dan panas yang dulu biasa ditanami tembakau. "Aku sudah coba tanam kakao," kata Kasar, "tetapi tanah ini tidak bagus untuk kakao. Cuma ini kebun yang aku punya. Kapuk tumbuh baik, tapi harganya rendah sekali." Jikapun pohon-pohon kapuk itu ditebang, dia tetap tidak punya cukup tanah untuk bisa kembali menanam tanaman pangan. Dia juga tidak bisa meminjam tanah untuk ditanami tanaman pangan seperti dulu, karena tanah semua orang lain sudah penuh ditanami pohon [kakao].

Dengan pedih Kasar menyadari bahwa dia tidak punya jalan keluar, jalan kembali, ataupun masa depan buat anak-anaknya. ... Saya takut anak laki-lakinya yang mengangkut karung kapuk itu tidak bisa bertahan. Rumah mereka berada di kaki bukit, sekitar satu jam jalan kaki dari sekolah terdekat di pesisir. Namun tidak seperti ayahnya yang mendaki naik turun bukit untuk bersekolah pada 1970-an, bocah itu sangat malu dengan pakaiannya yang compang-camping sehingga dia berhenti sekolah saat kelas tiga sd. (Dataran tinggi Lauje, Sulawesi, Indonesia, setelah 20 tahun "demam" kakao, Li 2014 [2021]: 1-2)

Setelah membahas dampak perubahan besar dan radikal akibat perampasan tanah berwatak kapitalistis terhadap hubungan generasi, penting untuk diingat bahwa sebagian besar masyarakat pedesaan di dunia mengalami hubungan kapitalistis bukan melalui penggusuran massal

secara tiba-tiba, melainkan melalui proses-proses lokal yang lebih se-nyap dan kadang nyaris tidak terlihat, di mana hubungan kapitalis muncul perlahan dan membuat kaum tani tunduk pada paksaannya. Dibandingkan “perampasan tanah” yang ingar bingar, proses-proses lokal inilah yang justru lebih mencerminkan cara kapitalisme agraria umumnya berkembang dalam sejarah. Komodifikasi tanah, tenaga kerja, input pertanian, dan hasil bumi, yang disertai komodifikasi kebutuhan dasar hidup, merupakan penggerak proses “eksklusi orang-orang dekat” (Hall, Hirsch, dan Li 2020 [2011]: Bab 6) serta akumulasi dan pengusuran “sehari-hari”. Seperti dijelaskan di Bab 1, ekonomi-politik agraria klasik menyebut proses ini sebagai “penumpukan keuntungan dan kerugian” yang menghasilkan “terpilahnya kaum tani” (Lenin 1960 [1899]) menjadi berbagai kelas: petani besar protokapitalis, petani menengah dan kecil, serta buruh tani tak bertanah. Contoh klasik proses ini di abad XX ialah “revolusi hijau” dalam produksi gandum, jagung, dan padi selama Perang Dingin.

Revolusi Hijau

“Revolusi hijau” umumnya merujuk pada program yang didukung pemerintah untuk mendorong intensifikasi serta komodifikasi petani kecil penghasil pangan, terutama di Amerika Latin dan Asia selama Perang Dingin pada dasawarsa 1940-an hingga 1970-an. Program intensifikasi ini dimulai dengan produksi gandum dan jagung di Meksiko, disusul kemudian gandum di India dan padi di berbagai negara non-komunis Asia. Lembaga bantuan pembangunan antarnegara (Amerika Serikat) dan kemudian internasional (Bank Dunia), melalui kerjasama dengan lembaga donor filantropi (Rockefeller Foundation dan Ford Foundation), telah mendukung penelitian serta penyediaan berbagai input dan teknologi baru. Termasuk bibit unggul, pupuk dan pestisida kimia sintetik, dan dalam beberapa kasus mesin pertanian, sarana fisik (irigasi dan jalan penghubung antara pasar dan lahan pertanian), serta lembaga pendukung (penelitian, penyuluhan, kredit untuk petani kecil,

dan pengendalian harga). Dalam masyarakat tani yang sudah terpilah di Amerika Latin dan Asia—yang ditandai dengan berlakunya sistem tuan tanah, meluasnya kaum tunakisma, dan diferensiasi kelas di antara kaum tani sendiri—program ini kadang berjalan bersamaan dengan reforma pertanahan yang berhaluan antikomunis, dan kadang justru menggantikannya (Patel 2012).

Bagaimana dampak komodifikasi dan intensifikasi revolusi hijau bagi masyarakat tani dan dinamika antargenerasi di dalamnya? Salah satu dimensi pentingnya ialah dampak dari teknologi baru itu sendiri. Mekanisasi (atas pengolahan tanah, penanaman, atau pemanenan) bisa meringankan beban kerja petani kecil dan, pada gilirannya, mengurangi tekanan pada anggota lebih muda di rumah tangga untuk tetap tinggal di desa membantu kerja tani. Sebaliknya, bagi rumah tangga tunakisma yang mengandalkan upah dari memburuh tani, mekanisasi bisa mengurangi peluang kaum muda untuk mendapatkan uang di kampung sendiri. Perubahan teknologi juga bisa mengubah pembagian kerja berbasis gender; misalnya, ketika sabit menggantikan ani-ani dalam panen padi di Jawa, sementara kerja panen yang sebelumnya hanya dilakoni perempuan lantas terbuka bagi laki-laki maupun perempuan (White 2000). Selain itu, teknologi baru juga membawa tatanan baru dalam hubungan generasi dan transfer pengetahuan pertanian. Kini petani makin bergantung pada lembaga penelitian negara, perusahaan agrobisnis, dan penyuluh untuk memperoleh pengetahuan baru tentang kualitas benih, pengendalian hama, dan sebagainya—yang dulunya merupakan khazanah pengetahuan lokal yang dibagi antarpetani dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Namun, “revolusi hijau” lebih dari sekadar teknologi baru dan pengetahuan pertanian. Pada intinya, revolusi ini mencerminkan momen khusus (yang sebagian besarnya didorong oleh dinamika Perang Dingin) dalam proses panjang makin mendalamnya relasi komoditas di kalangan petani kecil. Dengan demikian, revolusi hijau menjadi contoh dari proses yang lebih umum: komodifikasi pertanian skala kecil, yang membuat mereka tunduk pada “disiplin dan paksaan” seturut logika pasar.

Dampak Komodifikasi Pertanian Skala Kecil terhadap Hubungan Generasi

Dampak utama dari komodifikasi pertanian skala kecil terhadap hubungan antargenerasi ialah munculnya atau menjamahnya diferensiasi masyarakat tani. Dalam sistem agraria yang bertumpu pada pertanian skala kecil yang terkomodifikasi—ketika hak atas tanah bersifat privat dan bisa diperjualbelikan—ketakstabilan bersifat inheren karena membawa mekanisme konsentrasi kepemilikan tanah dan pemilahan kelas, sebagaimana telah digambarkan oleh banyak penulis semenjak zaman Lenin dan setelahnya (White 1989). Bagi sebagian petani, proses internal diferensiasi kelas ini membatasi atau bahkan menutup peluang mereka, sedangkan bagi sebagian lainnya justru memperlebar. Misalnya, satu kajian tentang beberapa desa penghasil padi di Jawa setelah lebih dari empat dasawarsa “revolusi hijau” menemukan perubahan struktur penguasaan tanah yang menjadi sangat timpang; akibatnya, sebagian besar kaum muda (perempuan maupun laki-laki) tidak punya harapan untuk mendapat warisan tanah atau memiliki tanah pertanian selagi masih muda. Pemuda dari keluarga kaya pemilik tanah luas mungkin kelak akan mewarisi dan memiliki tanah orang tua mereka, tetapi biasanya mereka lebih memilih menyewakan tanah warisan itu sebagai sumber penghasilan; tidak banyak yang berminat menggarapnya sendiri. Mereka umumnya memilih melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan meniti masa depan dengan pekerjaan bergaji tetap; orang tua mereka juga punya modal untuk mendukung mereka mendapatkan pekerjaan mapan (Akatiga dan White 2015).

Komodifikasi perekonomian pedesaan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin selama beberapa dasawarsa terakhir juga telah membawa berbagai perubahan lain di masyarakat pedesaan, yang kini makin kurang bergantung pada sektor pertanian dan makin tidak terbatas pada ekonomi setempat (Bryceson, Kay, dan Mooij 2000). Kerja-majemuk (*pluriactivity*) serta keluwesan bergerak antartempat dan antarsektor, terutama di kalangan pemuda, memang bukan hal baru, tetapi kini jauh

lebih penting dibanding sebelumnya. Surplus hasil usaha tani sering digunakan untuk membiayai kegiatan nontani dan migrasi, yang hasilnya kemudian bisa diinvestasikan kembali ke tanah, ternak, atau usaha agrobisnis. Bagi mereka yang berhasil melakukannya, investasi dalam pendidikan anak menjanjikan jalan keluar dari kerja kasar dan kadang untuk meninggalkan desa. Bagi keluarga yang tidak memiliki tanah sama sekali atau yang memiliki tanah sangat sempit, mereka biasanya mengandalkan pekerjaan nontani, baik di dalam atau di luar desa, sebagai sumber penting pendapatan untuk menambah penghasilan dari bertani atau memburuh tani.

Ketika pemuda makin mengandalkan kerja-majemuk dan kerja lintas-tempat serta lintas-sektor, pola reproduksi kelas pun berubah. Dalam masyarakat tani menetap, reproduksi kelas dulunya lebih banyak ditentukan oleh pewarisan hak-hak tanah. Namun, keterhubungan antara tanah dan kelas dalam struktur masyarakat pedesaan saat ini, meski belum sepenuhnya hilang, makin melemah dan kabur, dibandingkan dulu. Bagaimana perubahan ini memengaruhi struktur agraria baru yang dihadapi generasi muda pedesaan, baik laki-laki maupun perempuan? Philip Kelly menyelidik pola-pola reproduksi kelas antara generasi tua dan muda sebuah desa pinggiran kota di Filipina (lihat Kotak 2.2).

KOTAK 2.2

Reproduksi Kelas Sebuah Desa Pinggiran Kota di Filipina

Perbaikan transportasi, kemajuan pendidikan, lapangan pekerjaan di industri setempat dan migrasi ke luar negeri, serta masuknya pendatang baru untuk bekerja di pertanian, di pabrik, atau sebagai pekerja rumah tangga, semua ini telah menunjukkan

“perubahan penting dalam bangunan ekonomi dan sosial di desa” (Kelly 2012: 231). Luas tanah petani rata-rata tetap sekitar 2 hektar, dan sebagian besar petani menyewa kepada pemilik tanah yang tidak tinggal di desa (absente). Namun, proporsi tenaga kerja di desa yang menjadikan pertanian sebagai pekerjaan utama telah merosot dari 50 persen menjadi 14 persen, sementara upah kerja di sektor industri menjadi komponen penting perekonomian desa, khususnya bagi perempuan muda.

Tiga puluh tahun lalu, masih ada pola reproduksi kelas antar-generasi yang sejalur: dari petani penyewa menjadi petani penyewa, dari buruh tunakisma menjadi buruh tunakisma, atau mungkin dari pekerja migran menjadi pekerja migran. Namun, untuk generasi milenial saat ini, peluang kelas mereka sangat berbeda, seiring tumbuhnya perekonomian lokal; banyaknya kerja industrial; meningkatnya sarana transportasi, komunikasi, dan pendidikan; serta makin banyaknya penduduk desa yang merantau ke luar negeri. (Kelly 2012: 238)

Perubahan ini membawa dampak penting pada jalur kelas generasi baru. Meski secara umum ada tren mobilitas ke atas, posisi kelas orang tua dalam perekonomian agraris mungkin tidak lagi sepenuhnya menentukan peluang dan jalur generasi berikutnya, tetapi tetap membawa pengaruh. Tingkat pendidikan generasi sebelumnya (yang terkait dengan status kelas agraris) masih berbanding lurus dengan pendidikan generasi setelahnya.

Kita [sekarang] menyaksikan kelas-kelas agraris mereproduksi diri mereka ke sektor-sektor lain dengan relasi kelas yang

sangat berbeda. ... Namun, posisi awal dalam dinamika kelas agraria tampaknya tetap berpengaruh besar terhadap keluaran kelas generasi milenial. Siapa mengenyam pendidikan terakhir tingkatan apa dan mendapat pekerjaan apa ditentukan oleh latar belakang kelas keluarga mereka di sektor agraris. Meskipun produksi pertanian tidak lagi menjadi dasar utama yang menentukan dinamika kelas serta posisi generasi milenial, capaian mereka sekarang ini sebagiannya dipengaruhi oleh keuntungan atau kerugian yang diwariskan dari latar belakang kelas [generasi sebelum mereka] dalam produksi pertanian. (Kelly 2012: 248)

Kalau kekuatan-kekuatan yang menggerakkan diferensiasi agraria sudah sangat tertanam dalam pertanian skala kecil yang terkomodifikasi, mengapa prosesnya di banyak negara dan kawasan bukannya berlanjut menuju “polarisasi” yang mendorong generasi berikutnya terpilah ke dalam dua kelas agraris saja, yakni petani kapitalis di satu sisi dan proletar tunakisma di sisi lain? Mengapa usaha tani skala kecil tetap bertahan? Untuk memahami keberlanjutan serta dinamika pertanian skala kecil di masyarakat pedesaan yang terkomodifikasi dan terdiferensiasi, kita perlu menggali kecenderungan baik “sentrifugal” (lari dari pusat) maupun “sentripetal” (mencari pusat) dalam pertanian skala kecil, juga bagaimana “dua tren yang berlawanan ini berlangsung secara bersamaan” (Shanin 1972: 76). Kecenderungan sentrifugal merujuk pada apa yang disebut Lenin sebagai “penumpukan keuntungan dan kerugian”, yang menghasilkan kelas tuan-tanah serta petani yang mempekerjakan buruh upahan di satu sisi dan kelas semiproletar tunakisma serta nyaris tunakisma di sisi lain, dan juga timbulnya hubungan kerja berbasis upah di antara mereka. Namun, kecenderungan ini sejalan seiring dengan berbagai kecenderungan “pelevelan” yang menjadi penyeimbang; ke-

cenderung sentripetal ini mencakup pemecahan tanah luas melalui pewarisan, penggabungan tanah-tanah sempit, emigrasi orang-orang dari strata paling kaya dan/atau paling miskin, dan kerja-majemuk yang memungkinkan berlanjutnya penggarapan lahan sempit meski hanya cukup untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, “Seluruh proses dife-rensiasi dalam suatu masyarakat tani merupakan hasil bersih dari ke-cenderungan sentrifugal maupun sentripetal tersebut” (Shanin 1972: 117–119); hasil bersih ini cenderung berbeda antarwilayah, tergantung kondisi lokal dan peluang mobilitas antarsektor serta antartempat yang tersedia.

Pada awal abad XXI, seruan “revolusi hijau baru” mengumandang, terutama di Afrika; salah satu prakarsa utamanya ialah Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA), yang menerima pendanaan besar dari Gates Foundation dan Rockefeller Foundation. Kali ini pendekatannya lebih sejalan dengan kebijakan ekonomi neoliberal; dukungan negara dan Bank Dunia yang dulu menjadi ciri khas “revolusi hijau” kini jauh lebih berkurang, sementara perusahaan agrobisnis lebih banyak terlibat, yang terlihat dari kehadiran Monsanto pada badan penasihat AGRA.

Berbagai dukungan negara yang dibutuhkan Revolusi Hijau awal tidak mungkin lagi menjadi bagian dari dana bantuan Bank [Dunia] ... gagasan bahwa bantuan pembangunan bisa digunakan untuk subsidi input, kredit murah, atau kerja-kerja pemasaran pun nyaris seperti lelucon bagi kalangan ekonom pembangunan masa kini. (Patel 2012: 34)

DIMENSI GENERASI

DALAM REFORMA AGRARIA & PERTANAHAN

Program reforma pertanahan secara umum merupakan upaya untuk memperbaiki penyimpangan dalam alokasi kepemilikan dan hak penggunaan tanah.¹⁴ Penyimpangan ini sering kali berasal dari jenis-jenis

transformasi yang sudah dibahas di bab ini: perampasan tanah dan pengusuran oleh penjajah, pemagaran/pematokan tanah, proses diferensiasi serta sistem tuan tanah di tingkat lokal, dan berbagai reformasi yang berlangsung sebelumnya (seperti beberapa bentuk kolektivisasi sosialis). Maka, reforma pertanahan merupakan sarana “merebut kembali tanah” untuk pertanian skala kecil melalui mekanisme yang tertib dan diatur negara. Selain itu, reforma pertanahan juga kerap mengusung agenda makroekonomi lebih luas untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dan struktur pemangkuan tanah yang telah ditata-ulang biasanya diharapkan dapat mendorong transisi agraria, baik menuju sistem pertanian skala kecil yang termodernisasi secara kapitalistis ataupun sistem kolektif.

Meski sebagian reforma pertanahan terdahulu justru merampas tanah dari kaum miskin untuk dibagikan kepada kaum kaya, definisi umum tentang reforma pertanahan “redistributif” hanya mencakup program yang diniatkan dan dijanjikan untuk membagikan ulang tanah dari pemilik tanah luas kepada petani kecil dan buruh tani tunakisma (Griffin, Rahman Khan, dan Ickowitz 2002: 280; Lipton 2010). Biasanya, agenda reforma pertanahan ditujukan untuk membentuk atau memperkuat kelas “petani menengah” dalam jumlah besar, yang berorientasi pasar dan menghasilkan surplus. Agenda ini dilaksanakan dengan menetapkan batas maksimal kepemilikan tanah, membagikan tanah lebih kepada mereka yang tidak memiliki tanah sama sekali atau memiliki tanah sangat sempit, dan mengubah hak sewa menjadi hak milik. Reforma pertanahan yang dilaksanakan di Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan di bawah pengaruh Amerika Serikat pasca-Perang Dunia II biasanya dianggap sebagai “contoh sukses” model reforma pertanahan ini. Namun, model serupa juga digunakan pada tahap awal reforma pertanahan sosialis (sebelum kolektivisasi) di Uni Soviet, Tiongkok, Vietnam Utara, Korea Utara, Kuba, dan Ethiopia (Lipton 2010: 192–194). Merangkum pengalaman-pengalaman ini pada awal 1980-an, Ajit Ghose (1983: 17) mencatat bahwa “menghidupkan kembali kaum tani

merupakan langkah awal yang diperlukan ... terlepas dari watak sistem yang baru: apakah itu perekonomian petani kecil yang termodernisasi secara kapitalistik ataupun sistem kolektif. ... Tugas mendesak reforma agraria ialah memapankan petani kecil sebagai pelaku utama dalam kehidupan pedesaan.”

Dalam bahasa Inggris, istilah *land reforms* (“reforma pertanahan”, yang terbatas pada agenda mengubah struktur akses atas tanah) biasanya dibedakan dari *agrarian reforms* (“reforma agraria”), yang merujuk pada pendekatan lebih terpadu, tidak hanya mencakup pertanahan tetapi juga upaya memastikan petani kecil menjadi penerima manfaat atas berbagai input barang maupun keuangan serta dukungan kelembagaan (pengetahuan, kredit, pasar) yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan membangun penghidupan berkelanjutan. Namun, pembedaan ini cukup problematis, setidaknya karena dua alasan. Pertama, seperti dicatat oleh Erich dan Charlotte Jacoby setengah abad lalu, pembedaan ini sulit diterjemahkan ke bahasa lain—misalnya, “*land reform* dalam bahasa Prancis disebut *réforme agraire*, dan dalam bahasa Spanyol menjadi *reforma agraria*” (1917: xiv–xv). Kedua, reforma pertanahan yang berhasil hampir selalu disertai langkah-langkah pendukung seperti yang disebutkan tadi, jika memang tidak tersedia sebelumnya. Karena itu, gagasan “reforma agraria” lebih baik digunakan karena menekankan bahwa reforma pertanahan redistributif saja tidak cukup untuk mewujudkan perubahan struktural yang berkelanjutan dalam perekonomian dan masyarakat pedesaan.

Banyak kajian menunjukkan pentingnya akses perempuan atas tanah secara mandiri, dan juga mengungkapkan bercokolnya diskriminasi gender dalam kebijakan serta pelaksanaan hak-hak pertanahan.¹⁵ Konvensi PBB 1979 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women [CEDAW]), yang telah diratifikasi oleh 187 dari 193 negara anggota PBB, dengan tegas menyatakan bahwa perempuan berhak mendapatkan “perlakuan setara dalam reforma perta-

nahan dan agraria, serta dalam program pemukiman-ulang” (Pasal 14[g]). Namun, dalam kenyataannya, program reforma agraria justru kerap merugikan perempuan.

Skema pemberian tanah dan pemukiman ulang yang bersifat perorangan serta diatur negara kerap menghapuskan hak-hak tradisional perempuan atas tanah. Model reforma pertanahan dan program relokasi berbasis rumah tangga biasanya memberikan sertifikat tanah bukan kepada “rumah tangga”, melainkan kepada “kepala rumah tangga”; dalam praktiknya, model ini tidak menjadikan istri sebagai penerima tanah, atau hanya mengikutsertakan nama mereka dalam sertifikat yang beratas nama suami (Jacobs 2010: 43). Dengan demikian, kebijakan reforma agraria membawa dampak besar terhadap hubungan gender. “Reforma pertanahan tidak dapat disebut demokratis kecuali perempuan mendapatkan hak, kemandirian, serta kesempatan hidup yang lebih baik” (Jacobs 2010: 192).

Penelitian tentang hubungan generasi dalam reforma agraria masih berada pada tahap awal. Seiring berkembangnya pengetahuan seputar dinamika ini, kita bakal menemukan suatu pola di mana perempuan dan lelaki muda pedesaan menjadi pelaku penting dalam perjuangan reforma agraria lokal atau pelaksanaan reforma agraria yang diatur negara; namun, sebagai penerima manfaat, mereka justru sering terpinggirkan, baik karena alasan gender maupun generasi. Sebagaimana analisis dan kebijakan berhaluan feminis diperlukan untuk menangani isu-isu seputar gender dan hak-hak pertanahan, analisis hubungan generasi juga penting untuk memahami bagaimana reforma pertanahan—baik yang diatur negara secara searah dari atas (*top-down*) maupun yang berbasis perjuangan dan prakarsa lokal—sering kali mengabaikan dan menyingkirkan pemuda perempuan dan lelaki, baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai calon petani masa depan. Salah satu contohnya diceritakan oleh Martua Sirait yang menyoroti perjuangan petani kecil penggarap tanah “hutan negara” di kampung Ciniti (Kabupaten Garut, Jawa Barat). Mereka telah berjuang selama tujuh belas tahun untuk merebut

kembali tanah mereka yang dirampas pada 1982. Akhirnya, pada 1999, Badan Pertanahan Nasional (BPN) membagikan sertifikat tanah kepada 458 petani setempat. Ketika kembali ke Cinito sekitar sedasawarsa setelah redistribusi tanah, Sirait menemukan:

Dampak dari proses itu yakni para petani penggarap yang terlibat dalam perjuangan [merebut kembali tanah] itu sudah mendekati usia paruh baya ketika akhirnya mereka berhasil mendapatkan kepemilikan tanah. Sedikit saja di antara para penerima tanah itu yang mewariskan tanah mereka kepada anak-anak mereka (generasi kedua) Sebagian besar penerima tanah itu mempertahankan kepemilikan tanah dan menggarapnya, atau menjual sebagian petak tanah untuk biaya pendidikan anak-anak mereka atau biaya mencari kerja di luar pertanian. Ketegangan atas tanah di sini terasa lebih hebat pada generasi ketiga (cucu) yang memasuki usia produktif ... Kakek nenek mereka telah menjual tanah dan memberikan uangnya kepada orang tua mereka, atau tetap mempertahankan pemilikan tanah dan menanaminya dengan tanaman tunggal karet yang belum siap untuk disadap. Generasi ketiga ini merasa tersingkirkan dari program redistribusi tanah, karena tidak cukup umur dan ditutupnya kesempatan mereka untuk bekerja di kampung sendiri. (2015: 136 [2017: 146])

Di beberapa negara Afrika Sub-Sahara, skema kolonial yang mengubah hak-hak pertanahan komunal menjadi milik perorangan, seperti “Rencana Swynnerton” di Kenya pada 1950-an, juga membawa banyak dampak negatif, termasuk melemahnya hak perempuan dan lelaki muda atas tanah (Njoh *et al.* 2017). Contoh-contoh ini menunjukkan masalah mendasar dari berbagai upaya reforma agraria yang berpusat pada pemberian hak kepemilikan secara perorangan (Meinzen-Dick dan Mwangi 20089; Bromley 2008). Dengan sertifikasi tanah perorangan,

pemilik baru tidak serta-merta terhindarkan dari risiko kehilangan hak atas tanah. Sebaliknya, dengan memiliki sertifikat, pemilik tanah justru makin mudah menjual atau menjaminkan tanahnya untuk berutang, yang akhirnya membuat kaum miskin makin rentan kehilangan tanah. Hak milik pribadi juga mendorong pembelian tanah untuk spekulasi, yang menaikkan nilai pasar tanah, sehingga tanah makin sulit dijangkau petani kecil dan generasi muda. Kepentingan pemuda pedesaan, terutama perempuan, bakal lebih terlindungi—meski tidak sepenuhnya terjamin—jika reforma pertanahan menerapkan prinsip kepemilikan kolektif/komunal dengan hak guna perorangan yang terjamin. Prinsip ini, seperti kita telah lihat di bab ini, menjadi dasar pembagian tanah di Tiongkok dan Vietnam pascakolektivisasi. Prinsip yang sama juga dianjurkan oleh gerakan pekerja tunakisma Brasil (MST)—meski penerapannya tidak menyeluruh, karena sebagian besar penerima tanah tetap menginginkan hak perorangan—dan oleh gerakan petani dunia La Vía Campesina. Ketika ketimpangan agraria makin meningkat saat ini, semua ini penting dipertimbangkan oleh semua pihak yang ingin memprakarsai serta mendukung gelombang baru reforma agraria abad XXI yang menyerukan perjuangan “merebut kembali tanah”.

Bab ini telah membantu kita memahami implikasi hubungan generasi dari beberapa “transformasi besar” agraria, tetapi masih meninggalkan banyak pertanyaan. Seperti disebutkan di pendahuluan, sebagian masalah ini disebabkan keterbatasan sumber rujukan, karena sebagian besar penelitian tentang transformasi agraria hanya menyinggung dimensi generasi secara sepintas lalu, jika tidak sama sekali. Secara khusus, pembaca barangkali merasa bahwa kasus-kasus yang telah kita bahas kurang begitu menjelaskan dinamika internal rumah tangga pedesaan dan proses pengalihan (atau gagalnya pengalihan) sumberdaya agraria antargenerasi. Di Bab 3 kita memusatkan perhatian pada siklus hubungan generasi dalam rumah tangga petani, sementara di Bab 4 kita menilik lebih dekat pengalihan sumberdaya agraria antargenerasi.

CATATAN

- 1 Dalam hal budak milik, orang-orang yang diperbudak dimaknai sebagai barang milik sepenuhnya, dan keturunan mereka otomatis menjadi budak.
- 2 Bagian ringkasan ini, yang tidak dirujuk khusus, didasarkan pada Grier (2006: Bab 2, 3, dan 4).
- 3 Anak-anak perempuan dan perempuan muda Shona bisa dijadikan jaminan gadai oleh ayah mereka. Jika seorang lelaki miskin tidak punya hewan ternak untuk menebus denda, untuk ditukarkan makanan, atau membayar upeti kepada seorang tuan, dia dapat menukar anak perempuannya untuk meminjam beras, ternak, atau barang-barang lain. Anak perempuan yang jadi jaminan gadai itu kemudian tinggal dengan dan bekerja untuk pemberi utang ayahnya. Jika pengutang tidak menebus anak perempuan itu, pemberi utang bisa menikahnya atau menikahkannya dengan orang lain untuk mendapatkan tebusan atau mahar pengantin (Grier 2006: 62).
- 4 Bagian ini utamanya merujuk pada Elson (1994), Pelzer (1978), Stoler (1985), White (2004), dan White (2018a).
- 5 *Indenture* merupakan bentuk kontrak kerja yang mengikat pekerja selama periode tertentu (dalam kasus ini, biasanya tiga tahun). Ketika direkrut dengan skema ini, calon pekerja biasanya diberi uang muka secara kontan (atau utangnya ditebuskan), perjalanan gratis ke tujuan, dan janji perjalanan gratis pemulangan ketika kontrak berakhir.
- 6 Konvensi ILO No. 5 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja di Sektor Industri (1919).
- 7 Dewan Perwakilan Rakyat kolonial di Batavia (sekarang Jakarta).
- 8 Bagian ini utamanya didasarkan pada Stearns (2006) serta ringkasan lebih awal penulis atas kasus-kasus serupa dalam Bourdillon *et al.* (2010: 55–58).
- 9 Patrilokal merupakan pola pernikahan di mana perempuan ikut tinggal di rumah/keluarga lelaki.
- 10 “*Die Landsdiebstahl auf grosser Stufenleitr*” (Marx 1867: 443).
- 11 Lihat, misalnya, Tsikata dan Yaro (2014) tentang Uganda; Julia dan White (2012) tentang Indonesia; White, Park, dan Julia (2015) tentang enam kasus di Afrika dan Asia; serta Levien (2018) tentang kasus-kasus di Inggris, Gambia, Indonesia, dan India.
- 12 Dua pengecualian yakni Li (2018) (dibahas berikutnya di bab ini) dan Senties Portilla (2018) (dibahas di Bab 5).
- 13 12 *penny* = 1 *shilling*.

- 14 Sebagian seksi ini diambil dari White *et al.* (2014).
- 15 Lihat, khususnya, Agarwal (1994) untuk Asia Selatan; Deere dan de Leal (2001) untuk Amerika Latin; Jacobs (2010: Bab 8) serta Tsikata dan Golah (2010: Bab 4 dan 5) untuk kasus-kasus di Afrika Sub-Sahara.

BAB 3

Tumbuh Dewasa di Desa

Di semua masyarakat manusia, rumah tangga menjadi basis utama berlangsungnya reproduksi sosial. Agar suatu masyarakat dapat mempertahankan keberlangsungannya, rumah tangga harus terus hidup pada bentangan waktu cukup panjang untuk membesarkan keturunan hingga ke tahap bisa bereproduksi secara fisik maupun sosial.

—Fortes (1966: 2)

Rumah tangga merupakan bangunan mendasar dalam tatanan masyarakat agraris—selain individu, kelas agraris, gender, dan generasi, seperti yang telah dibahas di Bab 1. Bab ini menyelidiki daur perkembangan rumah tangga petani; dinamika perjalanan hidup dari kanak-kanak menuju usia muda, dewasa, hingga tua; dan hubungan otonomi, ketergantungan, serta saling-ketergantungan antargenerasi.

RUMAH TANGGA

Rumah tangga sering kali mewujud sebagai struktur yang rumit. Meski sekilas tampak seperti “keluarga batih” biasa—hanya sepasang suami-istri bersama anak-anak yang belum menikah—rumah tangga bisa saja mencakup unit-unit produksi, konsumsi, dan akumulasi yang berlainan dan tidak selalu saling meliputi. Maka, mendefinisikan “rumah tangga” tidak sesederhana seperti yang terlihat sekilas. Ada beberapa kriteria yang bisa digunakan untuk mendefinisikan rumah tangga: tinggal serumah, menggabungkan pendapatan dan hasil produksi, memasak atau makan bersama, kerja bersama, memiliki tanah bersama; tapi batasan unit-unit yang didefinisikan berdasarkan kriteria ini bisa berbeda-beda. Kelompok orang yang tinggal satu atap, memiliki dan mengerjakan lahan bersama,

berbagi penghasilan, memasak dan makan bersama bisa saja merupakan orang-orang yang sama. Namun, ada kalanya dimensi-dimensi “berumah tangga” tersebut tidak berjalan selaras, dan di sinilah pentingnya untuk menganalisis dimensi-dimensi itu secara terpisah. Contoh menarik bisa dilihat pada rumah panjang orang Dayak di Kalimantan, Indonesia (Kotak 3.1) dan kompleks rumah orang Tiv yang patrilineal di MbaGor, Nigeria (Kotak 3.2).¹

KOTAK 3.1

Sebuah Rumah Panjang Dayak Ngadju di Tumbang Gagu, Hulu Sungai Mentaya, Kalimantan

Sebuah rumah panjang merupakan satu bangunan utuh, tetapi orang-orang yang tinggal di dalamnya tidak membentuk satu kesatuan “rumah tangga”. Rumah panjang terdiri atas beberapa ruangan tempat tinggal, dan beberapa di antaranya mencakup lebih dari satu “unit rumah tangga”.

Sebanyak 76 orang dewasa dan anak-anak meninggal rumah panjang yang punya enam bilik terpisah, tetapi ada sebelas unit rumah tangga (*kabali*), yang masing-masing punya harta benda, anggaran konsumsi, dan usaha pertaniannya sendiri, termasuk pertukaran kerja dengan *kabali* lain. Dalam bahasa Dayak Ngadju, *kabali* mengandung berbagai makna, seperti “kuali”, “vagina”, “pasangan suami-istri”, dan “rumah tangga”—menunjukkan bahwa pemahaman orang Dayak Ngadju atas berumah tangga mengandung dua elemen, yakni matrifokalitas (terkait kedudukan perempuan) dan konsumsi bersama.

Masing-masing [*kabali*] memiliki alas tidur terpisah, lumbung padi sendiri, serta tungku dan lemari yang berbeda di dapur.

Lemari pakaian dan lemari dapur biasanya dikunci (dan kadang dipasangi perangkap) agar tidak mudah dibuka oleh penghuni lain. Mereka makan terpisah. ... Namun, yang terpenting, setiap rumah tangga bertanggung jawab atas penghidupan dan kesejahteraan anggotanya sendiri. Tiap *kabali* mengelola ladang serta kebunnya dan mengatur sendiri cara-caraenggarapnya, termasuk hubungan kerja di antara anggota keluarga dalam kegiatan produksi. (Miles 1976: 71)

KOTAK 3.2

Komplek Rumah Kyagba di MbaGor, Nigeria

Sebanyak 78 orang penghuni komplek ini merupakan satu “keluarga” besar yang bersifat patrilineal dan poligini: 16 lelaki suami, 40 perempuan istri, dan 22 anak bujang. Di dalamnya terdapat 34 pondokan, masing-masing dengan perapian sendiri—jadi, tidak semua istri mengurus satu “rumah” terpisah. Komplek ini memiliki 28 petak ladang ubi yang dikelompokkan menjadi 6 “blok ladang”. Masing-masing blok dikuasai oleh seorang suami, sedangkan tiap petak “ladang” dikuasai oleh seorang istri. Semua penghuni kampung bekerja bersama dalam berbagai tugas, tetapi sering juga membentuk kelompok kecil lelaki dan perempuan untuk mengerjakan tugas produksi tertentu.

Jika seorang perempuan yang sedang menyiangi ladang ditanyai “ini ladang siapa?” Dia akan menjawab “ini ladangku.” ... Namun, jika pertanyaan yang sama diajukan kepada sua-

mi si perempuan, dia juga akan menjawab “ini ladangku.” Untuk mengetahui lebih jauh, kita harus bertanya “untuk istri yang mana kamu mencangkuli ladang ini?” atau “siapa kepala komplek tempatmu tinggal?” Jika pertanyaan itu diajukan kepada kepala komplek, dia juga akan menjawab “ini punyaku.” Untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat, kita harus bertanya “untuk perempuan yang mana kamu mencangkuli ladang ini?” atau “anak kamu yang mana yang mencangkuli ladang untuk istrinya di sini?” Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini mengungkap jaringan hak di ladang tertentu. (Bohannon dan Bohannon 1968: 81)

Hak individu dan kelompok atas hasil pertanian diatur secara kompleks, tetapi terdefinisikan gamblang dalam susunan unit rumah tangga yang saling terkait ini.

Seorang perempuan mempunyai hak atas ladang: dia memiliki dan menguasai hampir semua panen yang dihasilkan ladangnya; dia juga berkewajiban memberi makan suami dan anak-anaknya dari panen ladangnya. Suaminya juga mempunyai hak atas ladang itu: dia telah menggarap ladang itu untuk istrinya dengan bantuan kerabatnya; jiwawut dan wijen yang ditanam di ladang itu menjadi miliknya; dia makan dari hasil tanaman itu dan membayar pajaknya. Kepala komplek juga mempunyai beberapa hak lain atas ladang itu: dialah yang menjatahkan lahan kepada si suami agar membuatkan ladang untuk si istri. (Bohannon dan Bohannon 1968: 81)

Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga (hubungan intra-rumah tangga) mengandung kemungkinan adanya mekanisme penghisapan surplus menurut hierarki berbasis gender dan generasi serta transaksi pengupahan dan sewa di dalam rumah tangga itu sendiri (White 1989: 22; Guyer dan Peters 1987). Berbagai contoh terkait hal ini dibahas lebih lanjut di bab-bab berikutnya.

Daur Perkembangan Rumah Tangga Agraris

Rumah tangga adalah entitas yang terus bergerak; komposisi dan strukturnya berubah seiring keluar masuk anggotanya (melalui kelahiran, kematian, pernikahan, dan migrasi), juga seiring bertambahnya usia tiap anggotanya lintas generasi. Perubahan ini menuntut kita untuk melihat rumah tangga dengan perspektif dinamis, yaitu melalui “daur perkembangan” rumah tangga, yang mencakup *pembentukan* (misalnya, ketika sepasang suami-istri setelah menikah memperoleh lahan tani sendiri dan membangun unit tempat tinggal, produksi, serta konsumsi secara mandiri); *perluasan* (ketika anggota baru bergabung, baik melalui kelahiran atau kehadiran orang tua janda atau kerabat lain); *penyebaran* (ketika anggota rumah tangga hengkang); *pemisahan/pembelahan* (ketika rumah tangga terbagi ke dalam dua unit atau lebih); dan *penggantian* (ketika rumah tangga awal sudah tidak ada lagi). Beberapa tahapan ini, seperti penyebaran dan penggantian, sebenarnya lebih tepat disebut sebagai “moment”, dan bisa saja berlangsung serempak; sementara tahap perluasan dan penyebaran rumah tangga cenderung menghabiskan waktu lebih lama.

Rumah tangga lebih kompleks, yang terdiri tidak hanya atas keluarga batih—seperti keluarga tiga generasi—biasanya lebih sering muncul pada tahap tertentu, dibanding pada tahap-tahap lainnya, dalam daur perkembangan rumah tangga agraris. Yang membuat suatu masyarakat atau kelas sosial lebih banyak memiliki keluarga inti dibandingkan keluarga besar bukanlah perbedaan budaya, melainkan berapa lama rumah tangga berada pada tahap tertentu dalam daur perkembangannya.

Misalnya, dalam rumah tangga majemuk yang tersusun berdasarkan kekerabatan patrilineal di Yen-Liao, Taiwan, Myron Cohen (1976) menemukan bahwa keluarga petani tembakau cenderung lebih lama mempertahankan struktur keluarga besar, karena dengan model ini kekuatan ekonomi mereka bisa lebih kuat.

Sebagaimana dulu sekali dicatat oleh ahli demografi Prancis Alfred Sauvy (1969: 248), setiap anggota yang lahir dalam rumah tangga awalnya hanya mengonsumsi tanpa menghasilkan apa pun, kemudian mulai membantu aktivitas ekonomi tetapi masih mengonsumsi lebih dari yang mereka hasilkan, lalu mencapai suatu titik (biasanya saat usia remaja atau awal dewasa) ketika produksi mereka melebihi kebutuhan konsumsi, dan nantinya—jika masih hidup hingga tua—kembali mengonsumsi lebih banyak ketimbang yang dihasilkan. Bertambahnya usia, bersamaan dengan penambahan dan penyebaran anggota yang ditempa secara kultural, membuat rumah tangga mengalami serangkaian perubahan dalam hal jumlah dan identitas anggota, usia dan hubungan antaranggota, serta kemampuan memproduksi dan kebutuhan konsumsi mereka.

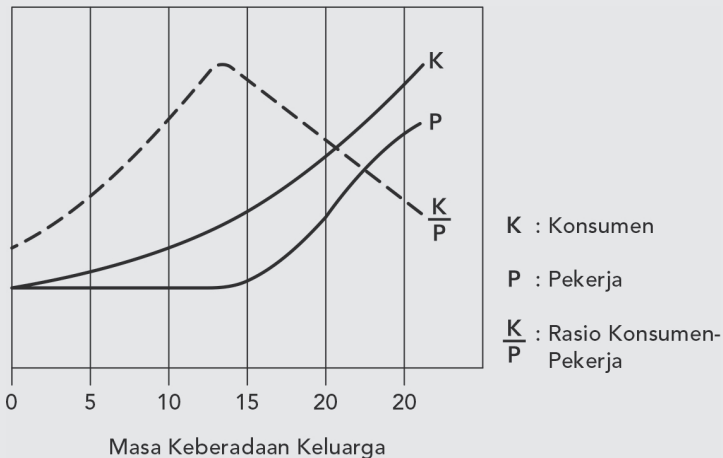
Berangkat dari berbagai kenyataan hidup mendasar tersebut, dan dengan beberapa asumsi tentang tingkat kelahiran serta nilai produksi dan konsumsi individu di berbagai usia, ahli agronomi Rusia A.V. Chayanov (1888–1939) membuat model untuk memahami bagaimana “rasio konsumen-pekerja” dalam rumah tangga petani Rusia berubah sepanjang daur perkembangan keluarga. Dalam modelnya (dipaparkan dalam Kotak 3.3), Chayanov menjelaskan bahwa “setiap keluarga, tergantung usianya, dalam tiap tahap perkembangannya menjadi mesin tenaga kerja yang sama sekali berbeda, baik dalam hal jumlah pekerja, rasio konsumen-pekerja, maupun kemungkinan penerapan prinsip kerjasama yang kompleks” (1966 [1925]: 60).

KOTAK 3.3

Model Chayanov tentang Perubahan Rasio Konsumen-Pekerja dalam Daur Kehidupan Keluarga Petani

Model Chayanov dimulai dengan pasangan muda, seorang suami berusia 25 tahun dan istri 20 tahun, yang diasumsikan melahirkan seorang anak tiap tiga tahun hingga memiliki sembilan anak. Diasumsikan pula bahwa semua anak ini hidup hingga dewasa, mulai berkontribusi pada perekonomian rumah tangga pada usia 15 tahun, dan konsumsi serta produksi seorang anak perempuan atau yang sudah dewasa dihitung sebesar 0,8 dibandingkan laki-laki. Tentu saja, semua asumsi ini perlu disesuaikan dengan kenyataan tertentu di berbagai tempat dan waktu.

Perubahan rasio konsumen-pekerja dalam daur kehidupan keluarga petani



Berdasarkan semua asumsi ini, rasio konsumen-pekerja keluarga dimulai pada angka 1,00 saat pasangan itu menikah; angka ini kemudian meningkat perlahan hingga mencapai 1,94 pada tahun ke-15, karena jumlah anak yang menjadi tanggungan lebih banyak daripada yang bekerja; setelah itu, rasio mulai turun ketika anak-anak mulai bekerja, hingga pada tahun ke-26 pernikahan, dengan sembilan anak berusia 0–24 tahun, rasionya turun menjadi 1,32; jika tidak ada lagi anak yang lahir, “ketika anak-anak tumbuh dewasa, rasio konsumen-pekerja akan terus menurun, hingga mendekati 1 pada tahun ke-37 keberadaan keluarga, dengan catatan bahwa ada anak lelaki yang menikah dan semua lansia tetap mampu bekerja” (Chayanov 1966 [1925]: 59).

Bagi Chayanov, naik-turunnya kekuatan tenaga kerja keluarga dan rasio konsumen-pekerja menjadi salah satu kunci untuk memahami perbedaan luasan lahan garapan. Di banyak masyarakat pedesaan, besaran rumah tangga dan luasan lahan garapan berbanding lurus; tetapi kedua busur ini bisa berjalan dua arah—rumah tangga besar bisa saja mampu menggarap lahan lebih luas, tetapi lahan yang luas juga bisa mendorong rumah tangga untuk tetap mempertahankan pola rumah tangga keluarga besar (*extended family*). Gagasan ini telah memicu perdebatan panjang dan kadang kusut antara dua pendekatan dalam menjelaskan diferensiasi sosial di kalangan petani: pendekatan berbasis “demografi” dan berbasis “kelas” sosial. Di satu sisi, Chayanov menekankan pengaruh dur kehidupan rumah tangga, seperti bertambahnya atau berkurangnya anggota yang bekerja. Di sisi lain, ada pandangan seperti yang diajukan Lenin, yang lebih menyoroti perbedaan kelas sebagai faktor utama. Pada masa Chayanov, di banyak daerah Rusia, tanah cukup mudah didapatkan oleh keluarga yang punya cukup tenaga kerja untuk mengerjakannya.

Hal ini membuat daur hidup rumah tangga—seperti bertambahnya anak atau anggota lain yang bekerja—berperan penting dalam menentukan luas lahan yang mereka kelola. Namun, Chayanov juga mengakui bahwa perbedaan luasan lahan garapan tidak hanya disebabkan oleh faktor demografi ini. Dia melihat ada “dua arus kuat” yang bekerja serentak: diferensiasi kelas (sosial) dan diferensiasi demografis (van der Ploeg 2013: 74 dst. [2019: 106 dst.]). Dengan demikian, di beberapa masyarakat, besarnya rumah tangga bisa berpengaruh besar terhadap luasan usaha tani (sebagaimana di utarakan Chayanov untuk Rusia) dan juga terhadap kekayaan rumah tangga, seperti ditemukan Witold Kula di kalangan petani Polandia: “[Rumah tangga mereka] bukan lebih besar karena lebih kaya, melainkan sebaliknya, mereka lebih kaya karena rumah tangga mereka lebih besar” (1976: 66). Namun, di kedua masyarakat ini, dan banyak masyarakat lain di mana struktur penguasaan tanah kurang longgar, penguasaan lahan luas justru mendorong keluarga berukuran lebih besar. Ini terjadi karena petani (orang tua) cenderung punya anak lebih banyak yang hidup dan mempertahankan anak-cucu lebih lama di rumah sebagai keluarga besar, sebagaimana dicatat di atas. Jadi, keragaman besarnya rumah tangga dan luasan lahan tani di suatu masyarakat kerap merupakan hasil dari kedua arus tersebut. Memisahkan pengaruh sosial/kelas dengan pengaruh demografi dalam diferensiasi yang diamati ini merupakan tugas metodologis yang tidak sederhana.²

PEMBAGIAN KERJA BERDASARKAN GENERASI

Sebelum pendidikan formal sekolah diperkenalkan, arena utama pembelajaran bagi anak-anak ialah bekerja dan bermain. Meluasnya keterlibatan anak-anak dalam kegiatan ekonomi—entah membantu orang tua, bekerja untuk orang lain, atau bekerja mandiri—berkait erat dengan munculnya pertanian menetap dan peternakan.

Penelitian arkeologis dan kajian kontemporer tentang masyarakat pemburu-peramu menunjukkan bahwa masyarakat jenis ini cukup efisien dalam memanfaatkan tenaga manusia untuk menghasilkan makan-

an (rasio hasil makanan terhadap input energi manusia), sehingga baik orang dewasa maupun anak-anak (perempuan dan lelaki) tidak perlu bekerja sekeras seperti yang dilakukan di masyarakat pertanian dan peternakan. Anak-anak di masyarakat pemburu-peramu tidak terlalu banyak berperan dalam kegiatan ekonomi hingga berusia remaja, dengan beberapa pengecualian (Lancy 2018: 111–118). Seiring berkembangnya pertanian menetaplah—yang baru muncul sekitar sepuluh ribu tahun lalu di beberapa belahan dunia dan jauh setelahnya di wilayah lainnya—kerja mulai dimaknai sebagai bagian dari masa kanak-kanak: “Perubahan paling mencolok yang dibawa budidaya pertanian ialah cara pandang baru terhadap peran anak-anak dalam bekerja. Dibandingkan di masyarakat pemburu-peramu, anak-anak lebih jelas dipandang sebagai tenaga kerja di hampir semua kelas petani” (Stearns 2006: 11).

Ketika kerja menjadi inti kehidupan anak-anak dan pemuda di masyarakat tani, muncul tegangan antargenerasi yang lebih kuat, dibandingkan di masyarakat pemburu-peramu. Untuk memaksimalkan sumbangsih kerja anak-anak, orang tua “harus memastikan anak-anak mereka tetap bekerja hingga usia remaja akhir ... [sehingga] semua masyarakat tani sangat menekankan pentingnya menanamkan sikap patuh pada anak-anak, dengan harapan kepatuhan ini bakal bertahan hingga anak-anak mereka menjadi pemuda dan membenarkan status mereka sebagai tenaga kerja tanggungan dalam ekonomi keluarga” (Stearns 2006: 13–14). Inilah yang kerap dipandang sebagai penyebab munculnya serta bercokolnya norma dan struktur gerontokrasi patriarkis dalam rumah tangga dan masyarakat agraris. Situasi ini juga memunculkan “pemuda” sebagai kategori generasi tersendiri dan memanjangkan masa peralihan menuju kedewasaan (sosial), yakni ketika perempuan dan lelaki muda tetap tinggal bersama orang tua jauh lebih lama setelah mencapai kematangan biologis, sebelum menikah atau mendapatkan akses atas lahan garapan sendiri.

Dengan demikian, hubungan antara orang dewasa dengan orang muda di rumah tangga dan masyarakat agraris dilandasi ketimpangan

kekuasaan antargenerasi. Namun, meski hubungan generasi di pedesaan dicirikan dengan kedisiplinan ketat, anak-anak dan kaum muda tidak sepenuhnya menjadi korban pasif dari struktur patriarkis; mereka juga punya cara untuk menegosiasikan tingkat otonomi tertentu dalam belenggu struktural ini. Kajian Samantha Punch di Lembah Camacho (Bolivia selatan) menunjukkan bahwa anak-anak perempuan dan lelaki menerima tugas-tugas tertentu tanpa protes, tetapi mereka juga berupaya mempertahankan tingkat otonomi tertentu melalui berbagai siasat, seperti menghindar, menanggulangi, dan bernegosiasi di keluarga. Begitu beranjak dewasa, kesempatan bermigrasi bisa menjadi dimensi baru dalam usaha mereka untuk menggapai kemandirian hidup (Kotak 3.4).

KOTAK 3.4

Saling-Ketergantungan Antargenerasi di Pedesaan Bolivia Selatan

Di Lembah Camacho, sebelum dan sesudah sekolah, rutinitas harian anak-anak juga diisi dengan bekerja:

- Pagi hari: Anak-anak bangun antara pukul 5.00–6.00, mengenakan pakaian kerja, dan, sembari ibu mereka menyiapkan sarapan, mengerjakan beberapa tugas seperti mengambil air dan kayu bakar, mengeluarkan ternak dari kandang, serta memberi makan dan/atau pemerah susunya.
- Berangkat sekolah: Setelah sarapan, mereka mencuci muka, ganti pakaian bersih untuk bersekolah, dan berangkat sekitar pukul 7.20, berjalan kaki menuju sekolah yang dimulai pukul 8.00.

- Sepulang sekolah: Mereka tiba di rumah sekitar pukul 2.00, lalu makan siang yang sudah disiapkan ibu atau kakak mereka.
- Sore hari: Mereka menjaga dan memberi makan ternak, membantu pekerjaan di lahan, mengusung air dan kayu bakar lagi, menjaga adik, mencuci pakaian, atau menyiapkan makanan.
- Senja hari: Sekitar pukul 5.00, mereka menikmati minuman hangat dan camilan, lalu mengumpulkan ternak untuk dimasukkan kandang; kadang tugas ini membutuhkan perjalanan jauh untuk menggiring kambing, domba, atau sapi dari kaki bukit.
- Malam hari: Sekitar pukul 7.00–8.00, mereka menyantap makan malam, dan tidak lama kemudian tidur, biasanya pukul 9.00.

Anak-anak biasanya mengerjakan seabrek tugas ini tanpa banyak mengeluh, bahkan sering merasa bangga karena bisa membantu keluarga. Namun, tidak semua pekerjaan dituruti begitu saja. Meski orang tua mengancam menghukum mereka, anak-anak bisa berdalih untuk menolak tugas yang tidak mereka sukai. Salah satu siasat mereka ialah menghindari: mengoper tugas ke adik, berpura-pura tidak mendengar dan cepat-cepat pergi sebelum perintah diulangi, atau berpura-pura berangkat menjalankan tugas tetapi sebenarnya pergi ke tempat lain untuk bermain bersama teman. Siasat lainnya ialah “menanggulangi”, yakni tetap menerima tugas tetapi dengan siasat tertentu: mengeluhkan kekesalan mereka secara terbuka, mengajak saudara untuk membantu agar lebih menyenangkan dan cepat rampung, atau mengerjakan tugas sambil bermain.

Begitu anak-anak bertambah usia, mereka mulai menunjukkan otonomi. Hal ini menegaskan bahwa sumbangsih orang dewasa dan orang muda saling bergantung dan bisa ditawarkan.

Felicia berkata kepada keempat anaknya: “Ada yang harus memerah susu kambing. Siapa yang mau pergi?” Keempat kakak beradik itu, yang sedang asyik menyiapkan joran untuk memancing di sungai, serentak menjawab: “Bukan aku!” Felicia lalu menunjuk salah seorang dari mereka: “Marco, kau yang pergi.”

Marco (14 tahun) langsung menjawab: “Tidak mau. Kemarin aku sudah bantu kakek menanam.” Setelah keempat anak itu beradu mulut, akhirnya Dionisio, adiknya yang berusia 12 tahun, mengalah. Dengan berat hati, dia berlari ke bukit, memerah susu, lalu cepat-cepat kembali untuk bergabung dengan para saudaranya. (Punch 2001: 31)

Ketika berusia 13 tahun, Antonio bilang kepada ayahnya bahwa dia ingin mulai cari uang sendiri, supaya bisa beli pakaian dan menabung untuk membeli sepeda bekas. Ayahnya setuju untuk memberinya sepetak lahan kecil, sebagai imbalan atas bantuannya menggarap lahan keluarga. Antonio lalu menjual seekor kambing—kado ulang tahunnya beberapa tahun sebelumnya—untuk membeli benih kacang. Dia mengajak adiknya membantu menanamnya; sebagai imbalannya, Antonio berjanji membagi panen lima bedeng tanaman kacang untuk sang adik. Antonio merasa bangga dengan usahanya sendiri, yang juga memberinya kemandirian; kini dia bisa membeli apa yang dia mau, termasuk baju baru, tanpa harus menunggu orang tuanya membelikan. (Punch 2011: 156f)

Sebagian besar pemuda desa tidak punya akses atas tanah atau pekerjaan sepanjang tahun, sehingga pilihan yang tersedia selain membantu pertanian keluarga ialah kerja migran. Namun, bagi banyak anak muda, pengalaman ini bisa terasa sangat menegangkan.

Monica, seorang perempuan 23 tahun, pertama kali pindah ke kota setempat bernama Tarija (Bolivia), kemudian bergeser ke bagian utara Argentina, dan akhirnya ke ibukota Argentina, Buenos Aires. Dia mendapatkan pekerjaan melalui kenalan keluarga dan teman-temannya, dengan memanfaatkan jaringan sosialnya sendiri. Monica menceritakan pengalaman pertamanya ke Argentina saat berusia 17 tahun: “Awalnya aku tidak betah, karena sangat merindukan keluarga. Aku sering menangis dan merasa kesepian, tapi aku tahan-tahan dan tetap tinggal. Aku pergi karena dari dulu aku ingin ke Argentina. Lalu aku bilang ke orang tua, dan ayah akhirnya mengizinkan aku pergi.” (Punch 2002: 128)

Domingo, seorang remaja 14 tahun yang bekerja di Pichanal, Argentina, bercerita: “Aku pindah ke Argentina karena tidak ada pendapatan sepeserpun di Churquiales. Aku sudah bekerja keras di sana [di rumah] untuk keluarga, tapi mereka tidak membayarku. Uang [yang aku dapat di sini] untukku dan keluargaku.” (Punch 2002: 126)

Sumber: Dikompilasi dari Punch (2001, 2002, 2007, dan 2011).

PENDIDIKAN, PEMISKINAN KETERAMPILAN, & ALIENASI

Seperti dibahas di Bab 1, masa kanak-kanak dan masa muda telah mengalami pemanjangan di beberapa generasi masa kini. Salah satu aspeknya, masing-masing generasi masa kini tersebut menghabiskan lebih banyak waktu untuk bersekolah, dibandingkan generasi orang tua mereka. Kini, di banyak daerah pedesaan seantero dunia, kita bisa melihat perbedaan mencolok antargenerasi dalam hal pendidikan: kakek-nenek yang tidak pernah bersekolah atau hanya menempuh SD beberapa tahun saja, ayah-ibu yang tamat SD dan mungkin SMP, sementara anak-anak mereka bisa melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah atau bahkan kuliah.

Sebelum ada sekolah formal, anak-anak desa punya banyak cara belajar untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal kehidupan saat dewasa. Di Eropa, misalnya,

petani dan buruh, yang bersekolah sebentar saja atau bahkan tidak bersekolah sama sekali, sama sekali tidak bodoh, terbelakang, atau bahkan buta huruf.³ Mereka belajar melalui sistem pendidikan “mangang” di keluarga dan masyarakat tempatan, dengan banyak keunggulan: anak-anak punya kebebasan untuk bergaul dengan orang dewasa ... sistem ini mendorong pengembangan/pengasahan bakat individu dalam interaksi sosial, sehingga tidak begitu bikin suntuk seperti bila dilakukan sendirian. ... Dan metodenya mudah disesuaikan dengan ragam jalur karier di tiap keluarga, baik berdasarkan jenis kelamin maupun urutan kelahiran (anak sulung atau bungsu). (Heywood 2001: 160)

Pendidikan wajib mulai diterapkan bukan karena tuntutan dari masyarakat bawah. Namun, “Bukan berarti keluarga petani dan kelas pekerja tidak peduli dengan pendidikan. Lebih tepatnya, mereka punya agenda [pendidikan] tersendiri, yang sering kali berbeda ... dengan agenda pemerintah.” Kebanyakan pembaharu-awal pendidikan

mengamini gagasan bahwa pendidikan seharusnya melanggengkan—bukannya merusak—hierarki serta kepatuhan sosial. Sedangkan para orang tua memandang pendidikan sebagai sarana untuk mendapatkan “keterampilan beraksara di bidang kerajinan atau perniagaan, memahami ajaran agama, dan menggapai harapan emansipasi politik dan mobilitas sosial” (Heywood 2001: 165–166).

Pengenalan sekolah formal merupakan proses yang berlarut-larut dan tidak merata, seperti digambarkan dalam cerita dari Prancis berikut ini (Kotak 3.5).

KOTAK 3.5

Kerja, Sekolah, dan Alienasi di Pedesaan Prancis

Sebelum ada sekolah formal, anak-anak di keluarga petani biasanya mulai membantu pekerjaan rumah sejak berusia 6 tahun, untuk menjaga adik, mengambil air, mengusir burung yang menyerbu tanaman di ladang, mengumpulkan kotoran hewan di jalan, membantu orang dewasa membajak tanah dengan hewan, dan dipercaya untuk *la garde des bestiaux*—menjaga unggas, babi, domba, kambing, atau sapi. Pembelajaran bertahun-tahun ini berlangsung melalui kerja (*sur le tas*), dengan mengamati dan membantu kerja orang dewasa, layaknya magang secara informal di pertanian.

Petani skala kecil dan buruh tani menjadi kelompok terakhir di masyarakat Prancis yang mengirim anak-anak mereka ke sekolah atau memaksa anak-anak mereka rutin hadir ke sekolah. Di wilayah dataran tinggi Haut-Doubs, misalnya, pada akhir abad XIX dan awal abad XX, “anak-anak berbondong-bondong bo-

los sekolah, terutama selama musim panas, dan sering absen pada berbagai kesempatan lain.”

Kurikulum sekolah dalam banyak hal tidak nyambung dengan kenyataan hidup pedesaan dan pengetahuan lokal. Anak-anak tidak dididik tentang pedesaan, kekayaan tumbuhan beserta manfaatnya, atau hal-hal lain yang dipahami dengan baik oleh warga desa tapi tidak dikuasai oleh para guru di sekolah. Salah satu orang tua mengingat dulu pernah bolos sekolah untuk belajar lebih banyak dari pemburu-gelap tentang cara bergerak secara senyap dan menemukan tempat persembunyian binatang buruannya. Seorang lain menyayangkan bahwa pelajaran ilmu hayat (botani) di sekolah tidak pernah menyebutkan tumbuhan yang akrab di kalangan petani. Bersekolah berarti dikurung lima hari seminggu, mempelajari hal-hal yang tidak berguna bagi kehidupan sehari-hari, sementara di luar sana begitu banyak hal menarik untuk dipahami.

Pada abad XX, keterlibatan anak muda secara perlahan-lahan dalam dunia pekerjaan khas masyarakat agraris mulai berubah seiring diterapkannya kebijakan pemerintah yang menetapkan batas usia wajib sekolah dan kapan mereka boleh mulai bekerja. Pada akhir abad XIX, batas usia ini ditetapkan sekitar 12 atau 13 tahun, lalu dinaikkan menjadi 14 tahun setelah 1936. Perubahan ini pun berdampak besar, salah satunya membuat anak-anak makin “terpisah dari dunia kehidupan orang dewasa” (Heywood 2007: Bab 10).

Akses atas sekolah formal, terutama yang bergaya Barat, telah begitu meluas sejak paruh abad XX. Pada abad XXI ini, rasanya akan sangat

aneh kalau tidak ada SD di desa, juga sekolah menengah yang jaraknya mudah dijangkau, jika bukan di desa setempat. Banyak anak desa, lelaki maupun perempuan, masih bersekolah hingga usia belasan akhir atau lebih (Ansell 2015: 309–314; Lancy 2018: 314).

Pengenalan program wajib belajar di pedesaan kerap ditentang oleh anak-anak maupun orang tua. Banyak yang merasa bahwa “Sekolah tidak berkaitan dengan kehidupan anak-anak di desa—“pedagogi” (metode pengajaran)—nya sangat buruk, anak-anak sering merasa bosan atau gelisah di kelas, dan yang terpenting, sekolah mengganggu anak-anak untuk membantu perekonomian keluarga” (Lancy 2018: 215). Bagi anak-anak desa, bersekolah tidak selalu menggantikan arena rumah, kerja, dan bermain; sebaliknya, sekolah justru menjadi ruang belajar tambahan yang (diharapkan) bisa melengkapi pengalaman mereka (Bourdillon *et al.* 2010: Bab 6; Lancy 2018: Bab 8). Seperti bisa dilihat pada kasus di Bolivia, anak-anak yang menghabiskan beberapa jam sehari di SD biasanya masih bisa tetap membantu pekerjaan keluarga. Namun, ketika mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi—dengan jam belajar lebih lama dan jarak sekolah lebih jauh dari rumah—keterlibatan mereka dalam pekerjaan menurun drastis; hal ini juga membuat mereka mengalami pemiskinan keterampilan (*de-skilling*) terkait pertanian serta kecakapan lain untuk bertahan hidup di pedesaan, seperti terlihat pada kasus di Jawa berikut ini (Kotak 3.6).

KOTAK 3.6

Memanjangnya Masa Kanak-Kanak dan Masa Muda di Sebuah Desa Jawa

Zaman dulu, saat masih bocah, kami biasa berlarian telanjang—sekarang semua anak sudah pada pakai baju dan ber-

sekolah, bahkan sudah bisa bantu-bantu pekerjaan rumah sejak usia delapan tahun. (Seorang lelaki mengenang masa kecilnya pada 1920-an, dari catatan lapangan penulis, Oktober 1973)

Anak-anak zaman sekarang, saat sore atau malam hari setelah sekolah, jarang yang bantu orang tua; mereka sukanya nonton tv. (Seorang guru SD, 1999, dari catatan lapangan penulis)

Kaliloro merupakan sebuah desa padat penduduk di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Ketika saya pertama kali melakukan penelitian lapangan di desa ini (1972–1973), lebih dari sepertiga rumah tangga tidak punya sawah, sementara 40 persen lainnya punya sawah tidak sampai 0,2 hektar, luasan yang hasil padinya saat itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan sebuah keluarga selama setahun. Semua rumah tangga tersebut saat itu menjalankan kerja-majemuk (*pluriactivity*), memadukan kerja pertanian dan kerja upahan di luar pertanian. Berdasarkan tuturan sejarah lisan yang dihimpun pada awal 1970-an, serta dua survei “alokasi waktu” kerja anak-anak dan orang dewasa—yang pertama pada 1973 dan kedua satu generasi kemudian pada 2000—terbangun gambaran cukup jelas tentang bagaimana sumbangsih kerja anak-anak di desa ini berubah selama tiga generasi.

Di awal abad XX, sangat sedikit orang Jawa pedesaan yang bersekolah formal. Ketika Sekolah Rakyat mulai dibuka di pedesaan pada 1920-an, sebagian anak lelaki (dan sangat sedikit perempuan) berkesempatan memperoleh pendidikan selama tiga tahun, yang mencakup dasar-dasar membaca-menulis-berhitung

(calistung), bahasa Jawa, dan beberapa keterampilan terapan. Sekolah hanya berlangsung tiga jam sehari, sehingga tidak terlalu mengganggu pola bekerja dan bermain anak-anak.

Mengingat masa kanak-kanak mereka pada akhir masa penjajahan (1920-an–1940-an), beberapa informan yang berusia lebih tua menyebutkan berbagai jenis pekerjaan yang mereka lakoni. Yang umumnya disebut ialah menanam, menyiangi rumput, dan memanen padi (terutama perempuan); menanam dan memanen jagung (perempuan dan lelaki); mengarit/meramban pakan ternak dan memandikan/menggembalakan ternak (terutama lelaki); kerja upahan membuat (sebelum usaha batik bangkrut saat krisis hebat 1930-an) dan menenun kain (1940-an–1970-an—keduanya umumnya dikerjakan anak perempuan); dan berbagai pekerjaan kerajinan tangan rumahan seperti menganyam tikar pandan (perempuan) dan tikar bambu (lelaki dan perempuan).

Selain melakukan kerja-kerja yang meningkatkan hasil dan pendapatan rumah tangga ini, anak-anak juga membantu beragam pekerjaan domestik: memomong adik (perempuan dan lelaki, tetapi umumnya perempuan), mengusung air dan mencari kayu bakar (perempuan dan lelaki), memasak dan pekerjaan rumah lainnya (utamanya perempuan). Para remaja lelaki juga turut serta dalam gotong royong dan *sambatan*, kadang untuk menggantikan lelaki dewasa; sementara anak-anak dari keluarga petani penyalak atau tunakisma adakalanya ditiptipkan ke keluarga elite tuan tanah sebagai kawula (*ngenger*), khususnya untuk mengurus ternak (bagi lelaki) dan pekerjaan rumah tangga (bagi perempuan). Situasi anak ini mengandung unsur kepatuhan dan patronase.

Pada awal 1970-an, bekerja dan bersekolah sudah dianggap lumrah dan sepatutnya dalam proses tumbuh dewasa anak-anak. Hampir semua anak menamatkan enam tahun SD, meski lebih

banyak anak lelaki daripada perempuan yang melanjutkan ke SMP (sering kali berhenti pada usia 15 tahun). Namun, pendidikan formal pada masa itu belum terlalu mengganggu peran anak-anak dalam bekerja. Anak-anak (lelaki maupun perempuan) di usia sekolah dasar (6–12 tahun) dan sekolah menengah (13–18 tahun) memberikan sumbangsih cukup besar dalam pekerjaan rumah maupun yang langsung mendatangkan pendapatan. Anak-anak usia 6–12 tahun rata-rata bekerja selama 30 jam sepekan; kalau waktu sekolah ditambahkan, maka mereka sibuk bekerja dan bersekolah selama sekitar 50 jam sepekan. Di kalangan remaja, perbedaan gender tampak jelas: dalam seminggu, laki-laki menghabiskan 39 jam untuk bekerja dan total 58 jam untuk bekerja dan bersekolah, sementara perempuan, yang umumnya sudah tidak bersekolah, bekerja 73 jam sepekan (seperti ibu mereka). Di semua rumah tangga petani kecil dan tunakisma ini, dari total jam kerja yang dihabiskan, lebih dari separuhnya dilakoni anak-anak. Tetapi hanya sebagian kecil dari jam kerja ini yang dihabiskan untuk pertanian; sebagian besar kerja anak-anak dicurahkan untuk keperluan rumah tangga seperti mencari kayu bakar, mengurus ternak dan meramban/mengarit pakannya, dan (untuk anak perempuan) kerajinan tangan. Semua pekerjaan anak-anak ini memungkinkan orang dewasa (lelaki dan perempuan) untuk lebih fokus bekerja pertanian (di lahan milik sendiri atau menjadi buruh tani upahan), perdagangan, dan kegiatan lain yang langsung menghasilkan pendapatan.

Pada 2000—satu generasi kemudian, ketika anak-anak ini sudah dewasa dan punya anak sendiri—hampir semua anak bersekolah hingga usia 15 tahun, dan mayoritas anak lelaki maupun perempuan usia 16–18 tahun bersekolah setingkat SMA. Kegiatan/tugas sekolah (kehadiran, perjalanan, dan PR) makin menyita

waktu anak-anak. Jam kerja “riil” mereka pun berkurang drastis, dan ini terkadang menjadi sumber tegangan antara orang tua dan anak, meski keluhan umum orang tua bahwa anak-anak tidak lagi membantu mereka sepertinya berlebihan. Pada kelompok usia 13–18 tahun, anak lelaki masih bekerja sekitar 18 jam seminggu, sementara anak perempuan bekerja 27 jam seminggu. Meski anak-anak usia ini masih bekerja, baik lelaki maupun perempuan kini menghabiskan nyaris 40 jam seminggu untuk bersekolah dan mengerjakan tugas rumah—yang mana di Barat sudah dinilai sebagai aktivitas penuh waktu.

Meski kini kerja anak-anak di lahan tidak begitu penting, baik anak lelaki maupun perempuan masih ke sawah saat musim sibuk, khususnya panen. Namun, dalam penelitian kami selanjutnya di Kaliloro pada 2017–2018, kami menemukan bahwa remaja saat ini merupakan generasi pertama yang, dalam banyak kasus, hampir tidak pernah menginjakkan kaki di sawah orang tua mereka. Proses pemiskinan keterampilan dan keterasingan dari dunia pertanian sudah berjalan begitu jauh (White 1976, 2012b; White dan Margiyatin 2016; White dan Wijaya 2019).

Pengalaman bersekolah sangat memengaruhi pembentukan identitas kaum muda. Sejak dimulainya sistem pendidikan formal dan terbukanya peluang kerja profesional, pemuda desa barangkali sudah memimpin masa depan di luar pertanian, dan orang tua dari kalangan petani kecil juga berharap anak-anak mereka mengejar cita-cita yang menjauhi pertanian. Kita telah menyimak cerita-cerita masa lalu dari fenomena ini di Bab 2. Pendidikan sendiri, dalam bentuknya yang sekarang, turut berperan dalam memiskinkan keterampilan bertani generasi muda

pedesaan; profesi bertani tidak dihargai lagi, dan bertani pun dianggap sebagai pilihan terakhir (pekerjaan rendahan) bagi mereka yang tidak berhasil dalam bersekolah (Katz 2004). Ketika martabat masa depan pertanian dan kehidupan pedesaan direndahkan, inilah salah satu alasan mengapa banyak pemuda desa enggan bercita-cita menjadi petani—satu persoalan yang akan kita kupas lebih lanjut di Bab 4 dan 5.⁴

Terkait persoalan pemiskinan keterampilan, menarik untuk menelusuri bagaimana gagasan tentang “hak pemuda untuk mencari nafkah” makin hilang dari wacana kebijakan internasional. Hampir seabad lalu, Liga Bangsa-Bangsa yang masih muda, melalui Deklarasi Hak-Hak Anak (1924), menyatakan: “Anak harus diberi kesempatan untuk mencari nafkah ... dan harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi.” Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB (1948) pun disebutkan: “Anak ... harus mendapatkan keterampilan yang membuatnya mampu mencari nafkah pada saatnya ... dan harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi.” Namun, tema ini hilang dalam konvensi HAM dan hak anak yang muncul berikutnya. Dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (1989), perlindungan dari eksploitasi masih dipertahankan, tetapi persiapan untuk mencari nafkah tidak lagi disebutkan sebagai tujuan pendidikan (White 2005: 324).

Pemiskinan keterampilan kaum muda pedesaan diperparah oleh pandangan kaku dari berbagai organisasi yang memperjuangkan hak anak untuk mengalami masa kanak-kanak yang “bebas dari kerja”, yakni masa kanak-kanak yang sama sekali tanpa pengalaman dunia kerja. Padahal, berbagai kajian menunjukkan manfaatnya bekerja bagi perkembangan anak; bahkan pemuda yang memadukan sekolah dengan kerja paruh-waktu punya peluang lebih baik di pasar tenaga kerja setelah tamat sekolah (Bourdillon *et al.* 2010: Bab 6). Karl Marx sangat menentang pelecehan dan eksploitasi anak di bawah kapitalisme, tetapi dia meyakini bahwa pekerjaan paruh-waktu bisa bermanfaat bagi kehidupan anak-anak dan pemuda, asalkan dipadukan dengan pendidikan.

Kami menganggap bahwa kecenderungan industri modern yang membuat anak-anak dan remaja (perempuan maupun lelaki) sama-sama melakoni seabrek kerja reproduksi sosial ialah arah kemajuan, masuk akal, dan absah, meskipun, di bawah kapital, sering kali diselewengkan menjadi bentuk eksploitasi kejam. Di masyarakat yang rasional, setiap anak, mulai usia 9 tahun, seharusnya menjadi pekerja produktif, sebagaimana tak satu pun orang dewasa bugar boleh dikecualikan dari hukum umum alam, yakni bekerja untuk mendapatkan penghidupan dan bekerja tidak hanya dengan otak tetapi juga dengan tangan.

Marx menganjurkan agar pekerjaan anak usia 9–12 tahun, baik di luar maupun di dalam rumah, dibatasi hingga 2 jam per hari, sementara untuk usia 13–15 tahun maksimal 4 jam, dan untuk usia 16–17 tahun paling lama 6 jam; semua pemberi kerja juga wajib memastikan bahwa pekerjaan anak dipadukan dengan pendidikan, baik untuk perempuan maupun laki-laki (Marx 1866).

Ketika pemuda desa yang berpendidikan mengalami pemiskinan keterampilan, mereka juga merasakan keterasingan dari keluarga dan lingkungan pedesaan, seperti dalam cerita dari Prancis di atas. Sekolah secara perlahan menggantikan peran-peran penting yang sebelumnya diemban keluarga. Sekolah, bersama kelompok-kelompok sebaya yang dibentuk berdasarkan usia di dalamnya, kini bersaing dengan keluarga untuk memperebutkan waktu dan perhatian anak-anak. Kita pun menyaksikan kecenderungan “makin terpisahnya anak-anak dari pergaulan dengan orang dewasa,” karena hubungan kegiatan anak-anak dan orang dewasa makin terputus (Hareven 2000: 120). Proses alienasi ini mencerminkan tidak hanya keengganan kaum muda membantu orang tua mereka dalam pekerjaan tani, tetapi juga tidak terpenuhinya cita-cita mereka untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dan mengasyikan. Di Jaunpur, India Utara, di mana banyak pemuda saat ini merupakan generasi pertama atau kedua yang bersekolah,

orang tua sering merasakan hubungan mereka dengan anak-anak muda terdidik makin renggang; mereka mengeluhkan buruknya komunikasi serta sikap hormat anak-anak muda terhadap mereka; mereka juga mengungkapkan kekecewaan mendalam, bahkan kebencian dan kemarahan, terhadap perilaku anak-anak mereka. ... Cerita tentang kegagalan dan kekecewaan [terhadap kaum muda] ini ... umumnya menyoroti ketidakmampuan pemuda, terutama lelaki, untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan sesuai harapan keluarga. ... Namun, para orang tua juga terus mengeluh bahwa pemuda terdidik enggan membantu pekerjaan rumah dan pertanian. Perempuan muda yang berpendidikan kerap digambarkan sebagai sosok yang “berbusana indah” dan “jijik dengan tahi sapi.” (Morarji 2016: 228)

Di Inggris modern, perasaan terputus dari dunia pertanian dan kehidupan pedesaan tercermin pada keluhan remaja perempuan dan lelaki di sebuah desa di wilayah tengah (Midlands). Mereka merasa tidak punya keterikatan atau minat dengan dunia pertanian; mereka juga mengeluhkan minimnya peluang untuk mencari uang di desa, sulitnya transportasi ke kota, serta kurangnya ruang untuk bermain atau berkumpul; setiap kali mencoba berkumpul, mereka sering diusir oleh “para tetua” yang menganggap mereka cuma mengganggu.

[Bagaimana rasanya kehidupan di sini?] Membosankan. Sepi. ... Tidak ada pekerjaan, ya beginilah desa. Kalau mau kerja, kau harus pergi keluar desa, dan butuh transportasi (Perempuan, 15 tahun).

Kami dilarang ke sana [tanah pertanian di pinggir perumahan baru yang sedang dibangun]. ... Ada papan besar bertuliskan “DILARANG MASUK, PENYEROBOT AKAN DIPROSES HUKUM.” Kami pernah ke sana sekali, dan tiba-tiba ada orang keluar dan mengomeli kami (Laki-laki, 13 tahun).

Waktu itu aku sedang berjalan bersama teman-teman di pinggir-an sungai kecil, tiba-tiba si kakek tua meneriaki kami “JANGAN MASUK TANAHKU!” ... Dasar si tua gila, dia pikir dia siapa! Itu kan cuma jalan setapak di samping rumah (Perempuan, 14 tahun). (Matthews dan Tucker 2011: 97–99)

KERJA-MAJEMUK LINTAS-SEKTOR & LINTAS-TEMPAT

Sebagaimana dijelaskan di Bab 1, satu elemen kunci dalam reproduksi dan keberlangsungan rumah tangga tani—baik petani pemilik tanah maupun tunakisma—ialah kemampuan mereka untuk mengandalkan beragam pekerjaan di samping pertanian. Kerja-majemuk lintas sektor (*pluriactivity*) dan lintas tempat (*plurilocality*) memainkan peran kunci dalam reproduksi sosial, diferensiasi sosial, dan perjalanan hidup lintas generasi. Di masyarakat pedesaan yang terdiferensiasi, petani besar dan menengah punya cara serta tujuan berbeda dibandingkan kelompok yang punya lahan sempit dan tidak punya lahan sama sekali dalam memanfaatkan sektor nontani. Bagi rumah tangga kaya yang memiliki usaha tani luas atau berstatus tuan tanah, surplus hasil tani biasanya digunakan untuk investasi di usaha-usaha nontani yang lebih padat-modal dan memberikan hasil lebih besar, seperti pengolahan hasil tani, transportasi, buka toko, perniagaan besar, dan lain-lain; keuntungan dari usaha-usaha ini biasanya digunakan untuk membeli lebih banyak tanah. Sebagaimana terjadi di Rusia pada akhir abad XIX menurut Lenin, elite desa, yang meskipun sedikit jumlahnya, bisa menguasai sebagian besar ekonomi pedesaan.

Dari segi jumlah, kaum tani borjuis terbilang minoritas kecil dalam masyarakat tani, mungkin tidak lebih dari seperlima dari jumlah rumah tangga keseluruhan. ... Namun, bobot mereka dalam total produksi pertanian, jumlah sarana produksi yang dimiliki, dan hasil panen secara keseluruhan, kaum tani borjuis ini sungguh

mendominasi. Merekalah penguasa pedesaan saat ini. (Lenin 1960 [1899]: 178)

Surplus hasil tani juga sering digunakan untuk membiayai migrasi generasi muda anggota rumah tangga, sedangkan keluarga yang tidak mampu menghasilkan surplus harus berutang untuk membiayai migrasi itu. Tabungan dan uang kiriman dari anggota keluarga yang merantau bisa digunakan untuk memperluas tanah, memodali kerja usaha tani, atau merintis usaha nontani.

Berbeda dengan petani skala besar, rumah tangga petani gurem atau tunakisma biasanya mengandalkan bukan modal tetapi tenaga kasar untuk bekerja di luar pertanian. Pekerjaan ini umumnya memberi penghasilan sangat kecil, bahkan kerap lebih rendah dibandingkan upah buruh tani harian; pekerjaan ini tetap dilakoni demi menambah penghasilan minim dari lahan sempit yang hanya cukup untuk bertahan hidup (White 1976). Lenin pernah menggambarkan kehidupan sejumlah besar rumah tangga petani gurem itu yang agak cocok dengan situasi sekarang: “pertanian kecil di sepetak lahan sempit, dengan kondisi usaha tani menuju kehancuran total ... tidak mampu bertahan hidup tanpa menjual tenaga kerja ... dan memiliki standar hidup yang sangat rendah” (Lenin 1960 [1899]: 177–178). Meski hasil panen dari lahan sangat sempit sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, produksi pertanian kecil tetap menjadi *salah satu* sumber penghidupan penting bagi rumah tangga. Bahkan, pertanian lahan sempit bisa lebih produktif (per hektar) dibandingkan pertanian lebih besar, dan tidak selalu dalam “kondisi menuju kehancuran total.” Dengan melakukan kerja-majemuk (*pluriactivity*), rumah tangga petani kecil bisa menghasilkan pendapatan dan penghidupan yang lumayan layak, tidak hanya dari menjual tenaga kerja, tetapi juga dari usaha mandiri seperti dagang kecil-kecilan, kerajinan, dan lain-lain.

Ketika bermigrasi secara besar-besaran, generasi dewasa muda desa sering kali meninggalkan anak-anak mereka untuk diasuh oleh kakek-

nenek; akibatnya, muncul desa-desa dan rumah tangga yang seolah “bolong”, hanya dihuni oleh anak-anak dan kakek-nenek lansia. Fenomena ini sangat jelas di pedesaan Tiongkok saat ini. Kerja-majemuk lintas sektor, baik di desa setempat maupun dengan bermigrasi, sudah lama menjadi ciri kehidupan rumah tangga pedesaan di Tiongkok. Industrialisasi pesat di Tiongkok sejak dulu sangat mengandalkan tenaga kerja murah dari kalangan pemuda desa. Dan desa masih menyediakan jaring pengaman informal bagi tenaga kerja industri: pekerja yang sakit, kehilangan pekerjaan, atau cacat bisa pulang kampung, sementara desa juga menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang ditinggalkan (anak-anak, pasangan, orang tua lansia) (van der Ploeg dan Ye 2016).

Pola mobilitas sirkuler ini—yang di banyak negara lain juga berlangsung walaupun tidak seekstrem di Tiongkok—membawa dampak positif maupun negatif bagi kehidupan pedesaan. Keluarnya orang-orang dari desa mengurangi tekanan terhadap lahan pertanian, sementara pengiriman uang dari perantau membantu keberlangsungan kerja pertanian dan meningkatkan kondisi kehidupan di desa. Keterhubungan dengan pertanian pun tetap terpelihara. Jika kota tujuan tidak begitu jauh, pemuda perantau biasanya pulang kampung untuk membantu orang tua ketika menyiapkan lahan dan panen; bahkan ada yang pulang kampung untuk menetap setelah berhasil menabung cukup banyak, atau saat orang tua mereka meninggal atau jompo sehingga harus ada anak yang mengurus rumah dan lahan. Tidak semua perantau balik kampung, tetapi mereka yang kembali biasanya membawa sumberdaya baru dan membantu pembangunan pedesaan (van der Ploeg dan Ye 2016: 26, 34). Dengan demikian, keterlibatan generasi muda dalam pekerjaan nontani—baik di dalam maupun di luar desa—tidak selalu berarti mereka benar-benar meninggalkan pertanian; dalam beberapa kasus, ini justru menjadi siasat untuk memungkinkannya masa depan mereka di pertanian, sebagaimana diuraikan di Bab 4 dan 5.

Di sisi lain, migrasi para dewasa muda (perempuan maupun lelaki) menciptakan struktur desa dan rumah tangga “bolong” di mana “anak-anak yang ditinggalkan” tumbuh bersama kakek-nenek (Ye dan Pan Lu 2011; Ye 2011). Melalui survei tentang anak-anak yang ditinggalkan di lima provinsi dengan tingkat migrasi tertinggi, Ye dan Pan Lu (2011: 363) menemukan bahwa sebagian besar anak diasuh oleh kakek-nenek (69 persen), sementara jumlah yang diasuh oleh ibu, ayah, atau kerabat lainnya jauh lebih sedikit, masing-masing 19 persen, 5 persen, dan 4 persen; sedikit saja anak yang mengurus diri sendiri. Kotak 3.7 menyuguhkan kisah kehidupan seorang anak perempuan yang tumbuh dalam keluarga yang “terbelah” semacam ini.

KOTAK 3.7

Tumbuh di Keluarga Terbelah di Pedesaan Tionggok

Yuegang, sebuah desa di Provinsi Szechuan, merupakan contoh tipikal desa agraris, dengan hasil tani utama jagung, sayuran, serta buah jeruk dan biwa. Tanah pertanian di desa ini sangat terbatas, hanya sekitar 0,5 *mu* (kurang dari 0,04 hektar) per orang, dan sekitar 70 persen pendapatan tunai bersumber dari kiriman uang para perantau. Lebih dari 80 persen perantau yang sudah menikah telah pergi bersama pasangan mereka, meninggalkan anak-anak di desa untuk diasuh oleh kakek-nenek.

Dongyue, seorang gadis berusia 9 tahun, telah tinggal bersama neneknya (berusia 68 tahun) sejak berumur 2 tahun, setelah disapih ibunya. Kedua orang tuanya bekerja di pabrik elektronik di kota. Mereka bertekad kuat mengumpulkan uang agar bisa membangun rumah baru di desa. Mereka merantau ke kota dengan membawa adik lelaki Dongyue yang berusia 2 tahun, teta-

pi meninggalkan Dongyue bersama neneknya. Mereka hanya pulang kampung setahun sekali selama sekitar sebulan saat Tahun Baru Imlek.

Dongyue bersekolah Senin–Jumat di sebuah sekolah-asrama yang berjarak sejam jalan kaki dari desanya. Neneknya memikul semua tanggung jawab, dari pekerjaan rumah, pekerjaan lahan, hingga mengasuh cucu. Selain menggarap lahan milik sendiri seluas 3 *mu* dengan menanaminya jagung, buah, serta sayuran, nenek Dongyue juga menyewa 1 *mu* lahan untuk ditanami kanola (*Brassica napus*, sumber minyak nabati). Uang kiriman dari orang tua Dongyue sebagian besar digunakan untuk memodali pertanian (beli benih, pupuk, pestisida), selain untuk biaya sekolah Dongyue. Saat musim sibuk, neneknya bekerja di lahan sejak jam enam pagi hingga petang, bahkan terkadang menunda makan malam sampai jam sembilan. Dia tidak ikut kelompok gotong royong yang dibentuk untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja, karena dia merasa terlalu renta untuk kerja fisik buat orang lain. Dongyue menjadi tenaga tambahan penting bagi neneknya; dia menghabiskan akhir pekan untuk mencari kayu bakar, membantu kerja di lahan, atau bersih-bersih rumah, sampai-sampai hampir tidak punya waktu untuk mengerjakan tugas sekolah atau bermain. Saban malam Minggu, Dongyue berkunjung ke rumah tetangga untuk menerima telepon selama sepuluh menit dari orang tuanya yang biasanya memintanya agar rajin belajar dan membantu neneknya.

Dalam kehidupan sehari-hari, Dongyue dan neneknya saling bergantung untuk menyelesaikan berbagai persoalan, baik terkait pertanian, keadaan darurat, maupun urusan lain rumah tangga. Makin banyak rumah tangga di desa ini yang mengalami situasi serupa (Pan Lu 2011).

Bab ini telah menunjukkan bahwa dengan kehadiran sekolah formal, anak-anak dan pemuda pedesaan cenderung mengenyam pendidikan lebih tinggi (atau setidaknya lebih lama) ketimbang orang tua mereka. Pendidikan, setidaknya sampai batas tertentu, telah menggeser posisi sentral kerja dalam kehidupan dan identitas anak-anak. Atau mungkin lebih tepatnya, “kegiatan kerja sekolah telah menggantikan pekerjaan lainnya,” karena kerja utama dan wajib anak-anak bukan lagi berkontribusi pada penghidupan rumah tangga, melainkan memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagaimana diajarkan guru di sekolah (Qvortrup 2001; Bourdillon *et al.* 2010: 115). Namun, pada saat bersamaan, anak-anak bisa mengalami pemiskinan keterampilan pertanian dan kecakapan harian lainnya, serta makin terpisah dari kehidupan orang dewasa. Di masyarakat pedesaan yang terkomodifikasi dan terdiferensiasi, anak-anak dan pemuda juga mengalami diferensiasi dalam hal gaya hidup dan kepemilikan barang. Meski begitu, ada satu aspek yang menyatukan mereka. Selama mereka masih menjadi tanggungan di rumah tangga, seberapa pun kaya atau miskin orang tua mereka, atau seberapa besar apa pun kemungkinan mereka mewarisi sumberdaya agraria di masa depan, tetap saja mereka dalam kondisi tidak punya tanah. Tidak sampai satu dari sepuluh orang muda desa di Afrika, Asia, serta Amerika Latin—dan di banyak negara bahkan tidak sampai satu dari dua puluh orang—yang memiliki sebidang tanah sendiri (IFAD 2019: 25).

Bab berikutnya membahas dinamika pengalihan sumberdaya agraria antargenerasi serta negosiasi dan tegangan yang muncul di seputar proses ini, ketika kaum muda “menanti mendapatkan tanah”.

CATATAN

- 1 Bagian ini didasarkan pada White (1980), di mana contoh-contoh ini dibahas lebih rinci.
- 2 Beberapa upaya awal yang telah dilakukan antara lain kajian Teodor Shanin (1972) tentang kaum tani Rusia selama 1910–1925 serta kajian Carmen Deere dan Alain de Janvry (1981) tentang diferensiasi demografis dan sosial di antara kaum tani Peru.
- 3 Ketika tidak ada sekolah, atau ada hanya untuk anak-anak kelas atas, orang tua yang kadang mengajari anak-anak mereka keterampilan membaca dan menulis, dan dengan demikian keterampilan ini diwariskan dari generasi ke generasi.
- 4 Tentang “pemiskinan keterampilan” anak-anak dan pemuda desa, baca Katz (2004).

BAB 4

Menantikan Tanah

Setiap kali generasi lebih tua digantikan oleh generasi baru, keberadaan rumah tangga petani dalam susunannya yang lama ikut dipertanyakan. ... Proses ini sangat dipengaruhi oleh aturan-aturan mengenai pewarisan, yang menentukan pengalihan sumberdaya dan penguasaan atasnya dari generasi tua ke generasi muda.

—Wolf (1966: 73 [1983: 129])

ALIH-GENERASI SUMBERDAYA AGRARIA

Sebagaimana dibahas di bab-bab sebelumnya, masyarakat tani umumnya sangat ditandai patriarki, baik dalam hubungan gender maupun generasi (Ní Laoire 2002; Stearns 2006). Dengan berkembangnya pertanian menetap, muncul kecenderungan di rumah tangga petani untuk memiliki lebih banyak anak. Hal ini berkaitan erat dengan kebutuhan tenaga kerja dalam pertanian nonmekanis, di mana produktivitas sangat bergantung pada jumlah tenaga kerja rumah tangga. Sehingga orang tua merasa perlu mengendalikan kerja anak-anak mereka, yang biasanya terlihat dari pola pendisiplinan keras dan budaya menghormati generasi tua. Beberapa sejarawan bahkan berpendapat bahwa hal inilah yang mendorong kemunculan serta makin dominannya patriarki di masyarakat agraris seantero dunia (Stearns 2006: 11–13). Patriarki di sini dipahami seturut makna asalnya, yakni hierarki mapan yang menempatkan laki-laki lebih unggul dari perempuan *dan* yang tua lebih unggul daripada yang muda.

Namun, dalam struktur patriarkis ini, kaum muda tidak selalu diam sebagai korban; mereka tetap memiliki apa yang disebut “agensi yang dibatasi” (lihat Bab 1). Bab sebelumnya telah membahas kajian etnografis

tentang cara “tradisional” anak-anak pedesaan tumbuh dewasa, di mana mereka yang ingin bertani (sering kali lelaki, tapi dalam beberapa kasus juga perempuan) bernegosiasi dengan orang tua atau kerabat dewasa lainnya agar mendapatkan sebidang tanah untuk digarap sendiri; ada juga yang bekerja sebagai buruh upahan di lahan milik orang lain dan, sampai taraf tertentu, bisa menguasai hasil kerja mereka sendiri.¹ Namun, pertanyaannya, di negara dan kawasan mana saja kondisi seperti ini masih memungkinkan kaum muda pedesaan untuk mengakses sumberdaya agraria dan memulai produksi secara mandiri seperti dalam cerita-cerita itu? Salah satu alasan mengapa banyak pemuda desa menunjukkan keengganan pada pertanian mungkin bukan karena mereka tidak suka bertani, melainkan karena harus menanti terlalu lama sebelum berkesempatan untuk bisa bertani secara mandiri.

Bab ini dimulai dengan ulasan singkat tentang berbagai cara pengalihan sumberdaya agraria antargenerasi, baik sebelum maupun sesudah penguasa sumberdaya meninggal dunia. Berikutnya mengupas negosiasi, perselisihan, dan tegangan antargenerasi maupun intragenerasi yang mewarnai proses-proses tersebut, dengan menggunakan studi kasus dari Eropa, Afrika, dan Asia. Pembahasan ini mencakup satu bagian tentang gender yang bersaling-silang dengan generasi dan kelas sebagai salah satu mekanisme utama penyingkiran struktural dalam alih-generasi sumberdaya agraria.

Di kalangan petani skala kecil—yang berbeda dengan masyarakat peladang dan pemburu-peramu—pengalihan sumberdaya agraria antargenerasi menjadi faktor penting yang melanggengkan serta memperkuat ketimpangan (Borgerhoff Mulder *et al.* 2009; Shenk *et al.* 2010). Begitu tanah menjadi hak milik, pengalihannya antargenerasi menjadi satu “faktor yang menentukan tingginya dan bercokolnya derajat ketimpangan di masyarakat yang mempraktikkan pertanian intensif” (Shenk *et al.* 2010: 65). Isu ini mengantarkan kita kembali ke beberapa kajian dan debat klasik tentang alih-generasi sumberdaya agraria, yang umumnya berfokus pada Eropa dan Afrika Sub-Sahara. Penelitian Jack Goody

bersama rekan-rekannya pada 1970-an menjadi salah satu tonggak penting dalam kajian ini (Goody 1971; Goody 1976; Goody *et al.* 1976).

Pewarisan sumberdaya agraria (dalam arti sempit pengalihan setelah kematian) sesungguhnya merupakan tahap terakhir dalam proses panjang pengalihan sumberdaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses yang lebih luas ini, termasuk pengalihan sumberdaya sebelum kematian, dikenal dengan istilah “devolusi” (Goody 1976). Proses ini dilaksanakan dalam berbagai bentuk yang sangat beragam di seluruh dunia. Pertama, jenis hak yang dialihkan (berbagai bentuk hak milik dan hak guna) beragam antartempat dan antarwaktu. Hak ini bisa mencakup hak atas tanah dan sumberdaya agraria lainnya, dan dalam beberapa kasus hak atas orang lain, misalnya istri (seperti ditunjukkan dalam cerita dari Burkina Faso di Kotak 4.1) atau budak. Kedua, meski pengalihan ini umumnya mengarah secara vertikal (ke satu atau lebih ahli waris di generasi berikutnya) daripada lateral (ke pewaris di antara saudara atau sepupu dalam generasi yang sama), ada banyak cara yang menentukan siapa yang layak menjadi pewaris; pola pengalihan ini bisa bersifat patrilineal (melalui garis laki-laki), matrilineal (melalui garis perempuan), atau ambilineal (melalui garis perempuan dan laki-laki); bisa dibagi di antara ahli waris atau tidak bisa dibagi (diberikan secara utuh kepada seorang ahli waris); dalam pewarisan yang tidak dapat dibagi, yang lebih diutamakan untuk menjadi ahli waris bisa anak sulung (*primogeniture*) atau anak bungsu (*ultimogeniture*), atau siapa pun yang ditunjuk tanpa mempertimbangkan urutan kelahiran.

Hukum dan praktik pewarisan ternyata “tidak hanya melibatkan pengalihan (hak atas) kekayaan materiel setelah kematian; [praktik dan hukum ini juga] mencakup reproduksi hak, kewajiban, dan perasaan antarkerabat, serta reproduksi relasi kepemilikan yang pada akhirnya memperkuat hierarki sosial berbasis gender dan kelas” (Rahman dan van Schendel 1997: 239). Dalam menilik pola dan praktik pewarisan kekayaan antargenerasi, penting untuk membedakan antara “hukum”, “adat”, dan praktik di lapangan. Selain itu, perlu disadari bahwa “adat”

dan praktik nyata tidak hanya berbeda satu sama lain, tetapi juga dapat berubah seiring waktu—seberapa pun dianggap mapan dan mengakar. Perubahan ini digambarkan dengan baik oleh Cole dan Wolf dalam kajian mereka yang membandingkan komunitas penutur bahasa Jerman dan penutur bahasa Romawi di Tyrol selatan, Italia, lebih dari setengah abad lalu. Pada masa itu, pewarisan tak-terbagi (*impartible*) yang diberikan kepada anak sulung lelaki merupakan praktik ideal sekaligus aktual di kalangan penutur bahasa Jerman, seperti halnya dengan orang Bavaria di seberang perbatasan (Wolf 1970). Sedangkan, tidak jauh dari sana, di kalangan penutur Romawi, warisan bisa dibagi dan ambilineal, di mana anak lelaki dan perempuan mendapatkan sama besar (Cole dan Wolf 1974). Saat mengunjungi kembali komunitas berbahasa Jerman di Santo Felix dua dasawarsa kemudian, Cole terkejut ketika menjumpai bahwa sistem pewarisan telah berubah, dari hak waris tunggal untuk anak lelaki sulung menjadi anak perempuan bungsu (*ultimogeniture*); dan anehnya, “warga desa mengatakan kepada etnograf bahwa beginilah adat istiadat mereka sejak dulu” (Hann 2008: 151, mengutip Cole 2003).

TEGANGAN ANTARGENERASI & INTRAGENERASI

Potensi perselisihan antara bapak dan anak lelaki di masyarakat Mossi berakar pada struktur masyarakat itu sendiri, terutama sistem pewarisan yang dianut. (Skinner 1961: 60)

Gesekan antargenerasi dan dalam satu generasi terkait alih kepemilikan tanah atau kekayaan lain dari satu generasi ke generasi berikutnya bukanlah hal baru. Masyarakat agraris punya ciri khas yang sangat umum: hasrat orang tua yang menua untuk mempertahankan wewenang mereka dengan tetap mengendalikan kekayaan keluarga di satu sisi, dan di sisi lain penentangan anak-anak untuk memperoleh bagian kekayaan keluarga, membentuk rumah tangga sendiri, serta mencapai status dewasa secara ekonomi dan sosial. Namun, cukup mengejutkan

bahwa gejala umum ini hampir luput dari perhatian penelitian terkini, kecuali tentang Afrika Sub-Sahara.

Kita bisa menemukan banyak contoh dari sejarah masyarakat tani Eropa. *Rata-rata* angka harapan hidup di masyarakat ini memang rendah, tapi bukan berarti semua atau sebagian besar orang tua mati lebih awal sehingga tanah mereka segera diwariskan kepada anak-anak mereka yang masih muda. Perbedaan rata-rata angka harapan hidup sebagian besarnya disebabkan oleh perbedaan tingkat kematian di kelompok balita dan anak, bukan di antara orang yang bertahan hidup hingga dewasa. Usia orang dewasa yang bertahan hidup cenderung jauh lebih panjang dibandingkan angka harapan hidup di masyarakat tersebut, seperti tergambar dalam cerita dari Tuscany abad XV berikut ini.

Dari kacamata generasi muda, banyak orang tua hidup terlalu lama. Misalnya, di daerah pedesaan sekitar Florence pada 1427, sebanyak 17,5 persen populasi berusia lebih dari 57 tahun. ... Kebanyakan lelaki lanjut usia tetap memegang kendali penuh atas pengelolaan lahan keluarga sampai mereka uzur atau meninggal. Akibatnya, generasi muda calon ahli waris harus menanti hingga berusia 45 atau 50 tahun sebelum mewarisinya. (Watts 1984: 59)

Di pedesaan Irlandia pada 1930-an, “bahkan pada usia 45 dan 50 tahun, jika orang tuanya belum mengalihkan kepemilikan lahan, si lelaki kampung itu tetap menjadi ‘bocah’, baik dalam hal kerja pertanian maupun dalam kosakata warga desa.” Fenomena ini, di mana orang dewasa secara biologis tetap dianggap “bocah” hingga usia paruh baya, bisa dimengerti kalau dilihat dari perspektif generasi tua: jika tanah diwariskan terlalu cepat, “seluruh jejak kendali orang tua terhapuskan ... para orang tua tidak lagi bisa menuntut bantuan dari anak-anak mereka” (Arensberg dan Kimball 1968: 40). Hal ini merangkum dilema yang dihadapi petani lansia dan anak-anak mereka yang masih remaja atau

dewasa muda; di Eropa, dilema ini sering diatasi dengan penandatanganan perjanjian resmi antara orang tua dan anak.

Selain itu, ada masalah waktu. Dalam banyak kasus, pewarisan lahan setelah kematian orang tua bukanlah strategi terbaik ... [karena] bisa menggoda generasi muda, yang sudah lelah menanti, untuk menguasai semua kekayaan secara serakah. ... Di Finlandia, seperti di negara-negara lain Eropa Utara, jalan keluar yang umum diambil untuk mengatasi masalah ini ialah kesepakatan antargenerasi di mana seorang ahli waris mengambil alih [lahan] dari satu atau kedua orang tuanya yang masih hidup ... penggunaan perjanjian tertulis untuk meresmikan pengalihan lahan tani *inter vivos* (di antara yang hidup) seperti ini sudah ada sejak dulu. (Abrahams 1990: 157–158)

Orang tua yang mempertahankan kendali atas sarana produksi hingga uzur bisa menghambat ambisi kaum muda. Makanya tidak heran kalau kaum muda kerap memiliki perasaan ambivalen terhadap orang tua mereka. Tetapi perasaan ini sebenarnya saling berbalas. Ketika petani tua melimpahkan kendali atas lahan kepada anak, dia merasa perlu memastikan posisinya tetap aman agar tidak kehilangan kekuasaan maupun sumber penghidupan. Di Calenberg (Lower Saxony) abad XVII, jika lahan tani diserahkan kepada ahli waris secara resmi ketika orang tua masih hidup, biasanya mereka membuat perjanjian yang disebut *Leibzucht*. “Perjanjian ini biasanya berisi klausul yang menyatakan bahwa ahli waris wajib menyediakan kebutuhan pangan, papan, dan sandang dalam jumlah tertentu buat orang tua yang pensiun, dan menjamin orang tua tetap memiliki hak untuk mendapatkan sebagian hasil dari lahan tersebut” (Berkner 1976: 78). Di Languedoc (Prancis) abad XV,

perjanjian [hibah] mencakup ketentuan khusus untuk mencegah sikap durhaka terhadap orang tua. Suatu perjanjian ... secara khusus

menyatakan bahwa tempat tidur kakek tidak boleh diganggu gugat, begitu juga jatah makannya. Kutukan akan menimpa pasangan muda yang berani menjual tempat tidur atau mengurangi jatah makanan itu! Dan terkutuklah cucu yang berani menjual ranjang dan selimut neneknya! (Le Roy Ladurie 1974: 33)

Di masa kini, cerita-cerita semacam jarang sedramatis itu. Tegangan antargenerasi memang selalu mungkin terjadi, kadang bisa saja menge-muka sebagai permusuhan terbuka, tetapi lebih sering terselubung dalam sikap diam, menghindar, atau retorika normatif berbakti dan menghormati orang tua. Satu cerita dramatis tentang sikap diam dan menghindar terkait pewarisan disajikan oleh Elliot Skinner dalam kajiannya tentang orang Mossi di Burkina Faso (dulu Upper Volta) sekitar dua generasi lalu (Kotak 4.1).

KOTAK 4.1

Perselisihan Ayah-Anak di Masyarakat Mossi, Burkina Faso

Di kalangan orang Mossi, para ayah meyakini punya hak penuh atas segala hal yang dimiliki atau dihasilkan oleh anak lelaki mereka, karena merasa bertanggung jawab atas kelahiran anak lelaki. Meski jarang diungkapkan secara terbuka, ada pemahaman bahwa anak lelakilah yang nantinya mewarisi semua harta ayah mereka.

Salah satu sumber utama konflik antara ayah dengan anak lelaki umumnya terkait istri. Dalam budaya Mossi, istri biasanya diperoleh melalui pewarisan atau perjodohan yang diatur dalam lingkup keluarga besar. Ikatan pernikahan ini biasanya diatur antara lelaki yang menjalin hubungan “persahabatan” untuk saling bertukar perempuan sebagai istri.

Karena biasanya hanya lelaki lebih tua yang punya kendali penuh atas perempuan dan harta benda dan bisa punya “sahabat”, para lelaki muda pun sulit mendapatkan istri. Lelaki muda diwajibkan menghormati para istri ayah mereka dengan sikap sangat formal. Namun, hubungan kaku ini kerap menjadi rumit karena anak lelaki muda maupun para perempuan istri itu menyadari bahwa suatu saat nanti mereka mungkin akan menikah. Untuk menghindari situasi canggung ini, orang Mossi menerapkan mekanisme penghindaran antara kedua belah pihak.

Para ayah di masyarakat ini cenderung merasa gelisah dengan pertumbuhan anak lelaki mereka, terutama sulung. Anak sulung kerap dianggap sebagai ancaman karena dialah pewaris utama yang akan menggantikan posisi ayahnya setelah mati. ... Ketika saya tanya mengapa anak sulungnya duduk jauh sekali darinya, sedangkan anak-anak yang lebih muda duduk dekat dengannya, seorang kepala adat berkata, “Karena dia akan mewarisi semua yang aku miliki setelah aku mati, untuk apa dia harus dekat-dekat denganku sekarang?!”

Orang Mossi menganggap durhaka kalau seorang anak lelaki menginginkan ayahnya mati, dan tidak ada juga yang mengungkapkan keinginan ini secara terbuka, tetapi mereka meyakini ada lelaki muda yang “hanya menantikan ayahnya mati.” Kematian seorang ayah, entah diharapkan atau tidak, memang membuka kesempatan besar bagi seorang lelaki untuk mewarisi istri dan kekayaan ayahnya.

Bahkan setelah kematian, permusuhan antara ayah dan anak lelaki tidak reda begitu saja. [Anak lelaki] harus tetap menunjukkan bahwa dia menghormati peninggalan ayahnya. Misalnya, jika seorang anak lelaki memutuskan untuk meninggalkan rumah ayahnya ketimbang membangun rumah baru, dia harus menutup

gerbang lama yang biasa digunakan ayahnya dan membuat gerbang baru. Begitu pula, jika dia menikahi para istri ayahnya, dia harus menutup pintu-pintu lama yang biasa digunakan ayahnya ketika mengunjungi para istri itu, dan harus membuat pintu-pintu baru (Skinner 1961: 56–59).

Beralih ke cerita yang tidak sedramatis ini, ada satu hal yang cukup umum tapi jarang diteliti: pembicaraan mengenai rencana pewarisan/penerusan (suksesi) lahan pertanian umumnya menjadi topik tabu antara orang tua dan calon ahli waris mereka. Di Irlandia, di mana model suksesi lahan tani secara tradisi mengikuti garis keturunan lelaki dan bersifat tak terbagi, Anne Cassidy meneliti pewarisan yang dianggap “tidak sesuai norma”, yang mana calon pewarisnya ialah perempuan. Di tiga dari empat kasus yang dia bahas secara rinci, meski pasangan petani sudah lansia dan anak-anak mereka sudah cukup dewasa, mereka belum pernah membahas suksesi bersama-sama. Salah satu narasumber Cassidy ialah Aisling, seorang mahasiswa doktoral berusia paruh 20-an dan salah satu dari tiga anak perempuan pasangan peternak sapi perah (Kotak 4.2).

KOTAK 4.2

Dilema Pewarisan Peternakan yang Dialami Seorang Anak Perempuan di Irlandia

Di keluarganya, Aisling merasa sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas masa depan peternakan keluarga dan tidak rela jika tanahnya dijual. Sejak kecil, dia merasa punya hubungan erat dengan peternakan itu dan sering membantu pekerjaan di

sana, seperti mengemudikan traktor dan memberi makan ternak. Namun, seiring bertambahnya usia, minatnya pada aktivitas peternakan makin memudar ... [meski begitu] ketika dewasa, kepeduliannya pada segi praktis peternakan mulai timbul lagi, sebagiannya karena besarnya rasa tanggung jawab untuk mempertahankannya. Bagi Aisling, menjadi petani/peternak bukan persoalan gender: bahwa dia tidak berminat menjadi petani/peternak bukan karena dia perempuan, melainkan karena dia sendiri yang secara pribadi memang tidak tertarik.

Apa pun rencana yang akan diambil untuk peternakannya, situasinya makin rumit karena neneknya yang sudah lansia masih sangat terlibat dalam pengelolaan peternakan. Jika terjadi perubahan besar pada peternakan, neneknyalah yang akan sangat terpuak. Masalah pewarisan ini membayangi hidup Aisling, memengaruhi keputusannya tentang tempat tinggal dan pekerjaan.

Rasanya aku tidak berminat menjadi petani/peternak ... tapi pada saat yang sama aku juga membayangkan kalau ... peternakan itu dibiarkan begitu saja ... ditinggalkan saja tanpa diurus ... rasanya sulit.

Dilema ini makin rumit karena keluarganya enggan membicarakan masa depan peternakan itu, meski Aisling berulang kali mencoba mengajak mereka membahasnya. Keluarganya tampaknya lebih memilih menunda keputusan sampai entah kapan. (Cassidy 2019: 243–245)

Kisah lain dialami oleh Joan, seorang mahasiswa dan salah satu dari tiga anak perempuan pasangan peternak sapi dan unggas. Di masa kecil-

nya, Joan sudah dianggap sebagai “petani/peternak” oleh ayahnya yang “agak otoriter”, karena dia melakukan banyak sekali pekerjaan, termasuk yang umumnya dianggap sebagai “pekerjaan lelaki”.

Hubungan Joan dengan peternakan agak rumit. ... Meski sudah lama meninggalkan rumah untuk berkuliah, dia masih terlibat [mengurus peternakan], utamanya karena ada semacam rasa bersalah dan keinginannya untuk membalas jasa orang tuanya yang telah membiayai pendidikannya. Meski dia menjadi calon kuat penerus, Joan sebenarnya tidak tahu siapa yang seharusnya mewarisi peternakan keluarganya, karena dia dan kedua saudara perempuannya sama-sama tidak ingin meneruskannya. Dia merasa menjadi calon kuat penerus karena sudah berperan layaknya “peternak” sungguhan. Tapi Joan sebenarnya tidak ingin itu terjadi, dan ... dia tidak berniat meneruskan peternakan itu.

Seperti pada dua keluarga lainnya, keluarga Joan juga belum pernah membahas suksesi lahan. Meski demikian, Joan merasa bahwa ayahnya tentu ingin peternakan itu tetap dipertahankan keluarga. (Cassidy 2019: 245–246)

Pada 2015, sebuah proyek konsultasi percontohan memberikan nasehat kepada peternak mengenai pewarisan/penerusan lahan di kawasan peternakan sapi perah di Victoria tenggara, Australia. Dalam beberapa kasus, pasangan peternak yang sudah lansia seperti sulit berbicara dengan anak-anak mereka mengenai harapan dan kecemasan akan masa depan peternakan. Mereka pun membutuhkan mediasi oleh penasihat proyek percontohan itu untuk memahami keinginan anak-anak mereka.

Saya berencana ingin berhenti mengelola peternakan ini sebelum saya berusia 70 tahun, yang tinggal empat tahun lagi, dan [saya perlu] mengetahui apakah salah satu dari dua anak lelaki saya ingin meneruskannya. (Greg, Kasus 1)

Saya menyadari bahwa kami sekeluarga belum pernah sungguh-sungguh membahas [keinginan anak-anak terkait peternakan]. (Simon, Kasus 10)

Anda harus jujur dan memikirkan hal-hal yang mungkin enggan dipikirkan berbagai orang ... Memang mudah menundanya, dan menganggapnya terlalu rumit. (Anne, Kasus 10) (Santhanam-Martin, Bridge, dan Stevens 2019: 263–264)

Tegangan terkait akses tanah bagi pemuda (lelaki dan perempuan) pun makin dirasakan, terutama ketika tanah cadangan sudah dipatoki, sementara pemuda tidak lagi punya kesempatan untuk membuka lahan garapan baru dan harus menunggu tanah yang mungkin diwariskan atau dijatahkan oleh orang tua, kerabat, atau tetua masyarakat. Julian Quan menggambarkan perubahan hubungan pertanahan antarkeluarga di Afrika Sub-Sahara dewasa ini, di mana kaum muda yang ingin bertani menghadapi kesulitan mendapatkan tanah: “Kesulitan kaum muda untuk mendapatkan tanah, pemusatan kepemilikan tanah, serta penjualan dan pembagian tanah oleh generasi tua kepada pihak di luar kerabat bisa menjadi masalah besar, apalagi jika tidak ada pilihan sumber penghidupan lain, dan juga bisa memicu konflik sosial yang meluas” (Quan 2007: 57). Tegangan ini makin tajam seiring komodifikasi pertanian, karena orang tua dan tetua kini bisa menjual atau menyewakan tanah, alih-alih mewariskannya kepada anak-cucu mereka. Cerita tentang tegangan semacam ini terjadi di Pantai Gading, yang telah disinggung sekilas pada halaman pertama buku ini, dan dipaparkan lebih rinci di Kotak 4.3.

KOTAK 4.3

Konflik Pertanahan Antarkeluarga
di Masyarakat Abure, Pantai Gading

Di masyarakat Abure, sistem kekerabatan bersifat matrilineal, di mana hak dan kewajiban terkait tanah dan kekayaan lainnya diwariskan kepada kerabat seturut garis perempuan. Berdasarkan norma yang berlaku di sini, ketika pemilik tanah meninggal, “warisan terlebih dahulu diberikan kepada saudara kandung laki-laki dari mendiang sampai generasi ini habis, kemudian kepada kepোনান kandung laki-laki.” Namun, dalam praktiknya, yang menentukan ahli waris ialah sidang keluarga (Kouamé 2010: 129), yang biasanya diwarnai “perselisihan tajam tentang peran ahli waris keluarga” (Kouamé 2010: 127). Ahli waris tidak berhak menjual tanah warisan, tetapi boleh menyerahkan hak pakai kepada kerabat seturut garis perempuan.

Demam budidaya nanas sejak 1950-an telah diiringi gelombang masuk orang-orang dari Burkina Faso, baik yang menjadi buruh ataupun petani kecil yang menyewa tanah dengan pembayaran tetap atau skema bagi-hasil. Yang berhak menerapkan skema sewa bertarif tetap ialah ahli waris; sementara mereka yang mendapatkan hak pakai boleh menyakapkan lahan sewaan dengan skema bagi-hasil. Penyewaan tanah keluarga ini menjadi sumber tegangan antara kaum tua dan “kaum muda” dalam keluarga. Kaum muda merasa penyewaan tanah itu membuat mereka sulit mendapatkan tanah garapan, karena para tetua lebih memilih menyewakan tanah kepada orang luar; mereka juga merasa tidak mendapatkan bagian yang adil dari uang penyewaan tanah itu. “Kaum muda” yang dimaksud di sini tidak merujuk

pada usia biologis semata, tetapi bisa mencakup kepala rumah tangga maupun lelaki lajang (Kouamé 2010: 133 n.8).

Kalaupun orang tua memberi kami tanah, luasannya terlalu kecil. Mereka lebih suka menyewakan tanah kepada orang Burkina Faso ketimbang kami garap. ...

Begitu orang tua menyewakan tanah, uangnya mereka gunakan tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk mengencani perempuan muda. (Kouamé 2010: 134)

Pada 2001, konflik pecah antara pemuda Abure dengan para penyewa tanah dari Burkina Faso. Para pemuda setempat mengumumkan larangan menyewakan tanah kepada orang asing; mereka juga mengobrak-abrik kebun nanas dan memancangkan bendera merah di bidang-bidang lahan yang sedang disiapkan untuk ditanami, sebagai tanda peringatan, jika lahannya ditanami, maka akan mereka rusak. (Kouamé 2010: 136)

Kojo Amanor (2005) menyuguhkan cerita senada dari bagian tenggara Ghana. Di sana, orang-orang muda kesusahan mendapatkan tanah, karena sebagian besar tanah telah dilepaskan kepada perusahaan sawit Ghana, Oil Palm Development Company. Mereka pun memanen buah kelapa sawit di perkebunan perusahaan pada malam hari; menurut mereka, tanah perkebunan yang seharusnya milik mereka itu telah direbut secara tidak adil, sehingga mereka berhak memanen buah sawitnya. Gelombang pasang-surut pertanian/perkebunan di tanah-tanah cadangan (*frontier*) telah mendorong migrasi tenaga kerja dan memengaruhi penilaian serta komodifikasi atas tanah, yang kemudian

memicu konflik sosial antara penduduk asli dan pendatang, antara ketua adat dan warga, antara pemuda dan tetua, serta antar-anggota keluarga. Pada babak awal, tanah tersedia melimpah, sementara tenaga kerja terbilang langka. Begitu perkebunan meluas dan banyak pendatang yang masuk, penjualan tanah tergantikan dengan penyewaan dan penyakapan. Kemudian, ketika tanah cadangan makin menipis dan tenaga kerja mencapai surplus di kalangan pendatang maupun pemuda bumiputra,

para ketua adat dan tetua kampung ... kini bisa memanfaatkan pekerja pendatang untuk menekan pemuda setempat ... pemuda pun makin bergantung pada tetua untuk mendapatkan tanah, karena mereka tidak bisa lagi membuka tanah hutan di luar kampung ... dan akses mereka atas tanah keluarga tidak bisa dipastikan lagi. Semua ini menyebabkan sengketa dan perselisihan antara pemuda setempat dengan pendatang. ... Akhirnya terjadi krisis. ... Para pekerja pendatang bergeser ke daerah cadangan/rintisan yang baru. ... Pemuda kampung juga tidak lagi bekerja di lahan keluarga, karena tidak pasti mendapat bagian tanahnya meski sudah bekerja keras menggarapnya. Mereka lebih banyak bekerja sebagai buruh dan penyakap, di lahan yang bukan milik keluarga mereka ... pertanian pun berubah menjadi kegiatan perorangan, sementara penyakapan menggantikan mekanisme pewarisan tanah antar-anggota keluarga. (Amanor 2010: 106–107)

Di kalangan petani kecil yang terkomodifikasi, penyewaan tanah secara tunai ataupun dengan skema bagi-hasil antara orang tua dan anak dewasa tampak lumrah, sebagaimana dialami Yaya dari kampung Kali-*loro*, Jawa (Kotak 4.4).

KOTAK 4.4

Yaya: Petani Penyakap di Tanah Mertua

Yaya, yang sudah ditinggal kedua orang tuanya sejak berusia 5 tahun, sudah mulai memburuh saat umur 12 tahun; tetapi dia cukup beruntung, karena majikannya membantunya untuk menamatkan sekolahnya di SMK. Setelah lulus, Yaya merantau di berbagai kota, hingga akhirnya balik kampung saat berusia 20 tahun dan menikah dengan Jarwo. Kini, pada usia 24 tahun, Yaya sudah punya seorang anak lelaki berumur 4 tahun, juga menjadi pengelola utama pertanian keluarga. Tetapi Yaya sama sekali tidak memiliki tanah sendiri, sepetak pun. Semua tanah garapannya ialah milik mertuanya. Ayah mertuanya hanya memiliki 700 meter persegi (0,07 hektar) sawah beririgasi; tetapi, sebagai kepala dusun, dia mendapat *lungguh* (tanah garapan sebagai gaji, dikenal juga sebagai tanah bengkok, dari tanah desa) berupa sawah seluas 0,6 hektar.

Setelah Yaya menikah selama dua tahun dan belajar bertani dengan membantu di sawah mertuanya serta memburuh di sawah milik orang lain, mertuanya menawari Yaya dan Jarwo untuk menggarap 1.000 meter persegi sawah *lungguh* yang sebelumnya digarap oleh penyakap sekampung. Selain itu, sejak sakit dan tidak mampu lagi menggarap sawah, ayahnya Jarwo juga menyuruh mereka menggarap sawah pribadi seluas 700 meter persegi, yang merupakan warisan dari kakeknya Jarwo. Yaya dan suaminya melakukan semua pekerjaan dan menanggung semua biaya input sawah ini, tetapi seluruh hasil panennya harus mereka serahkan kepada ayahnya Jarwo, tanpa menerima bagian sedikit pun. Belakangan, ayahnya Jarwo mengizinkan mereka untuk meny-

kap sebidang sawah lain seluas 700 meter persegi dari tanah *lungguh*-nya, menggantikan penyakap sebelumnya yang dianggap kurang memuaskan.

“Jadi,” kata Yaya, “kami menggarap tiga bidang sawah, semuanya milik bapaknya Jarwo.” Mereka menggarap total 0,24 hektar sawah, semuanya ditanami padi. Namun, dari semua panen, mereka hanya menerima bagian hasil dari sawah seluas 1.000 meter persegi (yang dibawa pulang untuk dimakan) dan setengah hasil penjualan panen dari sawah garapan seluas 700 meter persegi; untuk sawah 700 meter persegi lainnya, mereka tidak mendapat bagian sama sekali. Tentu saja Yaya merasa pembagian ini tidak adil: “Kami mengurus semua pekerjaannya dan membayar semua ongkosnya, tapi saat ikut memanen, kami hanya mendapat 1/6, tidak ada bedanya dengan buruh panen lainnya, cuma 3–4 kilogram beras. Tapi saya juga tidak bisa protes, mau bagaimana lagi.” (Catatan lapangan dari penelitian “Menjadi Petani Muda”)

SALING-SILANG ANTARA GENDER, GENERASI, & KELAS: PENYINGKIRAN STRUKTURAL DALAM ALIH-GENERASI SUMBERDAYA AGRARIA

Selama berabad-abad, keputusan pewarisan lahan tani lebih banyak ditentukan berdasarkan tradisi ketimbang berdasarkan kecocokan dan kemampuan pewaris. Mungkin sudah waktunya untuk memanfaatkan dan menghargai seluruh potensi yang dimiliki keluarga, yang berarti melibatkan anak-anak perempuan. (Schwarz 2004: 222)

Apakah Anda menganjurkan agar perempuan diberi hak atas tanah? Apa yang diinginkan perempuan? Memecah belah keluarga?

(Menteri Pertanian India, menanggapi usulan Bina Agarwal kepada Komisi Perencanaan Reforma Pertanahan India, Juni 1989, dikutip dalam Agarwal 1994: 281)

Gender adalah salah satu mekanisme utama penyingkiran secara struktural dalam pewarisan/pengalihan sumberdaya antargenerasi. Hampir semua negara anggota PBB telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 1979, yang menegaskan bahwa baik lelaki maupun perempuan memiliki “hak yang sama ... terkait pemilikan, pengelolaan, pengambilalihan, dan pelepasan properti” (Pasal 6[h]). Namun, di banyak negara, “perempuan masih kerap didiskriminasi dalam proses pewarisan lahan tani ... mereka biasanya mewarisi lahan hanya ketika skema ‘normal’ pewarisan tidak berjalan” (Symes 1990: 287–288). Menurut perkiraan Food and Agricultural Organization (FAO, organisasi pertanian dan pangan PBB), di negara-negara berkembang saat ini, porsi perempuan hanya 20 persen dari seluruh pemilik tanah, dan ketika benar-benar menguasai tanah, luasannya lebih kecil dan tanahnya lebih tandus [dibandingkan yang dikuasai laki-laki] (FAO 2011).

Di Twente timur, Belanda, petani tetap mempertahankan sistem warisan “tak terbagi”, meski hukum negara sudah lama mengamanatkan hak yang setara kepada semua saudara kandung (Hann 2008: 150, mengutip de Haan 1994). Seperti ditekankan dalam penelitian ulang Cole dan Wolf yang disebutkan sebelumnya, kasus ini mengingatkan kita untuk membedakan antara “hukum resmi” dan “hukum yang hidup” (praktik dan tradisi yang berlaku). Dalam bukunya yang berpengaruh, *A Field of One's Own*, Bina Agarwal menekankan pentingnya membedakan pengakuan klaim atas tanah antara yang bersifat “legal” dan yang berbasis “sosial”, antara pengakuan dan penegakannya, serta antara pemilikan tanah yang sah dan penguasaan yang sesungguhnya berlaku di lapangan. Menurut Agarwal, ketika perempuan “menguasai” tanah, berarti dia mampu membuat keputusan tentang penggunaan serta pe-

lepasannya, menggarapnya sendiri, dan mengelola hasilnya: “Tak satu pun dari semua bentuk penguasaan perempuan atas tanah ini yang bisa dijamin hanya dengan hukum kepemilikan” (Agarwal 1994: 19, 292).

Satu kajian perbandingan tentang hukum dan praktik pewarisan di tujuh negara mayoritas muslim di Afrika dan Asia² menunjukkan bagaimana hukum dan tradisi saling berinteraksi secara kompleks. Di satu sisi, hukum Islam sering dianggap mendiskriminasi perempuan, yang biasanya merujuk pada penafsiran atas ketentuan bahwa anak perempuan hanya berhak mendapat warisan setengah dari warisan anak lelaki. Namun, tafsiran progresif justru memandang hukum ini diberlakukan demi melindungi hak perempuan, karena mengakui perempuan sebagai ahli waris yang layak mendapatkan warisan dengan hak kepemilikan penuh, sekaligus melindungi janda dan anak-anak dari risiko tidak mendapatkan warisan sama sekali. Namun, meski beberapa negara memberlakukan hukum pewarisan ini sebagai hukum formal, praktiknya sangat bervariasi. Di beberapa daerah Indonesia, misalnya, anak perempuan mendapatkan bagian warisan yang setara; sedangkan di beberapa daerah Bangladesh, karena tekanan sosial atau diskriminasi, perempuan sering kali terdepak sebagai ahli waris (Khan 2016).

Diskriminasi berbasis gender dalam akses atas tanah acap terus berlangsung bahkan ketika hukum negara dan syariat agama tentang pertanahan dan pewarisan melarangnya. Di Monglarpura, sebuah desa muslim di Bangladesh, di mana syariat agama dijadikan dasar hukum negara tentang pewarisan, sistem pewarisan mengikuti mazhab Hanafi yang menetapkan warisan terbagi, kepemilikan pribadi, dan pewarisan berdasarkan hubungan kekerabatan atau pernikahan. Tapi, dalam praktiknya, sistem ini tidak mengakui hak perempuan untuk mewarisi tanah dan hanya mengakui hak waris perempuan berupa nafkah dari tanah warisan. Di sini, “Perempuan ‘mewarisi’ dan ‘memiliki’ tanah secara simbolis belaka, sekadar pengakuan bahwa mereka mendapatkan hak nafkah sepanjang hidup. Sesungguhnya mereka tidak diharapkan untuk benar-benar memiliki tanah warisan” (Rahman dan van Schendel 1997: 264).

Di sebagian besar daerah Indonesia, baik perempuan maupun lelaki mempunyai hak waris atas tanah dan kekayaan lain milik keluarga. Namun, di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Manggarai Barat, Flores, perempuan tidak punya hak waris.³ Di sebuah desa di kabupaten ini, Grace—seorang perempuan berusia 33 tahun, sudah menikah, dan punya anak perempuan berumur 4 tahun—menghadapi ketidakpastian besar sebagai petani muda, yang sepenuhnya bergantung pada lahan atas persetujuan dan kemurahan hati kerabat-lelakinya, terutama kedua adiknya (Kotak 4.5).

KOTAK 4.5

Grace, Perempuan Petani Muda Tanpa Hak atas Warisan Tanah

Grace mulai membantu keluarganya menggarap ladang ketika usianya menginjak 10 tahun, saat dia masih SD. Setelah tamat SMP, dia sempat bekerja selama dua tahun di Labuan Bajo, Ibu Kota Kabupaten Manggarai Barat, sebagai pramusaji di sebuah kedai kopi. Inilah satu-satunya pengalaman Grace merantau. Ketika kedua adik-lelakinya meninggalkan rumah, Grace pulang kampung untuk menemani orang tuanya di rumah. Selain membantu berbagai pekerjaan di lahan keluarga, dia juga memburuh di lahan milik orang lain.

Suami Grace berasal dari Ruteng, kecamatan di kabupaten sebelah. Berbeda dengan di Jawa dan banyak daerah lain di Indonesia, perempuan di Manggarai tidak punya hak waris atas tanah atau rumah orang tua; seturut adat setempat, perempuan yang menikah mestinya pindah ke desa suaminya.

Namun, di beberapa kasus, perempuan bisa mendapat akses atas tanah keluarga jika ayahnya meminta dia untuk tetap tinggal di desanya setelah menikah (sehingga suaminya harus pindah ke

desa istri), atau jika dia setuju menikah dengan sepupu (demi mempertahankan garis keturunan keluarga). Tetapi hal ini bisa terjadi hanya kalau ayahnya beserta seluruh kerabat-lelakinya setuju. Inilah yang dialami Grace. Dia mengelola pekarangan dan sebuah kebun seluas 0,5 hektar dari ayahnya, yang ditanami kemiri dan kopi. Dia menuruti keinginan ayahnya untuk tetap tinggal di desanya setelah menikah, dan kedua adik lelaki Grace setuju dengan keputusan ayahnya untuk memberinya hak pakai atas sebagian tanah keluarga, yakni ladang seluas 1.875 meter persegi yang sebenarnya dimiliki adik bungsunya, Roni. Roni merelakan ladang ini untuk digarap Grace karena dia tinggal jauh di Bali. “Saya dikasih ladang itu sebagai penggarap, bukan sebagai pemilik; saya dikasih ladang itu karena saya tidak diizinkan meninggalkan desa,” ujar Grace.

Grace menggarap ladang dengan skema bagi-hasil. Hasil panen padi dibagi tiga: untuk orang tuanya, Roni, dan dia sendiri. Ayahnya menyediakan sebagian biaya penggarapan, sementara Grace menanggung sisanya dan sebagian besar pekerjaan sampai panen. Roni tidak menyumbang apa-apa. Grace membawa pulang seluruh bagiannya untuk dimakan.

Grace melakukan nyaris semua pekerjaan di lahan, dari menyiapkan bedeng penyemaian benih, menebar benih dan menanam, hingga memupuk, menyangi rumput, dan memanen. Suaminya lebih banyak bekerja sebagai buruh bangunan dan sesekali saja membantunya di kebun dan ladang. Tenaga yang dibutuhkan untuk mengurus kebun tidak begitu banyak, karena pohon kemiri dan kopi sudah berusia puluhan tahun, sehingga praktis hanya perlu tenaga untuk memanen.

Grace tak punya harapan bisa beli tanah, entah untuk bertani maupun bangun rumah, karena harga tanah telah melonjak dalam

sepuluh tahun terakhir. Dia juga menyadari bahwa adat setempat memungkinkan adik-adiknya atau pamannya untuk mengambil kembali tanah yang sudah diberikan kepadanya, setelah ayahnya meninggal nanti. Pertimbangan inilah yang mendorongnya untuk mengamankan tanah pemberian ayahnya, di mana dia telah membangun rumah di atas sebagian tanah tersebut. Untuk mengamankan haknya, Grace telah menyiapkan surat hibah tanah untuk ditandatangani oleh Grace sendiri, ayahnya, suaminya, kedua adik-lelakinya sebagai saksi, dan kepala desa. Tiga tanda tangan di surat ini dibubuhkan di atas materai untuk memperkuat keabsahannya secara hukum. Penandatanganan surat ini harus diiringi upacara adat sebagai ungkapan terima kasih kepada ayahnya sekaligus untuk mencegah perselisihan di kemudian hari. Menurut Grace, surat hibah semacam ini merupakan hal baru di desanya; ketika surat itu dianggap sah, dia berencana menyimpan satu salinannya di kantor desa. Sejauh ini Grace baru membuat surat hibah untuk tanah pekarangan, dan belum berencana membuat surat hibah untuk tanah kebun. Dia memprioritaskan untuk mengamankan tanah pekarangan karena khawatir kalau adiknya berubah pikiran dan mendepaknya dari rumah. “Tanah itu sangat penting bagi kami, para perempuan, karena kebanyakan dari kami di sini adalah petani, dan kami tidak bisa bertani di tanah orang lain. Ada seorang perempuan yang menggarap ladang milik orang lain, tapi ketika panennya berhasil, pemilik tanah tersebut memintanya kembali.” (Ambarwati *et al.* 2019)

Hambatan yang dihadapi perempuan muda untuk terjun ke pertanian bisa bersifat materiel, kelembagaan, maupun ideologis, termasuk bagaimana peran berbasis gender dalam pertanian dipersepsikan dalam

wacana lokal, nasional, dan politik pertanian. Ruth Liepens (1998) menjelaskan ihwal ini melalui analisis wacana tentang narasi gender dalam pertanian di Australia dan Selandia Baru, yang didasarkan pada wawancara dan teks tertulis. Narasi pertama menggambarkan “petani dan aktivitas bertani dengan maskulinitas hegemonik: lelaki perkasa, bekerja di luar ruangan, dan sering dengan kerasnya alam.” Narasi kedua bermuatan maskulinitas ditemukan dalam politik pertanian, di mana para lelaki pemimpin di sektor ini digambarkan sebagai sosok “maskulin” karena kepemimpinan mereka yang tegas dan vokal, dengan ditopang posisi politik yang strategis dan berpengaruh. Narasi ketiga menggambarkan perempuan sebagai pihak yang patuh, selaras dengan maskulinitas hegemonik di narasi pertama; di sini, perempuan dipandang melalui “gagasan feminitas yang didasarkan pada hubungan pernikahan dan kekerabatan, kerja pengasuhan, serta ranah domestik” (Liepens 1998: 374). Seperti yang disampaikan seorang pemimpin organisasi petani di Australia kepada Liepens: “Saya pribadi tidak suka melihat perempuan bekerja di lahan. Perempuan sudah berkontribusi besar ... [kalau] rumah tangga berjalan lancar, semuanya beres. Peran mereka adalah di rumah, menjawab telepon, membantu sana-sini, dan sering kali mengelola pembukuan. Semua ini sudah jadi fondasi penting yang mendukung semuanya” (Liepens 1998: 378). Namun, ada juga narasi alternatif yang mulai berkembang, yang mengonstruksi “perempuan petani” dengan cara berbeda; narasi ini mengakui “kenyataan bahwa perempuan juga bertani dan, dengan demikian, (bisa saja) berjibaku dengan alat-alat berat, kerja fisik, dan mengelola bisnis usaha tani. ... Meski perkembangan semacam ini membuka peluang menjanjikan ... wacana umum dalam organisasi petani maupun media cetak pedesaan cenderung lamban dalam merepresentasikan para perempuan ini [secara setara]” (Liepens 1998: 375).

Caitriona Ní Laoire (2002) menggambarkan “kemunculan (atau kebangkitan kembali) jenis maskulinitas yang lebih terbuka dan lebih luwes” di kalangan lelaki petani muda di Irlandia. Menyebutnya “ke-

bangkitan kembali” cukup relevan, karena di banyak masyarakat, upaya untuk membangun konstruksi baru perempuan petani yang mandiri sesungguhnya menegaskan kembali aspek-aspek kemandirian perempuan desa yang sebelumnya tergerus oleh proses-proses formalisasi (sertifikasi tanah, akses kredit usaha tani, distribusi pengetahuan pertanian, dan sebagainya), seperti yang kita lihat dalam beberapa cerita tentang transformasi agraria yang dipaparkan di Bab 2.

Di dataran tinggi Saiss, Maroko, pengaruh kuat norma gender tampak jelas pada cita-cita kaum muda. Di satu sisi, para lelaki muda berharap menjadi pembaharu pertanian, seperti mengembangkan pertanian organik atau kebun buah untuk ekspor dengan teknologi irigasi tetes. Di sisi lain, para perempuan muda justru merasa masa depan mereka bukan di pertanian; mereka lebih berharap bisa membuka usaha bakeri, jahitan, atau usaha lain, dan/atau menikah serta tinggal di kota dengan rumah cadangan di desa (Bossenbroek 2016: 118).

Mengingat sulitnya akses tanah pertanian bagi kaum muda, tak heran kalau banyak pemuda desa memilih bermigrasi, daripada menjadi “pengangguran terselubung” selama bertahun-tahun di desa (Jeffrey 2010), hanya bekerja membantu orang tua atau kerabat tua lainnya. Siapa yang mau menunggu sampai usia 40 atau 50 tahun untuk menjadi petani? (White 2012a: 14). Namun, ketika pemuda meninggalkan desa, bukan lantas serta-merta bisa dianggap bahwa mereka benar-benar melepaskan diri dari kehidupan pedesaan dan pertanian untuk selamanya; kemungkinan mereka akan kembali ke pertanian di masa depan merupakan pertanyaan terbuka yang layak diteliti lebih lanjut.

Bab ini telah menyuguhkan banyak cerita yang menggambarkan adanya perselisihan atau tegangan tak terucap antara generasi muda dan tua terkait akses atas tanah. Namun, Jonathan Rigg dan rekan-rekannya mengingatkan dengan tepat bahwa hubungan antargenerasi tidak melulu berkonflik, tetapi justru bisa saling bergantung; generasi tua dan muda juga bisa bekerjasama dalam mengelola pertanian maupun memanfaatkan tenaga kerja mereka masing-masing secara sangat efektif

(Rigg *et al.* 2019: 12). Sebagaimana dibahas di Bab 1, menuanya populasi petani kecil juga tidak bisa dianggap sebagai masalah sederhana yang terjadi hanya karena generasi muda emoh menjadi petani atau tidak sanggup memulai bertani, atau karena orang tua mereka yang enggan atau tidak bisa berhenti bertani serta meneruskannya kepada generasi muda. Dari penelitian di tiga desa di Thailand timur-laut, Jonathan Rigg dan koleganya menganjurkan bahwa kita tidak bisa lagi mengkotakkan secara kaku orang desa sebagai “petani” atau “bukan petani”. Klasifikasi ini, menurut mereka, mengabaikan kenyataan bahwa banyak rumah tangga tani sebenarnya bersifat multifungsi:

Jika memusatkan perhatian pada petani tua penuh-waktu, kita tidak bisa menangkap kenyataan bahwa kegiatan bertani biasanya dikerjakan oleh beragam kerabat, kadang saat akhir pekan atau petang hari, sembari mereka berupaya menyeimbangkan kehidupan dan mata pencaharian. ... Di seluruh pedesaan Asia yang sedang berkembang ... sebagian besar rumah tangga dan banyak orang bekerja lintas-sektor, tani maupun nontani, sepanjang pekan, dari musim ke musim, dan dalam berbagai tahap kehidupan. ... Ini merupakan hal lumrah, bukan luar biasa. (Rigg *et al.* 2019: 4, 9)

Terkait “rumah tangga petani yang menua”, Rigg dan koleganya menggambarannya dengan cara yang memperkuat argumen mereka (Kotak 4.6).

Migrasi massal orang-orang muda dari pedesaan dan impian mereka untuk masa depan yang jauh dari pertanian tidak lantas membunyikan lonceng kematian pertanian skala kecil di generasi mendatang. Bab berikutnya membahas lebih dalam isu ini, menatap masa depan dengan pertanyaan sederhana tapi mendalam: “Siapa yang ingin menjadi petani?” di masa kini.

KOTAK 4.6

“Rumah Tangga Petani yang Menua”
di Ban Lao, Thailand Timur-Laut

Rumah tangga ini dikepalai oleh Mae Suk Watthana, seorang janda berusia 75 tahun, yang mengelola sawah seluas 9 *rai* (1,44 hektar) yang masih tercatat sebagai hak miliknya. Secara administratif, Mae Suk merupakan contoh petani menua yang dipandang “bermasalah” oleh para pembuat kebijakan dan sebagian akademisi.

Namun, Mae Suk tidak bekerja sendirian. Seorang anak lelakinya yang menduda dan anak perempuannya yang menjanda turut membantunya menggarap lahan, begitu pula cucu-cucunya. Tapi Mae Suk menekankan bahwa dialah yang mesti “memimpin” atau mengajari mereka dalam bisnis bertani.

Dua anak saya ini bekerja di pabrik. Mereka berangkat bekerja ke pabrik seperti biasa, [tetapi juga] bekerja di sawah saat musim tanam. [Mereka] ambil cuti dari kerja pabrik untuk menanam padi, saat dibutuhkan.

Untuk membajak tanah, Mae Suk telah membeli traktor tangan, yang biasanya digunakan oleh cucunya yang cedera karena kecelakaan lalu lintas sehingga tidak bisa lagi bekerja penuh-waktu.

Kasus ini ... menunjukkan betapa sulitnya mengategorikan Mae Suk hanya sebagai “petani yang menua”. Pertama, pekerjaan tani di rumah tangga ini terlaksana bersamaan dengan berbagai kegiatan lain. Meski secara resmi Mae Suk merupakan satu-

satunya petani penuh-waktu di rumah tangga ini, tetapi ... dia dibantu oleh anak dan cucunya; pembagian kerja mereka juga cukup kompleks, baik dalam sepekan maupun antarmusim. Koreografi kerja ini dimungkinkan sebagiannya berkat mekanisasi yang mengurangi beban kerja fisik, dan yang lebih penting, pertanian di keluarga ini tidak diprofesionalisasikan. Di keluarga ini, anggota yang lebih muda masih memiliki ikatan dengan tanah dan pertanian. Lahan-lahan tani kecil belum digabung menjadi usaha tani besar. Di desa-desa tempat kami penelitian, serta di sebagian besar Thailand dan Asia, kebanyakan lahan tani, seperti milik Mae Suk, hanya seluas 1 atau 2 hektar (Rigg *et al.* 2019: 10).

CATATAN

- 1 Dua cerita, dari Indonesia dan Bolivia, ditampilkan di awal Bab 1; untuk cerita dari Zimbabwe, lihat Reynolds (1991).
- 2 Bangladesh, India, Pakistan, Indonesia, Senegal, Togo, dan Mali.
- 3 Di kabupaten sebelahnya, Bajawa—sebagaimana Manggarai Barat, mayoritas penduduknya ialah Katolik Roma—yang sebagian besar warganya berasal dari kelompok etnik Naga yang bersifat matrilineal, justru laki-lakilah yang tidak bisa mendapat warisan.

BAB 5

Siapa Mau Jadi Petani?

Aku tidak pernah mau jadi petani. ... Lebih enak jadi buruh pabrik; kerjanya tidak perlu kepanasan, tidak kotor. Upahnya bisa buat beli HP, pakaian, kosmetik, tas, atau barang-barang lain yang dibutuhkan remaja. Bisa juga ditabung buat orang tua.

—Nona S, 19 tahun, migran pencari kerja
di kawasan industri Bekasi (Leavy dan Hossain 2014: 25)

Driss bukannya tidak sudi bertani, tetapi dia ingin pergi entah ke mana untuk mewujudkan rencana hidupnya, yang jauh dari pengawasan dan kekangan ayah dan keluarganya, juga dari lingkungan sekitarnya. [Saat ini] dia bertani dengan para saudara-lelakinya di lahan milik ayahnya dan di bawah kendali ayahnya. ... “Aku ingin pergi ke tempat lain. ... Aku sangat muak dengan keadaan di sini. Aku cuma ingin memiliki sesuatu sendiri, sesuatu yang bisa aku jadikan pegangan. Proyekku sendiri, uangku sendiri.”

—Driss, 29 tahun, sarjana pertanian di wilayah Saiss, Maroko
(Bossenbroek *et al.* 2015: 344–345, 347)

Ketika ditanya kamu kerja apa, jangan bilang *nalima tu* [“Aku cuma bertani”]. Katakan, “Aku adalah seorang petani!” (Adhiambo, laki-laki petani, Kenya barat, 27 Maret 2014). *Nalima tu* ... menggambarkan suatu kehidupan pertanian kecil yang gurem dan mengandaimkan ... pekerjaan yang tidak menghasilkan serta membosankan, juga cara masyarakat luas meremehkan pertanian. “Saya bertani!” [ialah] pernyataan yang diungkapkan dengan keteguhan, kebanggaan, dan

kepuasan, yang mengandung makna kecerdasan dan kemungkinan penghidupan mandiri secara keuangan melalui pertanian.

—Mwaura (2017: 1310–1311)

Di bab ini, kita kembali menilik masalah-masalah yang diajukan di Bab 1. Apakah pertanian skala kecil atau pertanian besar industrial yang akan menjadi basis pertanian di masa depan, dan apakah generasi pedesaan di masa datang akan menjadi (atau ingin menjadi) bagian dari masa depan itu? Bagian pertama bab ini menyelidik cita-cita pemuda desa dan berupaya mendekonstruksi anggapan bahwa mereka enggan menjadi petani di masa depan. Kita kemudian beralih membahas agensi (“yang terbatas”) kaum muda, sebagaimana tercermin pada mobilitas individual serta jalur-jalur mereka keluar dari (dan kadang kembali lagi ke) pertanian, dan juga pada keterlibatan mereka dalam gerakan-gerakan aksi kolektif. Bagian terakhir, simpulan buku ini, berisi ikhtisar tentang prakarsa-prakarsa yang dibutuhkan untuk mendorong revitalisasi pertanian kecil dengan generasi yang berkelanjutan.

GENERASI MASA DEPAN, PERTANIAN MASA DEPAN

Sulit membayangkan masa depan pedesaan dan pertanian—serta kemungkinan pertanian kecil menemukan tempat di dalamnya—dengan kepastian apa pun, di belahan dunia mana pun. Masa depan ini, sebagiannya, akan ditentukan oleh ketidakpastian perubahan iklim atau krisis iklim, serta kemampuan sistem pertanian dan mereka yang bergantung padanya untuk beradaptasi. Namun, lebih dari itu, masa depan ini juga sangat bergantung pada hasil dari “pertarungan akan masa depan pertanian” (Weis 2007): pergulatan yang terus berlangsung—kadang penuh kekerasan, tetapi lebih sering senyap, bahkan tak terlihat—untuk menguasai tanah, sistem pertanian, dan rantai pasokan pangan, antara berbagai corak, skala, dan prinsip pertanian. Hasil pertarungan ini kemungkinan besar akan melewati lintasan yang berbeda di tiap wilayah.

Secara historis, sebagaimana dibahas di Bab 2, ketika suatu rezim telah memungkinkan atau mendorong kemunculan dan dominasi penguasaan tanah pertanian skala besar, cepat atau lambat rezim berikutnya cenderung membongkar penguasaan semacam itu demi pertanian skala kecil yang lebih efisien, yang mengarah pada pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial. Pada 1980-an dan 1990-an, beberapa akademisi bahkan dengan yakin memperkirakan tamatnya era perkebunan besar (Francis 1994: 199). Namun, dalam beberapa dasawarsa terakhir, alih-alih menyusut, penguasaan tanah oleh korporasi dan pertanian skala besar justru berkembang pesat. Di banyak negara Afrika Sub-Sahara, pertanian komersial “skala menengah” (antara 5–100 hektar, terutama 10–100 hektar), yang dikelola dengan tenaga kerja upahan dan dimiliki oleh “kalangan profesional perkotaan atau tokoh pedesaan,” sedang meluas pesat, sedangkan proporsi lahan pertanian skala kecil (di bawah 5 hektar) kian menyempit (Jayne *et al.* 2016: 197).

Para pemikir masa depan lantas membayangkan dua kemungkinan arah pertanian yang bertolak belakang. Di satu ujung spektrum, ada skenario di mana pertanian industri yang didominasi korporasi makin merajai—padat energi, berbasis monokultur (tanaman sejenis), mempercepat pemanasan bumi, dan terintegrasi dalam rantai pasok pertanian-pangan global. Sementara di ujung lainnya, ada skenario “pembentukan kembali kaum tani” (van der Ploeg 2009), yang membayangkan berta-hannya, bangkitnya, dan berkembangnya alternatif-alternatif pertanian skala kecil. Model ini mungkin tidak selalu terdefinisikan dengan jelas, tetapi memiliki ciri utama berupa sistem produksi pangan yang lebih ramah lingkungan (ekologis) dan lebih adil secara sosial, dengan rantai distribusi yang lebih langsung dari petani ke konsumen. Para pendukungnya meyakini bahwa alternatif ini bisa menjadi solusi nyata untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia.

Satu hal yang pasti. Jika pertanian di masa depan ingin berkembang dengan gaya, teknologi, dan ekonomi pedesaan yang tidak digerakkan korporasi, melainkan lebih berhaluan pada kesejahteraan petani kecil

dan keberlanjutan ekologis, maka harus ada generasi baru (calon) petani kecil yang siap menerima tantangan ini. Kedua hal ini saling berkaitan dan saling memengaruhi: pertanian skala kecil yang berkelanjutan membutuhkan generasi baru (calon) petani kecil, sementara generasi muda di pedesaan bakal berpaling dari dunia pertanian jika mereka tidak melihat prospek penghidupan yang layak dan berkelanjutan dari bertani. Bagian selanjutnya membahas bagaimana kaum muda pedesaan bergumul dengan masa depan mereka, sebagaimana tercermin pada “cita-cita” yang mereka ungkapkan.

BERGUMUL DENGAN MASA DEPAN: CITA-CITA PEMUDA DESA

Apa yang dimaui kaum muda desa? Bagaimana mereka mengangankan masa depan?

Samuel Schielke menggambarkan bagaimana para lelaki berusia awal hingga paruh 20-an, di sebuah desa pesisir utara Mesir, mengungkapkan keputusan, baik karena terbatasnya peluang ekonomi maupun monotonnya kehidupan mereka (Kotak 5.1).

KOTAK 5.1

Hidup Penuh Kebosanan dan Tanpa Harapan di Sebuah Desa, Mesir

Najib: “Saban hari sama saja. Kami harus membanting tulang untuk mendapatkan sejinjit uang, hanya kerja dan kerja, tapi tetap tidak ke mana-mana. ... Itulah kenapa setiap orang ingin pergi. ... Seandainya saja mampu, setiap orang di sini bakal pergi, semuanya. Tidak ada yang mau tinggal di sini.”

Tawfiq: “Setiap hari begini-begini saja, tidak ada perubahan. Semua orang merasa jemu—tak ada yang benar-benar bahagia dan tenteram.”

Kehidupan perempuan muda lebih terkungkung—mereka tidak bisa nongkrong di kedai kopi atau bermain bola—tapi mereka juga tidak mengeluhkan kebosanan seperti para lelaki muda.

Nazli (seorang ibu muda): “Mereka [perempuan muda] selalu sibuk: menyiapkan sarapan, mendandani anak-anak, mengantarkan ke sekolah, ke les privat, bersih-bersih rumah, memasak, mencuci, dan akhirnya kelelahan hingga langsung tidur. Hidup mereka mungkin membosankan dan begitu-begitu saja setiap hari, tapi mereka tak pernah sempat untuk merasa bosan.”

Bukan sekadar rutinitas itu yang membuat hidup terasa menjemukan, melainkan tidak terpenuhinya aspirasi mereka.

[Rutinitas] makin menjemukan dan bikin putus asa ketika harapan kuat akan kehidupan yang lebih baik dan lebih menarik terus tumbuh tapi tidak pernah terwujud. Makin terhubungnya desa dengan media global dan arus migrasi telah menawarkan angan-angan dan gambaran tentang kehidupan berbeda yang lebih mengasyikkan dan penuh kemewahan serta pencapaian-diri. Kehidupan desa lantas dibandingkan dengan harapan yang jauh melampaui apa pun yang bisa ditawarkan oleh pedesaan ataupun perkotaan di sekitar. (Schielke 2008: 255–258)

Cita-cita (aspirasi) bisa dipahami sebagai “angan-angan masa depan yang dikehendaki” (Bossenbroek *et al.* 2015: 344), yaitu cara kaum muda bergumul dengan bayangan mereka tentang masa depan. Cita-cita ini berada di antara dua kutub: di satu sisi sebagai impian yang masih samar, dan di sisi lain sebagai harapan, tujuan, serta rencana yang lebih konkret (Quaglia dan Cobb 1996). Dalam wacana kebijakan, cita-cita sering dianggap berhubungan searah dengan tindakan (atau ketiadaan tindakan) dan dimaknai secara instrumental, sebagai hal yang perlu dikendalikan atau dimanipulasi. Menurut Arjun Appadurai (2004: 179) “keterbatasan [kaum miskin] untuk bercita-cita” bukan sekadar persoalan individual, tetapi juga menegaskan ketimpangan struktural yang menghambat mereka untuk “menemukan sumberdaya yang dibutuhkan guna menantang serta mengubah kondisi kemelaratan mereka sendiri” dan untuk mendesakkan perubahan. Sementara itu, menurut Bank Dunia (2014), anak-anak dan pemuda dari rumah tangga miskin (dan/atau orang tua mereka) kerap terjebak dalam “perangkap cita-cita”, yakni ketika “kemiskinan membungkam harapan” bahwa pendidikan bisa menjadi jalan untuk keluar dari kemiskinan. Selain kurang mampu bercita-cita, mereka juga dianggap kerap bercita-cita terlalu tinggi, seperti menjadi pegawai negeri, padahal peluangnya sangat kecil; mereka juga cenderung enggan akan masa depan yang lebih mungkin digapai, seperti bertani dan kerja kasar lainnya. Dengan demikian, di mata dunia kebijakan, tampaknya kaum muda selalu dianggap keliru dalam mengejar cita-cita.

Cara pandang yang instrumental semacam ini berbahaya, karena mengabaikan atau meremehkan hambatan-hambatan struktural yang membatasi pilihan dan peluang individu; cara pandang ini “menganggap individu dan kelompok sosial sepenuhnya bertanggung jawab atas masa depan mereka sendiri; jika gagal maju, itu karena kesalahan mereka sendiri yang ‘miskin cita-cita’” (Brunel 2018: 1). Dalam penalaran ini, “kegagalan [pemuda] dalam mendapatkan pekerjaan, penghasilan, atau kemapanan dipandang sebagai ketidakmampuan [mereka] sendiri, bukan

sebagai akibat dari perubahan struktural ekonomi-politik atau pengabaian sistemik atas kebutuhan mereka” (Naafs dan Skelton 2018: 4).

Sumber utama informasi mengenai cita-cita kaum muda pedesaan didapatkan dari wawancara dengan mereka—baik melalui survei sampel, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion* [FGD]), maupun percakapan yang lebih bebas dan kualitatif—kadang ditambah wawancara dengan warga lebih tua di desa untuk menanyakan harapan (atau kekhawatiran) mereka terhadap masa depan anak-anak mereka. Saya telah meninjau lima survei lintas-negara mengenai cita-cita pemuda desa, lelaki dan perempuan, yang mencakup total 35 negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, ditambah delapan negara transisi di Eropa.¹ Semuanya mengarah pada simpulan umum senada. Ketika mengajukan beberapa versi pertanyaan “Anda ingin menjadi apa ketika dewasa?” jawaban mereka begitu tegas, bahwa mereka mengharapkan pekerjaan kerah-putih atau kerah-biru bergaji tetap; hampir tidak ada yang menempatkan pertanian sebagai pilihan utama—jika pun disebutkan, pertanian ditempatkan di nomor terakhir (White 2018b: 10–16). Namun, apa makna sesungguhnya dari temuan ini? Dari mana asal cita-cita kaum muda yang disebutkan itu? Kita mungkin belum begitu memahami bagaimana cita-cita pemuda terbentuk, tetapi yang jelas, cita-cita itu tidak muncul begitu saja. Cita-cita dibentuk secara relasional, yakni “melalui interaksi dan di dalam sengkabut kehidupan sosial” (Appadurai 2004: 67). Ketika kaum muda ditanya tentang masa depan mereka oleh orang dewasa—baik dalam wawancara formal maupun dalam FGD bersama rekan-rekan sebaya—jawaban mereka kerap dipengaruhi oleh “saringan kelayakan sosial” (*social acceptability filters*). Cita-cita yang mereka ungkapkan bisa jadi bukan sepenuhnya mencerminkan visi dan harapan pribadi, melainkan lebih mencerminkan pandangan dominan tentang masa depan yang dianggap “pantas” dan terhormat secara sosial (Zipin *et al.* 2015: 236).

Ringkasnya, kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa sebagian besar kaum muda pedesaan mengungkapkan cita-cita untuk mendapat-

kan pekerjaan mapan di sektor formal. Ketika perbedaan gender diperhitungkan, pemuda perempuan bahkan lebih enggan lagi terhadap masa depan di pertanian (Elias *et al.* 2018). Namun, dalam wawancara formal ataupun FGD, baik perempuan maupun laki-laki cenderung lebih tegas mengungkapkan keengganan terhadap pertanian dan kehidupan pedesaan, dibandingkan ketika mereka mengungkapkan pandangan secara anonim. Dalam sebuah survei melalui sms² terhadap 10.000 pemuda lelaki dan perempuan (usia 18–35) di 21 negara Afrika, hampir seperempat responden menyatakan lebih memilih kehidupan pedesaan/pertanian yang lebih terjamin. Ketika survei ini menanyakan “apa yang bisa membuat pertanian sebagai pilihan menarik?” pertanian dipertimbangkan sebagai pilihan hanya jika (a) tersedia akses atas tanah dan sarana produksi lain, (b) jika pertanian dijalankan secara komersial, setidaknya sebagian, serta (c) dipadukan dengan sumber-sumber nafkah lain dalam pola kerja-majemuk (*pluriactivity*). Hasrat kaum muda untuk menjadi subjek mandiri secara ekonomi dan lepas dari ketergantungan pada orang tua sangat kuat. Mereka juga mengungkapkan pemahaman yang gamblang tentang kekangan-kekangan antargenerasi serta faktor lain yang membuat akses atas tanah dan kesuksesan dalam bertani menjadi sulit atau bahkan mustahil, setidaknya selagi mereka masih muda. Terakhir, meski sebagian dari mereka tertarik pada pertanian komersial, hanya sedikit yang berminat pada jenis wirausaha lainnya³ (White 2018b: 16).

Keengganan pemuda desa (perempuan maupun laki-laki) terhadap pertanian dan masa depan di pedesaan, sebagaimana terungkap dalam survei-survei tersebut, mungkin terlihat sebagai fenomena baru, tapi kita perlu berhati-hati dalam mengasumsikan demikian. Pemuda desa masa kini tentu punya cakrawala lebih luas ketimbang ayah-ibu dan kakek-nenek mereka. Meski sulit dibuktikan karena minimnya penelitian tentang pemuda desa generasi terdahulu, cukup masuk akal untuk beranggapan bahwa para petani dan buruh tani yang kini sudah dewasa juga pernah punya bayangan tentang masa depan yang lebih baik

di luar pertanian ketika mereka muda, setidaknya jika mereka sempat mengenyam pendidikan formal. Sebagian bukti sejarah mengenai hal ini telah dipaparkan di Bab 3. Sebagaimana dibahas di Bab 1, cita-cita kaum muda tidak selalu mencerminkan masa depan mereka saat dewasa. Hal ini juga berlaku bagi remaja perempuan dan laki-laki yang saya teliti di sebuah desa di Jawa pada awal 1970-an. Banyak dari mereka yang akhirnya tetap menjadi petani dan kini telah menjadi orang tua serta kakek-nenek bagi generasi muda di desa yang sama—generasi yang saat ini kami teliti dalam judul “Menjadi Petani Muda” (White dan Wijaya 2019).⁴

Kajian Gilda Senties Portilla (2018) tentang kaum muda yang menghadapi perluasan pesat perkebunan monokultur raksasa di Laos Selatan memberikan perspektif berbeda dari anggapan umum bahwa kaum muda pedesaan tidak berminat pada kehidupan pedesaan dan semuanya ingin pindah ke kota demi meraih gaya hidup modern. Banyak pemuda memang bermigrasi untuk bekerja sementara waktu, tetapi mereka cenderung tetap ingin kembali ke desa, tempat mereka kini bisa “menjalani dan membangun gaya hidup pedesaan yang modern.” Konsesi-konsesi perkebunan telah membuka berbagai kesempatan kerja bagi pemuda, baik perempuan maupun lelaki, yang mungkin enggan bekerja lama-lama tanpa upah di lahan orang tua tapi masih membayangkan pertanian sebagai pilihan kerja di masa depan, meski bukan pilihan idaman.

Dalam kajiannya tentang Sierra Leone pascaperang, Krijn Peters menyatakan bahwa “antipati kaum muda pedesaan [terhadap pertanian] sebenarnya tidak menyasar pertanian itu sendiri, melainkan pada kereنتan mereka, dalam kondisi-kondisi yang ada di desa, untuk dieksploitasi oleh kalangan elite dan para tetua setempat.” Peters menggambarkan bagaimana kaum muda pedesaan menghadapi hubungan yang pelik dengan para tetua desa yang memegang kendali atas adat istiadat, tanah, tenaga kerja pertanian, dan perjodohan dalam masyarakat yang sangat gerontokratis ini.

Intinya, pedesaan Afrika dihuni tidak hanya oleh petani pemilik tanah, tetapi juga makin banyak pemuda yang tidak punya kemampuan dasar bahkan untuk menjadi petani kecil. Mereka tersisihkan oleh ketatnya tatanan kelembagaan “adat”, yang pertama kali diterapkan di bawah kuasa kolonial dan terus dilanggengkan oleh elite pedesaan, ... [kaum muda] tidak bisa begitu saja mengerahkan tenaga mereka untuk menggarap tanah yang katanya melimpah, karena hasil kerja mereka rentan diperas untuk bayar mahar perkawinan dan denda hukuman adat akibat pelanggaran terhadap norma tradisional yang dikendalikan oleh para tetua desa. (Peters 2011: 224–225)

Dalam situasi lain, kaum muda pedesaan yang melihat peluang dalam pertanian kecil gaya baru dan modern bisa saja dihalangi oleh kekolotan orang tua. Di awal bab ini, kita menyaksikan bagaimana Driss, seorang pemuda Maroko berusia 29 tahun lulusan pertanian, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap orang tuanya yang menghambat ambisinya untuk menjalani kehidupan bertani secara modern di wilayah Saiss, di mana sumur bor dan irigasi tetes telah memungkinkan produksi buah-buahan dan sayuran untuk pasar ekspor. Pengalaman dan kekecewaan Driss ini mencerminkan kondisi banyak pemuda desa lain yang bercita-cita membangun kehidupan pertanian pedesaan yang lebih maju tetapi terhambat oleh belenggu patriarkis yang masih berkol (Kotak 5.2).

KOTAK 5.2

Kekecewaan Calon Petani Muda Maroko

Driss membayangkan masa depannya sebagai petani mandiri yang mengelola proyek pertaniannya sendiri dan mengikuti

perkembangan tanaman komoditas serta teknologi terbaru. Namun, saat ini dia masih bertani bersama para saudara lelakinya di lahan milik ayahnya, di bawah kendali penuh sang ayah. Mereka menanam bawang dan kentang di lahan irigasi seluas 3 hektar, sementara 10 hektar lahan tadah-hujan ditanami biji-bijian. “Jika ayahku menyuruh kami menanam bawang 4 hektar, aku tidak bisa menolak atau membantahnya.”

Pada 2009, Driss berhasil meyakinkan ayahnya untuk memasang irigasi tetes dan menjelaskan rencananya untuk menjalankan proyek kebun buah: “Aku menyewa 1 hektar lahan dari ayah dan juga membayar biaya air untuk menyirami bibit pohon.” Driss berharap bisa menanam 9.000 semaian pohon buah di sisa lahan yang ada. Tapi ayahnya tidak setuju, sehingga dia terpaksa menjual bibit-bibit pohon itu. Driss, dengan demikian, telah dihalangi oleh kehendak dan wewenang ayahnya. Kegagalannya untuk meyakinkan sang ayah membuatnya patah arang: “Aku ingin pergi ke tempat lain. ... Aku sangat muak dengan keadaan ini. Aku cuma ingin sesuatu untuk diriku sendiri, sesuatu yang bisa menjadi pegangan. Proyekku sendiri, uangku sendiri.” (Bossenbroek *et al.* 2015: 344–345, 347)

Kekecewaan senada juga diungkapkan oleh pemuda perempuan dan lelaki di kalangan gerakan pekerja tunakisma Brasil (MST) yang tinggal di permukiman lahan okupasi, di mana tanah telah dibagikan kepada masing-masing rumah tangga. Jika tetap tinggal di permukiman, para pemuda ini hanya bisa bekerja sebagai tenaga bantu tak dibayar di lahan keluarga. Di Semente, David (18 tahun) dan Laura (16 tahun) mengungkapkan pengalaman mereka:

David: Kalau kau tinggal bersama orang tua dan bekerja di lahan, saat panen tiba, kau tetap tidak dapat uang sepeserpun. Semuanya dikuasai ayah, *chefe da família* [sang kepala keluarga]. ... Satu-satunya sumber penghasilanku ialah dari bekerja di *roças dos outros* [lahan milik orang lain]. Upahnya sangat kecil ... dan kerjanya sangat berat. ... Asal kau tahu, aku ingin masa depan yang berbeda, untuk menjadi “seseorang” di kehidupan ini.

Laura: Ya, aku kerja saban hari, tapi aku tidak punya *renda* [pendapatan] sendiri. Karena tinggal seataap, kami semua harus saling bantu. Bukankah begitu yang disebut keluarga? (Gurr 2017: 105)

Terdapat perbedaan mencolok antara permukiman yang menerapkan sistem pertanian kecil yang digarap secara individual ini dengan sejumlah kecil permukiman MST yang memilih bertani secara kolektif. Di permukiman kolektif Capovi, semua pekerja berusia 14 tahun ke atas berhak mendapatkan upah, meski mereka yang berusia di bawah 18 tahun hanya menerima sekitar separuh dari upah penuh dan sisanya diberikan kepada orang tua mereka. Dengan sistem ini, sumbangsih kerja mereka diakui secara resmi, mereka punya pendapatan sendiri, dan saat mencapai usia 18 tahun, mereka bisa menjadi anggota penuh dan pemegang saham dalam koperasi (Gurr 2017: 74).

MEMILIH JALAN SENDIRI: KERJA LINTAS-TEMPAT DALAM DAUR HIDUP PEMUDA DESA

Di seluruh dunia, mayoritas pekerja migran (baik di dalam maupun di luar negeri) ialah kaum muda. Mereka bermigrasi tidak hanya karena sulit mendapatkan pekerjaan yang layak—atau lahan—di kampung halaman, tetapi juga karena dorongan untuk mandiri dan melepaskan

diri dari ketergantungan pada orang tua serta tetua lainnya. Selain itu, mereka juga terpicat dengan harapan akan peluang kehidupan lebih mapan dan “menjadi seseorang” di perkotaan yang dituju. Saat ini, peluang kaum muda pedesaan bermigrasi mencari penghidupan di luar desa makin meluas pada berbagai kelas sosial dan (di banyak negara) pada semua gender. Namun, satu hal penting (yang kerap diabaikan) ialah apakah hengkangnya kaum muda dari pedesaan dan pertanian bersifat permanen atau hanya bagian dari satu fase dalam perjalanan hidup mereka. Kita perlu menyelidik lebih jauh fenomena pergerakan sirkuler sebagai bagian dari perjalanan hidup antartempat dan antarsektor yang ditempuh kaum muda.

Salah satu perbedaan penting di kalangan petani muda yang perlu ditelaah lebih jauh ialah antara mereka yang meneruskan usaha tani keluarga (“petani penerus”)—baik dari orang tua maupun kerabat lainnya—dan mereka yang benar-benar baru dalam dunia pertanian (“petani baru”). Kelompok kedua ini tidak berasal dari latar belakang keluarga petani, tetapi memilih terjun ke pertanian, sehingga bisa dikatakan “memilih jalannya sendiri” ke arah yang berlawanan dari orang tua mereka. Di beberapa negara seperti Kanada, Spanyol (Monllor 2012), dan Jepang (McGreevey *et al.* 2018), jumlah petani muda “baru” kian bertambah, sering kali dengan dukungan keuangan dan kelembagaan dalam proses alih kepemilikan “di luar lingkup keluarga” (van Boxtel *et al.* 2016). Fenomena ini menunjukkan perlunya memperluas cakupan kajian, tidak hanya terbatas pada anak-anak petani yang ada. Ada anggapan kuat bahwa para “petani baru” ini bakal menjadi pembaharu dan lebih kritis terhadap praktik-praktik pertanian arus-utama.

Namun, kita juga perlu membedakan antara “penerus sejak awal” dan “penerus belakangan”. Penerus belakangan ialah mereka yang awalnya meninggalkan usaha tani keluarga untuk bekerja di sektor lain (baik di dalam ataupun di luar kampungnya) dan kemudian kembali bertani begitu lahan tersedia buat mereka. Di banyak negara, sebagian besar petani muda saat ini termasuk dalam kategori ini: mereka kembali ke

desa dan bertani setelah merantau. Di banyak daerah pedesaan sekarang ini, “desa” (dan juga “pertanian”) bagi generasi muda bukan lagi sekadar tempat mereka dibesarkan, tetapi juga tempat yang mereka tinggalkan untuk mencari kerja di perkotaan, tempat mereka mungkin menitipkan anak-anak kepada kakek-nenek, juga tempat yang bisa mereka datangi kembali untuk menjadi petani setelah mendapatkan tanah dan modal dari pekerjaan di kota.⁵ Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis daur hidup dalam memahami cita-cita pemuda serta pergerakan mereka keluar dari pertanian dan mungkin kembali lagi di kemudian hari. Tiga studi kasus dari Tiongkok, Burundi, dan Indonesia menggambarkan pola mobilitas ini (Kotak 5.3, 5.4, dan 5.5).

KOTAK 5.3

Dari Kerja Migran ke Budidaya Apel di Provinsi Hebei, Tiongkok

Zhang Changchun (43 tahun) merupakan petani termuda di Sanggang, sebuah desa di Provinsi Hebei, Tiongkok. Keputusan Zhang untuk bertani pada usia 37 tahun cukup menarik, mengingat kebanyakan pemuda desa telah bermigrasi ke kota, meninggalkan generasi lebih tua beserta cucu-cucu mereka di desa. Apa yang mendorongnya kembali ke pertanian?

Sebelum memulai budidaya apel organik—yang merupakan satu-satunya kebun apel di desa ini dan sekitarnya—Zhang bekerja sebagai pengemudi truk di perusahaan tambang setempat, dan sempat juga menjadi pekerja migran di kota. Lahir dan besar di pedesaan, Zhang selalu mengidamkan kebebasan serta kemandirian untuk mengelola usaha dan kehidupannya sendiri sebagai petani.

Enam tahun lalu, Zhang menukar tanah yang dialokasikan untuk keluarganya serta tanah yang dia sewa dengan sebidang tanah seluas 0,27 hektar—di lahan inilah dia menanam pohon-pohon apel pertamanya. Dia membeli komputer dan menghabiskan banyak waktu untuk belajar dari internet, juga mengunjungi kebun-kebun apel lain untuk memperdalam ilmunya tentang budidaya apel.

Tahun lalu, Zhang panen apel untuk pertama kalinya, meski hasilnya cuma 1.000 yuan (sekitar Rp2,2 juta). Namun, tahun ini hasil panennya melonjak hingga 9.000 yuan (sekitar Rp20 juta). “Semua orang bilang menanam apel di sini mustahil. Ini justru membuatku tertantang,” ujarnya. Zhang dan istrinya tetap menanam sayuran, di sela-sela pepohonan apel, untuk konsumsi rumah tangga. Dia juga menyewa 6 hektar lahan di lereng bukit di dekatnya untuk menanam kastanye dan kenari. Tapi dia mengakui bahwa bertani memang bukan hal mudah bagi anak muda. “Pada tahun-tahun awal, menanam apel butuh banyak modal, sementara hasilnya belum ada. Ini cukup sulit bagi anak muda yang tidak punya banyak modal dan juga masih harus menanggung orang tua.”

Dari kerja paruh-waktu di perusahaan tambang, Zhang memperoleh pendapatan lumayan untuk menafkahi keluarga sekaligus memodali kebun apelnya. Dia menghabiskan sekitar 30.000 yuan (setara Rp65 juta) modal awal dalam dua tahun pertama. Awalnya dia ragu apakah budidaya organik bisa berhasil, tapi kini dia makin yakin dengan hasilnya dan optimistis dengan keberlanjutannya di masa depan. Pemasaran tak jadi soal; Zhang menyasar konsumen kelas menengah, dengan mengandalkan jaringan informalnya untuk memasarkan apel organiknya yang lezat.

Ke depan, Zhang berencana kembali bekerja paruh-waktu di bidang pengangkutan, sementara istrinya akan mengurus kebun apel. Dia juga berharap ketika dirinya tua nanti, anak perempuannya—yang sekarang bekerja di kota terdekat—akan kembali ke desa untuk mengurusnya sekaligus meneruskan kebun apel yang telah dia bangun (ringkasan dari studi kasus dalam penelitian “Menjadi Petani Muda”, ditulis oleh Sharada Srinivasan, Pan Lu, dan Ben White, tidak diterbitkan).

KOTAK 5.4

Migrasi dan Cita-Cita Bertani di Pedesaan Burundi

Di sebuah desa di Burundi, sepertiga pemuda lelaki dan lebih dari separuh pemuda perempuan tidak punya harapan untuk mendapatkan warisan tanah. Dalam wawancara yang dilakukan Lidewijde Berckmoes, terungkap bahwa dua pertiga pemuda lelaki—dan sejumlah kecil perempuan—pernah menempuh perjalanan berbahaya ke Tanzania, setidaknya sekali, untuk mencari nafkah; separuh lebih dari mereka bahkan melakukannya berkali-kali. Kebanyakan pergi tanpa dokumen resmi dan berisiko dipenjara, diancam penduduk setempat, dan diperas oleh polisi atau tentara yang berpatroli di perbatasan. Para pemuda ini mencari kerja nontani, baik di Burundi maupun di Tanzania, bukan untuk meninggalkan dunia pertanian sepenuhnya, melainkan untuk mencari tambahan penghasilan selain dari pertanian dan agar bisa bertani di masa depan.

[Pemuda lelaki:] Kami bercita-cita menjadi petani, tapi kalau ada pekerjaan lain untuk tambahan, tentu lebih baik, karena pertanian saja tidak cukup.

[Pemuda lelaki:] Anak laki-laki yang akan segera dewasa bisa saja punya tujuh saudara lelaki di rumah. Mereka semua nanti harus berbagi sebidang tanah yang sama. Jadi, kalau kau tidak punya keahlian atau pekerjaan, kau tidak akan bisa mendapatkan uang buat beli tanah.

[Pemuda perempuan:] Tanah sudah tidak subur lagi, dan terjadi perubahan iklim. Makanya kami cari pekerjaan lain sambil tetap bertani.

[Pemuda lelaki:] Jika saja ada lembaga yang membantu kami untuk belajar keterampilan, kami bakal bisa bekerja dan punya uang buat beli tanah sebelum habis dibeli pihak-pihak lain. (Berckmoes dan White 2016: 298, 305–306)

KOTAK 5.5

Kembali ke Desa: Kisah Petani Muda Penyakap di Jawa

Sepasang suami-istri, Watinah dan Santoso, berasal dari keluarga petani kecil di Kaliloro, sebuah desa di Yogyakarta. Keduanya tamatan SMP dan sering membantu orang tua mereka di sawah. Orang tua Watinah punya sawah seluas 600 meter persegi,

sementara orang tua Santoso sama sekali tidak punya lahan sendiri dan menjadi penyakap lahan orang lain. Meski masih muda, keduanya sudah pernah kerja merantau. Setelah tamat sekolah, Watinah bekerja di pabrik sepatu di Tangerang, Jawa Barat selama delapan tahun, sebelum akhirnya pulang kampung untuk menikah. Sementara itu, Santoso awalnya tinggal di desa, membantu ayahnya menggarap sawah dan menjadi buruh harian lepas, sebelum akhirnya merantau ke Jakarta sebagai pedagang keliling. Sebelum menikah, Santoso membeli sebidang kecil sawah seluas 300 meter persegi dengan uang pinjaman dari bank. Bagi mereka, pulang kampung menjadi keputusan lumrah ketika mereka ingin berkeluarga. “Hidup di kota sangat mahal, penghasilan kami tidak cukup, apalagi kalau punya anak.” Mereka sekarang punya seorang anak perempuan yang bersekolah SMP.

Begitu kembali ke desa, Watinah dan Santoso mulai menggarap sawah kecil mereka sendiri itu sambil membantu ayahnya Santoso, yang sudah lama menyakap sawah cukup luas (1 hektar) milik seorang tuan tanah yang tinggal di luar desa. Awalnya, pekerjaan di sawah dibagi rata antara si ayah dan anak lelakinya. Setiap panen, setelah menyerahkan separuh bagian untuk pemilik tanah, sang ayah sering membagi hasil panen (dalam bentuk padi dan/atau uang tunai) kepada Santoso. Namun, sejak 2010, Santoso mengambil alih garapan, karena ayahnya sudah terlalu tua untuk bekerja. Watinah ikut membantu tandur (menanam), matun (menyiangi rumput), dan panen. Mereka masih memberi orang tua mereka sebagian hasil panen, entah berupa beras atau uang. Sementara itu, Watinah juga telah menerima hibah sawah seluas 300 meter persegi dari orang tuanya yang sudah lansia (lebih dari 75 tahun) dan membagikan sawah kepada anak-

anak mereka. Namun, alih-alih menggarapnya sendiri, Watinah memilih menyewakan sawahnya tersebut seharga Rp2 juta untuk masa sewa empat tahun. Semua uangnya diberikan kepada ibunya.

Dengan sawah garapan yang cukup luas, Santoso dan istrinya menjadi salah satu dari segelintir keluarga di desa yang tidak punya sumber penghasilan lain (nontani), selain seekor sapi dan tiga kambing. Keduanya bilang bahwa mereka memang berniat terus bertani, karena mereka sekarang punya sawah sendiri dan juga lahan garapan yang cukup luas. Tapi mereka tidak ingin anak perempuan mereka menjadi petani, apalagi si anak tidak pernah membantu pekerjaan di lahan dan sama sekali tidak paham pertanian; mereka bilang, pekerjaan-tetap di kota merupakan pilihan lebih baik untuk masa depan si anak (studi kasus dalam penelitian “Menjadi Petani Muda”, ditulis oleh Hanny Wijaya dan Ben White, tidak diterbitkan).

Sebagaimana dibahas di Bab 1, kajian tentang pemuda memandang mereka sebagai aktor dalam pembaruan sosial, ekonomi, dan politik, bukan sekadar objek pasif dari kendali dan bimbingan orang dewasa. Namun, kita juga telah menyadari “keterbatasan ruang gerak” yang dialami kaum muda—artinya, keputusan mereka untuk bertindak, baik secara individu maupun kolektif, selalu berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh struktur sosial, dalam tingkat yang berbeda-beda. Mobilitas pemuda antartempat dan antarsektor dan peran mereka dalam gerakan aksi kolektif yang lebih luas—yang akan kita bahas di bagian berikutnya—dapat dilihat sebagai bentuk nyata dari keterpautan tarik-menarik antara agensi dan struktur ini.

PEMUDA DESA & AKSI KOLEKTIF

Meski kelas merupakan kategori analisis yang mendasar dalam politik agraria, sangat penting untuk memahami bagaimana kelas bersaling-silang dengan identitas sosial lain seperti ras, suku, gender, generasi, kebangsaan, agama, dan tempat tinggal. (Edelman dan Borras 2016: 2)

Dulu aku tidak begitu paham *apa* itu MST. Aku pikir itu hanya urusan orang tuaku. Tapi pengalaman ini—datang ke Brasilia, berkontribusi dalam gerakan—sangat berharga buatku. Aku belajar bagaimana menjadi seorang pejuang, berkorban demi MST.

—Isabel (17 tahun), permukiman reforma agraria
Paulo Freire, Brazil (Gurr 2017: 183)

Hubungan pemuda dengan politik cukup kompleks (Ansell 2015: 231), sementara peran mereka dalam gerakan sosial, serta interaksi antara pemuda dan orang dewasa dalam gerakan tersebut, masih menjadi suatu “misteri ilmu sosial” (Scott dan Artis 2005). Pemuda tentu saja telah memengaruhi politik nasional di berbagai belahan dunia dan zaman (Ansell 2015: 231), tetapi kebijakan tentang pemuda cenderung memperlakukan mereka sebagai objek kebijakan dan alat pembangunan, bukan sebagai subjek aktif yang memiliki segala hak kewarganegaraan. Salah satu contohnya ialah pendekatan “bonus demografi” dalam kebijakan kepemudaan dan pembangunan. Pendekatan ini melihat “mengelembungnya jumlah pemuda” sebagai peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi kurang memandang kesejahteraan pemuda dan keadilan antargenerasi sebagai tujuan sendiri ataupun sebagai hak kaum muda. Cara pandang ini mirip dengan kecenderungan menganggap perempuan sebagai instrumen dalam argumen-argumen kesetaraan gender yang berfokus pada “efisiensi ekonomi” daripada keadilan gender itu sendiri (lihat Berik 2017).

Ada kesepakatan umum bahwa partisipasi pemuda dalam organisasi politik formal dan partai politik mengalami kemerosotan di mana-mana, juga bahwa “pemuda di berbagai belahan dunia makin banyak terlibat dalam aktivitas politik di luar ranah formal, seperti melalui gerakan sosial, kesukarelawanan, organisasi berbasis identitas, budaya urban, gerakan militan, dan kehidupan sehari-hari” (Ansell 2015: 233–234). Konsep-konsep tradisional mengenai “proses kebijakan” mungkin tidak mampu menangkap sepenuhnya realitas politik pemuda saat ini; hal ini karena makin menonjolnya “bentuk-bentuk politik alternatif non-formal, yang sering kali digerakkan oleh pemuda yang terpinggirkan ... yang merasa tersingkir dari politik formal dan bahkan menentangnya” (te Lintelo 2011: 12).

Dibandingkan dengan banyaknya kajian tentang peran pemuda dalam gerakan politik dan pergolakan di kota-kota besar (Bayat 1997; Abbink dan van Kessel 2005; Honwana dan de Boeck 2005), pergumulan pemuda dalam gerakan pembaruan agraria masih jarang dibahas. Dalam kajiannya tentang gerakan sosial di Brasil, Mesir, dan Nepal, Krishna Ghimire (2002: 62) mencatat bahwa masih menjadi perdebatan apakah pemuda pedesaan sebagai kelompok mampu memprakarsai atau memimpin gerakan sosial secara mandiri.

Dari pengalaman gerakan berbasis gender, kita belajar bahwa pemuda tidak harus memilih antara membentuk organisasi sendiri atau bergabung dengan gerakan yang sudah ada—keduanya bisa berjalan beriringan dan saling menguatkan. Mengarahkan kaum muda hanya ke organisasi kepemudaan berisiko membuat mereka makin terpinggirkan dari proses politik yang dikendalikan kaum dewasa. Pemuda beserta berbagai kepentingan mereka perlu diperjuangkan dalam organisasi dan gerakan yang lebih luas, dari tingkat lokal hingga nasional.

Hampir semua gerakan agraria—dari tingkat lokal, nasional, hingga internasional—menghadapi tantangan dalam memastikan regenerasi kepemimpinan. Para pemimpin perintis—yang umumnya laki-laki

dan dianggap sebagai “bapak pendiri” gerakan—perlu digantikan oleh kelompok lebih muda dan beragam (Edelman dan Borrás 2016: 87). Dua gerakan tani terbesar di dunia, La Vía Campesina di tingkat global dan gerakan pekerja tani tunakisma MST di Brasil, sangat giat mendorong partisipasi kaum muda dalam berbagai kegiatan, seperti kongres, pawai, sekolah pertanian agroekologi, dan pelatihan politik. Kedua gerakan ini menyadari bahwa ada kecenderungan generasi penerus—anak-anak para aktivis tani—meninggalkan gerakan dan kehidupan di pedesaan. Melinda Gurr menggambarkan bagaimana Tania, seorang pemimpin senior MST, pernah berbicara di hadapan dua ribu anak dari para perintis permukiman MST dalam sebuah Festival Seni di stadion sepak bola, yang diselenggarakan oleh Sekolah Reforma Agraria MST.

Wahai para pemuda MST, saya punya beberapa pertanyaan penting untuk kalian semua. Pertama, apakah kalian ingin tetap tinggal di desa? Atau justru ingin hengkang? Mengapa? Kita di MST butuh kejelasan tegas. Kami perlu tahu, mengapa banyak pemuda yang meninggalkan permukiman MST. *Apa alasannya?* Apakah karena sekolah kalian kekurangan guru? Apakah karena kalian merasa bekerja di lahan terlalu berat? ... Pikirkanlah baik-baik. Jika kalian semua meninggalkan kampung, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Apakah itu demi kepentingan rakyat dan keluarga kalian? Coba renungkan, mengapa orang tua kalian rela berkemah bertahun-tahun, hidup di bawah tenda plastik hitam, menanggung penderitaan, hanya demi mendapatkan sepetak tanah untuk digarap?

Di situs webnya, La Vía Campesina menyatakan: “pemuda [kita] berjuang bersama untuk menjaga keberlanjutan petani muda, baik perempuan maupun lelaki, untuk tetap tinggal di pedesaan dunia, dan untuk kembali menggarap lahan.” Untuk mendukung hal ini, La Vía Campesina secara rutin menggelar Sidang Pemuda dalam konferensi internasionalnya. Dalam Deklarasi Sidang Pemuda keempat (2017), selain

memperkuat berbagai prinsip utama gerakan, mereka juga menyoroti masih besarnya tantangan untuk memastikan keterlibatan aktif kaum muda.

Patriarki dan diskriminasi usia membatasi keterlibatan dan peran kami dalam proses pengambilan keputusan. ...

Kami memperjuangkan demokratisasi masyarakat dan partisipasi penuh pemuda dalam proses-proses politik dan pengambilan keputusan. Penting bagi kami untuk menciptakan ruang dalam organisasi dan gerakan kami sendiri agar pemuda mampu mengembangkan keterampilan kepemimpinan.

Kedaulatan pangan dan keadilan tidak mungkin terwujud tanpa feminisme dan kesetaraan bagi semua orang. Kita harus mengakui serta menghormati keberagaman dalam segala bentuknya, termasuk ras, gender, orientasi seksual, dan kelas sosial. Kami bertekad membasmi patriarki dan segala bentuk diskriminasi di mana pun itu terjadi. Kami juga berkomitmen untuk melakukan refleksi mendalam, mengevaluasi diri, dan mengidentifikasi bagaimana kami mungkin tanpa sadar turut melanggengkan patriarki dan rasisme.

Kita perlu memahami lebih jauh bagaimana cita-cita keterlibatan pemuda ini benar-benar terlaksana, terutama dalam organisasi dan gerakan yang umumnya masih hierarkis, terpusat, patriarkis, dan heteronormatif, seperti MST dan banyak kelompok anggota La Vía Campesina. Inilah yang menjadi fokus utama penelitian Melinda Gurr tentang keterlibatan kaum muda dalam politik MST. Sebagaimana disinggung sebelumnya, ada perbedaan nyata antara permukiman MST yang menerapkan sistem pertanian keluarga secara individual dan yang memilih bertani secara kolektif. Di permukiman yang berbasis pertanian keluarga, anak-anak muda masih harus berhadapan dengan norma-norma patriarkis dan gerontokratis; jika kondisi di rumah tidak mendukung kemandirian mereka, maka keinginan untuk bermigrasi dan mencari peluang di

tempat lain pun makin kuat. Sebaliknya, di permukiman yang berbasis pertanian kolektif,

kepemilikan tanah bersama, sistem kerja upahan, dan tata kelola komunal justru memupuk kondisi-kondisi yang lebih terbuka, menantang norma patriarki pedesaan, dan memberi ruang lebih luas bagi pemuda, terlepas apakah mereka bagian dari keluarga inti heteronormatif atau tidak. ... Dengan kata lain, sistem kolektif ini menawarkan skenario alternatif, bahwa kecenderungan generasi muda meninggalkan pertanian bukanlah sesuatu yang tak terhindarkan. (Gurr 2017: 256)

Di tingkat regional dan nasional, keterlibatan pemuda dalam kongres dan aksi massa membawa dampak tersendiri bagi gerakan.

Ketika hampir semua pimpinan MST berupaya merangkul dan menggerakkan pemuda ... pemuda pun memanfaatkan kesempatan ini dengan cara yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh para tetua. ... Pemuda tidak hanya aktif berpartisipasi, tetapi juga berani menyuarakan kritik atas ketimpangan yang merasa rasakan di dalam gerakan, baik dalam hal usia, gender, ras, maupun orientasi seksual; keberanian mereka dalam menantang struktur yang bercokol justru dapat mendorong MST menjadi lebih transformatif dan demokratis di masa depan. ... Dengan menguji batas-batas norma yang diterima dalam gerakan, mereka menggunakan wacana resmi MST untuk memperkuat subkultur sosialis pemuda yang mulai berkembang. ... MST juga *menjadi gerakan kaum muda* dengan cara yang mungkin tidak pernah diduga oleh generasi perintis. (Gurr 2017: 258–159)

Para aktivis muda pedesaan mungkin lebih tertarik bergumul dengan cara-cara hidup dan berorganisasi yang berhaluan alternatif, daripada sekadar mendorong perubahan kebijakan melalui jalur-jalur formal yang

ada (Ansell 2015: 234). Prakarsa-prakarsa alternatif itu bisa saja diilhami oleh gerakan nasional atau internasional yang lebih besar, tetapi ketika tidak ada pengaruh dari luar, prakarsa-prakarsa itu bisa saja muncul secara spontan di tingkat lokal. Di Bab 3, kami telah menggambarkan perubahan kehidupan remaja di desa Jawa, Kaliloro. Mereka adalah “generasi pertama yang, dalam banyak kasus, sama sekali belum pernah menginjakkan kaki di sawah orang tua mereka.” Namun, seperti dikisahkan dalam Kotak 5.6, sekelompok pemuda di desa ini justru memutuskan, atas pertimbangan mereka sendiri, untuk menjalankan pertanian kolektif.

KOTAK 5.6

Proyek Pertanian Kolektif Pemuda di Jawa

Di seluruh desa di Indonesia, terdapat organisasi pemuda bentukan negara, yakni Karang Taruna. Organisasi ini biasanya aktif dalam kegiatan olahraga, perayaan hari kemerdekaan, dan sebagainya. Namun, pada 2017, di salah satu sudut desa, seorang ketua Karang Taruna—seorang petani penyakap dan mantan pekerja migran yang kini berusia 30-an tahun—punya gagasan berbeda. Dia mengajak para anggotanya yang lebih muda untuk menyewa sebidang sawah dari pemerintah desa dan mengujicobakan pertanian kolektif. Dia ingin menemukan cara agar para remaja di desanya bisa belajar dasar-dasar pertanian, sehingga jika kelak pulang kampung dari perantauan, mereka sudah punya bekal menjadi petani. “Dengan proyek pertanian kolektif ini, para pemuda yang belum pernah bekerja di sawah akan belajar cara menanam dan semua pekerjaan lainnya. ... Kalau mereka tidak berhasil di kota, cepat atau lambat mereka akan pulang kampung, lalu mau kerja

apa kalau tidak menjadi petani?” Meski awalnya pemerintah desa menolak gagasan itu, mereka terus melobi sampai akhirnya berhasil mendapatkan sewa sawah milik desa. Mereka pun turun ke sawah bersama-sama—tandur (menanam), matun (menyiangi rumput), hingga memanen padi. Meski tidak berpengalaman, mereka sangat bangga karena hasil panen mereka tidak kalah dari para petani lainnya. Hingga 2019, mereka sudah memasuki musim tanam keempat dan mulai mencari peluang lain untuk mendapatkan penghasilan bersama. Sementara itu, organisasi Karang Taruna lain di Kaliloro mulai tertarik untuk mencontoh inisiatif mereka.

Hal ini cukup membawa optimisme; meski pemuda makin jauh dari dunia pertanian dan banyak yang mengalami pemiskinan keterampilan dalam bertani, bukan berarti mereka menolak pertanian sepenuhnya. Mereka hanya tidak ingin menghabiskan masa muda untuk bergantung pada orang tua dan mungkin ingin bertani dengan cara yang berbeda dari generasi orang tua mereka. Mereka—atau setidaknya sebagian dari mereka—masih melihat pertanian sebagai pilihan untuk masa depan (White dan Wijaya 2019).

Di berbagai belahan dunia masa depan nanti, kita mungkin akan menyaksikan bentuk-bentuk aktivisme kaum muda yang makin terhubungkan secara global, lebih terbuka, dan lebih kolaboratif dibandingkan zaman sebelumnya. Di wilayah Basque, Spanyol, misalnya, gerakan keadaulatan pangan berhasil menciptakan ruang sosial dan politik yang baru, seperti “paguyuban tani” dan *gaztetxes*—pusat kegiatan sosial yang dibangun oleh kaum muda untuk seni-budaya, pendidikan dan pelatihan, dan prakarsa lainnya. Beberapa *gaztetxes* bahkan membentuk ke-

lompok-kelompok kecil yang secara khusus berfokus pada produksi pangan (Kotak 5.7).

KOTAK 5.7

Gaztetxe Ortuondo di Pinggiran Kota Bilbao

Gaztetxe Ortuondo dibentuk oleh tiga belas pemuda—semuanya lelaki mahasiswa atau pengangguran yang tergabung dalam gerakan pemuda lokal—tanpa pengalaman bertani sebelumnya. Mereka awalnya hanya tertarik berkebun untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sendiri, tapi seiring waktu kegiatan ini berkembang lebih besar menjadi upaya untuk mendorong perubahan sosial. Langkah pertama mereka ialah mengokupasi sejumlah bidang tanah cukup luas untuk dijadikan kebun komunitas. Berikutnya, setelah melalui refleksi bersama, mereka memutuskan untuk memperdalam pergumulan mereka dengan membangun cara hidup yang melampaui kapitalisme.

Tujuan mereka ialah membangun ekonomi komunal di luar pasar kapitalis, dengan saling berbagi hasil produksi mereka. ...

Namun, perjalanan mereka tidak lepas dari kontradiksi. Salah satu dilema utama yang mereka hadapi ialah bagaimana menyeimbangkan kebutuhan individu dengan kepentingan kolektif. ... Mereka menyadari meski idealnya ingin menciptakan suatu ruang komunal yang terlepas dari logika pasar ... membebaskan diri sepenuhnya dari logika pasar dan pertukaran uang bukanlah hal mudah; sebagai kompromi, mereka menerapkan model ekonomi campuran ... sebagian hasil panen diperuntukkan bagi kebutuhan komunal, sementara sebagiannya lagi dijual. Pendekatan ini memungkinkan mereka memperoleh sumberdaya untuk me-

nutupi ongkos produksi dan menyumbang sejumlah uang bagi kebutuhan subsisten masing-masing anggota. Harapannya, seiring waktu, dengan taktik ini mereka bisa memperluas ekonomi komunal dan makin mengurangi ketergantungan pada pasar (Etxagibel dan Desmarais 2017: 5–6).

Prakarsa kolektif pemuda desa bisa saja menemui berbagai hambatan untuk mencapai kemandirian dan daya transformatif; hambatan ini tidak datang hanya dari dalam keluarga maupun masyarakat, tetapi juga dari dalam organisasi dan gerakan mereka sendiri, di tingkat daerah maupun nasional. Perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan politik, kemandirian lebih besar, serta peran lebih kuat dalam penentuan agenda gerakan pada akhirnya mesti dilakukan di berbagai tempat dan tingkatan, dan bisa saja dihadapkan pada perlawanan patriarkis dan gerontokratis pada semua tingkatan ini.

Salah satu faktor yang masih menjadi tanda tanya besar dalam memikirkan masa depan petani skala kecil dan pemuda desa ialah dampak dari gelombang populisme otoriter dan kekuatan sayap kanan ekstrem yang tengah meluas seantero dunia. Kekuatan ini acap memiliki basis dukungan yang kuat di pedesaan (Scoones *et al.* 2018; Faulkner *et al.* 2019: Bab 6) dan biasanya disokong oleh aliansi lintas-kelas dari kaum miskin perkotaan maupun pedesaan. Meski wujud kekuatan ini berbeda-beda di berbagai tempat, “muatan utamanya selalu sama—membangun narasi mitologis tentang masyarakat yang ‘dibayangkan’, disertai retorika mistisisme tentang darah dan tanah,” dan “tujuan akhirnya tak lain ialah membentuk suatu gerakan massif sayap kanan yang cukup kuat untuk merebut kekuasaan negara. Begitu berkuasa, arah gerakan ini cenderung menuju kendali otoriter terhadap seluruh aparatus negara ... dan kendali ini digunakan ... untuk membungkam pendapat berbeda

dan merusak demokrasi,” dengan makin tunduknya sosial demokrasi terhadap neoliberalisme dan kekuatan korporat (Faulkner *et al.* 2019: 251).

Kontradiksi antara cakrawala global kaum muda yang makin luas dan terdigitalisasi dengan menciutnya prospek ekonomi mereka bisa saja menggerakkan mereka ke berbagai arah: menuju gerakan progresif untuk perubahan, menarik diri dari politik, atau justru terjerumus dalam populisme reaksioner dan penuh kekerasan (Scoones *et al.* 2018: 5). Di banyak negara, organisasi kepemudaan yang disokong negara kerap dibentuk untuk menjinakkan aspirasi kaum muda dan mengandangkan mereka ke dalam wadah yang menghambat gerakan politik otonom. Ketika gerakan pemuda yang kuat dan independen tidak hadir untuk memperjuangkan kepentingan serta agenda mereka sendiri, anak-anak muda yang merasa frustrasi dan terpinggirkan bisa jatuh ke dalam sikap apatis dan kehilangan semangat juang; sebaliknya, sebagian dari mereka bisa saja tertarik ke organisasi-organisasi populis reaksioner, yang terkadang berbalut sentimen keagamaan, seperti Pemuda Pancasila dan Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia (Hasan 2016). Singkatnya, kita tidak bisa begitu saja mengasumsikan bahwa kaum muda pedesaan secara intrinsik bersifat progresif, atau reaksioner, atau apatis: “yang lebih berguna ialah melakukan analisis konkret mengenai peran pemuda di berbagai gerakan sosial dan peristiwa politik” (Harvey *et al.* 2016: 467).

MASA DEPAN PERTANIAN KECIL?

Di seantero dunia, kaum muda bangkit melawan sistem kapitalisme neoliberal. ... Jika mereka tidak memperjuangkan diri mereka sendiri dan bekerjasama, tidak akan ada pihak lain yang bisa diharapkan! (La Vía Campesina 2014: 2)

Sebagaimana disinggung di awal buku ini, masa depan pertanian kecil bergantung pada hadirnya generasi baru yang berminat untuk bertani. Namun, kemunculan generasi (calon) petani muda ini sendiri bergan-

tung pada seberapa besar harapan yang bisa ditawarkan sektor pertanian skala kecil di masa depan. Pertanian skala kecil menghadapi berbagai ancaman: serbuan pertanian industrial korporat dan dominasi agrobisnis atas rantai pertanian-pangan; pengabaian sistematis terhadap pertanian kecil oleh pemerintah,⁶ termasuk pembiaran atau bahkan dukungan penguasa pada perampasan tanah besar-besaran yang menggusur petani kecil; risiko bencana baru akibat krisis iklim; serta kebangkitan gerakan ekstrem kanan seantero dunia yang bersekutu dengan modal korporat. Di dalam sektor pertanian kecil yang masih bertahan pun, keberlanjutan generasi menjadi ancaman nyata, seiring menuanya populasi petani dan makin banyaknya pemuda yang berpaling dari pertanian. Meski buku ini berfokus pada ancaman yang disebut terakhir (masalah generasi), tetap penting untuk memperhatikan ancaman-ancaman lain.

Para aktivis muda La Vía Campesina mungkin benar ketika berpendapat (seperti dikutip di awal bagian ini) bahwa pemuda harus mengambil alih kendali atas masa depan mereka sendiri, tanpa berharap pada pihak lain, termasuk pemerintah. Namun, di sisi lain, pemerintah tidak bisa dibiarkan begitu saja lepas tangan dari tanggung jawab untuk menyediakan pekerjaan dan penghidupan bagi pemuda desa, juga dari janji-janji untuk mendukung pertanian kecil. Begitu pula bagi lembaga-lembaga internasional yang menaruh perhatian pada pertanian, pangan, dan pembangunan pedesaan.

Pada Mei 2019, FAO dan lembaga pembiayaan pengembangan pertanian internasional (International Fund for Agricultural Development [IFAD])—dua lembaga PBB yang fokus pada pertanian dan pangan—meluncurkan “Dasawarsa Pertanian Keluarga 2019–2028”. Prakarsa ini merupakan puncak dari proses yang dimulai sejak 2014, yang ditetapkan sebagai “Tahun Petani-Keluarga PBB”; tujuan utamanya ialah memperkuat komitmen politik dalam mendukung serta memberdayakan petani keluarga. Upaya ini juga sejalan dengan Resolusi PBB tentang Hak-Hak Petani dan Pekerja Pedesaan yang telah disahkan setengah tahun sebelumnya (UN 2018). Salah satu dari tujuh pilar

dalam Rencana Aksi Dasawarsa ini ialah “mendukung kaum muda dan memastikan keberlanjutan generasi dalam pertanian keluarga” (FAO dan IFAD 2019: 30–33). Beberapa pekan kemudian, pada Juni 2019, IFAD meluncurkan *Rural Development Report: Creating Opportunities for Rural Youth* (‘Laporan Pembangunan Pedesaan: Menciptakan Peluang bagi Kaum Muda Pedesaan’), yang bertujuan “memberikan analisis yang bisa dijadikan dasar untuk merancang kebijakan, program, dan investasi guna mendorong transformasi pedesaan yang lebih inklusif bagi kaum muda” (FAO dan IFAD 2019: 6).⁷

Namun, di dalam keluarga besar organisasi PBB, kita dapat melihat banyak kebijakan yang saling bertentangan terkait petani kecil, seperti yang bisa kita temukan di tingkat nasional di banyak negara. Di satu sisi, banyak peraturan perundang-undangan, prakarsa, dan wacana kuat yang menyerukan dukungan serta perlindungan bagi pertanian kecil, tetapi acap tidak benar-benar terlaksana. Di sisi lain, banyak kebijakan yang ada justru membiarkan atau bahkan mendukung perampasan tanah skala besar, pengusuran petani kecil, ekspansi korporasi ke dalam pertanian dan rantai pertanian-pangan, serta model pertanian dan sektor ekonomi lain yang membuat bumi makin panas. Hingga kini, baik dokumen Dasawarsa Pertanian Keluarga PBB maupun laporan IFAD tidak sekali pun menyinggung ancaman terhadap pertanian keluarga akibat serbuan modal raksasa yang berupaya menguasai tanah luas, menggusur petani kecil dengan pertanian industri yang merusak lingkungan, serta makin mendominasi sektor hulu dan hilir dalam rantai pertanian-pangan. Ancaman ini bak “gajah di pelupuk mata tidak tampak”—yang semua orang tahu tapi enggan membahasnya. Visi IFAD tentang masa depan pemuda desa didasarkan pada model “transformasi pedesaan” yang telah diuraikan dalam laporan mereka sebelumnya. Model ini melihat pergeseran dari pekerjaan mandiri ke pekerjaan berupah—dengan kata lain, menyusutnya pertanian kecil dan berbagai produksi skala kecil lainnya—sebagai “karakteristik mendasar dari transformasi pedesaan” (IFAD 2019: 15, mengutip IFAD 2016).

Dalam menghadapi potensi krisis generasi dalam pertanian kecil, penting untuk mencari cara mengatasi tegangan dan kekakuan dalam proses alih-generasi sumberdaya agraria, terutama dalam hal akses tanah pertanian bagi kaum muda. Di banyak belahan dunia, di mana sistem jaminan sosial dan pensiun bagi lansia masih minim atau tidak memadai, tanah memiliki fungsi penting sebagai jaminan sosial; oleh karenanya, kebutuhan dan kepentingan generasi tua petani kecil tidak boleh diabaikan begitu saja. Banyak program pemerintah maupun ornop telah dikembangkan untuk mendorong alih-generasi kepemilikan tanah, yang tidak selalu harus terjadi antara orang tua dan anak. Program-program ini juga berupaya menyediakan akses bagi calon petani muda atas “lahan tidur” atau tanah publik/negara dengan biaya murah. Contoh-contoh program semacam ini—yang dipaparkan berikutnya ini—telah dibahas di laporan berjudul *Youth and Agriculture* (‘Pemuda dan Pertanian’) terbitan FAO-IFAD-CTA (2014).

Di Burkina Faso, organisasi Songtaab-Yelgre meminta para kepala desa dan tetua adat agar memberi akses tanah kepada perempuan untuk produksi *shea butter* (lemak nabati hasil ekstraksi kacang-kacangan dari pohon Shea). Di wilayah Tigray, Ethiopia, ornop REST merehabilitasi lahan-lahan tandus di lereng perbukitan dengan membangun infrastruktur konservasi tanah dan air, sehingga lahan-lahan ini bisa dialokasikan kepada para pemuda tunakisma. Di Meksiko, pemerintah menjalankan program “Dana Wirausaha dan Tanah Pedesaan” untuk membantu kaum muda memperoleh tanah bekas lahan komunal yang tidak lagi dimanfaatkan; program ini juga memberi insentif bagi petani lebih tua agar mau mengalihkan tanah kepada generasi muda, dengan jaminan kesejahteraan mereka di masa pensiun. Di Mesir, pemerintah menyediakan lahan gurun yang telah direklamasi bagi pemuda; ribuan pemuda telah memperoleh tanah melalui program ini dengan syarat mereka tidak boleh menjualnya; banyak dari mereka yang kemudian sukses dalam produksi sayuran untuk dijual. Taiwan punya program “Tuan Tanah Kecil, Petani Penyewa Besar” yang diluncurkan

pada 2008 oleh Dewan Pertanian; program ini mendorong petani lansia untuk menyewakan tanah mereka dalam jangka panjang kepada petani muda atau organisasi tani; dalam dua tahun, sekitar 8.000 lansia pemilik lahan sempit telah menjalin kesepakatan dengan sekitar 700 petani muda sebagai penyewa. Di bagian barat-daya Uganda, perusahaan dagang pertanian RUL menandatangani perjanjian sewa jangka pendek dengan para lansia pemilik tanah yang tidak berencana menggunakan tanah mereka dalam setahun berikutnya; perusahaan ini kemudian menawarkan tanah-tanah tersebut kepada kelompok petani muda yang sudah ada maupun yang baru terbentuk; untuk bisa mengajukan sewa, kelompok ini harus beranggotakan minimal delapan orang berusia 18–35 tahun, tiga di antaranya harus perempuan (FOA-IFAD-CTA 2014).

Di Spanyol, Sekolah Gembala Katalonia melatih anak muda keterampilan menggembala domba dan pertanian organik; sekolah ini juga membantu peserta baru untuk mendapatkan akses tanah dan/atau pekerjaan dengan mempertemukan mereka kepada orang-orang yang akan menjual tanah atau petani mapan yang mencari tenaga kerja (Eco Ruralis 2016: 21). Di Jepang, di tengah menyusutnya jumlah petani kecil akibat populasi yang menua—dengan hanya separuh dari populasi petani tua berlahan sempit yang mempunyai calon penerus—makin banyak pemuda yang memasuki dunia pertanian. Mereka mendapat dukungan besar dari program-program pemerintah yang bertujuan mencegah terbengkalainya lahan pertanian. Calon petani muda bisa mendapatkan pelatihan gratis di sekolah pertanian, pinjaman bebas bunga, serta tunjangan senilai sekitar Rp225 juta per tahun. Pemerintah daerah juga menyediakan layanan untuk menempatkan petani baru di komunitas-komunitas yang menyediakan lahan, tempat tinggal, serta pendamping pertanian “untuk menjamin agar masuknya petani baru ini beserta keluarga mereka di kehidupan masyarakat desa berlangsung semulus mungkin” (McGreevy *et al.* 2018: 1–2). Prakarsa-prakarsa serupa juga berkembang di berbagai negara Eropa, di mana mekanisme “makcomblang” ini menjadi cara umum untuk meluncurkan peralihan/

regenerasi usaha tani di luar jalur keluarga (van Boxtel *et al.* 2016; Cassidy *et al.* 2019).

Prakarsa-prakarsa untuk mendukung calon petani muda sebaiknya merangkul mereka yang meneruskan usaha tani keluarga (penerus) maupun mereka yang baru pertama kali terjun ke pertanian (petani baru), baik laki-laki maupun perempuan. Program-program semacam ini juga perlu mempertimbangkan pola-pola khas kehidupan kaum muda hari ini, yang bisanya berpindah-pindah dan menjalani mata pencaharian beragam (kerja-majemuk), memadukan pendapatan dari pertanian dan nonpertanian. Dalam menumbuhkan lapangan kerja upahan di pedesaan baik di dalam maupun di luar sektor pertanian-pangan, pemerintah juga perlu lebih giat menciptakan permintaan tenaga kerja. Hal ini bisa dilakukan, misalnya, melalui program-program pasar kerja untuk anak muda, seperti penyediaan pekerjaan sektor publik di bidang yang bermanfaat secara sosial, serta program-program magang atau pelatihan kerja lain yang berfaedah. Terakhir, agar pedesaan menjadi ruang yang menarik bagi kaum muda untuk tinggal dan bekerja, dibutuhkan imajinasi kreatif untuk memproyeksikan masa depan pedesaan—bagaimana pedesaan bisa berkembang dan bagaimana kaum muda bisa menemukan peran aktif di dalamnya.

Di buku kecil ini, saya baru sedikit mengulas keterkaitan kompleks antara kelas, gender, dan hubungan generasi dalam rumah tangga dan masyarakat agraris. Meski demikian, saya harap ulasan singkat ini sudah bisa menunjukkan relevansi dan arti penting perspektif hubungan generasi dalam kajian perubahan agraria. Generasi tidak hanya menjadi poros utama dalam distribusi sumberdaya, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kekuasaan wacana, yang membentuk serta memengaruhi dinamika struktur ekonomi-politik agraria (Ansell 2016: 323–325).

Kaum muda pedesaan di dunia punya potensi besar untuk menjadi penggerak dalam upaya menghidupkan kembali pertanian kecil. Jika ingin memastikan masa depan pertanian kecil dengan keberlanjutan generasinya, pemerintah harus benar-benar memberikan dukungan

yang memadai, membuka akses petani kecil ke pasar yang berkembang, serta menciptakan peluang nilai-tambah—tidak hanya di lahan, tetapi juga di sepanjang rantai pertanian-pangan dari hulu hingga hilir. Komitmen ini juga mencakup upaya membatasi—bahkan bila perlu membalikkan—penggusuran/perampasan tanah serta monopoli agrobisnis skala besar, termasuk melalui reforma agraria lokal maupun nasional yang memungkinkan rakyat “merebut kembali tanah”. Namun, upaya menghidupkan kembali pertanian kecil dengan berkelanjutan generasinya tidak bisa sekadar melalui kebijakan teknis. Kaum muda harus diakui bukan sebagai alat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, melainkan sebagai subjek, pelaku aktif (aktor), dan warga negara yang berhak menentukan masa depan mereka. Ini berarti memastikan mereka mempunyai akses tanah serta sumberdaya agraria lainnya, tanpa mengabaikan kepentingan dan kebutuhan generasi tua. Selain itu, dibutuhkan kreativitas untuk menciptakan peluang di dunia pertanian yang menarik bagi kaum muda dan membangun sarana yang menjadikan pedesaan sebagai ruang yang layak serta menjanjikan bagi kaum muda untuk hidup dan bekerja.

CATATAN

- 1 Lima kajian yang disurvei antara lain: Levy dan Hossein (2014), OECD (2017) data dari proyek Global Evidence dari Overseas Development Institute (<http://www.gage.odi.org>) yang disediakan oleh Nicola Jones, Elias *et al.* (2018), serta survei melalui layanan pesan singkat (sms) dalam BMZ (2017) serta Melchers dan Büchler (2017). Untuk paparan lebih rinci, lihat White (2018b: 10–16).
- 2 SMS (*short message service*): pesan tertulis melalui jaringan telepon seluler.
- 3 Yang mereka maksud ialah usaha-usaha nontani. Pertanian skala kecil komersial bisa saja dianggap sebagai suatu kegiatan “wirausaha”.
- 4 Proyek penelitian “Menjadi Petani Muda: Jalur-Jalur Kaum Muda Menjadi Petani di Empat Negara (Tiongkok, Kanada, India, dan Indonesia)” didanai oleh Canadian Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC).
- 5 Tentang kasus Indonesia, lihat Koning (2005).
- 6 Dengan beberapa pengecualian, misalnya Jepang dan beberapa negara Eropa. Di beberapa negara, “pengabaian” merupakan penghalusan kata, ketika negara mengizinkan atau mendorong perampasan tanah besar-besaran.
- 7 Meskipun dua topik tersebut jelas berkaitan erat (masa depan pertanian keluarga dan masa depan kaum muda desa), juga bahwa keduanya dibuat oleh organisasi yang sama, dokumen PBB untuk Dasawarsa Pertanian Keluarga tidak menyebut laporan IFAD, begitu juga sebaliknya. Hal rumpang serupa dapat dilihat sedasawarsa lalu dalam laporan Bank Dunia; laporannya yang berjudul *World Development Report 2007: Development and the Next Generation* nyaris tidak menyebut pertanian, sementara laporan tahun berikutnya *World Development Report 2008: Agriculture for Development* nyaris tidak menyebut pemuda (World Bank 2006; World Bank 2007). Dua tim ahli masing-masing topik itu mungkin saling tahu, tetapi tampaknya tidak berdialog.

GLOSARIUM

Akumulasi primitif: Proses di mana bangunan sosial yang nonkapitalistis diubah menjadi kapitalistis, dengan terutama melibatkan pemisahan pekerja dari akses langsung atas alat produksi, khususnya tanah, melalui praktik pemagaran/pengavelingan (*enclosure*) yang mengusur petani kecil dan mengubah tanah menjadi milik pribadi serta modal (kapital). Lihat juga pemagaran/pengavelingan tanah; perampasan tanah.

Cottar (buruh tani, Skotlandia): Petani atau buruh tani yang tinggal di sebuah pondokan dan kadang menggarap sebidang lahan kecil, biasanya sebagai imbalan atas jasa tenaga kerja yang diberikan. *Lihat juga crofter.*

Crofter (Skotlandia): Penggarap lahan kecil yang menggarap tanah sebagai bagian dari sumber penghidupan, dan membayar sewa ke petani penyewa lebih besar. *Lihat juga cottar.*

Daur perkembangan rumah tangga: Proses pembentukan, pertumbuhan, penyebaran, perpecahan/pemisahan, dan penggantian rumah tangga, yang disertai dengan perubahan komposisi usia dan tenaga kerja anggota di dalamnya seiring berjalannya daur tersebut.

Devolusi: (Di buku ini) pembagian harta (terutama tanah) dari pemilik ke ahli warisnya, baik sebelum atau setelah pemilik meninggal. *Lihat juga pewarisan.*

Diferensiasi agraria: Kecenderungan—yang didorong oleh proses komodifikasi—pemilahan produsen komoditas skala kecil (petani kecil) menjadi beberapa kelas, yang disertai dengan hubungan timpang antara

kelas-kelas tersebut dalam skema penyakapan dan/atau penggunaan buruh upahan.

Gender: Perilaku dan makna-makna yang secara kultural dikaitkan dengan kategori sosial laki-laki dan perempuan, serta hubungan antara kedua kategori tersebut, dalam segala aspek aktivitas sosial—mulai dari akses atas sumberdaya, imbalan atau upah kerja, hingga pelaksanaan wewenang dan kekuasaan.

Generasi: (Di buku ini) hubungan yang dibangun secara sosial (politis, kultural) antara individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat berdasarkan usia “sosial” atau status tahapan-hidup mereka.

Gerontokrasi: Kekuasaan terstruktur generasi tua (biasanya laki-laki, *lihat patriarki*) terhadap generasi lebih muda.

Indenture (sistem kuli kontrak): Kontrak kerja dalam sistem ketenagakerjaan berbasis paksaan yang mengikat pekerja untuk bekerja buat majikan tertentu selama jangka waktu yang ditetapkan. Pekerja (kuli kontrak) biasanya menandatangani kontrak ini sebagai imbalan atas uang muka atau pengampunan utang.

Interseksionalitas (saling-silang): Interaksi dari berbagai bentuk dan hubungan penindasan, ketimpangan, dan identitas, seperti kelas, gender, suku, generasi.

Kelas (dalam konteks agraria): Kelompok sosial yang dicirikan berdasarkan posisinya dalam relasi sosial produksi serta hubungannya dengan kelas-kelas lain.

Komodifikasi: Proses di mana unsur-unsur produksi dan reproduksi diubah menjadi barang dagangan (komoditas) yang diproduksi untuk, dan

diperoleh melalui, pertukaran pasar, sehingga membuat unsur-unsur itu tunduk pada logika, aturan, dan paksaan pasar.

Mahar: Harta yang diserahkan saat pernikahan dari keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan. Bisa juga disertai layanan kerja mempelai laki-laki.

Matriarkat: Dominasi yang terstruktur dan terlembagakan perempuan sebagai suatu kelas terhadap laki-laki.

Matrifokal: Hubungan kekerabatan atau sosial yang berporos pada ibu atau para perempuan. Istilah ini umumnya digunakan untuk menggambarkan rumah tangga matrifokal, yakni rumah tangga yang disusun di sekitar peran ibu, sementara peran ayah tidak ada atau sangat terbatas.

Matrilineal: Garis keturunan atau warisan dari ibu kepada anak-anaknya. Dahulu, masyarakat matrilineal acap dianggap sebagai masyarakat yang dikuasai oleh perempuan, tetapi kini diketahui bahwa laki-laki pun bisa mendominasi secara ekonomi dan politik di masyarakat ini, sedangkan perempuan juga bisa menduduki status tinggi di masyarakat patrilineal.

Patriarki: Dominasi yang terstruktur atau terlembagakan laki-laki sebagai suatu kelas terhadap perempuan, serta dominasi generasi tua terhadap generasi muda. Meski sering dikaitkan dengan masyarakat patrilineal, patrilinealitas bukanlah syarat mutlak bagi dominasi laki-laki.

Patrilineal: Garis keturunan atau warisan dari ayah kepada anak-anaknya. Lihat juga matrilineal.

Pemagaran/pengavelingan tanah (*enclosure*): Pengambilalihan dan privatisasi tanah atau sumberdaya lain yang dulunya dipunyai bersama, se-

hingga para pengguna sebelumnya kehilangan hak. *Lihat juga perampasan tanah; akumulasi primitif.*

Pembagian kerja secara sosial: Penentuan tugas kelompok-kelompok masyarakat ke dalam kegiatan yang berbeda, sesuai kedudukan mereka dalam struktur relasi sosial, terutama yang berdasarkan hubungan kelas, gender, dan generasi.

Perampasan tanah: Pengambilalihan tanah atau hak-hak atas tanah dan sumberdaya secara besar-besaran yang melibatkan penggusuran pengguna sebelumnya oleh entitas korporat (perusahaan, nirlaba, maupun lembaga publik). *Lihat juga pemagaran/pengaveling tanah.*

Pertanian (skala) kecil: Merujuk pada cara dan ‘skala’ pelaksanaan usaha tani, ketimbang pada luasan lahan, di mana pemilik atau penggarap mengelola dan mengerjakan sendiri lahannya, terutama dengan bantuan para anggota keluarga, tanpa menutup kemungkinan penggunaan buruh upahan.

Petani/kaum tani (*peasants*): Produsen komoditas skala kecil (*petty commodity producers* [PCP]) dalam budidaya pertanian, yang mana produksinya (sebagian atau seluruhnya) ditujukan ke pasar, tetapi didasarkan pada sumberdaya dan relasi yang tidak diperlakukan sebagai komoditas.

Pewarisan: Penyerahan kepemilikan (hak yang melekat pada objek) atau kedudukan sosial setelah si pemilik meninggal, umumnya secara vertikal kepada generasi berikutnya, tetapi kadang juga secara horizontal kepada adik/kakak. *Lihat juga devolusi.*

Reforma agraria: Reforma menyeluruh yang mencakup pembagian tanah serta program-program pendukung bagi penerima manfaat, dengan

menyediakan input dan lembaga-lembaga yang dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan pertanian skala kecil.

Reforma pertanahan: Pengalokasian ulang kepemilikan atau hak-hak atas tanah, di mana biasanya penerimanya ditentukan dengan jelas. Program ini bisa melibatkan pengalihan tanah kepada petani kecil atau buruh tani tunakisma, nasionalisasi, kolektivisasi, atau bahkan pembubaran kolektivisasi. **Reforma pertanahan redistributif** biasanya didefinisikan lebih ketat sebagai program pengalihan hak atas tanah dari pemilik besar—baik individu maupun korporasi—kepada petani kecil dan buruh tani tunakisma. *Lihat juga reforma agraria.*

Reproduksi: Proses yang memastikan syarat-syarat kehidupan dan produksi di masa depan tetap terpenuhi, berdasarkan apa yang dihasilkan dan diperoleh saat ini. *Lihat juga reproduksi sosial.*

Reproduksi sosial: Praktik-praktik materiel dan wacana yang mendukung kelangsungan serta pembentukan kembali tatanan sosial—termasuk hubungan antarkelompok di dalamnya—dan anggotanya seiring waktu. *Lihat juga reproduksi.*

Rezim tenaga kerja: Cara-cara perekrutan dan pengerahan tenaga kerja serta pengaturannya dalam proses produksi, dan juga kondisi sosial serta politik yang memungkinkan penegakan hubungan-hubungan tersebut.

Rumah tangga: Unit ekonomi yang terbentuk atas dasar tinggal bersama. Kelompok domestik ini terdiri atas unit-unit produksi, konsumsi, dan akumulasi yang berbeda dan sebagiannya saja saling berkaitan. Di dalamnya, mungkin terjadi mekanisme pengalihan hasil-lebih (surplus) antaranggota yang didasarkan pada hierarki usia dan gender. Meski kon-

sep rumah tangga acap beririsan dengan “keluarga”, secara analitis kedua istilah ini berbeda; rumah tangga bisa juga mencakup pembantu upahan dan individu lain yang bukan kerabat.

PUSTAKA

- ABBINK, J. dan J. VAN KESSEL, penyunting. 2005. *Vanguard or Vandals: Youth, Politics and Conflict in Africa*. Leiden (Belanda): Brill.
- ABRAHAMS, RAY. 1990. "Old master, young master: retirement on Finnish farms." Dalam *Anthropology and the Riddle of the Sphinx: Paradoxes of Change in the Life Course*, disunting oleh PAUL SPENCER, 156–166. ASA Monographs 28. London (Inggris): Routledge:.
- AGARWAL, B. 1994. *A Field of One's Own: Gender and Land Rights in South Asia*. Cambridge (Inggris): Cambridge University Press.
- AKATIGA dan B. WHITE. 2015. "Would I Like to Be a Farmer?" *Inside Indonesia* 120 (April–June).
- ALANEN, L. 2016. "'Intersectionality' and Other Challenges to Theorizing Childhood." *Childhood* 23(2): 157–161.
- ALDEN WILY, L. 2012. "Looking Back to See Forward: The Legal Niceties of Land Theft in Land Rushes." *Development and Change* 39(3–4): 751–775.
- AMANOR, K. 2005. "Night Harvesters, Forest Hoods and Saboteurs: Struggles over Land Expropriation in Ghana." Dalam *Reclaiming the Land: The Resurgence of Rural Movements in Africa, Asia and Latin America*, disunting oleh S. MOYO dan P. YEROS. London (Inggris): Zed.
- _____. 2010. "Family Values, Land Sales and Agricultural Commodification in South-Eastern Ghana." *Africa* 80(1): 104–125.
- AMBARWATI, A., C. CHAZALI, H. WIJAYA, dan B. WHITE. 2019. "At the Intersection of Class, Generation and Gender: Young Women Farmers in Indonesia." Makalah dipresentasikan pada Seeds of Change conference Gender Equality Through Agricultural

- Research for Development, Australian National University, Canberra, 2–4 April.
- ANSELL, N. 2015. *Children, Youth and Development*, 2nd edition. London (Inggris): Routledge.
- _____. 2016. “Age and Generation in the Service of Development?” Dalam *Generationing Development: A Relational Approach to Children, Youth and Development*, disunting oleh R. HUIJSMANS, 315–330. London (Inggris): Palgrave Macmillan.
- APPADURAI, A. 2004. “The Capacity to Aspire: Culture and the Terms of Recognition.” Dalam *Culture and Public Action*, disunting oleh V. RAO dan M. WALTON, 59–84. Stanford (Amerika Serikat): Stanford University Press.
- ARCHAMBAULT, C. 2014. “Young Perspectives on Pastoral Rangeland Privatization: Intimate Exclusions at the Intersection of Youth Identities.” *European Journal of Development Research* 26(2): 204–218.
- ARENSBERG, C.M. dan S.T. KIMBALL. 1968. *Family and Community in Ireland*. Cambridge, MA (Amerika Serikat): Harvard University Press.
- AUSTRALIAN BUREAU OF STATISTICS. 2012. *Australian Social Trends*, December. aus-stats.abs.gov.au. Diunduh 5 Juni 2019.
- BADAN PUSAT STATISTIK (BPS). 2013. *Sensus Pertanian 2013*. Jakarta: BPS.
- _____. 1983. *Sensus Pertanian 1983*. Jakarta: BPS.
- BAYAT, A. 1997. *Street Politics: Poor People’s Movements in Iran*. New York (Amerika Serikat): Columbia University Press.
- BEAZLEY, H., S. BESSELL, J. ENNEW, dan R. WATERSON. 2009. “The Right to Be Properly Researched: Research with Children in a Messy, Real World.” *Children’s Geographies* 7(4): 365–378.
- BELOV, F. 1956. *The History of a Collective Farm*. New York (Amerika Serikat): Praeger.
- BERCKMOES, L. dan B. WHITE. 2016. “Youth, Farming and Precarity in Rural Burundi.” Dalam *Generationing Development: A Relational*

- Approach to Children, Youth and Development*, disunting oleh R. HUIJSMANS, 291–312. London (Inggris): Palgrave Macmillan.
- BERIK, G., penyunting. 2017. “Making the Case for Gender Equality: Efficiency and Social Justice Arguments.” *Canadian Journal of Development Studies* 38(4): 542–581 (Special section).
- BERKNER, L.K. 1976. “Inheritance, Land Tenure and Peasant Family Structure: A German Regional Comparison.” Dalam *Family and Inheritance: Rural Society in Western Europe, 1200–1800*, disunting oleh J. GOODY, J. THIRSK, dan E.P. THOMPSON, 71–95. Cambridge (Inggris): University Press.
- BERLANT, L. 2007. “Cruel Optimism: On Marx, Loss and the Senses.” *New Formations* 63(1): 33–51.
- BERNSTEIN, H. 2010. *Class Dynamics of Agrarian Change*. Agrarian Change and Peasant Studies Series. Halifax (Kanada): Fernwood Publishing.
- _____. 2019. *Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria (Edisi Revisi)*. Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria. Yogyakarta: INSIST Press.
- _____. 1981. “Concepts for the Analysis of Contemporary Peasantries.” Dalam *The Political Economy of Rural Development: Peasants, International Capital, and the State*, disunting oleh R. GALLI, 3–24. Albany (Amerika Serikat): SUNY Press.
- BESSANT, J., R. FARTHING, dan R. WATTS. 2017. *The Precarious Generation: A Political Economy of Young People*. London (Inggris): Routledge.
- BHANDAR, B. 2018. *Colonial Lives of Property: Law, Land, and Racial Regimes of Ownership*. Durham (Amerika Serikat): Duke University Press.
- BHATTACHARYA, P. 2017. *Social Reproduction Theory*. London (Inggris): Pluto Press.
- BMZ. 2017. “The Voice of Youth at the G20 Conference.” Dalam *One World – No Hunger: Future of the Rural World*. International G20 Conference, Berlin, 27–28 April. Bonn (Jerman): Ministry for Economic Cooperation and Development.

- BOHANNAN, P. dan L. BOHANNAN. 1968. *Tiv Economy*. London (Inggris): Longman.
- BORGERHOFF MULDER, M. *et al.* 2009. "Intergenerational Wealth Transmission and the Dynamics of Inequality in Small-Scale Societies." *Science* 326 (30 October): 682–688.
- BOSENENBROEK, L. 2016. "Behind the Veil of Agricultural Modernization: Gendered Dynamics of Rural Change in the Saïss, Morocco." Disertasi Ph.D. di Wageningen University, Belanda.
- BOSENENBROEK, L., J.D. VAN DER PLOEG, dan M. ZWARTEVEEN. 2015. "Broken Dreams? Youth Experiences of Agrarian Change in Morocco's Saïss Region." *Cahiers Agricultures* 24: 342–348.
- BOURDILLON, M., D. LEVISON, W.E. MYERS, dan B. WHITE. 2010. *Rights and Wrongs of Children's Work*. Rutgers (Amerika Serikat): Rutgers University Press.
- BROMLEY, D.W. 2008. "Formalizing Property Rights in the Developing World: The Wrong Prescription for the Wrong Malady." *Land Use Policy* 26: 20–27.
- BRUNEL. 2018. "Concept Note for the Conference 'Theorizing Young People's Aspirations in a Global Context'." Brunel University, 26–27 Maret.
- BRYCESON, D., C. KAY, dan J. MOOIJ, penyunting. 2000. *Disappearing Peasantries? Rural Labour in Africa, Asia and Latin America*. London (Inggris): Intermediate Technology Publications.
- BUCK, J.L. 1930. *Chinese Farm Economy: A Study of 2866 Farms in Seventeen Localities and Seven Provinces in China*. Diterbitkan untuk the University of Nanking and the China Council of the Institute of Pacific Relations. Chicago (Amerika Serikat): University of Chicago Press.
- CASSIDY, A. 2019. "Female Successors in Irish Family Farming: Four Pathways to Farm Transfer." *Canadian Journal of Development Studies* 40(2): 238–253.

- CASSIDY, A., S. SRINIVASAN, dan B. WHITE. 2019. "Generational Transmission of Smallholder Farms in Late Capitalism." *Canadian Journal of Development Studies* 40(2): 220–237.
- CHAYANOV, A. V. 1966a [1925]. "Peasant Farm Organization." Dalam *A. V. Chayanov: The Theory of Peasant Economy*, disunting oleh D. THORNER *et al.*, 29–269. Homewood (Amerika Serikat): American Economic Association.
- _____. 1966b [1929]. "On the Theory of Non-Capitalist Economic Systems." Dalam *A. V. Chayanov on the Theory of Peasant Economy*, disunting oleh D. THOMAS, B. KERBLAY, dan R. SMITH, 1–28. Homewood (Amerika Serikat): American Economic Association.
- CHISWELL, H. 2014. "The Importance of Next Generation Farmers: A Conceptual Framework to Bring the Potential Successor into Focus." *Geography Compass* 8: 300–312.
- COHEN, M. 1976. *House United, House Divided: The Chinese Family in Taiwan*. New York (Amerika Serikat): Columbia University Press.
- COLE, J. 2003. "The Last Becomes First: The Rise of Ultimogeniture in Contemporary South Tyrol." Dalam *Distinct Inheritance: Property, Family and Community in a Changing Europe*, disunting oleh H. GRANDITS dan P. HEADY, 263–274. Münster (Jerman): LIT Verlag.
- COLE, J. dan E. WOLF. 1974. *The Hidden Frontier: Ecology and Ethnicity in an Alpine Valley*. New York (Amerika Serikat): Academic Press.
- COLLINS, P. H. dan S. BILGE. 2016. *Intersectionality*. Cambridge (Inggris): Polity Press.
- CUERVO, H. dan J. WYN. 2012. *Young People Making It Work: Continuity and Change in Rural Places*. Carlton (Australia): Melbourne University.
- DAVIDSON, N. 2004. "The Scottish Path to Capitalist Agriculture 2: The Capitalist Offensive (1747–1815)." *Journal of Agrarian Change* 4(4): 411–460.
- DE HAAN, H. 1994. *In the Shadow of the Tree: Kinship, Property and Inheritance Among Farm Families*. Amsterdam (Belanda): Het Spinhuis.

- DE KAT ANGELINO, P. 1929. *Vorstenlandsche Tabaksenquête (Inquiry on tobacco in the Principalities)*. Publication No. 5 of the Labour Office. Weltevreden (Hindia Belanda): Landsdrukkerij.
- DE SCHUTTER, O. 2011. "How Not to Think of Land-Grabbing: Three Critiques of Large Scale Investments in Farmland." *Journal of Peasant Studies* 38(2): 249–279.
- DE STE. CROIX, G.E.M. 1981. *The Class Struggle in the Ancient Greek World*. London (Inggris): Duckworth.
- DEERE, C.D. dan A. DE JANVRY. 1981. "Demographic and Social Differentiation among Northern Peruvian Peasants." *Journal of Peasant Studies* 8(3): 335–366.
- DEERE, C.D. dan M. LEÓN DE LEAL, penyunting. 2001. *Empowering Women: Land and Property Rights in Latin America*. Pittsburgh (Amerika Serikat): Pittsburgh University Press.
- DEVINE, T. 2006. *Clearance and Improvement: Land, Power and People in Scotland 1700–1900*. Edinburgh (Skotlandia): John Donald.
- DURHAM, D. 2017. "Elusive Adulthood: Introduction." Dalam *Elusive Adulthood: The Anthropology of New Maturities*, disunting oleh D. DUNHAM dan J. SOLWAY, 1–38. Bloomington (Amerika Serikat): Indiana University Press.
- ECO RURALIS. 2016. *Farm Succession in Romania: Who Will Take over the Lands from an Aging Peasant Population?* Cluj (Rumania): Asociația Eco Ruralis.
- EDELMAN, M. dan S.M. BORRAS JR. 2016. *Political Dynamics of Transnational Agrarian Movements*. Agrarian Change and Peasant Studies Series. Rugby (Inggris): Practical Action Publishing dan Halifax (Kanada): Fernwood Publishing.
- ELIAS, M., N. MUDEGE, D.E. LOPEZ, D. NAJJAR, V. KANDIWA, J. LUIS, J. YILA, et al. 2018. "Gendered Aspirations and Occupations Among Rural Youth, in Agriculture and Beyond: A Cross-Regional Perspective." *Journal of Gender, Agriculture and Food Security* 3(1): 82–107.

- ELMHIRST, R., M. SISCAWATI, B.M. BASNETT, dan D. EKOWATI. 2018. "Gender and Generation in Engagements with Oil Palm in East Kalimantan, Indonesia: Insights from Feminist Political Ecology." Dalam *Gender and Generation in Southeast Asian Agrarian Transformations*, disunting oleh C.M.Y. PARK dan B. WHITE, 33–55. London (Inggris): Routledge.
- ELSON, R.E. 1994. *Village Java Under the Cultivation System, 1830–1870*. Sydney (Australia): Allen and Unwin.
- ETXAGIBEL, J.A. dan A.A. DESMARAI. 2017. "Youth Producing Food for an Alternative Society: Insights from the Basque Country." Paper 32, Conference "The Future of Food and Challenges for Agriculture in the 21st Century." Etxalde-ISS-ICAS, April 2017.
- FAO. 2011. *The State of Food and Agriculture 2010–2011. Women in Agriculture – Closing the Gender Gap for Development*. Roma (Italia): Food and Agricultural Organization of the UN.
- FAO dan IFAD. 2019. *United Nations Decade of Family Farming 2019–2028. Global Action Plan*. Roma (Italia): Food and Agricultural Organization of the UN dan International Fund for Agricultural Development.
- FAO-IFAD-CTA. 2014. *Youth and Agriculture: Key Challenges and Concrete Solutions*. Roma (Italia): Food and Agricultural Organization of the UN.
- FAULKNER, N., bersama S. DATHI, P. HEARSE, dan S. SYEDA. 2019. *Creeping Fascism: What It Is and How to Fight It*. London (Inggris): Public Reading Rooms.
- FORTES, M. 1966. "Introduction." Dalam *The Developmental Cycle in Domestic Groups*, disunting oleh J. GOODY, 1–14. Cambridge (Inggris): Cambridge University Press.
- FRANCIS, D.G. 1994. *Family Farming: Tradition and Transformation*. London (Inggris): Earthscan.

- FRANK, S.P. 1991. "‘Simple Folk, Savage Customs?’ Youth, Sociability, and the Dynamics of Culture in Rural Russia, 1856–1914." *Journal of Social History* 25(4): 711–736.
- GHIMIRE, K.B. 2002. "Social Movements and Marginalized Rural Youth in Brazil, Egypt and Nepal." *Journal of Peasant Studies* 30(1): 30–72.
- GHOSE, A.K. 1983. "Agrarian Reform in Developing Countries: Issues of Theory and Problems of Practice." Dalam *Agrarian Reform in Contemporary Developing Countries*, disunting oleh A.K. GHOSE, 3–30. Geneva (Swiss): ILO dan New York (Amerika Serikat): St. Martin’s Press.
- GOODY, J. 1976. *Production and Reproduction: A Comparative Study of the Domestic Domain*. Cambridge Studies in Social Anthropology 17. Cambridge (Inggris): Cambridge University Press.
- GOODY, J., J. THIRSK, dan E.P. THOMPSON, penyunting. 1976. *Family and Inheritance: Rural Society in Western Europe, 1200–1800*. Cambridge (Inggris): Cambridge University Press.
- GOODY, J., penyunting. 1971. *The Developmental Cycle in Domestic Groups*. Cambridge Papers in Social Anthropology 1. Cambridge (Inggris): Cambridge University Press.
- GORSUCH, A.E. 2000. *Youth in Revolutionary Russia: Enthusiasts, Bohemians, Delinquents*. Bloomington (Amerika Serikat): Indiana University Press.
- GRAEUB, B., J. CHAPPELL, H. WITTMAN, *et al.* 2016. "The State of Family Farms in the World." *World Development* 87: 1–15.
- GRIER, B.C. 2006. *Invisible Hands: Child Labour and the State in Colonial Zimbabwe*. Portsmouth (Inggris): Heinemann.
- GRIFFIN, K., A. RAHMAN KHAN, dan A. ICKOWITZ. 2002. "Poverty and the Distribution of Land." *Journal of Agrarian Change* 2(3): 279–330.
- GURR, M. 2017. "Limits of Liberation: Youth and Politics in Brazil’s Landless Workers Movement." Disertasi Ph.D. di Syracuse University, Amerika Serikat. [https:// surface.syr.edu/etd/827](https://surface.syr.edu/etd/827).

- GUYER, J. dan P. PETERS, penyunting. 1987. "Conceptualizing the Household: Issues of Theory and Policy in Africa." *Development and Change* 18(2), Special Issue.
- HAJDU, F., N. ANSELL, E. ROBSON, dan L. VAN BLERK. 2013. "Rural Young People's Opportunities for Employment and Entrepreneurship in Globalized Southern Africa: The Limitations of Targeting Policies." *International Development Planning Review* 35(2): 155–174.
- HALL, D., P. HIRSCH, dan T.M. LI. 2011. *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. Singapura: NUS Press.
- HANN, C. 2008. "Reproduction and Inheritance: Goody Revisited." *Annual Review of Anthropology* 37: 145–158.
- HAREVEN, T. 2000. *Families, History, and Social Change: Life-Course and Cross-Cultural Perspectives*. Boulder (Amerika Serikat): Westview Press.
- HARVEY, L., S. ROBERTS, dan J.-A. DILLABOUGH. 2016. "Youth Rising? The Politics of Youth in the Global Economy." *British Journal of Sociology of Education* 37(3): 465–480.
- HASAN, N. 2016. "Violent Activism, Islamist Ideology, and the Conquest of Public Space among Youth in Indonesia." Dalam *Youth Identities and Social Transformations in Modern Indonesia*, disunting oleh K. ROBINSON, 200–213. Leiden (Belanda): Brill.
- HEYWOOD, C. 2001. *A History of Childhood: Children and Childhood in the West from Medieval to Modern Times*. Cambridge (Inggris): Polity Press.
- HILTON, R. 1975. *The English Peasantry in the Later Middle Ages*. Oxford (Inggris): Oxford University Press.
- HONWANA, A. dan P. DE BOECK, penyunting. 2005. *Makers and Breakers: Children and Youth in Postcolonial Africa*. Oxford (Inggris): James Currey.
- HUIJSMANS, R. 2016. "Generationing Development: An Introduction." Dalam *Generationing Development: A Relational Approach to*

- Children, Youth and Development*, disunting oleh R. HUIJSMANS, 1–31. London (Inggris): Palgrave Macmillan.
- IFAD. 2016. *Rural Development Report 2016: Fostering Inclusive Rural Transformation*. Roma (Italia): International Fund for Agricultural Development.
- . 2019. *Rural Development Report 2019: Creating Opportunities for Rural Youth*. Roma (Italia): International Fund for Agricultural Development.
- ILO. 2017a. *Global Employment Trends for Youth 2017: Paths to a Better Working Future*. Geneva (Swiss): ILO.
- . 2017b. *Employment Policy Brief: New Automation Technologies and Job Creation and Destruction Dynamics*. Geneva (Swiss): ILO.
- JACOBS, S. 2010. *Gender and Agrarian Reforms*. London (Inggris): Routledge.
- JACOBY, E. (berkolaborasi dengan C. JACOBY). 1971. *Man and Land: The Fundamental Issue in Development*. London (Inggris): André Deutsch.
- JAYNE, T.S., J. CHAMBERLIN, L. TRAUB, N. SITKO, M. MUYANGA, F. YEBOAH, W. ANSEEUW, A. CHAPOTO, A. WINEMAN, C. NKONDE, dan R. KACHULE. 2016. “Africa’s Changing Farm Size Distribution Patterns: The Rise of Medium-Scale Farms.” *Agricultural Economics* 47 (Supplement): 197–214.
- JEFFREY, C. 2010. *Timepass: Youth, Class and the Politics of Waiting in India*. Stanford (Amerika Serikat): Stanford University Press.
- JONES, G. 2009. *Youth*. Cambridge (Inggris): Polity Press.
- JULIA dan B. WHITE. 2012. “Gendered Experiences of Dispossession: Oil Palm Expansion in a Dayak Hibun Community in West Kalimantan.” *Journal of Peasant Studies* 39(3–4): 995–1016.
- KATZ, C. 2004. *Growing Up Global: Economic Restructuring and Children’s Everyday Lives*. Minneapolis (Amerika Serikat): University of Minnesota Press.

- KAUTSKY, K. 1988 [1899]. *The Agrarian Question*. 2 Volume. London (Inggris): Zwan Publications.
- KELLY, P.F. 2012. "Class Reproduction in a Traditional Rural Setting: Youth Trajectories in a Peri-Urban Philippine Village." Dalam *Revisiting Rural Places: Pathways to Poverty and Prosperity in Southeast Asia*, disunting oleh J. RIGG dan P. VANDERGEEST, 229–249. Singapura: NUS Press.
- KEYNES, J.M. 1963 [1930]. "Economic Possibilities for Our Grandchildren." Dalam *Essays in Persuasion*, 358–373. New York (Amerika Serikat): W.W. Norton
- KHAN, F. 2016. *Islamic Inheritance Laws and Their Impact on Rural Women in Muslim Societies: Synthesis of Studies from Asia and West Africa and Emerging Recommendations*. Roma (Italia): International Land Coalition.
- KONING, J. 2005. "The Impossible Return? The Post-Migration Narratives of Young Women in Rural Java." *Asian Journal of Social Science* 33: 165–185.
- KORZENSKY, A. 2019. "Extrafamilial Farm Succession: An Adaptive Strategy Contributing to the Renewal of Peasantries in Austria." *Canadian Journal of Development Studies* 40(2): 291–308.
- KOUAMÉ, G. 2010. "Intra-Family and Socio-Political Dimensions of Land Markets and Land Conflicts: The Case of the Abure, Côte d'Ivoire." *Africa: The Journal of the International African Institute* 80(1): 126–146.
- KULA, W. 1976. *An Economic Theory of the Feudal System*. London (Inggris): New Left Books dan Humanities Press.
- LA VÍA CAMPESINA. 2014. "Young People in Action: Struggles and Visions for Food Sovereignty." *Nyeléni Newsletter* 17: Youth and Agriculture: 1–2. www.nyeleni.org.
- _____. 2017. "Youth Assembly Declaration." www.viacampesina.org/ VII International Conference: Youth Assembly Declaration, 25 Juli.

- _____. Tanpa tahun. “Youth in Vía Campesina” <https://viacampesina.org/en/who-are-we/youth/>.
- LANCY, D.F. 2018. *The Anthropology of Childhood*. Cambridge: (Inggris) Cambridge University Press.
- LE ROY LADURIE, E. 1974. *The Peasants of Languedoc*. Terjemahan John Day. Urbana (Amerika Serikat): University of Illinois Press.
- LEAVY, J. dan N. HOSSAIN. 2014. “Who Wants to Farm? Youth Aspirations, Opportunities and Rising Food Prices.” IDS Working Paper 439. Falmer (Inggris): Institute of Development Studies.
- LENIN, V.I. 1960 [1899]. *The Development of Capitalism in Russia. Vol. 3 of Collected Works*. London (Inggris): Lawrence & Wishart.
- LEVIEN, M. 2018. “Gender and Land Dispossession: A Comparative Analysis.” Dalam *Gender and Generation in Southeast Asian Agrarian Transformations*, disunting oleh C.M.Y. PARK dan B. WHITE, 9–32. London (Inggris): Routledge.
- LI, T.M. 2009. “To Make Live or Let Die? Rural Dispossession and the Protection of Surplus Populations.” *Antipode* 41(S1): 66–93.
- _____. 2014. *Land’s End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Durham (Amerika Serikat): Duke University Press.
- _____. 2017. “After Development: Surplus Population and the Politics of Entitlement.” *Development and Change* 48(6): 1247–1261.
- _____. 2018. “Intergenerational Displacement in Indonesia’s Oil Plantation Zone.” Dalam *Gender and Generation in Southeast Asian Agrarian Transformations*, disunting oleh C.M.Y. PARK dan B. WHITE, 56–74. London (Inggris): Routledge.
- _____. 2020. *Kisah dari Kebun Terakhir: Hubungan Kapitalis di Wilayah Adat*. Terjemahan oleh NADYA KARIMASARI dan RONNY AGUSTINUS. Jakarta: Marjin Kiri.
- LIEPENS, R. 1998. “The Gendering of Farming and Agricultural Politics: A Matter of Discourse and Power.” *Australian Geographer* 29(3): 371–388.

- LIPTON, M. 2010. *Land Reform in Developing Countries: Property Rights and Property Wrongs*. London (Inggris): Routledge.
- LONG, N. dan J.D. VAN DER PLOEG. 1994. "Heterogeneity, Actor and Structure: Towards a Reconstitution of the Concept of Structure." Dalam *Rethinking Social Development: Theory, Research and Practice*, disunting oleh D. BOOTH, 62–89. Harlow (Inggris): Longman Scientific.
- LOWDER, S., J. SKOET, dan T. RANEY. 2016. "The Number, Size, and Distribution of Farms, Smallholder Farms and Family Farms Worldwide." *World Development* 87: 16–29.
- MANNHEIM, K. 1952 [1928]. "The Problem of Generations." Dalam *Karl Mannheim: Essays on the Sociology of Knowledge*, disunting oleh P. KECKSOMETI. London (Inggris): Routledge.
- MARX, K. 1866. "The Different Questions: Instructions for the Delegates of the Provisional General Council of the International Workingmen's Association." *Der Vorbote* 10–11, juga dalam *The International Courier* 6/7 dan 8/10 (1867). <http://www.marxists.org/archive/marx/works/1866/08/instructions.htm>.
- _____. 1867. *Das Kapital. Vol. I*. Hamburg (Jerman): Otto Meissner Verlag.
- _____. 1977 [1867]. *Capital. Vol. I*. London (Inggris): Lawrence & Wishart.
- MATTHEWS, H. dan F. TUCKER. 2011. "On Both Sides of the Tracks: British Rural Teenagers' Views on Their Ruralities." Dalam *Global Perspectives on Rural Childhood and Youth*, disunting oleh R. PANELLI et al., 95–105. London (Inggris): Routledge.
- MAZOYER, M. dan L. ROUDART. 2012. *A History of World Agriculture, from the Neolithic Age to the Current Crisis*. London (Inggris): Earthscan.
- MCGREEVY, S.R., M. KOBAYASHI, dan K. TANAKA. 2018. "Agrarian Pathways for the Next Generation of Japanese Farmers." *Canadian Journal of Development Studies* 40(2): 271–290.

- MEINZEN-DICK, R. dan E. MWANGI. 2008. "Cutting the Web of Interests: Pitfalls of Formalizing Property Rights." *Land Use Policy* 26: 36–43.
- MELCHERS, I. dan B. BÜCHLER. 2017. "Africa's Rural Youth Speak out." *Rural* 21 51(3).
- MILES, D. 1976. *Cutlass and Crescent Moon: A Case Study in Political and Social Change in Outer Indonesia*. Sydney (Australia): Centre for Asian Studies.
- MONLLOR, N. 2012. "Farm Entry: A Comparative Analysis of Young Farmers, Their Pathways, Attitudes and Practices in Ontario (Canada) and Catalunya (Spain)." http://www.laccb.cat/fitxer/2283/Monllor_Farm_Entry_Report_2012.pdf.
- MOORE, B. dan R. PARKER. 2009. *Critical Thinking, 9th edition*. New York (Amerika Serikat): McGraw-Hill.
- MORARJI, K. 2016. "Subjects of Development: Teachers, Parents, and Youth Negotiating Education in Rural North India." Dalam *Generationing Development: A Relational Approach to Children, Youth and Development*, disunting oleh R. HUIJSMANS, 221–242. London (Inggris): Palgrave Macmillan:.
- MUTANDA, F. 2016. "Earn and Learn System: Is It the Panacea to Frightening Drop-Out Rates in Zim?" *Manica Post* 22 Januari. <https://www.manica-post.co.zw/earn-and-learn-system-is-it-the-panacea-to-frightening-drop-out-rates-in-zim/>.
- MWAURA, G.M. 2017. "Just Farming? Neoliberal Subjectivities and Agricultural Livelihoods Among Educated Youth in Kenya." *Development and Change* 48(6): 1310–1335.
- NAAFS, S. dan T. SKELTON. 2018. "Youthful Futures: Education, Aspirations and Employment in Asia." *Children's Geographies* 16(1): 1–14.
- NAFTALI, O. 2016. *Children in China*. Cambridge (Inggris): Polity Press.
- NAPIER COMMISSION. 1884. *Evidence taken by her Majesty's Commission of Enquiry into the conditions of the crofters and cottars in the Highlands and Islands of Scotland*. Didigitalisasi oleh Lochaber College

- Mallaig, 2007. <http://www.whc.uhi.ac.uk/napier-commission/highlands-and-islands-commission>.
- NAYAK, A. dan M.J. KEHILY. 2013. *Gender, Youth and Culture: Global Masculinities & Femininities, 2nd edition*. Basingstoke (Inggris): Palgrave MacMillan.
- NÍ LAOIRE, C. 2002. "Young Farmers, Masculinity and Change in Rural Ireland." *Irish Geography* 35(1): 16–27.
- NJOH, A., J. ANCHANG, E. ANANGA, dan F. AKIWUMI. 2017. "Africa's Triple Heritage, Land Commodification and Women's Access to Land: Lessons from Cameroon, Kenya and Sierra Leone." *Journal of Asian and African Studies* 52(6): 760–779.
- OECD. 2017. *Youth Aspirations and the Reality of Jobs in Developing Countries: Mind the Gap*. Development Centre Studies, Paris (Prancis): OECD Publishing.
- PAN LU. 2011. "A Portrayal of a Split Family in Rural China." *Journal of Peasant Studies* 38(3): 620–624.
- PATEL, R. 2012. "The Long Green Revolution." *Journal of Peasant Studies* 40(1): 1–63.
- PELZER, K. 1978. *Planter and Peasant: Colonial Policy and the Agrarian Struggle in East Sumatra, 1863–1947*. The Hague (Belanda): Martinus Nijhoff.
- PETERS, K. 2011. *War and the Crisis of Youth in Sierra Leone*. Cambridge (Inggris): Cambridge University Press.
- PLEYTE, C. 1911. *De inlandsche nijverheid in West-Java als sociaal-ethnologische verschijnsel. (Native industries in West Java as a social-ethnological phenomenon)*. Batavia (Hindia Belanda): Javasche Boekhandel & Drukkerij.
- PROCTOR, F. dan V. LUCCHESI. 2012. *Small Scale Farming and Youth in an Era of Rapid Change*. London (Inggris): IIED. <https://pubs.iied.org/pdfs/14617IIED.pdf>.
- PUNCH, S. 2001. "Negotiating Autonomy: Childhoods in Rural Bolivia." Dalam *Conceptualizing Child-Adult Relations*, disunting oleh L.

- ALANEN dan B. MAYALL, 23–26. London (Inggris): Routledge Falmer.
- _____. 2002. “Youth Transitions and Interdependent Adult-Child Relations in Rural Bolivia.” *Journal of Rural Studies* 18: 123–133.
- _____. 2007. “Negotiating Migrant Identities: Young People in Bolivia and Argentina.” *Children’s Geographies* 5(1–2): 95–112.
- _____. 2011. “Generational Power Relations in Rural Bolivia.” Dalam *Global Perspectives on Rural Childhood and Youth: Young Rural Lives*, disunting oleh RUTH PANELLI *et al.*, 151–164. London (Inggris): Routledge.
- QUAGLIA, R. dan C. COBB. 1996. “Towards a Theory of Student Aspirations.” *Journal of Research in Rural Education* 12(6): 127–132.
- QUAN, J. 2007. “Changes in Intra-family Land Relations.” Dalam *Changes in “Customary” Land Tenure Systems in Africa*, disunting oleh LORENZO COTULA, 51–63. London (Inggris): International Institute for Environment and Development (IIED).
- QVORTRUP, J. 2001. “School-Work, Paid Work and the Changing Obligations of Childhood.” Dalam *Hidden Hands: International Perspectives on Children’s Work and Labour*, disunting oleh P. MIZEN, C. POLE, dan A. BOLTON, 91–107. London (Inggris): Routledge Farmer.
- RAHMAN, M. dan W. VAN SCHENDEL. 1997. “Gender and the Inheritance of Land: Living Law in Bangladesh.” Dalam *The Village in Asia Revisited*, disunting oleh J. BREMAN, P. KLOOS, dan A. SAITH, 237–276. Delhi (India): Oxford University Press.
- REYNOLDS, P. 1991. *Dance Civet Cat: Child Labour in the Zambezi Valley*. London (Inggris): Zed Books.
- RICKLEFS, M. 2007. *Polarizing Javanese Society: Islamic and Other Visions, 1830–1930*. Singapura: NUS Press dan Leiden (Belanda): KITLV Press.
- RIGG, J., M. PHONGSIRI, B. PROMPHAKPING, A. SALAMANCA, dan M. SRIPUN. 2019. “Who Will Tend the Farm? Interrogating

- the Ageing Asian Farmer.” *Journal of Peasant Studies*. DOI: 10.1080/03066150.2019.1572605.
- SANTHANAM-MARTIN, M., P. BRIDGE, dan L. STEVENS. 2019. “Working with Stuckness: Lessons from an Intervention to Support Intergenerational Transitions on Australian Dairy Farms.” *Canadian Journal of Development Studies* 40(2): 254–271.
- SAUVY, A. 1969. *General Theory of Population*. New York (Amerika Serikat): Basic Books.
- SCHIELKE, S. 2008. “Boredom and Despair in Rural Egypt.” *Contemporary Islam* 2: 251–270.
- SCHWARZ, U. 2004. *To Farm or Not to Farm? Gendered Paths to Succession and Inheritance*. Münster (Jerman): LIT Verlag.
- SCOONES, I., M. EDELMAN, S.M. BORRAS JR., R. HALL, W. WOLFORD, dan B. WHITE. 2018. “Emancipatory Rural Politics: Confronting Authoritarian Populism.” *The Journal of Peasant Studies* 45(1): 1–20.
- SCOTT, G. dan J. ARTIS. 2005. “Building Democracy, Promoting Tolerance: Adolescent Responsiveness to Social Movement Messages.” Dalam *Sociological Studies of Children and Youth*, Vol. 11., disunting oleh D. KINNEY dan K. BROWN ROSIER, 53–79. Bingley: Emerald Group Publishing.
- SENTÍES PORTILLA, G. 2018. “Land Concessions and Rural Youth in Southern Laos.” Dalam *Gender and Generation in Southeast Asian Agrarian Transformations*, disunting oleh C.M.Y. PARK dan B. WHITE, 152–171. London (Inggris): Routledge.
- SHANIN, T. 1972. *The Awkward Class*. Oxford (Inggris): Clarendon Press.
- SHENK, M., *et al.* 2010. “Intergenerational Wealth Transmission among Agriculturalists: Foundations of Agrarian Inequality.” *Current Anthropology* 51(1): 65–82.
- SHEPON, A., P.J.G. HENDRIKSSON, dan TONG WU. 2018. “Conceptualizing a Sustainable Food System in an Automated World: Towards a ‘Eudaimonian’ Future.” *Frontiers in Nutrition* 18(5): 1–13.

- SHUMBA, N. 2015. "Zimbabwe: When Ending Child Labour Does Not End Child Exploitation." *African Arguments* 10 September. <https://african-arguments.org/2015/09/10/zimbabwe-when-ending-child-labour-does-not-end-child-exploitation/>.
- SIRAIT, M. 2015. "Inclusion, Exclusion and Agrarian Change: Experiences of Forest Land Redistribution in Indonesia." Disertasi Ph.D. di International Institute of Social Studies, Den Haag, Belanda.
- SKINNER, E. 1961. "Intergenerational Conflict Among the Mossi: Father and Son." *The Journal of Conflict Resolution* 5(1): 55–60.
- SPENCER, P., penyunting. 1990. *Anthropology and the Riddle of the Sphinx: Paradoxes of Change in the Life Course*. ASA Monographs 28. London (Inggris): Routledge.
- STEARNS, P. 2006. *Childhood in World History*. London (Inggris): Routledge.
- STOLER, A. 1985. *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870–1979*. New Haven (Amerika Serikat): Yale University Press.
- SUMBERG, J., N. AKUA ANYIDHOHO, J. LEAVY, D. TE LINTELO, dan K. WELLARD. 2012. "Introduction: The Young People and Agriculture 'Problem' in Africa." *IDS Bulletin* 43(6): 1–8.
- TAWNEY, R.H. 1966 [1932]. *Land and Labour in China*. New York (Amerika Serikat): M.E. Sharpe.
- TE LINTELO, D. 2011. "Youth and Policy Processes." Future Agricultures Consortium Working Paper 025. Brighton (Inggris): University of Sussex.
- TISDALL, E.K.M. dan S. PUNCH. 2012. "Not so 'New'? Looking Critically at Childhood Studies." *Children's Geographies* 10(3): 249–264.
- TSIKATA, D. dan J.A. YARO. 2014. "When a Good Business Model Is Not Enough: Land Transactions and Gendered Livelihood Prospects in Rural Ghana." *Feminist Economics* 20(1): 202–226.
- TSIKATA, D. dan P. GOLAH, penyunting. 2010. *Land Tenure, Gender and Globalization: Research and Analysis from Africa, Asia and Latin*

- America*. New Delhi (India): Zubaan and Ottawa (Amerika Serikat): IDRC.
- UNITED NATIONS (PBB). 2018. *United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas*. Diadopsi pada UN General Assembly Human Rights Council, 39th Session, 28 September 2018.
- VAN BOXTEL, M., K. HAGENHOFER, dan B. HANDL. 2016. "Farm Succession: Examples from France, Belgium, Austria and the Netherlands." Oktober. <http://www.newbie-academy.eu/wp-content/uploads/2018/11/Farm-Succesion-Brochure.pdf>.
- VAN DER PLOEG, J.D. 2009. *The New Peasantries: Struggles for Autonomy and Sustainability in an Era of Empire and Globalization*. London (Inggris): Earthscan.
- _____. 2013. *Peasants and the Art of Farming: A Chayanovian Manifesto*. Halifax (Kanada): Fernwood Publishing.
- _____. 2020. *Petani dan Seni Bertani: Maklumat Chayanovian*. Terjemahan CIPTANINGRAT LARASTITI. Yogyakarta: INSISTPress.
- VAN DER PLOEG, J.D. dan JINGZHONG YE. 2016. "The Circularity of Town–Countryside Relations and Multiple Job Holding." Dalam *China's Peasant Agriculture and Rural Society: Changing Paradigms of Farming*, disunting oleh J.D. VAN DER PLOEG dan JINGZHONG YE, 25–44. London (Inggris): Routledge.
- VISSER, O. 2010. "Insecure Land Rights, Obstacles to Family Farming, and the Weakness of Protest in Rural Russia." *Laboratorium* 1(2): 275–295.
- VORBRUGG, A. 2019. "Not About Land, Not Quite a Grab: Dispersed Dispossession in Rural Russia." *Antipode* 51(3): 1011–1031. DOI: 10.1111/anti.12523.
- WATTS, S. 1984. *A Social History of Western Europe 1450–1720: Tensions and Solidarities among Rural People*. London (Inggris): Hutchinson University Library for Africa.

- WEIS, T. 2007. *The Global Food Economy: The Battle for the Future of Farming*. London (Inggris): Zed Books dan Halifax (Kanada): Fernwood Publishing.
- WELLS, K. 2009. *Childhood in a Global Perspective*. Cambridge (Inggris): Polity Press.
- WHITE, B. 1976. "Production and Reproduction in a Javanese Village." Disertasi Ph.D. di Columbia University, New York, Amerika Serikat.
- _____. 1980. "Rural Household Studies in Anthropological Perspective." Dalam *Rural Household Studies in Asia*, disunting oleh H.P. BINSWANGER, R.E. EVENSON, C.A. FIORENCIO, dan B. WHITE, 3–25. Singapura: Singapore University Press.
- _____. 1989. "Problems in the Empirical Analysis of Agrarian Differentiation." Dalam *Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia*, disunting oleh G. HART, A. TURTON AND B. WHITE, 15–30. Berkeley (Amerika Serikat): University of California Press.
- _____. 2000. "Rice Harvesting and Social Change in Java." *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 1(1): 79–102.
- _____. 2004. "Constructing Child Labour: Attitudes to Juvenile Work in Indonesia, 1900–2000." Dalam *Labour in Southeast Asia: Local Processes in a Globalized World*, disunting oleh R. ELMHIRST dan R. SAPTARI, 77–105. London (Inggris): Routledge:.
- _____. 2005. "Shifting Positions on Child Labour: The Views and Practices of Intergovernmental Organizations." Dalam *Child Labour and Human Rights: Making Children Matter*, disunting oleh B. WESTON, 319–342. Boulder (Amerika Serikat) dan London (Inggris): Lynne Rienner.
- _____. 2012a. "Agriculture and the Generation Problem: Rural Youth, Employment and the Future of Farming." *IDS Bulletin* 43(6): 9–19.

- _____. 2012b. "Changing Childhoods: Javanese Village Children in Three Generations." *Journal of Agrarian Change* 12(1): 81–97.
- _____. 2018a. "Marx and Chayanov at the Margins: Understanding Agrarian Change in Java." *The Journal of Peasant Studies* 45(5–6): 1108–1126.
- _____. 2018b. "Rural Youth, Today and Tomorrow." Background Paper no. 8 for the 2019 Rural Development Report. Roma (Italia): IFAD.
- WHITE, B. dan C.U. MARGIYATIN. 2016. "Teenage Experiences of School, Work and Life in a Javanese Village." Dalam *Youth Identities and Social Transformations in Modern Indonesia*, disunting oleh K. ROBINSON, 50–68. Leiden (Belanda): Brill.
- WHITE, B. dan H. WIJAYA. 2019. "Young People's Spatial and Sectoral Mobility: A Life-Course Perspective from Kulonprogo (Yogyakarta, Indonesia)." Presentasi pada International Convention of Asian Scholars, Leiden, Belanda.
- WHITE, B., C.M.Y. PARK, dan JULIA. 2015. "The Gendered Political Ecology of Agrofuels Expansion." Dalam *The Political Ecology of Agrofuels*, disunting oleh K. DIETZ, B. ENGELS, O. PYE, dan S.A. BRUNNENGRÄBER. London (Inggris): Routledge.
- WHITE, B., R. HALL, dan W. WOLFORD, penyunting. 2012. "The New Enclosures: Critical Perspectives on Corporate Land Deals." *The Journal of Peasant Studies* 39(3–4), Special Issue.
- WOLF, E. 1966. *Peasants. Foundations of Modern Anthropology Series*. Englewood Cliffs (Amerika Serikat): Prentice-Hall.
- _____. 1970. "The Inheritance of Land among Bavarian and Tyrolese Peasants." *Anthropologica*, 12(1): 99–114.
- WORLD BANK. 2006. *World Development Report 2007: Development and the Next Generation*. Washington, DC (Amerika Serikat): The World Bank.
- _____. 2007. *World Development Report 2008: Agriculture for Development*. Washington, DC (Amerika Serikat): The World Bank.

- _____. 2014. "Aspiration Traps: When Poverty Stifles Hope." *Inequality in Focus* 2(4): 1–4.
- WYN, J. dan R. WHITE. 1997. *Rethinking Youth*. London (Inggris): Sage Publications.
- YE, JINGZHONG. 2011. "Left-Behind Children: The Social Price of China's Economic Boom." *Journal of Peasant Studies* 38(3): 613–650.
- YE, JINGZHONG dan PAN LU. 2011. "Differentiated Childhoods: Impacts of Rural Labour Migration on Left-Behind Children in China." *Journal of Peasant Studies* 38(2): 355–377.
- ZHOU, X. dan L. HOU. 1999. "Children of the Cultural Revolution: The State and the Life Course in the People's Republic of China." *American Sociological Review* 64(1): 12–36.
- ZIPIN, L., S. SELLAR, M. BRENNAN, dan T. GALE. 2015. "Educating for Futures in Marginalized Regions: A Sociological Framework for Rethinking and Researching Aspirations." *Educational Philosophy and Theory* 47(3): 227–246.

INDEKS

A

- Agarwal, Bina 126, 127
AGRA (Alliance for a Green Revolution in Africa) 68
akumulasi primitif 53, 173, 176
Amanor, Kojo 2, 122–123
anak-anak yang ditinggalkan orang tua 103–105
antargenerasi, hubungan
 pengalihan/transfer sumberdaya 117–120, 124–130
 saling-ketergantungan 132–135
 tegangan dan konflik 112–117, 120–123
Appadurai, Arjun 142–143
Argentina 90
aspirasi/cita-cita/keinginan/harapan 59
 pemahaman tentangnya 142
 pemuda desa 6, 8, 100, 119–120, 132, 140–148
Australia 9, 119, 131

B

- Bangladesh 127
Bank Dunia 24, 62, 68, 142, 172
“Becoming a Young Farmer” (Menjadi Petani Muda), proyek penelitian 125, 145, 152, 155, 172
Belanda 19, 37, 126
Belov, Fedor 46–49
Berckmoes, Lidewijde 152–153
Bolivia 1, 24, 87–90, 94
Bourdillon, Michael 36
Brasil 73, 147, 156, 157–158
Burkina Faso 2, 111, 115–117, 121–122, 168
Burundi 150, 152–153

C

- Cassidy, Anne 117–119
CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) 126
Chayanov, Alexander V. 17, 82–84
Cohen, Myron 82
Cole, John W. 112, 126
cottar, lihat *crofter*
crofter 54–58

D

- daur/perjalanan hidup 20–21, 53, 77, 102, 133, 148, 150
Deere, Carmen Diana 108
de Janvry, Alain 108
de Kat Angelino, P. 42–43
dekulakisasi 47
de Sainte-Croix, G.E.M. 16–17
De Schutter, Olivier 60
devolusi (alih-generasi) 109–112
diferensiasi/pemilahan/perbedaan
 agraria 12–13, 14, 62, 64, 67, 69, 173
 demografi 84, 85
 sosial 43, 85, 102

E

- ekonomi-politik agraria xvii, 11–15
Ethiopia 69, 168

F

- FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB) 126, 166–168
Filipina 65–67
Finlandia 114

G

Gambia 74
 gender 4, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 39, 42, 46,
 81, 97, 109, 130, 131, 156, 157, 159, 160,
 174, 176, 177
 dan cita-cita 132, 144
 dan hubungan antargenerasi 117–118,
 125–130
 dan tanah 49, 50, 58, 70, 71, 126–130
 generasi 4, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 25, 26,
 58–60, 66–67, 71, 72, 77, 81, 109, 111,
 156, 158, 170, 174, 175, 176
 kajian tentangnya 4, 11, 20–24
 gerontokrasi 22, 32, 86, 145, 159, 164,
 174
 Ghana 2, 122–123
 Ghimire, Krishna 157
 Ghose, Ajit 69
 Gurr, Melissa 148, 156, 158, 159, 160

H

Hilton, Rodney 16

I

IFAD (International Fund for Agricultural
 Development) 166–167
 ILO (Organisasi Perburuhan
 Internasional) 5–8, 42, 46
indenture 40, 41, 74, 174
 India 3, 6, 25, 28, 62, 100, 126, 136, 172
 Indonesia (termasuk Sulawesi, Kalimantan,
 Jawa, Flores) 1, 9, 24, 25, 27, 37–43,
 58–61, 74, 78–79, 123–125, 127–130,
 136, 150, 153–155, 161–162, 165, 172
 Inggris 101
 interseksionalitas (saling-silang) 13, 14, 28,
 125–135, 174
 Irlandia 27, 113–114, 117–118
 Italia 112

J

Jacobs, Susie 49, 51, 71
 Jacoby, Erich dan Charlotte 70

Jawa 37–42, 94–98, 123–125, 128, 145,
 153–155, 161–162
 kolonial 34–42
 Jepang 28, 69, 149, 169, 172

K

Kalimantan 58–59, 78–79
 Kanada 19, 27, 149, 172
 kanak-kanak (masa kecil) 20, 21, 23, 24,
 86, 99–101, 103–104, 105–106, 118–119
 dan kerja 92, 99–100, 107, 109, 117
 di masyarakat komunis 45
 pedesaan 91, 92–98, 108, 148–149
 pemahaman tentangnya 24, 86
 pemanjangannya 91, 94–98
 Kautsky, Karl 17

kelas 4, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 25, 28,
 44, 64, 69, 84, 85, 110, 125, 156, 159,
 164, 174
 reproduksi kelas 65–66
 Kelly, Philip 65–67
 Kenya 72, 137
 kerentanan/tidak pasti 6, 8
 kerja lintas-tempat (*plurilocality*) 19, 65,
 102–104, 148–155
 kerja-majemuk (*pluriactivity*) 19, 64, 65,
 68, 95, 102–106
 Keynes, John M. 7, 28
kolkhoz 46–47
 komodifikasi 12, 61–63, 120, 122, 174
 dampaknya pada hubungan generasi
 64–67
 Komsomol 46–47
 komunisme 45–50, *lihat juga* pertanian
 kolektif
 Korea Selatan 69
 Korea Utara 69
 Kuba 69
 Kula, Witold 85

L

Laos 145
 La Via Campesina 73, 158–159, 165–166
 Lenin, V.I. 62, 64, 67, 84, 102, 103
 Liepens, Ruth 131
 Liga Bangsa-Bangsa 42, 99
 Li, Tania 58–59

M

Malaysia 24
 Mannheim, Karl 21, 26
 Maroko 132, 137
 Marx, Karl 53, 74, 99, 100
 maskulinitas 131
 Meksiko 24, 62, 168
 Mesir 53, 140–141, 157, 168
 migrasi/merantau (pemuda desa) 5,
 19, 33–36, 38, 52, 53, 65, 81, 87, 90,
 103–105, 128, 132, 133, 141, 148, 149,
 150–155, 159, *lihat juga* kerja lintas-
 tempat
 mobilitas, *lihat* migrasi; kerja lintas-tempat
 modal manusia (*human capital*), teori 6, 23
 MST (Gerakan Pekerja Tunakisma Brasil)
 73, 147–148, 156, 158–160

N

Napier, Komisi 55–57
 Nepal 157
 Nigeria 78–79
 Ní Laoire, Caitriona 131

P

Pan Lu 105–106, 150–152
 Pantai Gading 2, 120–121
 patriarki 22, 33–36, 109
 PBB 24, 70, 99
 Dasawarsa Pertanian Keluarga 166–167
 pemagaran/pengavelingan/pematokan
 tanah (*enclosure*) 53, 54–57, 69, 175–176,
lihat juga perampasan tanah
 pembagian kerja secara sosial 12, 13, 31,
 176

pembentukan kembali kaum tani 139
 pemiskinan keterampilan 91–101
 pemuda/kaum muda/masa muda
 cita-citanya 100, 114, 140–148
 dan pekerjaan 4, 5–9, 20, 99, 101
 dan tanah 1, 2, 3, 22, 57, 58–60, 71–72,
 107, 112–114, 117–125, 168–169
 definisinya 21, 24
 kajian kepemudaan 4, 11, 20–24, 25,
 155
 kebijakan kepemudaan 24, 28, 45–46,
 50, 165–170
 pemanjangan masa muda 25, 86, 94–98
 sebagai aktor 26, 87, 91, 155, 156–165
 pendidikan 5, 6, 7, 24, 25, 36, 41, 45, 50,
 59, 85, 107, 142, *lihat juga* sekolah
 dan cita-cita pemuda 64, 142, 145
 dan mobilitas 66–67
 dan pemiskinan keterampilan 91–94,
 98, 100
 penggusuran 31, 53–60, 166, 167, 176
 penuaan (petani) 3, 9–11
 dan suksesi lahan/usaha tani 112–125
 penyakapan (penggarapan bagi-hasil) 121,
 123, 124–125
 perampasan tanah 53–60, 69, 166,
 167, 171, 176, *lihat juga* pemagaran/
 pengavelingan/pematokan tanah
 (*enclosure*)
 Perang Dingin 62, 63
 perbudakan 16, 32, 74, 111
 pertanian kecil/berlahan sempit 3, 8–12,
 14, 15, 19, 50, 51–52, 60, 61–65, 67, 69,
 92, 123, 133, 146
 ancaman yang dihadapi 166, 167
 definisinya 18–19
 masa depannya 138–140, 164, 165–168,
 170–171
 pertanian/usaha tani kolektif 47–50, 69,
 70, 148, 159, 160, 161, 163, 164
 pertanian korporat 52, 53, 54, 58–60
 perubahan/krisis iklim 7, 138, 166
 Peters, Krijn 145–146

Polandia 85
populisme otoriter 164
Prancis 92–93, 100, 114
Punch, Samantha 1, 87, 89–90

Q

Quan, Julian 120

R

reforma agraria 44, 68–73, 176, 177
reforma pertanian 63, 177
 dimensi generasi 68, 68–73
reproduksi, diperluas dan sederhana 12,
 20, *lihat juga* reproduksi sosial
reproduksi sosial 5, 9, 11, 19–20, 22, 77,
 100, 102, 177
revolusi
 Kebudayaan 50
 Rusia 45–49
 Sosial 43–50
 Tiongkok 49–50
Revolusi Hijau 62–68
rezim tenaga kerja 12, 13, 14, 28, 31–33,
 43
 kolonial 31–42
 pemahaman tentangnya 13, 177
Rigg, Jonathan 11, 132–135
rumah panjang 78–79
rumah tangga 19, 20, 43, 44, 71, 77–85,
 174
 “bolong” 51, 104–105
 daur perkembangannya 81–85
 kerja-majemuk (*pluriactivity*) 102–105,
 133
 pemahaman tentangnya 77–78, 177
Rumania 10
Rusia 43–44, 45–46, 50, 51–52, 84–85,
 102, *lihat juga* Uni Soviet

S

Sauvy, Alfred 82
sawit 58–59, 122

Schielke, Samuel 140–141
sekolah 6, 85, 87, 88, 91–100, 106, 107,
 lihat juga pendidikan
 belajar sambil bekerja 35–36
Selandia Baru 131
Senties Portilla, Gilda 74, 145
Shanin, Teodor 67–68, 108
Sierra Leone 145
Sirait, Martua 71–72
Skinner, Elliott 112, 115–117
Skotlandia 54–57, 58, 173
Spanyol 149, 162, 169
Sulawesi 1, 61
Sumatra 37, 40, 41
surplus populasi relatif 8

T

Taiwan 69, 82, 168
Tangerang (Indonesia) 41
Tanzania 24, 152
teknologi 6, 7, 28, 62, 63, 139, 147
Thailand 133–135
Tiongkok, Republik Rakyat
 jumlah usaha tani kecil 3
 kuli kontrak di perkebunan Sumatra 40
 petani muda 150–152
 reforma pertanian 69, 73
 rumah tangga “bolong” 51, 104–106
 transformasi agraria 43–53
transformasi agraria kolonial 31–42, 69,
 72–73, 146
transformasi agraria sosialis 43–50

U

Uganda 169
Ukraina 46, 47–49
Uni Soviet 43–44, 45–46, 69, *lihat
 juga* Rusia

V

van der Ploeg, Jan Douwe 17–18
Vietnam 28, 50, 69, 73

W

warisan 5, 50, 60, 64, 65, 68, 109–125,
 173, 175, 176
 bisa/tidak bisa dibagi 111–112
 dalam hukum Islam 127
 Wells, Karen 19–20
 Wolf, Eric 15, 17, 109, 112, 126

Y

Ye, Jingzhong 104–105

Z

Zimbabwe 33–36

Buku *Pertanian dan Masalah Generasi* ini menyelidik persoalan yang kerap luput dari perhatian: bagaimana sumberdaya agraria, terutama tanah, serta peluang penghidupan di pedesaan diwariskan dan dialihkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui pembacaan tajam dan unik atas dinamika ini, Ben White menunjukkan bahwa memahami hubungan antargenerasi adalah kunci untuk melihat ke mana arah pertanian kita dan apa yang terjadi pada generasi muda pedesaan di masa datang.

Apa yang akan terjadi pada jutaan pemuda desa di Asia dan Afrika yang tidak mampu pergi ke kota untuk mencari kerja tapi juga terhalang untuk memasuki pertanian produktif di masa depan? Melalui buku ini, Ben White menyuguhkan kekhawatiran wawasan, kejernihan konseptual, dan kedalaman telaah empiris terhadap pertanyaan mendesak itu. Buku yang sangat saya rekomendasikan.

*Tania Li, Departemen Antropologi,
Toronto University, Kanada*

Setidaknya, dalam satu dekade terakhir, pertanyaan “Siapa Mau Jadi Petani?” makin sering terlontar dalam diskusi publik di Indonesia. Buku ini hadir dengan analisis empiris yang tajam, dengan penggunaan konsep yang cermat dan reflektif untuk mengurai keterkaitan antara kelas, gender, dan generasi dalam memahami perubahan agraria. Buku ini penting dibaca oleh kaum muda yang sedang mencari arah, generasi tua yang menyimpan pengalaman panjang, dan terutama para pengambil kebijakan yang ingin merumuskan masa depan pertanian secara lebih adil dan berkelanjutan.

Charina Chazali, AKATIGA, Indonesia



International
Institute of
Social Studies



COHD 人文与发展学院
College of Humanities and Development Studies (COHD)

insist
PRESS
www.insistpress.com

f INSISTPress
t @insistpress
@ @insistpress

ISBN: 978-623-6179-32-1 (PDF)

